

Daftar Isi

Table of Content

TINJAUAN UMUM General Overview	2
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders.....	3
Sekilas Kinerja Performance	5
Selayang Pandang Brantas Abipraya Brantas Abipraya At a Glance.....	10
Pencapaian Tahun ini Achievement of This Year	14
Jejak Langkah Milestone	20
Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	22
Laporan Dewan Komisaris	29
Laporan Dewan Direksi	32
Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2013 Responsibility Annual Report 2013	35
PROFIL PERUSAHAAN Company profile	36
Riwayat Perusahaan Company History in Brief	38
Struktur Organisasi Organization Structure	44
Visi – Misi - Budaya - Motto Vision - Mission - Culture - Motto	46
Profil Dewan Komisaris The Board of Commissioners' Profile	50
Profil Dewan Direksi The Board of Directors' Profile	53
Profil Pejabat 1 Tingkat Dibawah Direksi Officer One Level Under The Board of Directors... ..	57
Sumber Daya Manusia Human Resources	59
Perusahaan Afiliasi Affiliated Companies	65
ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS	68
Rencana, Strategi & Program Plans, Strategi & Programs	70
Tinjauan Industri Industry Overview	79
Tinjauan Operasi Operating View	82
Pemasaran Marketing	84
Produksi Production	86
Hasil Usaha Return	88
Investasi Investment	90
Tinjauan Keuangan Financial Review	91
Aspek Keuangan Financial Aspect	92
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE	94
Ringkasan Kinerja Keuangan Summary of Financial Performance	96
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance (GCG)	98
Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Assessment Criteria for Performance Excellence	99
BUMN Bersih BUMN Clean	100
Laporan Keuangan Audited Audited Financial Report	103



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

RUPS Pengesahan Hasil Usaha Tahun 2013 dilaksanakan :

Hari/ Tanggal : Kamis 27 Maret 2014

Jam : 16.30 – 18.00 Wib

Tempat : Gedung Kantor Kementerian BUMN

Jl. Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat

Pejabat yang hadir : 1. Pemegang Saham

- a. Gatot Trihargo - Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Jasa
- b. Imam Apriyanto Putro - Sekretaris Kementerian BUMN
- c. Wahyu Kuncoro - Asisten Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Jasa III
- d. Rina Morita - Kepala Bidang Usaha Jasa III

2. Komisaris

- a. Ramli Ibrahim - Komisaris
- b. Adhy Duriat Soemono - Komisaris
- c. Eko Subekti - Komisaris

3. Direksi

- a. Bambang E Marsono - Direktur Utama
- b. C. Thomas Pangaribuan - Direktur Operasi I
- c. Ekodjati Tunggulgeni - Direktur Operasi II
- d. Sukarno Joesoeputra - Direktur Keuangan dan SDM

Spirit For Giving The Best

KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi & Rekan sesuai Laporan No. 010/LAI-BA/JKT2/II/14 tanggal 14 Februari 2014, dengan pendapat *wajar dalam semua hal yang material*, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.



Sekilas Kinerja

Performance At A Glance

LAPORAN LABA (RUGI) Profit (Loss) Statement

(dalam jutaan rupiah)

(millions rupiah)

NO.	LAPORAN LABA / RUGI	2013	2012	2011	2010	2009	INCOME STATEMENT
1	Pendapatan Usaha	1.441.225,40	923.403,03	703.877,06	502.101,04	711.892,95	Revenue
2	Biaya Pokok	(1.285.793,92)	(830.607,25)	(622.655,17)	(490.101,46)	(628.502,64)	Cost of Good Sold
3	Labu Kotor	229.632,01	171.963,60	109.031,35	93.527,67	105.776,40	Gross Profit
4	Labu Bersih	161.280,76	103.078,17	65.400,75	55.350,20	73.252,09	Operating Income
5	Labu Sebelum Pajak	109.341,15	72.207,05	40.007,49	26.330,57	52.736,46	Earning Before Tax
6	Labu Bersih Setelah Pajak	72.783,95	50.837,44	26.012,73	16.088,80	34.080,17	Earning After Tax

NO.	NERACA	2013	2012	2011	2010	2009	BALANCE SHEET
7	Total Aset	1.151.329,55	900.074,03	640.115,73	640.272,74	637.740,73	Total Assets
8	Total Liabilitas	861.050,32	625.440,64	478.638,66	508.788,40	500.254,28	Total Liabilities
9	Ekuitas	290.279,22	274.633,39	161.477,07	135.272,74	138.486,45	Equity

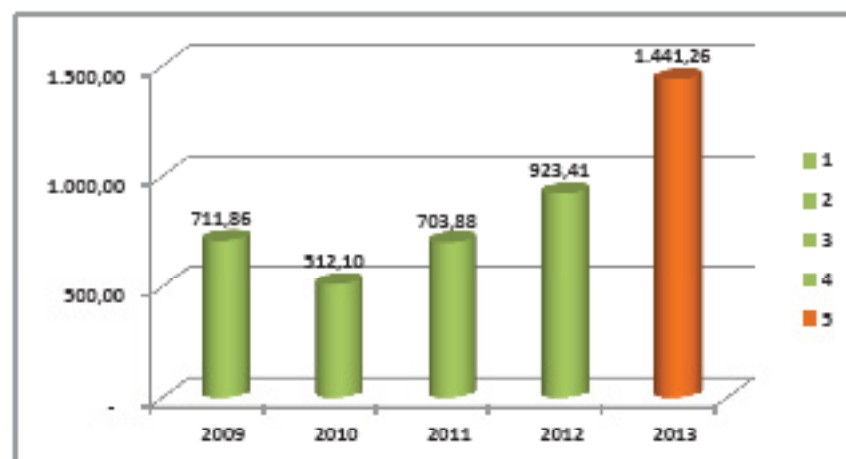
NO.	RASIO-RASIO KEUANGAN	2013	2012	2011	2010	2009	FINANCIAL RATIO
10	Labu Sebelum Pajak / Pendapatan	7,58 %	7,82 %	5,68 %	5,14 %	7,41 %	Earning Before Tax/Revenue
11	Biaya Pokok / Pendapatan	89,21 %	89,95 %	88,46 %	85,75 %	88,20 %	Cost of Good Sold/Revenue
12	Labu Sebelum Pajak/Total Aset	9,40 %	10,94 %	6,25 %	4,07 %	8,27 %	Earning Before Tax/Total Assets
13	Rasio Lancar	178,82 %	151,30 %	141,73 %	122,33 %	151,53 %	Current Ratio
14	Rasio Kas	91,61 %	45,07 %	47,47 %	20,40 %	33,07 %	Cash Ratio
15	Hitung Terhadap Aset	74,78 %	76,42 %	74,77 %	78,07 %	63,42 %	Debt to Total Assets
16	Hitung Terhadap Modal	296,62 %	324,16 %	296,36 %	378,34 %	438,21 %	Debt to Equity
17	Hitung Terhadap Aset Tetap	307,96 %	280,73 %	188,65 %	200,08 %	226,50 %	Debt to Fixed Assets



Sekilas Kinerja

* Pendapatan Usaha
Revenue

711,86
512,10
703,88
923,41
1.441,26

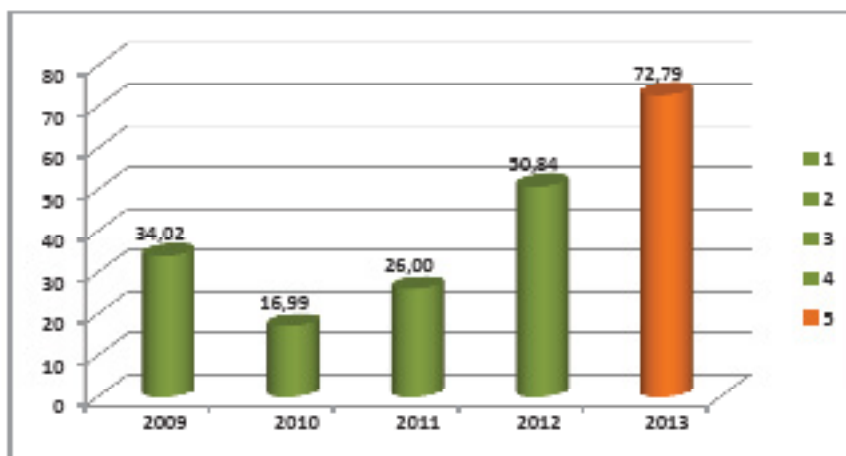


dalam milyar rupiah
in billion rupiah

56%
pendapatan usaha
meningkat dari tahun
sebelumnya

* Laba Bersih Setelah Pajak
Net Income

34,02
16,99
26,00
50,84
72,79

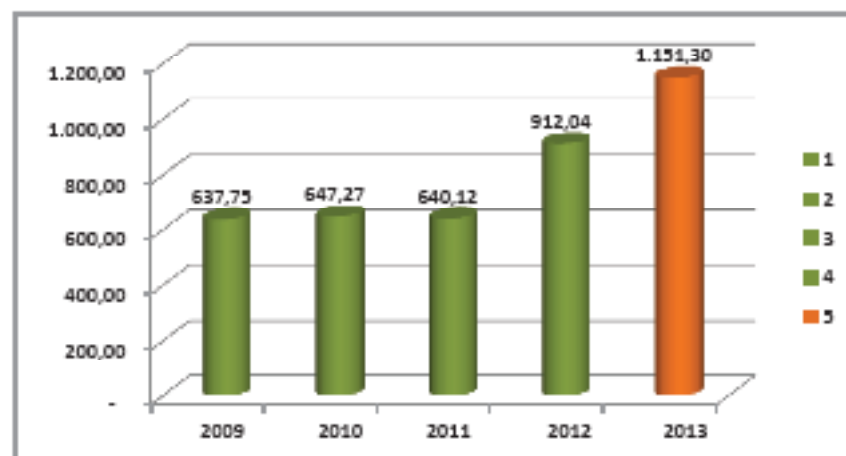


dalam milyar rupiah
in billion rupiah

43%
Laba Bersih meningkat
dari tahun sebelumnya

* Total Aset
Total Asset

637,75
647,27
640,12
912,04
1.151,30



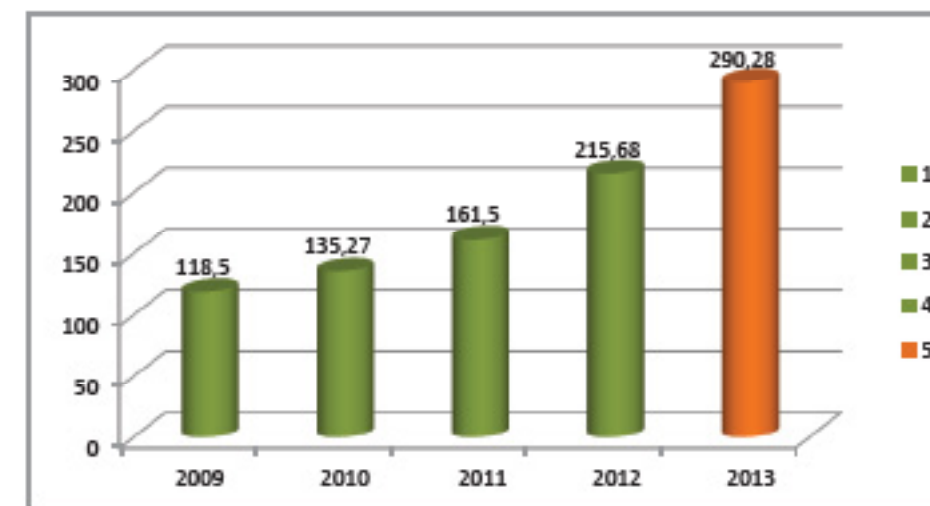
dalam milyar rupiah
in billion rupiah

27%
Total aset meningkat
dari tahun sebelumnya

Sekilas Kinerja

* Ekuitas
Equity

118,5
135,27
161,5
215,68
290,28

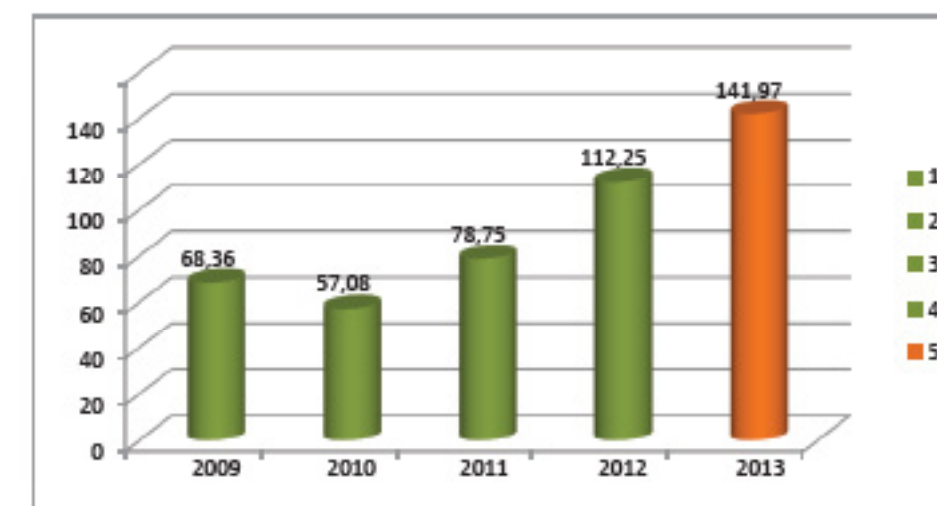


dalam milyar rupiah
in billion rupiah

35%
Ekuitas meningkat
dari tahun sebelumnya

* Imbal Balik Ekuitas
Return on Equity

68,36
57,08
78,75
112,25
141,97



dalam milyar rupiah
in billion rupiah

43%
EBITDA meningkat
dari tahun sebelumnya



SELAYANG PANDANG

At A Glance

PT Brantas Abipraya (Persero) yang selanjutnya disebut Brantas merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi. Saat ini, perusahaan yang dikenal sebagai perusahaan konstruksi umum ini tidak hanya menangani proyek-proyek irigasi, tetapi juga telah melaksanakan proyek bergengsi yang terletak di dalam dan di luar negeri. Proyek tersebut, antara lain bendungan, terowongan, jalan dan jembatan, bandara, bangunan, pembangkit listrik, dan banyak lagi.

PT. Brantas Abipraya (Limited Liability Company) hereinafter referred to as Brantas is one of State-Owned Enterprises (SOES) in the construction sector. Currently, the company is well-known as a public construction company that does not only handle irrigation projects, but also it has performed a prestigious project in the home country or in overseas. The said projects are among others irrigation, tunnel, road, bridge, airport, construction, electricity power plant, and many more.



Sesuai dengan misi perusahaan, dan untuk mengantisipasi pasar bebas di era globalisasi, dimana persaingan akan menjadi sangat sulit dihindarkan, Brantas terus mengembangkan rencana intensif agar menjadi perusahaan terkemuka dalam industri konstruksi. Guna mewujudkan rencana tersebut jajaran manajemen Brantas telah menetapkan visi dan misi korporasi sebagai berikut :

Visi : "Menjadi perusahaan terpercaya dalam industri konstruksi"

Artinya :

1. Memiliki segala persyaratan profesional yang memadai.

In accordance with the company's mission, and to anticipate a free market in the globalization era, where competition will be considerably avoidable, then Brantas keeps developing an incentive plan to become a well-known company in the construction industry. To actualize such a plan, the management of Brantas has defined vision and mission of the corporation as follows:

Vision : "To be a reliable company on the construction industry"

It shall mean:

1. To have all professional requirements which are adequate

2. Dalam 5 (lima) tahun ke depan mampu menjadi 5 (lima) besar perusahaan konstruksi nasional.

Misi : "Menyediakan produk konstruksi bermutu tinggi secara profesional dan berkelanjutan".

Artinya :

1. Memberikan produk yang bersaing dalam hal harga, mutu, pelayanan dan

2. Within 5 (five years in the future become 5 (five) great national construction company

Mission : "To provide high quality construction products in a professional and sustainable manner".

It shall mean :

1. Provide competing products in price, quality, service and friendly

ramah terhadap lingkungan serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja

2. Bekerja secara efisien menurut standar yang unggul dan diakui secara internasional (ISO, OHSAS, SMK3, SNI, COSO, MBCIPE, dll)
3. Selalu menjaga hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder

Keinginan menjadi perusahaan terkemuka dalam industri konstruksi ini harus didukung oleh fondasi yang kuat berupa strategi korporasi yang efektif dan komprehensif yang didukung oleh keuangan yang mapan, sistem manajemen yang baik serta SDM yang handal yang memiliki komitmen tinggi

to environment and prioritize to safety and work health.

2. Work efficiently work according to superior and internationally recognized standards (ISO, OHSAS, SMK3, SNI, COSO, MBCIPE, etc.)
3. Always keep the good relationship with all stakeholders.

A desire to become a well-know company in the construction industry should be supported by a strong foundation in the form of an effective and comprehensive strategi supported by a stable finance, good management system either reliable HR which has a high commitment towards the

terhadap perusahaan. Untuk itulah, perseroan memiliki motto "Semangat memberikan yang terbaik" atau "Spirit for giving the best".

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa untuk memenangkan persaingan, seluruh staf harus ditingkatkan kemampuan mereka agar dapat bekerja secara efisien yang efektif sehingga dapat memenuhi tenggang waktu dan kualitas kerja yang baik untuk tiap proyek yang dikerjakan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan begitu perseroan dapat meningkatkan kinerja dan citra perusahaan. Pengembangan perusahaan selama ini telah berjalan pada trek yang ada dan itu terbukti membuahkan berbagai prestasi yang diakui banyak pihak. Prestasi itu berhasil diraih antara lain karena Brantas mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9000 di semua unit kerja atau usaha.

Setelah berhasil menerapkan sistem secara konsisten untuk beberapa kali, Brantas berhasil mendapatkan jaminan mutu ISO 9001:2000 sejak 22 Januari 1998. Sertifikat tersebut diberikan oleh Lloyd's Register Quality Assurance.

Untuk mempertahankan prestasi yang sudah diraih, perusahaan mengembangkan sistem berdasarkan pada kebijakan mutu. Semua anggota dan personil Brantas akan selalu melakukan pekerjaan dengan semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen.

Guna menghadapi tantangan kedepan yang makin kompleks, pada tanggal 12 Desember 2011, perusahaan mendirikan PT Brantas energi yang bergerak dibidang pembangunan, perindustrian, perdagangan dan jasa dalam bidang ketenaga listrik dan energi alternatif dengan nilai, investasi sebesar Rp. 51,480,000,000 atau setara dengan kepemilikan sebesar 99%.

Company. Hence, the company has a motto "Spirit for Giving The Best".

The company realizes that to win a competition, all staffs should improve their abilities so that they work efficiently and effectively in order to comply with grace period and good work quality for each project which is performed in accordance with the cost spent. As a matter of fact, the company can enhance its performance and image. The company development has been insofar running on the existing track and it is proven of generating various achievements admitted by numerous parties. Such achievements have been successfully achieved among others due to Brantas develops and applies consistently the quality management system based upon ISO 9000 in all working units/businesses.

After achieving such success in applying a consistent system, Brantas has several times obtained a quality assurance of ISO 9001:2000 since January 22, 1998. The certificate is provided by Lloyd's Register Quality Assurance. To maintain the achievement, the Company develops the system based upon a quality policy. All members and personnel of Brantas will always perform the work under a spirit to give the best services for the customers. To face a challenge ahead that is very competitive, on December 12, 2011, the company has established PT Brantas Energy having line of business in development, industrial, trading and services in the field of electrical and alternative energy under an investment value of Rp 51,480,000,000,- or equalize to the shareholding of 99%.



56 %

• Pendapatan Usaha Meningkat Increased Business Revenue

Kinerja manajemen diborong untuk meningkatkan pendapatan. Tahun ini pendapatan mencapai 1.441,25 Miliar meningkat 56 % dibanding tahun 2012 sebesar 923,41 Miliar

The management performance is supported to increase the revenue. This year, the revenue achieved 1.441,25 Billion increased 56 % compared to 2012 worth 923,41 Billion.

Tahun 2013 1.441,25 miliar

Tahun 2012 923,41 miliar

43 %

• Laba Bersih Meningkat Increased Net Profit

Kenaikan pendapatan diikuti dengan kenaikan laba yang cukup signifikan. Laba tahun 2013 tercapai sebesar 72,79 miliar, meningkat 43 % dibandingkan tahun 2012 sebesar 50,84 Miliar

The increase in revenue is followed by the increase in profit which is significant enough. The profit in 2012 achieved 72,79 billion, increased 43 % compared to 2012 worth 50,84 billion.

Tahun 2013 72,79 miliar

Tahun 2012 50,84 miliar

27 %

• Aset Meningkat Increased Asset

Jumlah total aset tahun 2013 tercapai sebesar 1.151,3 miliar, meningkat 27 % dibandingkan tahun 2012 sebesar 909,97 Miliar

In 2013, total asset reach 1.151,3 billion, increasing 27% compared to that of 2012 which was 909,97 billion.

Tahun 2013 1.151,3 Miliar

Tahun 2012 909,97 Miliar

70 %

• Jumlah Pembayaran Pajak Meningkat Increased Tax Payment

Pertumbuhan perusahaan salah satunya diukur dari jumlah pajak dibayar. Tahun 2013, PT Brantas mencatat jumlah pembayaran pajak sebesar 36,55 miliar, meningkat 70 % dibanding tahun 2012 sebesar 21,46 miliar.

One of growth indicator of company is the amount of tax payment, in 2013 Brantas recorded the tax payment amount at 36,55 billion, increased 70% compared to 2012 worth 21,46 billion

Tahun 2013 36,55 Miliar

Tahun 2012 21,46 Miliar

45,81 %

• Kontrak Baru Meningkat Increase in New Contract

Perusahaan bertekad untuk menggenjot pendapatan dengan mengikuti lebih banyak lelang untuk memperoleh proyek baru. Kontrak baru pada tahun 2013 sebesar 3.431,22 miliar meningkat tajam 45,81 % dari tahun 2012 sebesar 2.353,27 miliar.

The company has a strong intention to boost the revenue by participating in numerous bids to obtain a new project. The new project in 2013 worth 3.431,22 billion increased significantly 45,81 % from 2012 worth 2.353,27 billion.

Tahun 2013 3.431,22 Miliar

Tahun 2012 2.353,27 Miliar

11 %

• Jumlah SDM Bertambah Increased Human Capital

Untuk menjawab tantangan bisnis konstruksi yang terus berkembang, PT Brantas Abipraya (Persero) menambah jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja tahun 2013 adalah 357 meningkat 11 % dibanding tahun 2012 yang berjumlah 322 tenaga kerja.

To meet the challenges of a growing construction business, PT Brantas Abipraya (Persero) increase the amount of labor. The number of workers in 2013 was 357, an increase of 11 % compared to the year 2012, amounting to 322 workers.

Tahun 2013 357 pekerja

Tahun 2012 322 pekerja

75,56

• GCG

Berdasarkan Assessment terhadap penerapan GCG pada PT Brantas Abipraya (Persero) untuk periode tahun 2013 yang dilakukan sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT Brantas Abipraya (Persero) mencapai skor 75,56 dari skor maksimal 100, berada dalam kategori predikat "BAIK", skor ini naik bila dibandingkan dengan hasil assessment tahun 2011 yang mencapai 73,85

Based on the Assessment on GCG implementation in PT. Brantas Abipraya (Persero) for the period of 2013, which was conducted from 18th November 2013 to 23rd January 2014, it may be concluded that the GCG implementation condition in PT. Brantas Abipraya (Persero) reached a score of 75.56 of the maximum score of 100. It was within the "GOOD" title category. This score was increased if it was compared with the 2011 assessment score, i.e. 73.85.

102,40

• Skor KPI melebihi target KPI Score Exceed the Target

Skor Indeks pencapaian Perusahaan direncanakan mencapai 100 %, namun pada realisasinya tercapai 102,40, melebihi target 2,40%

Key Performance Indicator was targeted at 100%, but the it realized at 102,4, this exceed 2,40%

"AAA"

• Tingkat Kesehatan Perusahaan Company's Health Rank

Tingkat kesehatan perusahaan tahun 2013, Brantas memperoleh predikat "AAA" dengan capaian skor 96 untuk kinerja perusahaan dan meningkat 2,25 % dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 93,75

The company's 2013 health rank was "AAA" in which Brantas reached a score of 96 in terms of the corporate performance and it was increased from the 2012 score, i.e. 93.75.



• **Kriteria Penilaian Kinerja Unggul**
Assessment Criteria for Performance Excellence

Dalam tahun 2013, PT Brantas Abipraya pertama kali di audit KPKU dengan skor 385,5 kategori Early Improvement

In 2013, PT. Brantas Abipraya was audited for the first time by KPKU and it scored 385.5 and was categorized as Early Improvement.



• **BUMN Bersih**
An Upright State-Owned Enterprise

Pada tahun 2013 PT Brantas Abipraya pertama kalinya di audit BUMN bersih oleh BPKP hasilnya perusahaan dikategorikan "cukup berkomitmen" dalam menepatkan BUMN bersih

In 2013, PT. Brantas Abipraya was audited in terms of an upright state-owned enterprise for the first time by BPKP. As a result, the company is categorized as "sufficiently committed" to implement an upright State-Owned Enterprise.



1980

PT Brantas Abipraya dibentuk sebagai pemegang yang bergesek di bidang konsultasi regional. Dari hasil pemetaan proyek induk pengembangan wilayah Sungai Brantas (Proyek Brantas), menjadi Pusat Orientasi

PT Brantas Abipraya established as a company engaged in the field of regional consultation. Parent of the division of project development Brantas River region (Brantas Project), a Point Oriented



1990

PT Brantas Abipraya mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan pekerjaan dalam bidang jasa pengisian (jalan, jembatan, gedung dan bandar udara)

PT Brantas Abipraya got the confidence to do the work in the field of service provision (roads, bridges, buildings, and airports)



1992

Di usia 12 tahun PT Brantas Abipraya membangun PCP kota Perjang, Banglimog, Riau. Dengan menerapkan metode REC (Roller Compacted on Course). Metode pertama dalam proyek perintis di Indonesia

At the age of 12 years of PT Brantas Abipraya build hydropower Lung city, Banglimog, Riau. By applying the method of REC (roller compacted on Course). The first method in dam construction project in Indonesia



1995

Manajemen PT Brantas Abipraya memindahkan kantor dari Kota Malang ke Jakarta untuk menunjang kegiatan dan mendekatkan dengan pusat pemerintahan

Management of PT Brantas Abipraya moved his offices from Malang to Jakarta to support the activities and closer to the center of government



2008

Dengan pindahnya kantor pusat PT Brantas Abipraya, perusahaan ini makin berkembang dan mendapat piagam penghargaan sebagai salah satu wajib pajak patuh dari Direktorat Jenderal Pajak hingga sekarang

Result of the displacement of the headquarters of PT Brantas Abipraya, this company is growing and award plaque as one abiding taxpayers of the Directorate General of Taxation until now

2010

PT Brantas Abipraya mendapat piagam penghargaan dari majalah Info Bank, sebagai perusahaan BUMN dan Konstruksi terbaik berdasarkan pada kinerja pertumbuhan usahadan rasio keuangan

PT Brantas Abipraya mendapat plaque from magazines Info Bank, a state-owned company and the best construction on growth performance usahadan Based on the financial ratios



2011

Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI)



meng-anagrasah-kan pengalaman sebagai kontraktor Indonesia yang mengerjakan bangunan terbanyak. Dep. Konstruksi Indonesia (PU) memperczynkan proyek konstruksi kategori bangunan gedung lebih dari 8 lantai (green building)

Indonesian Construction Association (AKI) uses award-grace-kan as Indonesian contractors are working on the highest dam. Dep. Construction Indonesia (PU) entrust the building construction project category over 8 floors (green building)



2012

PT Brantas Abipraya, dipercaya untuk mengerjakan proyek Underpass Cibubur, dengan menggunakan Jacking System. Sistem ini merupakan teknologi yang pertama kali diterapkan di Indonesia.

PT Brantas Abipraya, trusted to carry out the Underpass Cibubur Project by implementing Jacking System Technology. The Technology is the first one to be implemented in Indonesia.



2013

PT Brantas Abipraya, Mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia untuk pekerjaan pemasangan underpass terpanjang dengan sistem jacking

PT Brantas Abipraya, was awarded by the Indonesian Record Museum for the longest jacking system-based underpass tunnel work.



IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

Laporan Posisi Keuangan Komparatif

Statement of Comparative Financial Position

LAPORAN LABA RUGI		2013	2012	2011	2010	2009	INCOME STATEMENT
NO.	ASSET						ASSET
1	Aset Lancar						Current Assets
2	Kas dan Setoran Kas	441.167.637.947	195.249.957.121	129.952.744.954	67.298.407.480	91.316.084.047	Cash and Cash Equivalents
3	Pinjaman Usaha						Accounts Receivable
4	Pinhak Yang Berelasi	185.525.696.870	126.245.300.077	111.481.002.070	79.085.129.622	86.578.009.282	Its related parties
5	Pinhak Ketiga	28.013.944.081	5.025.188.564	5.041.896.222	25.912.503.142	7.723.247.513	Third Party
6	Pinjaman Lain - Lain						Facilities - Other
7	Pinhak yang berelasi	2.301.000.000	1.201.386.934				Third Party
8	Pinhak Ketiga	1.268.036.460	9.673.858.221	12.082.398.854	4.571.369.418	4.443.538.808	Third Party
9	Tupuhan Bantu Kepada Pemakai Jasa						Gross Claims To Employer
10	Pinhak Yang Berelasi	62.825.102.186	104.421.124.700	45.516.604.302	127.486.295.902	108.214.711.229	Its related parties
11	Pinhak Ketiga	21.997.244.130	35.474.430.282	183.321.224	459.700.200	11.812.399.442	Third Party
12	Persewaan	374.461.011.086	38.311.076.150	51.057.375.057	25.785.142.551	1.513.135.731	Inventory
13	Utang Mula	29.004.241.037	14.282.579.254	14.607.526.324	19.531.440.743	6.972.375.705	advance
14	Beban Dibayar Dimuka	19.770.385.689	15.049.735.883	29.984.619.524	33.924.579.699	14.090.689.718	Prepaid Expenses
15	Pajak Dibayar Dimuka	30.216.699.650	11.408.534.886	4.267.056.370	5.270.217.089	16.141.180.761	Prepaid Taxes
16	Jaminan	10.700.821.618	7.681.578.007	2.182.389.227	1.426.376.447	2.472.129.470	insurance
17	Total Aset Lancar	861.125.431.689	642.729.007.425	385.487.403.230	403.575.219.983	488.568.301.375	Total Current Assets
18	Aset Tidak Lancar						Noncurrent Assets
19	Properti Investasi	-	-	151.989.480.000	151.554.480.000		Investment Property
20	Aset Tetap - Net	279.591.747.851	263.346.574.875	101.718.787.028	89.543.790.174	74.506.052.431	Fixed Assets - Net
21	Aset Lain-Lain - Net	10.612.371.300	3.733.552.271		2.599.248.989	154.635.378.969	Other Asset
22	Total Aset Tidak Lancar	290.204.119.151	267.080.127.146	253.708.267.028	243.687.419.143	299.161.421.400	Total Non-Current Assets
23	JUMLAH ASSET	1.151.329.550.840	909.809.134.571	639.195.670.258	647.262.639.126	787.729.722.775	TOTAL ASSETS
24	LIABILITAS						Liabilities
25	LIABILITAS JANGKA PENDEK						Short-Term Liabilities
26	Utang Usaha						Accounts Payable
27	Pinhak Yang Berelasi			6.347.335.660	8.182.112.761	4.478.478.146	Its related parties
28	Pinhak Ketiga	323.110.037.440	235.288.054.565	118.484.714.295	82.629.833.822	99.380.505.255	Third Party
29	Pinjaman Lain - Lain	1.145.145.427	56.294.095.504		3.445.464.601	2.281.091.095	Other Loans - Long Term Liability

IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

30	Utang Non Bank						Non-Bank Debt
31	Utang Lain-lain - Pinhak yang berelasi			78.161.108			Other payable - related parties
32	Utang Pajak	7.770.605.510	7.515.762.785	2.927.546.201	4.102.843.517	1.098.215.855	Taxes Payable
33	Utang Mula Pemakai Jasa - Jajeh Utang Sisa Tahun	71.826.728.150	85.481.081.595	20.485.208.008	75.395.084.087	32.162.730.316	Advance Employer - One Year Maturity
34	Pembayaran Dimasukkan Dimuka	17.274.108.777	6.477.678.344	5.167.248.842	1.081.201.205	571.188.563	Advance Received In Advance
35	Utang Yang Masih Harus Dibayar	42.294.360.791	24.488.783.083	11.266.757.872	18.304.547.576	22.332.562.480	Account Expenses
36	Utang Sewa Pembiayaan - Jajeh Utang Sisa Tahun	17.038.751.264	8.433.066.341	7.308.975.786	776.302.234	890.608.647	Finance Lease Payables - One Year Maturity
37	TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	481.550.738.362	424.547.786.194	228.677.476.944	528.145.532.450	388.648.816.896	TOTAL SHORT-TERM LIABILITIES
NO.	LIABILITAS JANGKA PANJANG						Long-Term Liabilities
38	Liabilitas Imbalan Kerja	7.574.832.371	18.068.966.747	9.680.850.532	11.383.674.819	11.586.218.124	Post-Employment Benefits Liability
39	Utang Non Bank	144.300.000.000					
40	Utang Bank - Sisa dari Utang Sisa Tahun Yang Belum Waktu Sisa Tahun		221.088.720.684	136.481.931.211	101.486.283.784	128.280.144.184	Bank Debt - Not of Current Maturity of The One Year
41	Utang Mula Pemakai Jasa - Sisa dari Utang Sisa Tahun Yang Belum Waktu Sisa Tahun	146.498.260.497	31.235.638.551	55.550.988.429	65.953.255.787	86.138.719.086	Employer Advance - Not of Part A One-Year Maturity
42	Utang Sewa Pembiayaan - Sisa dari Utang Sisa Tahun Yang Belum Waktu Sisa Tahun	6.117.482.546	7.507.512.067	4.340.838.074	1.046.688.875	12.262.281.285	Finance Lease Payable - Not of Current Maturity of The One Year
43	Sewa Berjangka Panjang	75.000.000.000					
44	Total Liabilitas Jangka Panjang	379.400.584.414	270.892.846.960	205.980.779.047	181.872.863.195	249.610.464.682	Total Long-Term Liabilities
45	JUMLAH LIABILITAS	861.050.322.776	695.440.633.154	434.658.255.991	709.018.395.645	638.259.281.478	TOTAL LIABILITIES
NO.	EKUITAS						Equity
46	Ekuitas Yang Dapat Dibagikan Kepada Pemilik Entitas Induk						The Equity Attributable to Owners of Parent Entity
47	Modal Saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham						Capital Stock - par value of Rp 1,000,000 per share
48	Modal dasar - 40.000 saham						Authorized - 40,000 shares
49	Modal ditempatkan dan disetor 161.555 dan 10.000 saham	161.555.000.000	161.555.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	Issued and paid 10,000 shares
50	Penyertaan Modal Negara						State Capital
51	Cadangan	32.311.000.000	7.584.891.200	7.585.411.200	7.585.411.200	7.585.411.200	status
52	Saldo Laba (Rugi)	90.845.472.307	42.602.004.393	(7.642.819.247)	(33.655.548.118)	(50.644.442.943)	reserve
53	Jumlah Ekuitas Yang Dapat Dibagikan						
54	Kepada Pemilik Induk	284.711.472.307	211.741.895.503				
55	Kepentingan Non Pengendali	5.567.755.757	3.940.856.215				
56	TOTAL EKUITAS	290.279.228.757	215.682.751.808	161.497.072.067	135.484.343.082		TOTAL EQUITY
57	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.151.329.550.840	909.809.134.571	640.695.748.058	647.272.739.126	637.749.732.775	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

NO.	URAIAN	2013	2012	2011	2010	2009	DESCRIPTION
1	PERKAWANTAHAN USAHA	1.441.255.406.449	833.457.004.330	703.877.857.470	613.101.037.057	711.080.063.039	OPERATING REVENUES
2	BEBAN LANGSUNG	(1.285.733.323.333)	(830.607.235.337)	(622.025.166.000)	(455.101.461.451)	(638.912.645.700)	DIRECT COSTS
3	LABA KOTOR - SEBELUM BAGIAN LABA JOINT OPERATION	155.461.483.114	92.799.828.893	81.221.850.619	72.999.576.206	83.347.303.339	GROSS - PROFIT BEFORE JOINT OPERATION
4	BAGIAN LABA JOINT OPERATION	74.171.434.236	73.163.771.000	27.803.457.627	20.520.291.730	22.483.181.076	THE PROFIT JOINT OPERATION
5	LABA KOTOR	229.632.917.371	171.963.600.701	109.024.348.446	93.527.867.936	105.770.484.395	GROSS PROFIT
6	BEBAN USAHA						OPERATING EXPENSES
7	Pegawai	41.386.444.976	36.477.233.025	27.334.941.706	24.097.834.707	20.139.915.259	employee
8	Umum	19.022.398.549	13.961.705.596	11.611.670.886	11.943.953.945	10.370.719.000	general
9	Pengangkutan	2.485.737.103	2.590.745.340	1.623.433.757	807.714.705	740.354.130	transportation
10	Pemasaran	4.844.548.768	2.792.506.270	2.287.263.404	2.129.245.325	1.271.232.903	marketing
11	Pengembangan	-	596.181.470	-	-	-	development
12	Arahan Beban Usaha	68.352.149.417	52.815.422.299	143.539.529.750	(38.177.668.586)	(32.524.401.296)	Total Operating Expenses
13	LABA USAHA	161.280.767.953	119.078.178.402	65.484.348.691	55.350.199.350	73.242.083.099	OPERATING PROFIT
14	Pendapatan (Golongan) Lain-Lain						INCOME (EXPENSE) OTHER
15	Pendapatan Lain-Lain	3.300.354.262	10.045.367.735	13.707.205.000	11.032.073.739	3.004.026.330	Miscellaneous Income
16	Beban Lain-Lain	(24.607.750.943)	(17.673.594.790)	6.446.180.127	(9.359.244.643)	(9.962.684.746)	Miscellaneous Expenses
17	Arahan Pendapatan (Golongan) Lain-Lain	(19.306.736.681)	6.827.627.063	13.261.105.742	1.732.829.097	(4.895.663.195)	Total Income (Expense) Other
18	LABA SEBELUM BEBAN BUNGA DAN PAJAK PENGHASILAN	141.973.971.273	112.250.581.412	78.752.834.436	57.065.028.447	68.350.400.404	EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES
19	BEBAN BUNGA	(32.632.812.963)	(39.953.492.170)	(38.745.368.605)	(30.743.456.330)	(15.619.001.114)	INTEREST EXPENSE
20	LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	109.341.158.310	72.297.089.242	40.007.465.831	26.321.572.117	52.731.399.290	INCOME BEFORE INCOME TAX
21	BEBAN MANFAATPAJAK PENGHASILAN						(EXPENSE) INCOME TAX BENEFIT
22	Pajak Final	(36.557.200.116)	(21.459.618.217)	(13.994.756.956)	(9.350.677.290)	(10.624.623.107)	Final tax
23	Pajak Ditai	-	-	-	-	-	Current tax
24	Pajak Tanggungan	-	-	13.994.756.956	9.350.677.290	-	Deferred tax
25	LABA TAKSIKURSI	72.783.958.193	50.837.471.025	26.012.708.875	16.970.894.827	34.106.776.183	NET INCOME



IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

Realisasi pendapatan 5 tahun terakhir

Realization of revenue last 5 years

Dalam jutaan rupiah		In millions of rupiah					
NO.	URAIAN	2013	2012	2011	2010	2009	DESCRIPTION
1	Pendapatan Usaha						Revenue
2	Jasa Konstruksi	1.407.055,48	970.522,63	689.262,454	94.405,90	701.820,77	Construction Services
3	Jasa Perawatan	34.199,91	12.874,46	14.524,61	17.795,341	0.039,18	Equipment Services
4	Jumlah Pendapatan Usaha	1.441.255,40	983.397,09	703.787,06	112.201,24	701.860,95	Total Operating Revenue

Beban Perusahaan 5 tahun terakhir

The company incurs the last 5 years

Dalam jutaan rupiah		In millions of rupiah					
NO.	URAIAN	2013	2012	2011	2010	2009	DESCRIPTION
1	Beban Operasional						Operating Expenses
2	Beban Kontrak	1.285.793,92	830.712,70	622.655,17	439.101,46	628.512,64	Expense-Contracts
3	Beban Usaha :						Operating Expenses:
4	Pegawai	41.900,44	30.411,25	22.559,942	4.059,83	21.29,52	employee
5	Umum	19.022,39	12.962,94	11.511,57	11.142,05	10.378,72	general
6	Penggunaan	2.408,75	2.520,75	1.523,43	807,71	742,53	Depreciation
7	Pemasaran	2.844,54	2.280,61	2.060,05	2.120,27	1.271,23	marketing
8	Pengembangan Hoeks	-	0,00	-	-	-	Equipment
9	Jumlah Beban Usaha	68.352,14	52.885,42	43.539,60	38.177,67	32.534,40	Total Operating Expenses
10	Jumlah Beban Operasional	1.354.164,06	883.598,12	666.194,77	477.279,13	661.047,04	Total Operating Expenses
11	Beban Non Operasional	19.306,75	6.827,62	-	-	-	Non Operating Expenses
12	Beban Lain - lain	24.607,75	17.698,36	6.446,18	9.399,24	9.968,68	Other Expenses
13	Beban Bunga	32.632,81	39.953,49	38.745,373	0.743,46	15.619,00	Interest Expense
14	Jumlah Beban Non Operasional	51.939,60	46.781,11	45.191,55	40.142,78	25.579,6	Total Non Operating Expenses
15	KUJAL BEBAN PERUSAHAAN	1.406.103,66	930.379,23	711.386,32	517.421,91	686.626,64	KUJAL Expenses Company

IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

Laporan Arus Kas 5 Tahun Terakhir

Cash Flow Cash 5 Years

Dalam jutaan rupiah		In millions of rupiah					
NO.	URAIAN	2013	2012	2011	2010	2009	DESCRIPTION
1	Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasional	314.454,05	48.298,06	90.053,90	4.051,78	24.858,98	Cash Flow from (to) Operating Activities
2	Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi	(19.191,62)	(28.502,25)	(25.404,45)	(23.246,38)	(17.254,83)	Cash Flow from (to) Investing Activities
3	Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan	(49.274,14)	45.205,77	(2.307,20)	(4.831,88)	24.798,20	Cash Flow from (to) Financing Activities
4	Keuntungan Bersih Kas & Setara Kas	245.988,29	65.001,59	62.342,24	(24.025,48)	(32.402,34)	Net Income to Cash & Cash Equivalents
5	Kas & Setara Kas pada awal periode	195.179,34	130.177,76	67.290,41	91.316,88	58.913,74	Cash & Cash Equivalents at beginning of period
6	Kas & Setara Kas pada akhir periode	441.167,63	195.179,34	129.552,74	67.290,41	91.316,08	Cash & Cash Equivalents at end of period

Laporan Perubahan Ekuitas

Statement of Changes in Equity

Dalam jutaan rupiah		In millions of rupiah					
NO.	URAIAN	2013	2012	2011	2010	2009	DESCRIPTION
1	Saldo per awal periode	214.534,26	162.017,88	135.484,34	118.495,45	67.079,20	Balance at the beginning of period
2	Laba bersih tahun berjalan	72.783,95	50.837,44	26.812,73	16.988,89	34.028,17	Net income current year
3	Partisipasi Modal Pemerintah	--	151.554,48	--	--	151.554,48	Government Equity

Rasio Keuangan Selama 5 Tahun Terakhir

Financial Ratio over 5 Years

Dalam jutaan rupiah		In millions of rupiah					
NO.	URAIAN	2013	2012	2011	2010	2009	DESCRIPTION
1	KEUNTUNGAN / PROFITABILITAS						PROFITABILITY / RENTABILITY
2	Laba Sebelum Pajak / Pendapatan	7,58 %	7,82 %	5,68 %	5,14 %	7,41 %	Profit Before Tax / Revenue
3	Beban Kontrak / Pendapatan	89,21 %	89,95 %	88,46 %	5,75 %	88,29 %	Cost of Revenue / Revenue
4	Laba Sebelum Pajak / Total Aset	9,49 %	7,94 %	6,25 %	4,07 %	8,27 %	Income Before Tax / Total Asset
5	LIKUIDITAS / LIQUIDITY						LIQUIDITY / Liquidity
6	Rasio Lancar	178,82 %	151,39 %	141,73 %	122,33 %	151,53 %	Current Ratio
7	Rasio Kas	91,61 %	45,97 %	47,47 %	11,40 %	33,87 %	Cash Ratio
8	SOLVABILITAS / SOLVABILITY						SOLVENCY / SOLVABILITY
9	Rasio Hutang Terlepas Aset	74,78 %	76,42 %	74,77 %	9,07 %	81,42 %	Liabilities / Assets
10	Rasio Hutang Terlepas Modal	296,62 %	324,16 %	296,36 %	378,34 %	438,21 %	Liabilities / Equity
11	Rasio Hutang Terlepas Aset Tetap	307,96 %	288,73 %	188,65 %	218,01 %	226,59 %	Liabilities / Fixed Assets

Laporan Dewan Komisaris

The Board of Commissioner's Report

Hedyanto W. Husaini
Komisaris Utama | President Commissioner



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Brantas telah mengalami peningkatan kinerjanya sebagaimana tercermin dalam laporan ini. Brantas pada tahun 2013 telah mengalami kemajuan dan peningkatan serta keberhasilan dalam pengembangan usaha. Keberhasilan tersebut, tidak lepas dari kerja keras dari semua jajaran Perusahaan.

Dewan Komisaris memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Direksi. Dalam laporan keuangan 2013, kinerja keuangan menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan. Ini ditandai dengan peningkatan laba bersih setelah pajak mencapai Rp72,80Milyar atau tumbuh 143,53% dibandingkan dari tahun sebelumnya sebesar Rp.50,72Milyar.

Semua capaian yang diperoleh pada tahun 2013 ini merupakan modal yang sangat berharga untuk memacu seluruh karyawan dan manajemen dalam meningkatkan kinerja dan kapasitas serta kapabilitas seluruh sumber daya Brantas sehingga diharapkan pada tahun-tahun mendatang bisa meraih keberhasilan yang lebih baik lagi.

We shall extend our gratitude and praise to the God Almighty, so Brantas may improve its performance as reflected in this report. In 2013, Brantas has made progress and improvement and success in terms of the business development. The success is supported by the diligent work of all levels of the Company.

The Board of Commissioners shall extend the highest reward to all members of the Board of Directors. In the 2013 financial statement, the financial performance shall indicate a very significant improvement. It is marked by the net (after tax) profit increase, which reaches IDR72.80 Billion or grows 143.53% compared with the previous year, i.e. IDR50.72 Billion

All achievements in 2013 are a very valuable resource to encourage all employees and management in order to improve the performance, capacity and capability of all resources of Brantas. Therefore, it is expected that the Company may reach higher success.

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi kepada manajemen Brantas yang telah mendukung diterapkannya pengendalian kinerja yang berbasis Key Performance Indicator (KPI) dan telah diterapkannya Good Corporate Governane (GCG). Sesuai dengan fungsi dan tugas Dewan Komisaris sebagai pengendali dan pengawas melalui pertemuan yang rutin antara Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sesuai amanah Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, perlu segera dibangun, dibiayai dan dipelihara system database kepegawaian; system dan prosedur kerja, pola karier yang mendorong motivasi karyawan untuk bekerja; system kepangkatan dan remunerasi yang baik dan transparan; system dan mekanisme pendidikan dan latihan yang menunjang dan memacu kemampuan teknis dan manajerial sumber daya manusia sehingga tercipta iklim kerja yang semakin kondusif.

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip GCG yang telah dimulai sejak beberapa waktu lalu perlu terus dikembangkan implementasinya agar diperoleh manfaat yang kongkrit. Sedangkan pengendalian internal perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keyakinan mengenai keandalan laporan keuangan, keefektifan dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturannya yang berlaku.

Direksi telah menerbitkan Pedoman GCG, yang memuat prinsip-prinsip yang berlaku bagi seluruh aktivitas Perseroan. Direksi perlu secara konsisten menginformasikan Pedoman GCG ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan sehingga dapat memahami dan memaklumi standar kerja Perseroan yang sesuai dengan ketentuan GCG.

Keberhasilan penerapan GCG ini bukan hanya karena tersedianya sarana/acuan tata kelola Perseroan seperti Pedoman GCG, melainkan komitmen dari pimpinan tertinggi Perseroan yang diikuti oleh seluruh staf dan karyawan serta didukung oleh Dewan Komisaris. Pedoman GCG ini merupakan acuan langkah awal dalam pengelolaan Perseroan yang sehat dan beretika serta memberikan gambaran yang objektif dan transparan kepada stakeholders Perseroan.

The Board of Commissioners shall also extend appreciation to the management of Brantas, which has supported the Key Performance Indicator (KPI)-based performance control and application of the Good Corporate Governance (GCG). It shall be in accordance with the functions and duties of the Board of Commissioners as the controller and supervisor, which are materialized by routine meetings between the Board of Directors and Board of Commissioners according to the mandate of the Company's Article of Association.

In order to increase the capacity and competence of human resources, a human resources database system; employment system and procedure, career pattern encouraging the employees' work motivation; fair and transparent structural and remuneration system; education and training system and mechanism which supports and improves the technical and managerial competence of the human resources should be constructed, improved and maintained. Therefore, a more conducive working environment can be materialized.

In addition, the application of the GCG principles, which has been commenced from sometimes ago, should be developed continuously. Thus, a concrete benefit may be obtained. Meanwhile, the company's internal control aims to gain confidence on the reliability of financial statements, effectiveness and efficiency of the operations, and compliance with prevailing laws and regulations.

The Board of Directors has issued the GCG guidelines, which sets out the principles applying to all activities of the Company. The Board of Directors needs to consistently inform this GCG Guideline to all stakeholders. Thus, they can understand and comprehend the working standard of the Company in accordance with the provisions of GCG.

The successful implementation of this GCG is not solely due to the availability of a resource/reference to the Company's governance, such as the GCG guidelines, but also the commitment from the top management of the Company, which is followed by all staff and employees and supported by the Board of Commissioners. This GCG Guideline is an initial step reference in terms of the healthy and ethical management of the Company as well as providing an objective and transparent overview to the stakeholders of the Company.

Khusus untuk program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Dewan Komisaris mengharapkan agar melalui berbagai kegiatan yang digelar sungguh bisa merupakan suatu wujud peran serta Perseroan dalam menjalankan fungsi tanggung jawab sosialnya atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pengembangan masyarakat, dengan program CSR tersebut, manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya mereka yang berada disekitar proyek yang dikerjakan oleh Brantas.

Especially to the Partnership and Community Development program, The Board of Commissioners expects that through some activities done, it can be really as the role and realization of the Company on performing the social responsibility or Corporate Social Responsibility (CSR) for developing the community, with the CSR program, the benefit can be perceived by the public community, especially to those who stay around the project done by Brantas.

“Semua capaian yang di peroleh pada tahun 2013 ini merupakan modal yang sangat berharga untuk memacu seluruh karyawan dan manajemen dalam meningkatkan kinerja dan kapasitas serta kapabilitas seluruh sumber daya Brantas, sehingga diharapkan pada tahun-tahun mendatang bisa meraih keberhasilan yang lebih baik lagi.”

Disamping itu pada tahun 2013 telah banyak saran dan rekomendasi Dewan Komisaris yang telah ditindaklanjuti oleh Direksi dan Seluruh Manajemen Brantas. Untuk masa mendatang, sesuai dengan aspirasi pemegang saham. Dewan Komisaris akan lebih berperan dan memberikan masukan dan pengawasan kepada Direksi. Semua itu akan menjadi masukan-masukan penting agar tercipta akuntabilitas, transparansi dan efisiensi.

Dengan keberhasilan yang diperoleh pada tahun 2013, dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam mencapai pertumbuhan usaha pada masa yang akan datang. Dewan Komisaris berharap seluruh manajemen dan staf dapat mewujudkan visi dan misi perseroan di masa mendatang.

Akhirnya dalam kesempatan ini, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada Direksi dan segenap karyawan atas dukungan dan kerja sama yang telah ditunjukkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Semoga Tuhan selalu menyertai kita semua.

Jakarta, Maret 2014

Ir. Hedyanto W. Husaini, MSCE., MSi.
Komisaris Utama

Furthermore, there have been a lot of suggestions and recommendations in 2013 from the Board of Commissioners. Furthermore, there have been a lot of suggestions and recommendations in 2013 from the Board of Commissioners which have been followed-up by the Board of Directors and the entire Management of Brantas. For the foreseeable future and in accordance with the aspiration of shareholders, the Board of Commissioners will play a more active role and provide input and oversight to the Board of Directors. All suggestions are important to create the accountability, transparency, and liability.

The success obtained in 2013 can be used as a benchmark to achieve the future business growth. The Board of Commissioners hopes that the entire management and staff may materialize the vision and mission of the company in the future.

Last but not least, the Board of Commissioners shall hereby express gratitude to the Board of Directors and all employees for their support and cooperation which has been demonstrated in carrying out their respective duties and functions. May God always be with us all.



Bambang E. Marsono
Direktur Utama | President Director

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Secara umum kondisi perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2013 dapat dikatakan belum bisa lepas dari pengaruh krisis ekonomi global, ditambah lagi dengan penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya USD yang menyentuh angka Rp.12.000/USD. Tentu saja hal ini sangat memberatkan bagi bisnis jasa konstruksi sepanjang tahun 2013. Namun demikian kita masih pantas bersyukur bahwa pertumbuhan pasar jasa konstruksi di Indonesia masih cukup menjanjikan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,3% (berdasarkan data IMF).

Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang giat dilaksanakan sepanjang tahun baik oleh pemerintah maupun swasta dan BUMN. Di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat tersebut, Alhamdulillah Brantas Abipraya berhasil meraih pendapatan

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

In general, we can safely say that the Indonesian economic situation in 2013 remains affected by the global economic crisis. In addition, Rupiah was depreciated against foreign currencies, specifically USD which reached IDR12,000/USD. It was certainly very demanding for the construction service business in 2013. However, we should be grateful because the Indonesian construction market growth is still promising due to the economic growth, i.e. 5.3% (based on the IMF data).

Such growth is especially supported by infrastructure construction projects which are diligently performed throughout the year, by either the government or private sector and SOEs. In the middle of a very tough economic burden, thanks to God that Brantas Abipraya successfully reached the business or sales revenue more

Peluang pasar konstruksi di Indonesia masih cukup terbuka, walaupun dengan tingkat persaingan yang semakin ketat.....

Brantas Abipraya berhasil meraih pendapatan usaha atau sales lebih dari Rp. 1.441,25 milyar, meningkat 56% dibanding tahun 2012

usaha atau sales lebih dari Rp1.441,26 milyar, meningkat 56% dibanding tahun 2012. Sedangkan laba bersih mencapai Rp.72,78 milyar, atau meningkat hampir 43% dibanding tahun 2012.

Tahun 2013 merupakan momen penting bagi Brantas Abipraya, karena tahun 2013 merupakan akhir dari pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2009-2013, dimana harus disusun RJPP untuk periode 5 tahun mendatang yaitu RJPP 2014-2018. Pada tahun ini, beberapa pencapaian penting berhasil diraih dan akan tercatat dalam sejarah perkembangan perusahaan, diantaranya adalah:

1. Untuk pertama kalinya menghasilkan Pendapatan Usaha (Revenue) di atas 1 triliun.
2. Untuk pertama kalinya mendapatkan penilaian Level GCG "Baik"
3. Untuk pertama kalinya memperoleh predikat "Sehat AAA"
4. Tercatat sebagai pemegang Rekor MURI untuk "Pekerjaan Terowong Underpass Terpanjang dengan Jacking System"

than IDR1,441.26 billion. It increased 56% from the 2012's revenue. Meanwhile, the net profit is IDR72.78 billion or increasing almost 43% from the 2012's net profit.

2013 is a significant milestone for Brantas Abipraya because 2013 is the end of the Company's Long-Term Plan (RJPP – Rencana Jangka Panjang Perusahaan) of 2009-2013, in which a RJPP for the next 5 year period should be drafted, namely RJPP of 2014-2018. In this year, there are several significant accomplishments and they will be recorded in the company's development history, among others:

1. The first over 1 trillion revenue for the Company
2. The first "Good" GCG Level assessment
3. The first "Healthy AAA" predicate
4. Recorded as the MURI (Indonesian Record Museum) Record holder of "Longest Jacking System-based Underpass Tunnel Work"

Laporan Dewan Direksi

The Board of Director's Report

Kami yakin bahwa pencapaian-pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran perusahaan dan dukungan optimal dari seluruh stakeholder. Manajemen menjadikan pencapaian ini sebagai bahan evaluasi internal. Di satu sisi, pencapaian ini membuktikan bahwa strategi, kebijakan dan program kerja yang selama ini diterapkan sudah berada di jalur yang benar. Di sisi lain, pencapaian ini juga akan dijadikan tantangan untuk semakin meningkatkan kinerja di waktu-waktu yang akan datang.

Manajemen menyadari sepenuhnya bahwa seiring dengan semakin terbukanya perekonomian regional, persaingan akan semakin meningkat, dan tantangan yang harus dihadapi perusahaan di masa depan juga akan semakin besar. Oleh sebab itu RJPP 2014-2018 disusun dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, tanpa meninggalkan semangat untuk memacu pertumbuhan, dengan harapan dapat menempatkan perusahaan jajaran teratas dalam industri konstruksi nasional. Untuk tujuan itu, seluruh pegawai telah berinisiatif melakukan perumusan ulang terhadap visi, misi dan budaya perusahaan. Visi, misi dan budaya yang baru ini diharapkan mampu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan seluruh Insan Abipraya untuk menyongsong tantangan lima tahun ke depan.

Laporan Tahunan (Annual Report) ini meskipun disusun secara sederhana, telah diupayakan untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012. Data yang disajikan diharapkan mampu memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh segenap stakeholder, sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan bagi semua pihak. Namun demikian, kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari segenap stakeholder untuk perbaikan di waktu mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



Bambang E. Marsono
Direktur Utama | President Director

We are confident that such accomplishments are the fruits of hard work of all company's employees and optimal support from all stakeholders. The Management should make these achievements as an internal evaluation material. On the one hand, they prove that the recent work strategy, policy and programmes are on the right track. On the other side, they are also a challenge for us improving the future performance.

The Management is fully aware that by the regional economic open door policy, the competition will grow tougher and future challenges for the company are increasing. Therefore, the 2014-2018 RJPP is drafted by prioritizing the caution principle, without leaving behind the spirit to improve the growth. It is expected that the company can sit at the top position within the national construction industry. For such goal, all employees have taken initiatives to reformulate the company's vision, mission and culture. This new vision, mission and culture are expected to be a source of inspiration and strength for all Insan Abipraya to face the next five year challenges.

Even though this Annual Report is drafted in a simple manner, it has been tried to comply with criteria stipulated by the Resolution of the Secretary of the State Owned Enterprises Ministry No. SK-16/S.MBU/2012. The data presented are expected to give various necessary information for all stakeholders, as the consideration for decision making of all parties. Nevertheless, we realize that this report is far from perfect. Therefore, we expect suggestions and advices from all stakeholders for the future improvement.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2013

Laporan Tahunan ini, berikut laporan keuangan dan informasi lain yang terkait, merupakan tanggung jawab Manajemen PT Brantas Abipraya (Persero) dan telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tandatangannya masing-masing dibawah ini.

Jakarta, Maret 2014
PT Brantas Abipraya (Persero)



Ir. Hedyanto W. Husaini, MSCE, MSI
Komisaris Utama | President Commissioner



Eko Subekti
Komisaris | Commissioner



Adhy Duriat Soemono
Komisaris | Commissioner



Ramli Ibrahim
Komisaris | Commissioner



Ekodjati Tunggulgeni
Direktur Operasional II | Operational Director II



Bambang E. Marsono
Direktur Utama | President Director



C. Thomas Pangaribuan
Direktur Operasional I | Operational Director I



Sukarno Jososaputro
Direktur Adm dan Keuangan | HRD & Finance Director



PROFIL PERUSAHAAN Company Profile

Riwayat Perusahaan

Company History in Brief



Sejarah Brantas sebagai perusahaan konstruksi nasional berawal dari hasil pemekaran Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Kali Brantas yang lebih dikenal dengan sebutan Proyek Brantas. Gagasan pengembangan proyek Brantas tersebut bermula dari pemikiran almarhum Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Ir. Sutami dalam inspeksi kerjanya pada tahun 1970.

Dalam inspeksi tersebut, Ir. Sutami mengemukakan tentang perlunya dipersiapkan suatu wadah untuk mengelola proyek-proyek yang akan segera selesai seperti Proyek Karangates dan Proyek Selorejo. Setelah melalui

The history of Brantas as a national construction company has been initiated from a blossoming outcome of the River Brantas Area Development Project better known as Brantas Project. An initiative on Brantas project development was initiated from the initiative of the late Minister of Public Works and Electricity, Ir. Sutami in the inspection of his work in 1970.

In the said inspection, Ir. Sutami uttered about the importance to manage projects that would be over such as Karangates and Selorejo Projects. After various preparations were carried out, then Brantas was

berbagai persiapan maka berdirilah Brantas berdasarkan akta notaris Kartini Muljadi, S.H., No. 88 tanggal 12 November 1980.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan akta notaris Tjipto Pranowo, S.H., di Jakarta No.15 tanggal 12 Agustus 2008. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM dengan Surat Kepmen No.AHU.62129.AH.01.02 tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

established based upon a notarial deed of Kartini Muljadi, S.H., No.88 dated November 1980.

The Company's articles of association has been amended several times, the recent one has been amended by the notarial deed of Tjipto Pranowo, S.H., in Jakarta No.15 dated August 12, 2008. The said amendment was approved by the Minister of Justice and Human Right under his Decree No.AHU.62129.AH.01.02 year 2008 concerning Approval on the Deed of Amendment to the Company's Articles of Association.

Riwayat perusahaan

Company History in Brief

Brantas yang berdiri menjadi sebuah perusahaan yang berbasis profit oriented ini waktu didirikan berkantor pusat di Malang, Jawa Timur. Seiring dengan perkembangan perusahaan, manajemen terus berbenah dan mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan berbagai macam proyek. Setelah 10 tahun berdiri, perusahaan mulai mendapatkan kontrak pekerjaan dalam bidang non pengairan (non water resources project) seperti bidang proyek jalan dan jembatan, proyek gedung dan proyek bandar udara.

Dalam usinya yang ke-12, tepatnya pada tahun 1992, Brantas berhasil menorehkan prestasi yang monumental. Itu ditandai dengan adanya kepercayaan untuk membangun PLTA Kotapanjang, Bangkinang, Riau. PLTA dengan tipe On Create Gravity Dam ini dalam pembangunannya diterapkan metode RCC (Roller Compacted on Create). Metode ini menjadi yang pertama digunakan dalam proyek pembangunan dam di Indonesia.

Seiring dengan perputaran zaman dan makin beratnya tantangan yang dihadapi, pada tahun 1995 manajemen memutuskan untuk memindahkan kantor, dari Malang ke Jakarta. Ini harus dilakukan guna menunjang kegiatan perusahaan agar dapat lebih berkembang dan pendekatan pada pusat pemerintahan.

Keputusan memindahkan perusahaan ke Jakarta, merupakan keputusan yang tepat. Buktinya keberadaan Brantas makin diakui dan dipercaya oleh banyak pihak dengan makin berkembangnya perusahaan. Penilaian yang positif dari stakeholder dan lembaga terkait pun muncul. Pada tahun 2008, Brantas mendapatkan piagam penghargaan sebagai salah satu wajib pajak patuh dari Direktorat Jenderal Pajak dan penghargaan ini terus berlanjut hingga tahun 2011.

Tidak berhenti di situ, pada usianya yang ke-30, pada tahun 2010, Brantas mendapatkan piagam penghargaan sebagai perusahaan BUMN dan konstruksi terbaik. Penilaian itu didasarkan pada kinerja pertumbuhan usaha

Brantas which has been established to become an oriented-profit based company, at the time of establishment, the head office was located in Malang, East Java. In line with the company improvement, the management keeps restructuring and gaining a trust to carry out various kinds of projects. After 10 years of its establishment, the company has commenced obtaining a work contract in the field of non-water resources project such as road, bridge, construction and airport projects.

At the age of 12 years, in 1992, Brantas successfully achieved a monumental achievement. It was marked by obtaining a trust to build PLTA (Water Power Plant) of Kotapanjang, Bangkinang and Riau. In its development, this PLTA under the type On Create Gravity Dam applies RCC (Roller Compacted on Create) method. Such method becomes the first one that is used in the dam construction project in Indonesia.

In line with a cycling era and hard challenge to be faced, in 1995, the management decided moving the office from Malang to Jakarta. It should be carried out in order to support the company activities so that it will develop more and close to the central government.

The decision to move the company to Jakarta is the right decision. As a proof, the existence of Brantas is admitted and trusted by numerous parties which can be seen that the company is getting developed. A positive recognition from the stakeholders and related institutions has also come up. In 2008, Brantas achieved an award as one of obedient taxpayers from Directorate General of Tax and this award is continuously achieved up to 2011.

It doesn't stop on that point, at the age of 30 years, in 2010, Brantas achieved the award as the best construction company. Such valuation is based upon a business growth

dan rasio keuangan dari majalah Info Bank.

Setahun kemudian, Brantas pun mendapat penghargaan dari AKI (Asosiasi Konstruksi Indonesia) sebagai kontraktor Indonesia yang paling banyak mengerjakan bendungan. Ini jelas menunjukkan prestasi yang menggembirakan sekaligus bukti bahwa Brantas sudah berjalan tepat pada jalurnya.

Atas profesionalisme yang ditunjukkan seluruh karyawan Brantas disertai dengan hasil proyek yang sempurna, maka Konstruksi Indonesia 2011 (Departemen Pekerjaan Umum) memberikan proyek konstruksi kategori bangunan gedung >8 lantai (green building). Dan peresmian gedung kantor pusat oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Menatap perkembangan dan tantangan masa depan yang makin kompleks, manajemen membuat langkah strategis pada tahun 2011. Itu diwujudkan dengan melakukan diversifikasi usaha, yakni di bidang investasi PLTM dan membentuk anak perusahaan dengan nama "Brantas Energi".

performance and financial ratio as valuated by Info Bank magazine.

A year later, Brantas also achieved the award from AKI (Indonesian Construction Association) as the Indonesian contractor which works mostly for the dam project. It is obviously indicating a pleased achievement and a proof that Brantas has run on the right lane.

Upon its professionalism as shown to all employees and also a perfect project outcome, therefore, Indonesia Construction 2011 (Department of Public Works) awarded a construction project under category of 8 storied-building so-called green building. And the inauguration of the head office building was inaugurated by the Minister of Public Works.

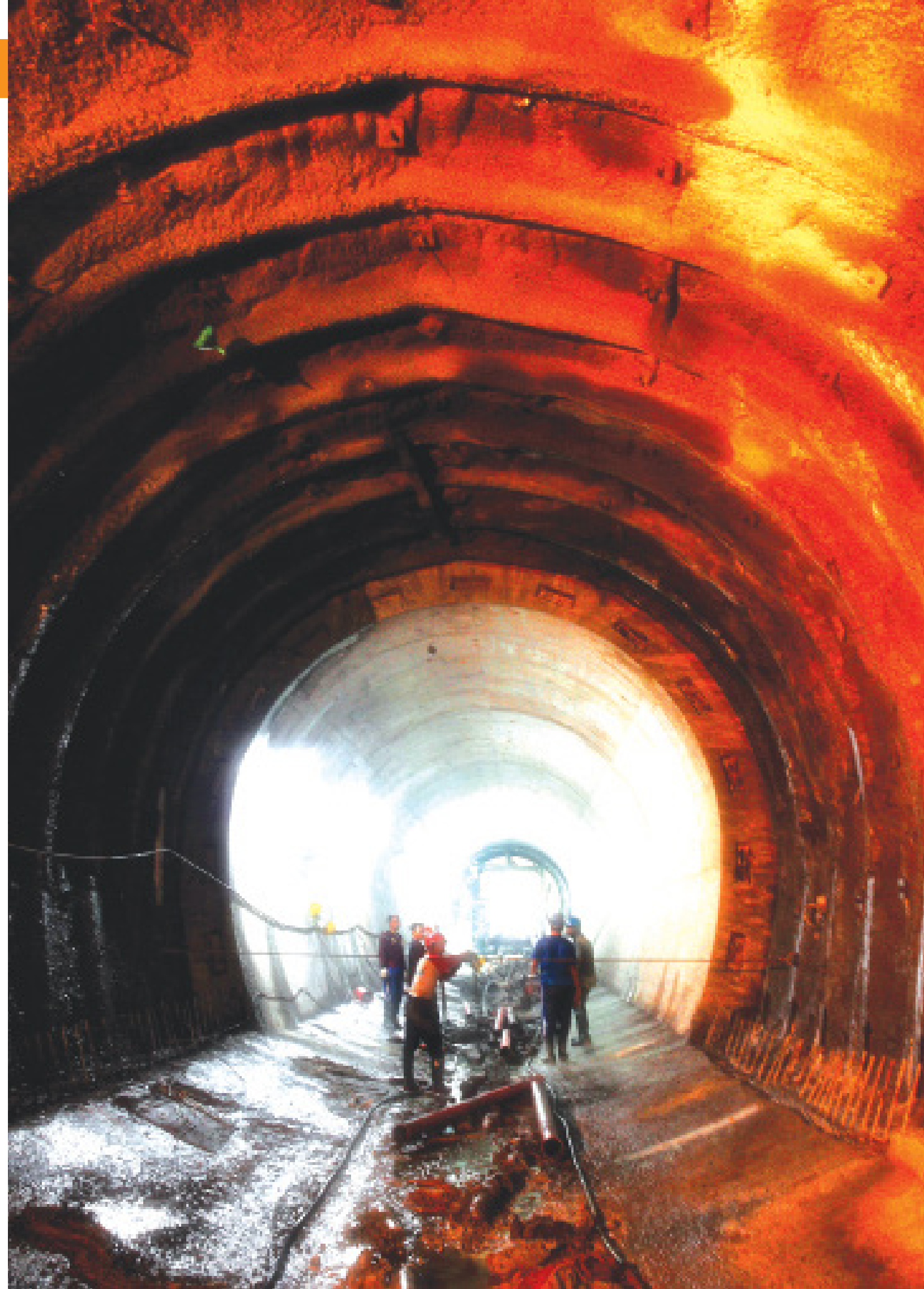
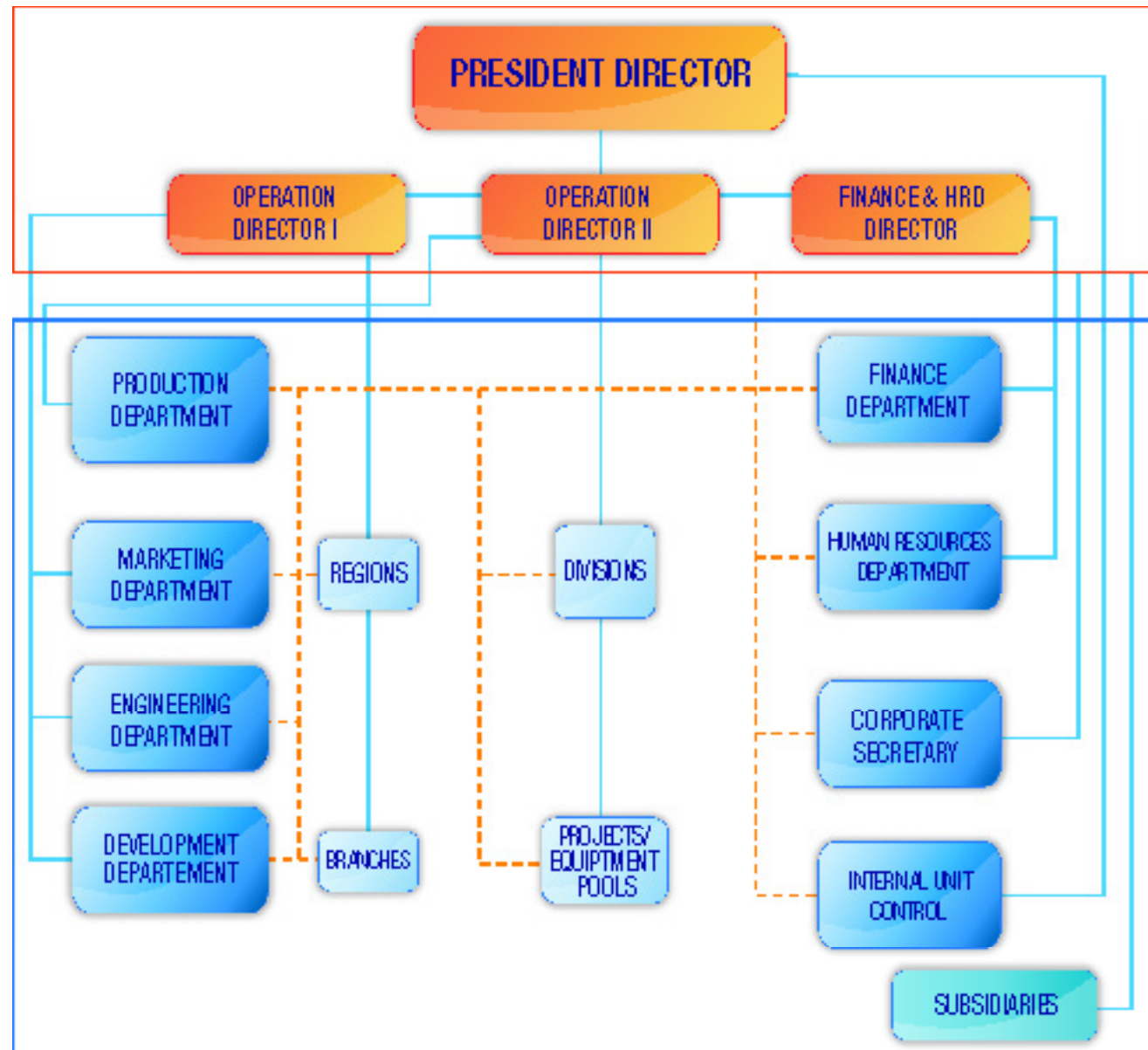
In 2011, in facing the improvement and the upcoming challenge which is getting complicated, the management created a strategy step. It was actualized by performing a business diversification, i.e. in the field of PLTM investment and establishing subsidiary named "Brantas Energi".





Struktur Organisasi

Organization Structure



VISI, MISI, MOTTO, BUDAYA

1. Visi

"Menjadi perusahaan terpercaya dalam industri konstruksi"

Artinya :

1. Memiliki segala persyaratan profesional yang memadai.
2. Dalam 5 (lima) tahun ke depan mampu menjadi 5 (lima) besar perusahaan konstruksi nasional.

2. Misi

"Menyediakan produk konstruksi bernutu tinggi secara profesional dan berkelanjutan."

Artinya :

1. Memberikan produk yang bersaing dalam hal harga, mutu, pelayanan dan ramah terhadap lingkungan serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Bekerja secara efisien menurut standar yang unggul dan diakui secara internasional (ISO, OHSAS, SMK3, SNI, COSO, MBCIPE, dll).
3. Selalu menjaga hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder.

VISION, MISSION, MOTTO, CULTURE

1. Vision

"To be a reliable company in the construction industry"

It shall mean:

1. To have all professional requirements
2. Within the next 5 (five) years, to become one of the five (5) major national construction companies.

2. Mission

"To provide high quality construction products in a professional and sustainable manner."

It shall mean:

1. To provide competitive products in terms of price, quality, service and environmental friendly and prioritize the occupational health and safety
2. To efficiently work in accordance with superior and internationally recognized standards (ISO, OHSAS, SMK3, SNI, COSO, MBCIPE, etc.)
3. To continuously maintain a good relationship with all stakeholders.

3. Nilai Budaya

a. Entrepreneurship

"Dalam setiap tindakan memperimbangan untung rugi bagi Perusahaan, baik finansial maupun non finansial, risiko dan tanggung jawab terhadap para stakeholder."

b. Professionalism

"Jujur, kompak, team-work, mandiri, bekerja dengan standar yang unggul dan diakui secara internasional serta menjunjung tinggi etika profesi guna memenuhi harapan stakeholder".

c. Innovative

"Bekerja dengan konsep yang jelas, kreatif dalam menerapkan solusi baru yang lebih baik dalam hal input, proses, produk dan layanan untuk memberikan keuntungan bagi Perusahaan serta memuaskan pelanggan".

d. Competitive

"Tangguh, pantang menyerah dan ulet dalam mempertahankan dan meningkatkan eksistensi Perusahaan memenangkan

3. Cultural Values

a. Entrepreneurship

"In every action, it shall consider profit and loss of the Company, either financial or non-financial, risks and responsibilities to all stakeholders."

b. Professionalism

"Honest, unified, team-work, independent, work with superior and internationally recognized standards and highly regard the profession ethics to meet the stakeholders' expectation"

c. Innovative

"To work in a clear and creative concept in terms of applying a better new solution for the input, process, product and service to give profits for the Company and satisfy the customers"

d. Competitive

"Tough, persistence and determination in maintaining and improving the Company's existence to win

persaingan dalam industri konstruksi serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi Perusahaan."

Akronim untuk Nilai Budaya Perusahaan adalah :

EPIC

4. Motto

"Spirit for giving the best"

the competition in the construction industry and provide the best added value for the Company."

Acronym for the Company's Cultural Value is :

EPIC

4. Motto

"Spirit for giving the best"



Profil Dewan Komisaris

The Board of Commissioner's Report



Eko Subekti
Komisaris
Commissioner

Ramli Ibrahim
Komisaris
Commissioner

Hedyanto W. Husaini
Komisaris Baru
President Commissioner

HR Adhy Duriat Soemono
Komisaris
Commissioner

Hedyanto W. Husaini
President Commissioner



Lahir di Bandung, 18 September 1956 menjabat sebagai komisaris utama PT.Brantas Abipraya (Persero) Sejak 2012, Saat ini beliau masih menjabat juga sebagai Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU. Lulus menjadi sarjana Teknik Sipil ITB Bandung tahun 1980 dan pendidikan pasca sarjana di Countruction Management Reliigh Reliigh lulus tahun 1990

Born in Bandung, 18th September 1956. He has been serving as the president commissioner of PT. Brantas Abipraya (Persero) since 2012. He is also currently serving as the Head of Construction Development Agency of the Ministry of Public Works. He obtained his bachelor degree in Civil Engineering from the ITB Bandung in 1980 and master degree in Construction Management from the Reliigh Reliigh in 1990.

Ramli Ibrahim
Commissioner



Lahir di Sigli, 23 September 1951. Saat inimenjabat sebagai komisaris PT. Brantas Abipraya (Persero) sejak juni 2011. Seselumnya pada 2007-2009 mejabat sebagai Deputi Pengawasan Badan Pengawasan Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh & Nias. Lulus menjadi sarjana ekonomi dari Unsyiah pada 1978. Kemudian melanjutkan pendidikan magister manajemen agribisnis di Pasca Sarjana Pertanian Bogor lulus pada 1997.

Born in Sigli, 23rd September 1951. He is currently serving as the commissioner of PT. Brantas Abipraya (Persero). He has held the position from June 2011. He was previously serving as the Deputy of Supervision at the Rehabilitation and Reconstruction Supervising Agency of Aceh and Nias from 2007 to 2009. He obtained his bachelor degree in Economics from the Unsyiah in 1978. Then, he continued his education to the agribusiness management postgraduate programme in the Agricultural Postgraduate Programme in Bogor and graduated in 1997.



Eko Subekti
Commissioner

Lahir di Surabaya 28 April 1955 menjabat sebagai komisaris PT.Brantas Abipraya (Persero) Sejak Juni 2011, Saat ini beliau masih menjabat juga sebagai Direktur bina program Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU. Lulus menjadi sarjana hidroteknik dari ITS Surabaya tahun 1979 dan pendidikan pasca sarjana di Univesitas DELFT Belanda lulus tahun 1984

Born in Surabaya, 28th April 1955. He has been serving as the commissioner of PT. Brantas Abipraya (Persero) since June 2011. He is also currently serving as the Director of Programme Development at the Directorate General of Water Resources of the Ministry of Public Works. He obtained his bachelor degree in Hydroengineering from the ITS Surabaya in 1979 and master degree from the DELFT University, Netherland in 1984.



Adhy Duriat Soemono
Commissioner

Lahir di Semarang 6 Januari 1951. Saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Brantas abipraya (Persero) SEJAK JUNI 2011. Sebelumnya pernah menjabat sebagai direktur Logistik Deputy Logistik dan Peralatan Badan Penanggulangan Bencana (BNPB). Lulus mejadi sarjana teknik sipil dari Institut Teknologi Bandung Pada 1978. Pendidikan pasca sarjana Land & Water Depelopment IHE Delf, Belanda lulus pada 1982.

Born in Semarang, 6th January 1951. He is currently serving as the commissioner of PT. Brantas Abipraya (Persero). He has held the position since June 2011. He was previously holding a position as a Logistic director at the Deputy of Logistics and Equipment of the Indonesian National Board for Disaster Management (BNPB – Badan Nasional Penanggulangan Bencana). He obtained his bachelor degree in Civil Engineering from the Institut Teknologi Bandung (Bandung Technological Institute) in 1978 and master degree in Land & Water Development from IHE Delf, Netherland in 1982.

Profil Dewan Direksi

The Board of Direction Report



Ekodjati Tunggulgeni
Direktur Operasi II

Bambang E. Marsono
Direktur Utama

C. Thomas Pangaribuan
Direktur Operasi I

Sukarno Jososaputro
Direktur Keuangan dan SDM



Bambang E. Marsono President Director

Lahir di Cilacap, 15 September 1953. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) sejak 20 Juni 2011. Sebelumnya menduduki posisi Direktur Pemasaran PT Waskita Karya (Persero). Lulus menjadi sarjana teknik sipil dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1979. Kemudian melanjutkan pendidikan magister di Institute Manajemen Prasetya Mulya dan lulus pada tahun 1995. Kini sedang menyelesaikan program doktor di Universitas Negeri Jakarta.

Born in Cilacap, 15th September 1953. He is currently serving as the President Director of PT. Brantas Abipraya (Persero). He has held the position since 20th June 2011. He was previously holding a position as the Marketing Director at PT. Waskita Karya (Persero). He obtained his bachelor degree in Civil Engineering from the University of Gadjah Mada in 1979 and master degree from the Prasetya Mulya Management Institute in 1995. He is currently completing his doctoral study at the State University of Jakarta.



C. Thomas Pangaribuan Operational Director I

Lahir di Medan, 23 Februari 1960. Saat ini menjabat sebagai Direktur Operasi I PT Brantas Abipraya (Persero) sejak tahun 2004. Sebelumnya menduduki posisi Direktur Pemasaran PT Brantas Abipraya (Persero). Lulus menjadi sarjana teknik sipil dari ITN Malang. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen Universitas Islam Sumatera Utara dan Lulus Pada tahun 2003.

Born in Medan, 23rd February 1960. He is currently serving as the Operational I Director of PT. Brantas Abipraya (Persero). He has held the position since 2004. He was previously holding a position as the Marketing Director at PT. Brantas Abipraya (Persero). He obtained his bachelor degree in Civil Engineering from the ITN Malang and master degree in Management from the Islamic University of North Sumatera in 2003.



Ekodjati Tunggulgeni Operational Director II

Lahir di Jember, 24 Desember 1963. Saat ini menjabat sebagai Direktur Operasi II PT Brantas Abipraya (Persero) sejak Juni 2011. Sebelumnya menduduki posisi Kepala Divisi Produksi I PT Brantas Abipraya (Persero). Lulus menjadi sarjana teknik pengairan dari Universitas Brawijaya pada tahun 1988. Kemudian melanjutkan pendidikan magister teknik di Universitas Tarumanegara dan lulus pada tahun 2006.

Born in Jember, 24th December 1963. He is currently serving as the Operational II Director of PT. Brantas Abipraya (Persero). He has held the position since June 2011. He was previously holding a position as the Head of Production I Division at PT. Brantas Abipraya (Persero). He obtained his bachelor degree in Water Engineering from the University of Brawijaya in 1988 and master degree in Engineering from the Tarumanegara University in 2006.



Sukarno Jososaputra HRD & Finance Director

Lahir di Karanganyar, 22 November 1952. Saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan & SDM PT Brantas Abipraya (Persero) sejak Juni 2004. Sebelumnya menduduki posisi General Manager Keuangan PT Wijaya Karya (Persero). Lulus menjadi sarjana ekonomi manajemen dari Universitas Satya Negara Indonesia.

Kemudian melanjutkan pendidikan Business Administration New Port University School of Business Administration - California

Born in Karanganyar, 22nd November 1952. He is currently serving as the Financial & Human Resources Director of PT. Brantas Abipraya (Persero). He has held the position since June 2004. He was previously holding a position as the Financial General Manager at PT. Wijaya Karya (Persero). He obtained his bachelor degree in Management from the University of Satya Negara Indonesia and master degree in Business Administration from the New Port University, School of Business Administration - California.

Profil Pejabat 1 Tingkat Di Bawah Direksi

The Board Director's Profile

Kantor Pusat

Head Offices

NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
Prawinto Aji	Sekretaris Perusahaan	Sekretariat Perusahaan
Subardjono	Kepala SPI	Satuan Pengawasan Intern
Nurtjahja	General Manager	Departemen Pemasaran
Pramono	General Manager	Departemen Teknik
Aman Prayogo	General Manager	Departemen Pengembangan
Sugeng Rochadi	General Manager	Departemen Produksi
Tumpang	General Manager	Departemen Keuangan
Sudiwantoko	General Manager	Departemen Sumberdaya Manusia

Kantor Divisi

Division Offices

NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
Dwi Indayani	Kepala Divisi	Divisi I
Syarif	Kepala Divisi	Divisi II
Soekarno	Kepala Divisi	Divisi III
Agustinus Sudradjat	Kepala Divisi	Divisi Peralatan

Kantor Wilayah

Regional Offices

NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
Agus Subiyantoro	Kepala Wilayah	Wilayah I, Medan
Nurtjahja	Kepala Wilayah	Wilayah II, Jakarta
Dandung Pamularno	Kepala Wilayah	Wilayah III, Surabaya
Herman Dwi Haryanto	Kepala Wilayah	Wilayah IV, Makassar
Yusup Wibisono	Kepala Wilayah	Wilayah V, Samarinda

Anak Perusahaan

Subsidiaries

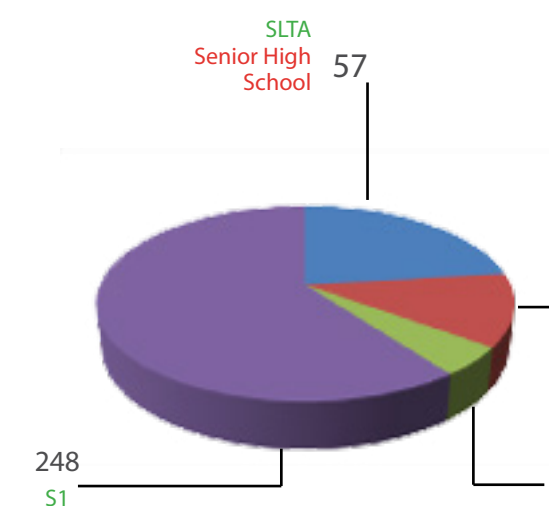
NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
Sutjipto	Direktur Utama	PT Brantas Energi
Sunarko Ambarmojo	Direktur	PT Brantas Energi

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

Sumber daya manusia di PT Brantas Abipraya (Persero) dapat digambarkan dalam berbagai komposisi. Jumlah karyawan hingga akhir 2013 adalah 357 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

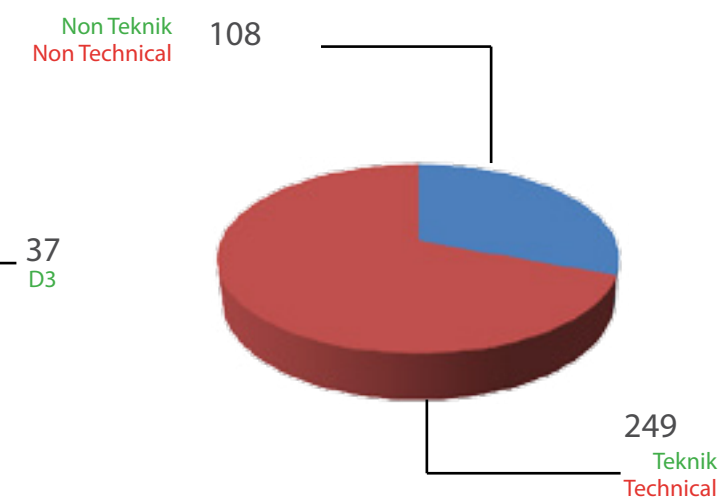
Human resources of PT Brantas Abipraya (Persero) can be elaborated in various compositions. Total employees up to the end of 2011 are 296 people with the following composition here of:



Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Employee Composition Based on Education Background

Menurut Kompetensi	Jumlah Total	Based On Competence
S2	15	S2
S1	248	S1
D3	37	D3
SLTA	57	Senior High School
JUMLAH	357	TOTAL

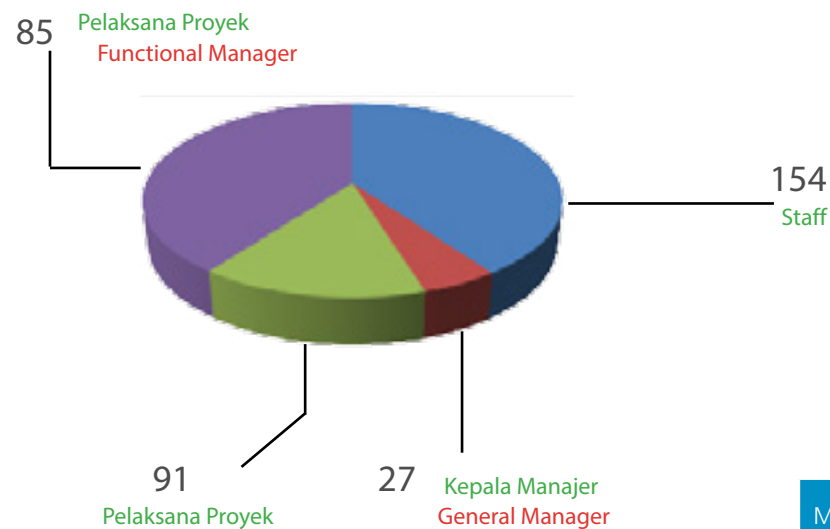


Komposisi Karyawan Berdasarkan Bidang Employee Composition Based on Field

Menurut Kompetensi	Jumlah Total	Based On Competence
Teknik	249	Technical
Non Teknik	108	Non technical
Jumlah	357	Total

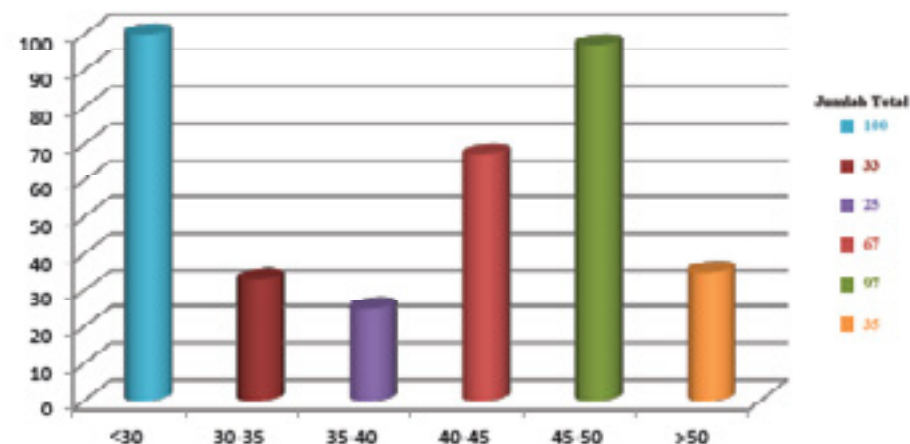
Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi
Employee Composition Based on Organization Level

Menurut Jenjang Manajemen	Jumlah Total	Based On Management Level
General Manager	27	General Manager
Functional Manager	85	Functional Manager
Supervisor	91	Supervisor
Staff	154	Staff
Jumlah	357	Total



Komposisi Karyawan Berdasarkan Kelompok Usia
Employee Composition Based on Age

Menurut Jenjang Usia	Jumlah Total	Based on Age
> 50	35	> 50
45 - 50 tahun	97	45 - 50 years
40 - 45 tahun	67	40 - 45 years
35 - 40 tahun	25	35 - 40 years
30 - 35 tahun	33	30 - 35 years
< 30 tahun	100	< 30 years
Jumlah	357	Total



Sumber Daya Manusia

Human Resources

Sumber Daya Manusia, merupakan salah satu aset yang terpenting bagi Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan telah menyusun program peningkatan Sumber Daya Manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen SDM, pelatihan dan pengembangan pegawai, serta penugasan pegawai dalam pengambilan gelar S2 baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri.

Dalam sistem remunerasi pegawai, secara konsisten Perseroan melakukan penilaian karya pegawai setiap tahun. Penilaian tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan grade setiap pegawai secara tepat dan adil, sehingga pegawai merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi Perseroan. Di samping itu, penerapan reward & punishment juga dijalankan, baik terhadap pegawai secara individu maupun kepada kelompok kerja. Bagi yang memberikan kinerja yang luar biasa, diberikan apresiasi dengan kenaikan grade maupun bentuk lainnya, sedangkan bagi yang menyumbang kinerja kurang, juga diberikan sanksi baik melalui penurunan grade maupun bentuk lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The Human Resources constitute one of the important assets for the Company. Hence, the Company has composed an improvement program for the Human Resources in terms of quantity or quality. The quality improvement and HR competency are carried out by developing the Information System on HR Management, training and employee development as well as employee assignment in taking the title of Post-Degree either carried out in the home country or in Overseas.

In the employment remuneration system, the Company consistently conducts an employment assessment every year. Such assessment is used as a basic to determine grade for each employee in a right and fair manner so that the employees are motivated to give their best effort for the Company. In addition thereto, an application for reward and punishment are also performed either towards the employee individually or to the working unit. For those giving a remarkable performance are awarded an appreciation by increasing grade or any other form whatsoever, meanwhile, for those contributing a less performance, they are also imposed a sanction in the form of decreasing grade or any other form whatsoever in accordance with applicable provision.

PT Brantas Abipraya (Persero) adalah perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan belum mencatatkan sahamnya di pasar modal. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Tjipto Pranowo, SH., pada Pasal 4 menyebutkan sebagai berikut:

1. Modal dasar perseroan berjumlah sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar) yang terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,-
2. Dari modal tersebut telah ditempatkan/diambil bagian dan telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 10.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp 10.000.000.000,-
3. 100% dari nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas atau seluruhnya berjumlah Rp 40.000.000.000,- telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia ke dalam kas perseroan, dengan cara sebagai berikut:
 - Sebesar Rp 10.000.000.000,- telah ditempatkan dan disetor dengan uang tunai sebagai setoran modal lama
 - Modal dalam portepel Rp 30.000.000.000
4. Penyertaan Modal Pemerintah
Penyertaan modal Negara sebesar Rp 151,554,480,000 berupa tanah Kementerian Pekerjaan Umum seluas 24.464 m² yang terletak di Jl. Yos Sudarso Jakarta Utara sesuai dengan surat Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum No.TN.01.11. Ka.PBMN/751 tanggal 4 Maret 2010 perihal Penyertaan Modal Negara atas Tanah Kementerian Pekerjaan Umum kepada PT Brantas Abipraya (Persero).

PT Brantas Abipraya (Persero) is the company whose shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia and its share has not been registered in the capital market. Amendment to the Company's Articles of Association under Notarial Deed Number 15 dated August 12, 2008 drawn up before Notary Nanda Tjipto Pranowo, SH, whereby in Article 4 states as follows;

1. Authorized capital of the company totaling Rp 40,000,000,000,- (forty billion) divided into 40,000 (forty thousand) shares, each at the face value Rp 1,000,000,-
2. Of the said capital has been subscribed/taken up its division and fully paid up by the State of the Republic of Indonesia worth Rp 10,000 shares or entirely Rp 10,000,000,000,-
3. 100% of the face value of each share has been subscribed abovementioned or entirely Rp 40,000,000,000,- has been fully paid up by the State of the Republic of Indonesia
 - Rp 10,000,000,000,- has been subscribed and paid up by cash as a payment for previous capital.
 - Capital in the portfolio Rp 30,000,000,000,-
4. State equity participation amounting to Rp 151,554,480,000 Ministry of Public Works as land measuring 24,464 m², located on Jl. ODOT North Jakarta in accordance with the letter of the Head of State Property Management of the Ministry of Public Works No.TN.01.11. Ka.PBMN/751 dated March 4, 2010 concerning the Investment of the Ministry of Public Works Land PT Brantas Abipraya (Limited).

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Brantas Abipraya (Persero), per 31 Desember 2011 nilai sebesar Rp 151,554,480,000 telah dimasukkan sebagai Penyertaan Modal Negara.

In accordance with the Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 63 Year 2010 dated August 24, 2010 The addition of the Investment of the Republic of Indonesia to the Company's Capital Stock (Persero) PT Brantas Abipraya, per December 31, 2011 amounting to Rp 151,554,480,000 was entered as the State Capital.



PERUSAHAAN AFILIASI

Affiliated Companies

Nama Name

PT. Brantas Energi

Bidang Usaha Business Fields

Investasi Hydroelectric Power Plant

Status Perusahaan Company Status

Swasta

Pemilik Owner

99 % dimiliki oleh PT Brantas Abipraya (Persero)

1 % Koperasi Karyawan

Tanggal Pendirian Date of Incorporation

12 Desember 2011

Dasar Hukum Pendirian Legal Bases of Incorporation

Akta No 6 Tahun 2011 Suparmin, SH, M. Kes

Susunan Perseroan Office Board

Komisaris Utama : Suyono

Sukarno Joso Saputro

Direktur Utama : Sutjipto

Direktur : Sunarko Ambarmojo

Kantor Pusat Head Office

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14, Cawang,
Jakarta Timur 13340

Telp : (021) 851 6290

Fax : (021) 851 6095

Email : bap@brantas-abipraya.com

www.brantas-abipraya.co.id





Regional and Branch Offices:

Head Office

Jl. D.I. Panjaitan Kav - 14
 Cawang, Jakarta Timur 13340
 Phone : (021) 851 6290
 Fax : (021) 851 6095
 Website : www.brantas-abipraya.com

Medan

Jl. Pabrik Tenun No. 66 A
 Phone : (061) 4529184
 Fax : (061) 4529184

Jakarta

Jl. D.I Panjaitan Kav -14
 Cawang, Jakarta 13340
 Phone : (021) 857 6633
 Fax : (021) 851 6095

Riau and Sumatra Barat

Jl. Nuri 21 Sukajadi
 Pekanbaru-Riau
 Phone : (0761) 205 97
 Fax : (0761) 205 97

Semarang

Perum Perwira Diponegoro VIII No. 90
 Banyumanik - Semarang
 Phone : (024) 746 6304
 Fax : (024) 746 6304

Palembang

Jl. Dwikora II / Jl. Pertiwi
 No. 1274 B Rt. 10 Palembang
 Phone : (0711) 369 928
 Fax : (0711) 369 928

Banjarmasin

Perumahan Citra Raya Angkasa Blok D No.
 9 Landasan Ulin, Banjar Baru 70724
 Phone : (0511) 705 865
 Fax : (0511) 705 865

Samarinda

Jl. Kebahagiaan No. 23 Samarinda
 Phone : (0541) 736 162
 Fax : (0541) 736 162

Makassar

Jl. Boulevard Blok A-3 No. 1
 Panakkukang Mas, Makasar 90114
 Phone : (0411) 454 490
 Fax : (0411) 441 840

Surabaya

Jl. Jemur Sari Utara II No. 32
 Surabaya 60237
 Phone : (031) 841 2335
 Fax : (031) 841 2335

Bali

Jl. Turi No.8 Kesiman, Denpasar Timur
 Phone : (0361) 228 501
 Fax : (0361) 228 501



PEMBAHASAN DAN ANALISA MANAJEMEN Management Discussion & Analysis

Rencana, Strategi & Program

Plans, Strategies and Programs

Prakiraan Situasi Dan Kondisi Umum Tahun 2013

Situasi Eksternal

Pertumbuhan ekonomi Indonesia > 6,3% tahun 2012, sehingga Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan nomor 2 di bawah China. Tahun 2013 diprediksi pertumbuhan 6,8% menunjukkan peningkatan ekonomi Indonesia berkelanjutan. Peningkatan RAPBN 2013 dengan program pembangunan infrastruktur ditingkatkan dan diperluas cakupannya. Dengan pertumbuhan yang demikian tinggi dan didukung stabilitas keamanan dan politik maka pasar swasta dipastikan semakin besaran banyaknya pemodal asing yang masuk Indonesia.

Kondisi Internal

Struktur keuangan perusahaan semakin baik, setara bertahap perusahaan sudah menjadi sehat, walaupun ekuitas perusahaan masih sangat kecil. Fasilitas perbankan baik NCL maupun CL cukup memadai, dengan demikian kebutuhan Modal Kerja dapat dipenuhi dari perbankan, lembaga keuangan maupun dari rekanan sub kontraktor maupun supplier yang mendukung kegiatan operasi perusahaan. Rencana pertumbuhan perusahaan yang berkesinambungan 5 tahun terakhir >30% pertahun, dalam tahun 2013 perusahaan harus membuat aspek pemasaran, produksi dan sumber daya.

a. Bidang Pemasaran

Reputasi perusahaan dalam membangun proyek-proyek sumber daya air tidak dapat tersaingi dari sesama BUMN karya, dalam tahun 2013 harus lebih hati-hati dan memiliki strategi yang jitu untuk memperoleh proyek-proyek yang memberi kontribusi/keuntungan bagus. Hal ini memperhatikan semangat pesaing untuk pasar ini tidak terbatas BUMN, swasta maupun perusahaan asing. Pengembangan pasar proyek-proyek Bina Marga, Cipta Karya masih perlu perjuangan keras, walaupun perusahaan secara bertahap sejak 2010 sudah masuk pasar ini dari kecil. Untuk masuk pasar di luar Kementerian PU, yaitu infrastruktur yang dibangun/dibiayai BUMN, Pemda, Swasta. Perusahaan harus berusaha ekstra keras dan berhati-hati baik swakelola maupun ber JO dengan pihak lain.

Forecast of the General Situation and Condition in 2013 External Situation

External Situation

The Indonesian economic growth in 2012 was > 6.3%. Thus, Indonesia was the 2nd growing country, under China. In 2013, it is predicted that the growth will be 6.8% and indicates the continuous Indonesian economic growth. The increase of the 2013 Draft of State Budget is reached by the improvement of an infrastructure development programme and the expansion of its coverage. By such high growth and supported by security and political stability, the private market is ensured to grow bigger and the number of foreign investors entering Indonesia should increase.

Internal Conditions

The company's financial structure is getting better and equal. Thus, gradually the company has become healthy even though the company's equity is still very small. Banking facilities, either NCL or CL, are sufficient. Therefore, the necessary Working Capital may be fulfilled from sub contractors or suppliers who support the company's operation. The company's continuous growth plan in the last 5 years is >30% per year. In 2013, the company must make marketing, production and resources aspects.

a. Marketing Sector

The company's reputation in constructing water resources projects cannot be taken down by the fellow karya State-Owned Enterprises. In 2013, it should be more careful and have an accurate strategy to get projects which may contribute to/give good profits. It considers the competitors' spirit for this market and does not limited to State-Owned Enterprises, private or foreign companies. The market development of Bina Marga (Highway Construction) and Cipta Karya (Human Settlements) projects should still be fought, even though the company has entered this market from a small step since 2010. In order to enter the market outside the Ministry of Public Works, i.e. infrastructures built/funded by State-Owned Enterprises, Local Governments, Private Sector, the Company must work hard and carefully, either independently managed or joint operation, with other party.

b. Bidang Produksi

Carry over tahun 2012 diperkirakan + Rp. 2,5 triliun yang harus diproduksi tahun 2013 + Rp. 1,4 triliun, diharapkan menjadi peluang untuk memproduksi sejak awal tahun.

Kendala dalam memproduksi tahun 2013 harus segera dapat diatasi diantaranya :

- Masalah sosial (pembebasan lahan, aspek teknis, aspek komunikasi & kesiapan sumberdaya perusahaan).
- Kemungkinan lambatnya proses perolehan kontrak baru
- Ketersediaan peralatan dan sub kontraktor di lokasi proyek yang terpencil khususnya proyek-proyek di luar Jawa.

Kesiapan sumberdaya setiap perolehan kontrak, dapat diantisipasi lebih awal sehingga perusahaan mampu menghasilkan proyek proyek sesuai kontrak yang ditandatangani.

c. Bidang Keuangan

Dengan meningkatnya ekuitas Perusahaan sejak 2011, kesempatan mendapatkan dukungan kredit modal kerja maupun fasilitas – fasilitas perbankan lainnya lebih terbuka, sehingga kekuatan finansial menjadi pendorong produksi tahun 2013.

Yang harus disikapi sejak awal tahun adalah pola belanja proyek dengan memperhatikan penyerapan/pembayaran termyn oleh pemberi kerja, oleh karena itu optimalisasi pemanfaatan fasilitas SKBDN & SCF dapat menekan beban bunga kredit.

Untuk memperbaiki struktur keuangan perusahaan khususnya kebutuhan investasi dan modal kerja jangka menengah, perusahaan berencana memperoleh tambahan modal kerja jangka panjang dalam bentuk obligasi atau bentuk lain dalam pasar modal.

d. Bidang Sumber Daya Manusia

Kuantitas SDM yang dirancang sesuai RJP 2009-2013 dirasakan kekurangannya sehubungan dengan pertumbuhan perusahaan & peluang pasar yang terbuka luas. Dari segi jumlah cukup untuk menghadapi target-target perusahaan tahun 2013. Namun karena masih kurang sesuai profil pendidikan dan profil kompetensi SDM terhadap tuntutan pekerjaan maka sumber daya manusia ini sangat terasa ketinggalan/ketimpangannya. Untuk menghadapi tuntutan pertumbuhan perusahaan, Recruitment pegawai baru untuk memperbaiki profil pendidikan dan profil kompetensi ini, telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2007, namun pegawai-pegawai baru tersebut baru siap menjadi kepala proyek setidaknya setelah 5 tahun untuk menutup kebutuhan SDM ditempuh rekrut pegawai yang berpengalaman .

b. Production Sector

The 2012 carry over is predicted to be +IDR2.5 trillion which must be produced in 2013 + IDR1.4 trillion and it is expected to be a chance to produce from the beginning of the year.

Hindrances to produce in 2013 shall be immediately addressed, among others:

- Social issues (land acquisition, technical aspects, communication aspects & preparedness of the company's resources)
- Possibility of the late new contract process
- Availability of equipment and sub-contractors at the remote project locations, especially projects outside Java Island.

The preparedness of resources of each contract acquisition may be anticipated earlier. Thus, the company may produce projects in accordance with the signed contract.

c. Financial Sector

By the increase of the Company's equity since 2011, a chance to get working capital or other banking facilities support will be bigger. Therefore, the financial strength should be the 2013 production booster.

A matter to be addressed from the beginning of the year is project expenses by considering term usage/payment by the employer. Thus, the SKBDN & SCF facility utilization may be optimized by suppress the credit interest.

In order to remedy the company's financial structure, especially the medium-term investment and working capital necessity, the company plans to get long-term working capital in the form of bonds or other forms in the capital market.

d. Human Resources Sector

The quantity of human resources designed according to the 2009-2013 RJP has some weaknesses in connection with the company's growth and widely opened market chance. The amount is sufficient to address the company's targets in 2013. However, due to the inappropriate educational and competence profile of the human resources to the work load, the human resources are considered to be left behind/unstable. In order to address the company's growth demand, the recruitment of new employees in order to remedy these educational and competence profiles, has been performed gradually since 2007. However, such new employees are only ready to be a head of a project in at least 5 years. In addition, in order to cover the necessity of human resources, experienced employees are recruited.



Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi juga selalu dilakukan. Menghadapi masalah ini secara simultan harus ditempuh pemanfaatan sub kontraktor untuk mendukung pencapaian target.

- e. Bidang Sumber Daya Alat
Alat-alat konstruksi yang dimiliki perusahaan sudah sangat tua. Namun dengan meningkatkan mitra usaha, sumber daya alat diyakini mampu mendukung target produksi tahun 2013. Peremajaan alat konstruksi juga sudah dimulai tahun 2007, namun karena keterbatasan likuiditas, maka investasi alat-alat baru sampai dengan tahun 2012 masih sangat terbatas.
- f. Bidang Strukur Organisasi dan Sistem
Struktur Organisasi dan sistem tata kelola yang ada saat ini masih sesuai dan mampu menjawab tantangan eksternal maupun pertumbuhan usaha. Saat ini Perusahaan telah menerapkan sistem manajemen ISO-9001:2000, OHSAS-18001:1999 dan SMK3, serta ISO 14000, dan semuanya telah bersertifikat. Disamping itu Perusahaan juga telah menerapkan prinsip – prinsip Good Corporate Governance (GCG), dan telah memiliki Board of Manual maupun Code Of Conduct sebagai pedoman penerapan GCG tersebut. Dalam rangka menilai penerapan prinsip – prinsip GCG ini, telah dilakukan assesment oleh pihak BPKP maupun BPK

Asumsi - Asumsi

RKAP tahun 2013 disusun berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2013 sebesar 6,8%
- b. Tingkat laju inflasi tahun 2013 sebesar 4,9 %
- c. Tingkat suku bunga kredit bank 10% per tahun
- d. Nilai tukar US Dollar terhadap rupiah berada pada kisaran Rp. 9.300 per US Dollar.
- e. Patokan harga BBM di tahun 2013 \$100/barrel.

The education and training to improve the competence are always held. In order to simultaneously address this problem, sub-contractors should be hired to support the target accomplishment.

- e. Equipment Resources Sector
Construction tools of the company are very old. However, by the increase of business partners, the equipment resources are believed to be able to support the 2013 production targets. The construction tools improvement has been commenced in 2007. However, due to the limited liquidity, the new tools investment is very limited up to 2012.
- f. Organizational Structure and System
The recent organization structure and management system are still appropriate and able to address external and business growth challenges. Currently, the Company has applied the management system of ISO-9001:2000, OHSAS-18001:1999 and SMK3, and ISO 14000. All management systems have been certified. In addition, the Company has also applied the Good Corporate Governance (GCG) principles, and had the Board of Manual and Code of Conduct as a guideline to apply such GCG. In order to assess the application of this GCG principles, an assessment by BPKP and BPK has been performed.

Assumptions

The 2013 Work Plan and Budget is arranged based on these following assumptions:

- a. The 2013 national economic growth rate is 6.8%.
- b. The 2013 inflation rate is 4.9%.
- c. The bank credit interest rate is 10% per annum.
- d. The exchange rate of US Dollar to Rupiah is around IDR9,300 per US Dollar.
- e. The fuel price reference in 2013 is \$100/barrel.

Strategi – Kebijakan Dan Program

Strategy, Policy and Program

Strategi Umum Perusahaan

General Strategy of the Company

Tahun 2010 adalah tahun pertama kali penjualan tembus

In 2010 was the first sale breaking through over Rp 1,000

Tender Activity During 2013

Tender Activity During 2013

NO.	URAIAN	2013	2012	2011	DESCRIPTION
1	Dimulai 2013	1.454.300,00	1.217.463,20	7.072.782,81	Attended
2	Diumumkan	1.295.420,00	9.885.154,20	6.989.662,08	Published
3	Dalam Proses / Belum diumumkan	3.312.000,00	2.485.290,00	883.477,05	Not Published
4	Dimenangkan	2.915.000,00	1.916.832,47	1.280.455,38	Win
5	% Kesuksesan	74,00	19,70	18,32	% Win
6	Padahan Kontrak Baru	3.431.220,00	2.353.260,10	1.605.110,00	New Deals
7	Tender	3.327.400,00	1.916.832,47	1.280.455,38	Tender
8	Tanpa tender	103.820,00	436.436,72	324.663,52	Without Tender

Deal Values In 2013

Deal Values In 2013

NO.	URAIAN	2013	2012	2011	DESCRIPTION
1	Kontrak Lama	2.508.770,00	1.707.040,02	1.866.547,32	Previous Deals
2	Kontrak Baru	3.431.220,00	2.353.260,10	1.605.110,00	New Deals
3	Jumlah	5.939.990	4.151.217,21	3.471.656,32	Total

Contract Deal per Segment

Contract Deal per Segment

NO.	URAIAN	2013	2012	2011	DESCRIPTION
1	Pengairan	3.601.922,58	1.250.793,63	1.061.654,15	Drainage
2	Jalan dan jembatan	948.218,02	250.533,54	294.656,80	Road and Bridges
3	Gedung/Bangunan	403.199,06	22.580,19	489.150,61	Building
4	Kelistrikan	330.933,82	274.234,66	403.116,02	Electricity
5	Lain lain	178.910,80		58.206,710	Others

Rencana, strategi & program

Plan, Strategies and Programs

diatas Rp 1000 miliar, dan Perusahaan berhasil membukukan laba bersih setelah pajak diatas target RKAP yaitu sebesar Rp 34 milyar dan berhasil mencapai tingkat kesehatan "Sehat AA". Tahun 2011, Perusahaan banyak sekali menghadapi kendala eksternal yang diluar kendali Perusahaan, antara lain pembebasan tanah yang belum selesai diproyek – proyek besar yang sudah dikontrak, design yang belum selesai

over IDR1000 billion, and the Company successfully gained net (after tax) profit over the Work Plan and Budget target, i.e. IDR34 billion and reached the healthy status of "AA Healthy". Meanwhile, in 2011, the Company frequently faced an external obstruction beyond the Company control, i.e. unfinished land exemption in the huge projects that was

NO.	URAIAN	2013	2012	2011	DESCRIPTION
1	Produksi dan Kontrak Baru	847.167,81	856.939,22	544.483,83	Production and New Deals
2	Proyek JO	197.161,08	481.023,66	315.218,98	JO Projects
3	Proyek Non JO	650.006,73	375.915,56	229.264,66	Non JO Projects
4	Produksi dan Kontrak Lama	1.386.973,35	813.662,14	587.844,11	Production and Previous Deals
5	Proyek JO	595.724,68	442.383,43	380.658,07	JO Projects
6	Proyek Non JO	791.248,67	371.278,70	199.186,04	Non JO Projects
7	JO Projects	792.885,76	923.407,08	695.877,05	
8	Non JO Projects	1.441.255,40	747.194,25	428.450,70	
9	Jumlah Total	2.234.141,16	1.670.601,36	1.132.327,76	Total Amount

pada proyek – proyek besar yang sudah dikontrak, serta terlambatnya tender proyek – proyek baru sampai akhir tahun. Akibat adanya kendala eksternal tersebut diatas maka Perusahaan hanya mampu mencapai volume penjualan sebesar Rp 824 miliar, jauh dibawah target RKAP, sehingga target laba setelah pajak juga tidak tercapai karena beban tetap yang harus ditanggung.

Dengan memperhatikan kinerja Perusahaan tahun 2011, situasi eksternal tahun 2012 yang diharapkan lebih kondusif, dan kondisi internal Perusahaan yang telah lebih sehat sebagaimana telah diuraikan di atas maka Perusahaan menetapkan strategi umum tahun 2012 yang belum beranjak dari strategi tahun sebelumnya yaitu "STABILISATION" dengan mengembalikan target – target Perusahaan pada alur RJPP. Dengan strategi ini Perusahaan akan lebih berkonsentrasi dalam membangun sumber daya Perusahaan, dan meningkatkan daya saing untuk menghadapi pertumbuhan usaha yang lebih besar ditahun-tahun yang akan datang.

under contract, unfinished design in the huge projects that was under contract, as well as delay on new project bid up to the end of year. Due to the foregoing external obstructions, the Company only reached the sales volume worth Rp 824 billion far below the RKAP target, therefore, the profit target after tax was not successfully attained since the permanent expenses had to be borne.

In observance of the Company performance 2011, and external situation of 2012 are expected more conducive and internal condition of the Company will be healthier as elaborated above, therefore, the Company defines a general strategy for 2012 which has not moved from the previous strategy namely "STABILIZATION" by returning the Company targets on the RJPP track. Along with such strategies, the Company is expected to concentrate more on developing the Company's resources and enhancing competitiveness to face a bigger business growth in the upcoming years.

Meskipun dalam penetapan target, Perusahaan mentargetkan penjualan tahun 2012 sebesar Rp. 1.55 triliun atau naik 87.95% dari prognosa tahun 2011 sebesar Rp. 824 milyar, tapi hal ini lebih dimaksudkan untuk menangkap peluang-peluang yang sedang terbuka, dan mengembalikan target – target Perusahaan pada alur RJPP.

Tinjauan Pencapaian Per Bidang

a. Bidang Pemasaran

Realisasi kegiatan tender diikuti dalam tahun 2012 tercapai 83,93 % dari target RKAP. Realisasi tender yang lebih kecil dibanding rencananya tersebut dikarenakan mundurnya jadwal pelaksanaan tender beberapa proyek ke tahun berikutnya. Persentase kemenangan dicapai sebesar 19,79 % dibanding RKAP sebesar 18,98 %.

b. Bidang Operasi / Produksi

Realisasi produksidalam tahun buku 2013 diuraikan pada tabel berikut:
Target produksi sebesar Rp. 1.900,00 milyar tercapai sebesar Rp. 1.670,60 milyar atau 87,93 %

Tidak tercapainya target produksi tersebut antara lain disebabkan oleh :

- Kontrak baru tahun 2013 sebagian besar baru diperoleh pada triwulan IV/2013, sehingga kesempatan untuk berproduksi di tahun 2013 sangat kecil,
- Musim penghujan tahun 2013 praktis terjadi sepanjang tahun dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi di beberapa lokasi proyek sehingga sangat mengganggu kecepatan produksi dan mengakibatkan juga naiknya biaya produksi.
- Pembebasan lahan di beberapa proyek besar belum berhasil diselesaikan, sehingga pekerjaan tidak/belum bisa dilaksanakan; misalnya Jalan masuk ke PLTA Cisokan, Bendungan Bintang Bano, Proyek Jabung dan lain - lain,
- Perubahan design proyek berlarut - larut, sehingga proyek tidak berproduksi misalnya Proyek PLTM Ciantem.

c. Bidang Teknologi / Peralatan Produksi

Kegiatan pada bidang teknologi pada tahun 2013 ini difokuskan pada perbaikan dan penyempurnaan teknologi produksi (metode konstruksi) yang telah dimiliki perusahaan.

Even though, in the target determination, the Company has target for the 2012 sales worth Rp 1.55 trillion or increases 87.95% of the 2011 prognosa worth Rp 824 billion, however, it is intended to catch opened opportunities and to return the Company's targets on the RJPP track.

Per Sector Strategy

a. Marketing

Realization of tender activity followed in the year 2012 reached 83.93% of the target CBP. Realization tender smaller than planned due to delays in the implementation of several projects to tender next year. Achieved a winning percentage of 19.79% compared to 18.98% for CBP.

b. Operation/Production

Actual production in the 2013 financial year are outlined in the following table: Production target of Rp. 1900.00 billion reached Rp. 1670.60 billion or 87.93%

The production shortfall is caused by:

- New contract in 2013 most of the newly acquired IV/2013 quarter, so the opportunities for production in 2013 is very small,
- Rainy season in 2013 practically occurs throughout the year with rainfall intensity is very high in some locations so that the project is very disturbing production speed and also result in increased production costs.
- Land acquisition in several major projects have not been successfully resolved, so that the work does not / can not be implemented, for example Access to Cisokan hydropower, dam Star Bano, Project Jabung and others - others,
- Changes in project design drawn - so that the project does not produce such micro power projects Ciantem.

c. Technology / Production Equipment

Activities in the field of technology in 2013 is focused on improving and improving production technology

Pengembangan teknologi produksi dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan biaya yang lebih efisien dan meningkatkan kualitas hasil pekerjaan.

Biaya untuk kegiatan dibidang teknologi ini dibebankan langsung pada Biaya Produksi. Metode pelaksanaan yang telah disepakati/ditetapkan pada awal proyek, dalam perjalanan dilakukan review dan dilakukan inovasi agar meningkatkan kualitas produksi, menekan biaya dan menjaga mutu.

Investasi Peralatan produksi berupa peralatan proyek melakukan secara bertahap disesuaikan kemampuan perusahaan dan kebutuhan proyek yang dilaksanakan. Pemeliharaan peralatan dilakukan secara intensif, peralatan tua yang sudah tidak layak diprogramkan dijual/dihapuskan.

d. Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan yang dilakukan di tahun 2013 dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan antara lain :

- 1 Upaya diversifikasi usaha, dengan membentuk anak perusahaan bergerak dalam bidang Energy

NO.	URAIAN	2013	2012	2011	DESCRIPTION
1	Jumlah Pegawai Awal	322	294	284	Number of Employee
2	Penerimaan	49	42	30	Recruitment
3	Pengurangan	14	14	20	Turn Over
4	Jumlah Total	35	322	294	Total Amount

- 2 Membuat dan memperbaiki prosedur-prosedur, petunjuk-petunjuk kerja dan metode konstruksi.
- 3 Upaya pengembangan jasa konstruksi pengerukan dan drilling grouting.

Kegiatan pengembangan usaha difokuskan pada usaha membangun Hidro Power (renewable energy) sebagai investor. Sesuai usulan kepada pemegang saham, perusahaan memutuskan pengembangan investasi melalui anak perusahaan.

(construction method) which has owned the company. Development of production technology by companies to produce more cost efficient and improve the quality of the work.

Costs for this technology in the field of activity charged to Cost of Production. Implementation methods that have been agreed / defined at the beginning of the project, on the way to be reviewed and made innovations in order to improve production quality, reduce costs and maintain quality.

Production equipment in the form of equipment investment projects done gradually adjusted the company's ability and needs of projects implemented. Equipment maintenance is done intensively, old equipment is not feasible programmed sold / written off.

d. Research and Development

Activities carried out in the year 2013 in the field of Research and Development, among others:

- 1 Efforts to diversify the business, by establishing a subsidiary engaged in the Energy

- 2 Create and repair procedures, work instructions and method of construction.
- 3 Efforts to develop the dredging and construction services drilling grouting.

Business development activities focused on building Hydro Power (renewable energy) as an investor. Appropriate proposals to shareholders, the company decided to invest development through subsidiaries.

e. Bidang Logistik

Mengingat sebagian besar proyek-proyek yang ditangani berada di remote area, maka bidang logistik ini ditangani

NO.	URAIAN	UNIT	2013	2012	2011	DESCRIPTION
1	Jumlah Jam Pelatihan	jam	8.500,00	9.385,00	7.995,00	Number of Employee
2	Biaya Pendidikan dan Pelatihan	jam	2.500,00	1.710.567,10	1.682.103,96	Recruitment

langsung oleh proyek-proyek untuk material / sub kontraktor yang berada dekat lokasi proyek. Adapun Pengadaan yang terpusat dilakukan Kantor Pusat terbatas pada material - material industri yang nilainya besar seperti besi beton, semen, aspal dan lainnya, juga pengadaan sub kontraktor besar kelas nasional.

f. Bidang Manajemen Organisasi dan Sistem

Pada tahun 2013 ini Perusahaan terus menerus melakukan penyempurnaan organisasi sebagai pendukung pertumbuhan/perkembangan perusahaan. Restrukturisasi tersebut pada intinya adalah merupakan penyempurnaan sistem sentralisasi, pemisah fungsi Pemasaran dengan fungsi perasi/ Produksi, serta merampingkan organisasi, serta memperpendek birokrasi. Perbaikan dan pembaharuan sistem juga dilakukan di tahun 2013 ini antara lain ; Perkuatan organ pemasaran ditingkat pusat dan Wilayah / Cabang, perbaikan sistim manajemen proyek, perbaikan sistem manajemen ISO 9001 - 2000 dan pembaharuan sertifikat, penerapan sistem manajemen yaitu SMK3 dan OHSAS serta ISO 14001-2004. Disamping itu, dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG dan penerapan manajemen resiko perusahaan.

g. Bidang Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai tahun 2012 direncanakan sebanyak

e. Logistics

Considering most of the projects handled are in remote areas, the logistics are handled directly by the

projects for material / sub-contractors who are near the project site. The centralized procurement conducted Headquarters limited to material - great value industrial materials like iron concrete, cement, asphalt and other sub-contractors also supply large national class.

f. Organization and System Management

In 2013, the Company continuously improve the organization as a supporter of the growth / development of the company. The restructuring at its core is a centralized system refinement, separation functions with functions perasi Marketing / Production, as well as streamline the organization, as well as shortening the bureaucracy. Repair and renewal system is also carried out in the year 2013, among others; Strengthening national level marketing organ and Regional / Branch, project management system improvements, improved management system ISO 9001-2000 and renewal certificate, the application of the management system and OHSAS SMK3 and ISO 14001 - , 2004. In addition, in order to improve the application of the principles of good corporate governance and enterprise risk management implementation.

g. Human Resources

Planned number of employees in 2012 was 325 people,

325 orang, namun realisasinya sebanyak 322 orang atau 99,08% dari rencana. Rincian jumlah pegawai pada tabel berikut:

SDM tahun 2013 sebanyak 322 orang terdiri dari SDM yang berpendidikan teknik 224 (69,57%) orang dan non tehnik sejumlah 98 orang atau 30,43%. Realisasi jumlah pegawai tahun 2013 dibawah target RKAP 2013 sebanyak 325 orang. Jika dibandingkan kondisi pada akhir tahun 2012 jumlah pegawai tersebut mengalami kenaikan karena adanya rekrutmen tenaga sebanyak 42 orang. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga, perusahaan telah melakukan rekrutmen pegawai baru (fresh graduate) pada bulan Maret 2013, dan setelah dilakukan seleksi, calon pegawai terseleksi sebanyak 26 orang.

Untuk meningkatkan kualitas SDM, PT Brantas Abipraya telah mengintensifkan program pelatihan seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Program pelatihan yang dilaksanakan masih meliputi pelatihan untuk sertifikasi dan pelatihan untuk penunjang keahlian pegawai dan peningkatan kompetensi guna menunjang operasional/kegiatan usaha perusahaan.

h. Bidang Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern dalam tahun 2013 ini telah melaksanakan objek audit seperti tabel berikut:

i. Bidang Keuangan dan Akuntansi

Meningkatkan ketersediaan modal kerja yang bersumber dari dalam perusahaan (percepatan termin, dan penjualan aset-aset tidak produktif) dan sumber ekstern (kredit bank, supplier) serta meningkatkan pengendalian pembelanjaan proyek, BAU dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Menyempurnakan sistem akuntansi sesuai prinsip-prinsip standar akuntansi, dan mengintegrasikannya dalam program IISCS.

Melaksanakan sistem perpajakan dan selalu mengikuti perkembangan / peraturan perpajakan untuk menghindari kerugian akibat pajak.

j. Bidang Investasi

Investasi dilakukan dengan pertimbangan yang sangat berhati-hati, hanya untuk hal-hal yang benar-benar menguntungkan perusahaan dan dengan mempertimbangkan cash flow perusahaan

but its realization as many as 322 people or 99.08% of the plan.

Details of the number of employees in the following table:

HR in 2013 as many as 322 people consisting of 224 human resources engineering education (69.57%) and non-technical people some 98 people or 30.43%. Realization of the number of employees in 2013 under the CBP 2013 as many as 325 targets everyone. If compared conditions at the end of 2012 the number of employees has increased due to recruitment as many as 42 people. To meet the power requirements, the company has a new recruit employees (fresh graduate) in March 2013, and after the selection, prospective employees selected 26 persons.

To improve the quality of human resources, PT Brantas Abipraya has intensified its training program as shown in the table below: Implemented training programs still include training for certification and training to support employee skills and competencies to support an increase in operational / business activities..

h. Intern Supervision

Intern Supervision Unit in 2013 has been implementing audit objects such as the following table:

i. Finance and Accounting

Improve the availability of working capital is sourced from within the company (acceleration terms, and the sale of non-productive assets) and external sources (bank loans, suppliers) as well as improve control spending projects, BAU and other expenses. Improving the accounting system according to the principles of accounting standards, and integrate it in IISCS program.

Implement the taxation system and keeping / tax laws to avoid losses due to taxes.

j. Investment

Investments are made with consideration to be very careful, only for things that actually benefit the company and taking into account the company's cash flow

Tinjauan Industri

Industrial Overview

Tinjauan Industri Industry Overview

Setelah krisis keuangan global yang melanda dunia menjelang akhir tahun 2008, tren pertumbuhan ekonomi dunia mulai merambat naik sepanjang tahun 2009. Meskipun beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Eropa belum menunjukkan pemulihan ekonomi yang bermakna, beberapa negara seperti China dan India serta negara-negara kawasan ASEAN telah memperlihatkan pertumbuhan yang mulai membaik.

Gambaran ekonomi berbagai kawasan di dunia pada tahun 2012 menunjukkan indikasi perlambatan ekonomi global. Krisis utang yang membelit perekonomian di kawasan Eropa dan permasalahan fiskal yang dihadapi Amerika Serikat menjadi faktor penyebab tertahannya ekspansi ekonomi global dan menimbulkan gejolak di pasar keuangan global. Kuatnya indikasi perlambatan ekonomi global mendorong proses lambatnya tekanan inflasi. Seiring dengan meningkatnya risiko perlambatan ekonomi global, laju pengetatan kebijakan moneter di negara berkembang mulai tertahan, sementara kebijakan moneter di negara maju masih cenderung akomodatif untuk menopang aktivitas perekonomian.

Meskipun demikian kondisi ekonomi negara Asia secara umum tetap menunjukkan hasil positif meskipun ada sedikit perlambatan. Perlambatan terjadi pada negara-negara Asia dengan penggerak ekonomi didominasi oleh ekspor, khususnya ke negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat. Potensi krisis yang lebih besar

After the global monetary crisis near the closing of 2008, the world's trend of economic growth started to bounce back during 2009. Nonetheless, such top achievers as the US and Europe have not yet shown any significant rebounds, other powers like China and India, followed with southeastern neighbors have actually waved a good sign of growth.

Economic overview in many parts of the world in 2012 showed an indication of global economic slowdown. The debt crisis that struck European economy and the fiscal faced by the United States impeded the global economic expansion and caused turmoil in the global financial markets. Strong evidence of slowdown affected a slow process of inflation pressure. In line with the increased risk of a global economic slowdown, the pace of monetary tightening in developing countries began to hold back, while monetary policy in advanced economies tended to remain accommodative to support economic activity.

Nonetheless, economic conditions in general, Asian countries continued to show positivity in the face of slight slowdown. The slowdown occurred in Asian countries whose economic locomotives were dominated by exports, especially to the developed countries like Europe and the United States. The potential for an even greater crisis than the global



dari pasar keuangan global juga sempat membuat khawatir investor di Indonesia, baik dalam pasar modal maupun pasar uang.

Akan tetapi dengan besarnya ekonomi domestik dan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto yang rendah, Indonesia relatif paling sedikit terkena dampak apabila terjadi krisis ekonomi global. Dengan dukungan stabilitas makro dan sistem keuangan yang terjaga, kinerja perekonomian Indonesia selama tahun 2011 masih cukup baik. Pertumbuhan ekonomi di Triwulan IV – 2011 tumbuh sebesar 6,5% dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat cenderung menguat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, industri konstruksi juga mencatat kinerja yang cukup menggembirakan di tahun 2011, dalam semester pertama sektor konstruksi menorehkan kinerja yang baik, ditandai dgn kenaikan pendapatan sebesar 37,45 % dari Rp 512,10 miliar di tahun 2010 menjadi Rp 703,80 miliar di tahun 2011.

Pertumbuhan paling spektakuler terjadi pada proyek jalan/jembatan, pendapatannya melompat hingga 455,80 % untuk kontrak lama dan 567,55 % untuk kontrak baru. Lompatan yang sangat menggembirakan setelah mengalami penurunan di tahun 2010.

Proyek pengairan membukukan kenaikan 20,61 % di kontrak lama dan 14,92 % di kontrak baru, sementara kelistrikan mencatatkan kenaikan 3,17 % di kontrak lama. Pendapatan proyek - proyek kerjasama operasi KSO atau Joint Operasi tahun 2011 naik 37,05 % dibanding tahun 2010. Berdasarkan total pendapatan, kontribusi terbesar berasal dari proyek pengairan yang mencapai 67,39 % dari total pendapatan di luar proyek Joint Operation atau mencapai Rp 474,31 miliar. Sedangkan dari total pendapatan (termasuk JO) mencapai 41,89 %.

Kenaikan pendapatan tsb menunjukkan masih

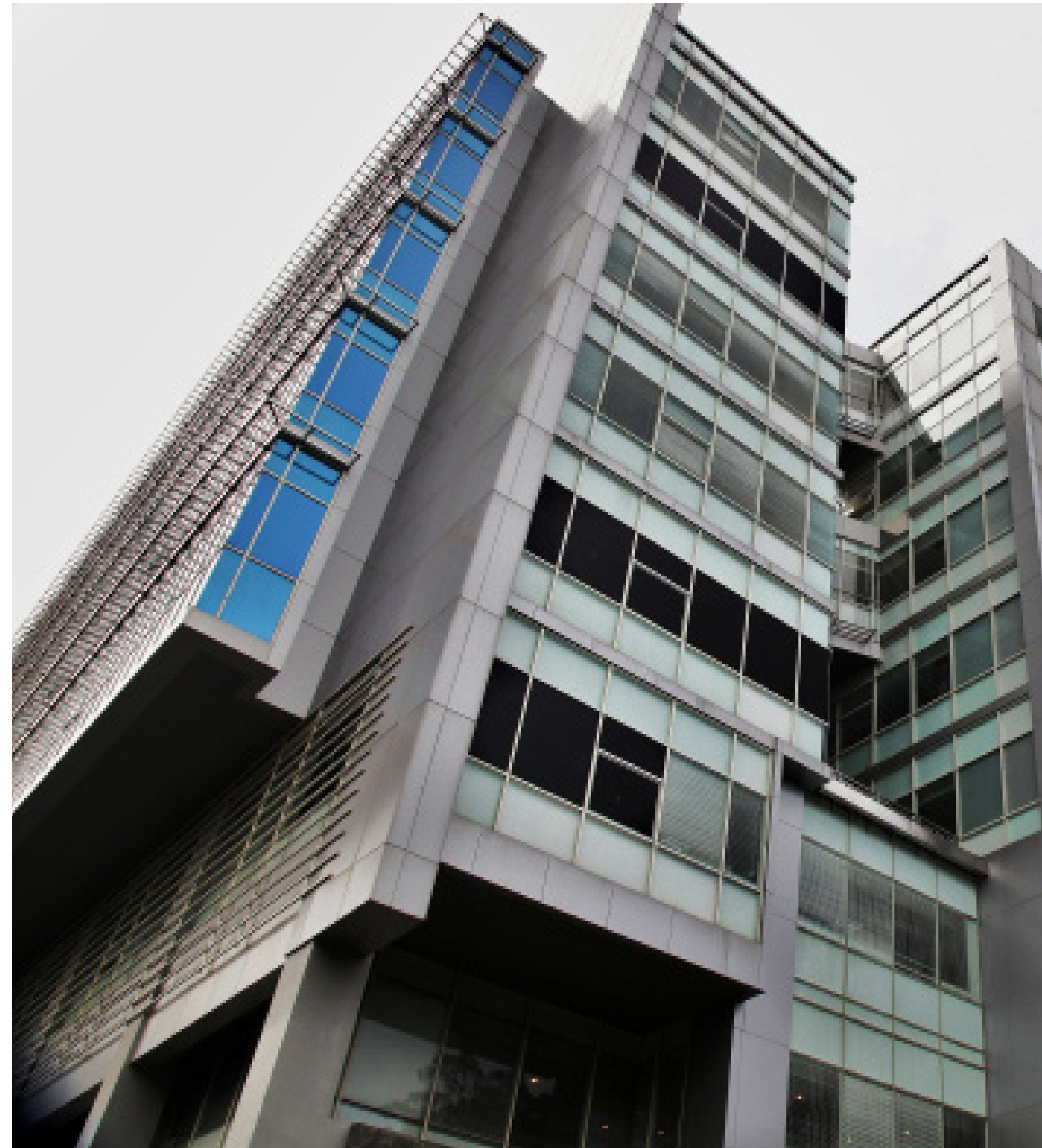
financial markets had also alarmed investors in Indonesia, both in the capital and money markets.

However, given the vast domestic economy and low ratio of debt against gross domestic product, Indonesia is relatively the least affected in any event of global economic crisis. Given the support of macro stability and a maintained financial system, Indonesia's economic performance during 2011 remained outstanding. Economic growth in the fourth Quarter - 2011 rose by 6.5% and the exchange rate against the US dollar was strengthened. Given the Indonesia's economic growth, the construction industry also stroke promising performance in 2011, in the first half of the construction sector recorded a well performance, marked with 37.45% revenue increase from Rp 512.10 billion in 2010 to Rp 703.80 billion in 2011.

The most impressive growth occurred to roads/bridges projects, whose revenue bounced by 455.80% for old contract and to 567.55 for the new contract, an enormous rebound after a decline in 2010.

Irrigation projects hit a 20.61% rise in the old contract, and 14.92% in the new contract, while electricity recorded a 3.17% increase in the old contract. The Joint Operation projects' revenues in 2011 increased by 37.05% compared to that in 2010. Referring to the total revenues, the largest contribution was from the irrigation project, reaching 67.39% of the total project revenues other than the Joint Operations or Rp 474.31 billion. In the meantime, the total revenue (including JO) reached 41.89%.

Such revenue increase shows how huge the construction



Analisa Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

luasnya pangsa pasar konstruksi yang memungkinkan perkembangan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Diharapkan pertumbuhan konstruksi bisa menjadi penggerak perekonomian Indonesia. Pertumbuhan rata-rata industri konstruksi di Indonesia sebesar 13,71%, trend positif tersebut bisa dikatakan cukup memacu pergerakan ekonomi Indonesia.

Tinjauan Operasi

Operation Review

Seiring dengan pertumbuhan industri konstruksi di Indonesia, perolehan kontrak baru Brantas juga mengalami peningkatan yang cukup tajam di tahun 2013 yaitu sebesar Rp 3.431,22 miliar meningkat 31,41 % dibanding tahun 2012 sebesar Rp 2.353,27 miliar. Pendapatan (Produksi) di luar proyek JO juga meningkat 35,92 % dari Rp 923,41 miliar tahun 2012 menjadi Rp 1.441,25 miliar di tahun 2013. Sedangkan pendapatan (produksi) termasuk proyek JO meningkat Rp 1.670,60 miliar di tahun 2012 menjadi Rp 2.234,13 miliar di tahun 2013. Peningkatan pendapatan tersebut membawa dampak positif bagi pencapaian laba sebelum pajak di tahun 2013 sebesar Rp 109.34 miliar meningkat cukup signifikan yaitu 33.87 % dibanding tahun 2012 sebesar Rp 72,30 miliar.

Berdasarkan neraca dan laba rugi tahun 2013, tingkat kesehatan perusahaan sesuai dengan ketentuan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang dinyatakan dalam Surat Keputusan No KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 berada dalam kondisi Sehat (AAA) dengan nilai bobot 96. Kondisi tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2012 dengan bobot 93,75.

market is to enable a sustainable development year by year. It is hoped that the construction growth may inspire the Indonesian economy as a whole. The average growth of construction industry in Indonesia is 13,71%, which can be said to be sufficient to boost Indonesian economy.

Along with the growth of the construction industry in Indonesia, the acquisition of new contracts Brantas also experienced a sharp increase in 2013 amounting to Rp 3.431,22 billion, up 31,41% compared to the year 2012 amounted to USD 2.353,27 billion. Income (production) outside JO projects also increased 35,92% from Rp 923,41 billion in 2012 to Rp 1.441,25 billion in 2013. While income (production) including JO projects Rp 1.670,60 billion in 2012 to USD 2.234,13 billion in 2013. The increase in revenue is a positive impact on the achievement of pre-tax profit in 2013 amounted to Rp 109.34 billion, a significant increase is 33.87% compared to 2012 amounting to Rp 72,30 billion.

Based on the balance sheet and profit and loss in 2013, the health of the company in accordance with the provisions of the State Owned Enterprises Minister stated in Decree No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 to be in healthy condition (AAA) with a weight value of 96. The condition was slightly decreased compared to the year 2012 with a weight of 93,75.



Pemasaran

Marketing

Realisasi & RKAP Pemasaran Tahun 2013 & 2012

Realization & RKAP of Marketing in 2013 & 2012

Dalam jutaan rupiah

in million rupiah

NO.	Uraian	RKAP Tahun 2013	RKAP Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2012	Percentage to		Description
						% RKAP 2012	% Realization 2011	
1	Lelang yang diikuti	18.125.000,00	14.549.300,00	12.170.863,20	7.072.782,81	80,27	119,54	Tender followed
2	Lelang yang diumumkan	15.312.500,00	12.954.420,00	9.685.154,20	6.989.662,08	79,41	133,75	Tender announced
3	Lelang yang dimenangkan	2.915.000,00	3.237.400,00	1.916.832,47	1.280.455,38	111,06	168,89	Tender award
4	% Lelang yang dimenangkan	16,08 %	22,25 %	15,77 %	18,32 %	18,25	63,91	Tender award
5	Dalam Proses Belum Diumumkan	1.812.500,00	3.312.020,00	2.485.299,00	881.427,05	54,18	281,32	Without Tender
6	Perolehan Proyek Baru	3.000.000,00	3.431.220,00	2.353.269,19	1.605.119,00	113,18	146,61	New Projects Acquired

Realisasi perolehan Kontrak Baru tahun 2013 sebesar Rp. 3.431,22.19 juta atau mencapai 114,37% dari RKAP sebesar Rp.3.000.000,00 juta, dan naik dari realisasi tahun 2012 yang sebesar Rp. 2.353,26 juta atau 145,30 %.

Lelang Yang Dimenangkan tahun 2013 sebesar Rp. 3.237,40 juta atau mencapai 111,06 % dari RKAP sebesar Rp. 2.915,00 juta, dan naik sebesar Rp 1.320,57 juta atau 149,70% dari realisasi tahun 2012 yang sebesar Rp 1.916,83 juta.

Realization of New Contract acquisition in 2012 of Rp. 3.431,22.19 million or 114,37% from CBP reached Rp. 3.000.000,00 million, and up from the realization in 2012 that amounted to Rp. 2.353,26 million or 145,30%.

The gain on auction in 2013 Rp3.237,40 million, or 111,06 % of the CBP is Rp. 2.915,00 million, and an increase of Rp 1.320,57 million or 149.70% from the realization in 2012 that amounted to Rp 1.916,83 million.

Realisasi kegiatan tender diikuti dalam tahun 2013 tercapai 80,27 % dari target RKAP. Realisasi tender yang lebih kecil dibanding rencananya tersebut dikarenakan mundurnya jadwal pelaksanaan tender beberapa proyek ke tahun berikutnya. Persentase kemenangan dicapai sebesar 22,25 % dibanding RKAP sebesar 16,08 %.

Realization of tender activity followed in the year 2013 reached 80,27% of the target CBP. Realization tender smaller than planned due to delays in the implementation of several projects to tender next year. Achieved a winning percentage of 22,25% compared to 16,08 % for CBP.



Analisa Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Produksi

NO	URAIAN	2013	2012	2011	DESCRIPTION
1	Produksi dari Kontrak Baru	847.167,81	473.882,13	344.483,83	Production from New Deals
2	Proyek JO	197.161,08	371.278,70	315.218,98	JO Projects
3	Proyek Non JO	650.006,73	442.383,43	229.264,66	Non Jo Projects
4	Produksi dari Kontrak Lama	1.386.973,35	436.839,23	387.844,11	Production from Previous Deals
5	Proyek JO	595.724,68	375.915,58	380.658,07	JO Projects
6	Proyek Non JO	791.248,67	481.023,65	199.186,04	Non JO Projects
7	JO Projects	792.885,76	747.194,28	695.877,05	
8	Non JO Projects	1.441.255,40	923.407,08	428.450,70	
9	Jumlah Total	2.234.141,16	1.670.601,36	1.132.337,76	Total Amount

NO	URAIAN	2013	2012	2011	DESCRIPTION
1	Pengairan	1.387.390,22	1.250.793,03	1.061.054,15	Drainage
2	Jalan dan jembatan	442.354,75	250.533,54	294.656,80	Road and Bridges
3	Gedung/Bangunan	221.449,17	22.580,19	48.915,04	Building
4	Kelistrikan	153.041,77	278.294,66	403.116,02	Electricity
5	Lain-lain	23.855,65		58.206,710	Others
6	Jumlah Total	2.234.141,16	4.151.217,21	3.471.666,32	Jumlah Total



Realisasi Produksi tahun 2013 sebesar Rp 1.441,25 milyar atau mencapai 102,9 % dari RKAP tahun 2013 yang sebesar Rp 1.400,00 milyar, dan naik dari realisasi tahun 2012 sebesar Rp 923.407,25 juta atau 156,10 %, diluar realisasi produksi proyek-proyek kerja sama operasi (Joint Operation / JO) sebesar Rp 792,88 milyar. Sehingga total realisasi produksi tahun 2013 termasuk proyek-proyek JO sebesar Rp 2.234,13 milyar, dibawah RKAP tahun 2013 sebesar Rp 2.350.00 milyar atau hanya mencapai 95,10 % dari RKAP tahun 2013.

Tidak tercapainya Produksi / Pendapatan disebabkan : Kontrak baru tahun 2013 diperoleh pada triwulan keempat 2013 sehingga kesempatan untuk berproduksi sangat sempit. Musim penghujan tahun 2013 praktis terjadi sepanjang tahun dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi sehingga sangat mengganggu kecepatan produksi dan mengakibatkan juga naiknya biaya produksi.

Pembebasan lahan di beberapa proyek besar belum berhasil diselesaikan, sehingga pekerjaan tidak / belum bisa dilaksanakan, misalnya Jalan masuk ke Waduk Kuningan Bendungan Simbayat dan lain - lain

Realization of Production in 2013 amounted to Rp 1.441,25 million or reached 102,9% of the CBP in 2013 which amounted to Rp 1.400,00 million, and up from the realization in 2012 of Rp 923.407,25 million or 156,10%, beyond realization of projects production operation (Joint operation / JO) of Rp 792,88 million. So that the total actual production in 2013 including projects JO Rp 2.234,13 million, under CBP in 2013 of Rp 2.350.00 or 95,10 % of RKAP only reached in 2013.

Failure to achieve production / income due to: new contract in 2013 acquired in the fourth quarter of 2013, so the opportunity to produce very narrow. Rainy season in 2013 practically occurs throughout the year with rainfall intensity is so high that very disturbing production speed and also result in increased production costs.

Land acquisition in several major projects have not been successfully resolved, so that the work does not / can not be implemented, for example, Access to Reservoir Dam Simbayat Brass and others - others

Analisa Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Hasil Usaha

Realisasi & RKAP Laba / Rugi Tahun 2013 & 2012

Returns

Realization & RKAP for Profit/Loss in 2013 & 2012

NO.	Uraian	RKAP Tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2012	Persentase Terhadap		Description
					RKAP 2013	REALISASI 2012	
					%	%	
1	Pendapatan Usaha	1.400.000,00	1.441.255,40	923.407,08	71,03	131,19	Profit
2	Beban Langsung	1.259.300,00	1.285.793,23	830.607,26	18,06	189,16	Direct Cost
3	Laba Kotor Usaha	140.700,00	229.632,91	171.963,59	99,40	157,72	Gross Profit
4	Bagian Laba JO	75.100,00	74.171,43	79.163,77	219,90	284,56	JO Profit Share
5	Laba Kotor Usaha setelah JO	215.800,00	155.461,48	109.031	66,08	116,58	Gross Profit after JO
6	Beban Usaha	59.100,00	68.352,14	52.885,42	114,97	121,47	Business Cost
7	Laba Usaha	156.700,00	161.280,76	119.078,17	89,13	179,09	Business Profit
8	Pendapatan (Biaya) Lain-lain	(10.300,00)	(19.306,79)	(6.827,63)	68,28	(51,49)	Other Revenue (Cost)
9	Laba (rugi) sebelum beban bunga dan PPh	146.400,00	141.973,97	115.260,64	93,71	146,36	Profit (loss) before tax and interest
10	Beban Bunga	(39.200,00)	(32.632,81)	39.953,49	99,88	103,12	Interest
11	Laba Sebelum PPh	107.200,00	109.341,15	72.297,05	87,10	180,71	Profit before tax
12	Beban Pajak	(37.050,00)	(36.557,20)	21.489,62	76,64	153,34	Tax
13	Laba (Rugi) Bersih	70.150,00	72.783,95	50.807,44	77,03	195,43	Net Profit (Loss)

Realisasi laba bersih tahun 2013 perusahaan sebesar Rp 72,78 milyar berada dibawah RKAP tahun 2013 sebesar Rp 70,15 milyar atau hanya mencapai 77,03 % dan naik dari realisasi laba bersih tahun 2012 sebesar Rp 50,83 milyar atau naik menjadi 195,43% .

Realization of the company's net profit in 2013 amounted to USD 72,78 million under the CBP in 2013 amounting to Rp 70,15 million or only reached 77.03% and up from actual net income in 2012 amounted to USD 50,83 million or up to 195.43%.

Tidak tercapainya target penjualan tersebut disebabkan oleh:

- Terlambatnya perolehan kontrak – kontrak baru tahun 2013
- Kondisi cuaca / hujan yang ekstrem
- Beberapa lokasi proyek tidak bisa dikerjakan karena pembebasan lahan belum selesai
- Adanya perubahan design proyek yang sangat mendasar, sehingga proyek tersebut belum dapat dikerjakan

Non-achievement of such sales target is due to:

- Delayed new contract acquisition for 2013
- Extreme condition/rainy weather
- Some of project locations cannot be accessed for land acquisition issues
- Material change of project design that no activities can be done

Posisi Keuangan Konsolidasi

Realisasi & RKAP Posisi Keuangan Tahun 2013 & 2012

Consolidated Financial Position

Realization & RKAP Financial Position Year 2013 & 2012

NO.	Uraian	RKAP Tahun 2013	Realisasi 2013	Realisasi 2012	Realisasi 2011	Persentase terhadap		Description
						RKAP 2013	REALISASI 2012	
						%	%	
1	Aset Lancar	740.008,25	861.125,43	642.729,67	386.407,46	116,36	133,00	Current Asset
2	Ekuitas Anak Perusahaan	100.000,00	5.567,75	-	-	5,56	2,74	Equity
3	Aset Tidak Lancar	265.434,53	290.204,11	3.733,96	151.989,48	109,33	100,68	Non-Current Asset
4	Aset Tetap	226.696,68	279.591,74	236.895,57	84.427,40	123,33	106,10	Fixed Asset
5	Aset Leasing	-	-	27.016,13	17.291,39	-	-	Leasing Asset
6	Aset Lain-lain	-	10.612,37	-	-	-	-	Other Asset
7	Jumlah Aset	1.137.268,18	1.151.329,55	909.974,91	640.115,73	101,23	126,52	Asset Amount
8	Liabilitas Lancar	-	17.938,75	272.929	329.916	-	190,16	Current Liability
9	Liabilitas Tidak Lancar	-	71.826,72	205.690	181.873	-	84,10	Non-Current Liability
10	Liabilitas Jangka Pendek	266.934,20	481.559,73	415.114,73	266.238,90	180,40	113,42	Short Term Liability
11	Hutang Leasing	-	-	17.080,58	11.739,82	-	-	Leasing Liability
12	Liabilitas Jangka Panjang	588.000,00	379.490,58	263.295,33	201.639,94	64,53	140,08	Long Term Liability
13	Ekuitas	281.813,65	290.279,22	214.534,27	161.497,07	103,00	139,30	Equity
14	Total Liabilitas & Ekuitas	1.137.268,18	1.151.329,55	909.974,91	640.115,73	101,23	126,25	Total Liability and Equity

Analisa Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Realisasi Jumlah aset tahun 2013 sebesar Rp1.151.329,55 juta berada diatas RKAP tahun 2013 sebesar Rp 1.137.268,18 juta atau naik sebesar 101,23% dari RKAP tahun 2013, dan naik 126,52% dibanding realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 909.974,71. Realisasi total aset diatas target RKAP, hal ini disebabkan tingginya piutang usaha atas proyek – proyek loan yang belum dapat cair pada akhir tahun.

Realization of total assets in 2013 amounted to Rp 1.151.329,55 million is above the CBP in 2013 of Rp 1.137.268,18 million, an increase of 101,23% from the CBP in 2013, and up 126,52% compared to the year 2013 amounting to Rp. 909.974,71. Realization of total assets above the target CBP, this is due to the addition of PMN and capital investment subsidiary entities, and high trade receivables of the project - the project loan that can not be liquid at the end of the year. this is due to higher accounts receivable from the project - a project loan that can not be liquefied at the end of the year

Investasi

Realisasi & RKAP Investasi 2013 & 2012

Investment

Realization & RKAP Investment 2013 & 2012

NO.	Uraian	RKAP 2013	Realisasi 2013	Realisasi 2012	Persentase Terhadap		Description
					RKAP 2013	REALISASI 2012	
					%	%	
1	Tanah		480,00				Land
2	Bangunan						Buildings
3	Peralatan Proyek	31.850,00	47.317,76	19.788,35	71,94	273,17	Project Equipments
4	Peralatan Umum						General Equipments
5	Penyerahan Anak Perusahaan	100.000,00	100.000,00	20.000,00			Subsidiaries
6	Peralatan Kantor	900,00		355,00	11,93	(17,99)	
7	Investasi untuk Peralatan proyek & bangunan Gedung Baru			20.143,35	67,14	89,81	Investment for project equipment and new Buildings
8	Investasi untuk Penyerahan Anak Perusahaan			20.000,00	100,00	38,85	Investment on Subsidiaries
9	TOTAL	132.750,00	147.317,76	40.143,35	80,29	100,00	TOTAL

Realisasi Investasi tahun 2013 sebesar Rp 147.317,76 juta diatas RKAP tahun 2013 sebesar Rp 132.750 juta 110,79% nya dan juga diatas realisasi 2012 sebesar Rp 40.143,35 juta atau hanya 366,97 % dari realisasi tahun 2012.

Sumber dana untuk investasi tersebut diambil dari akumulasi penyusutan dan leasing. Kenaikan investasi diatas RKAP dikarenakan adanya penyertaan pada anak perusahaan yang dilakukan pada Desember 2013.

Kinerja keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) untuk tahun 2013 dengan skor 96,00 dikategorikan Sehat ("AAA").

Realization of investment in 2013 amounted to USD 147.317,76 million up the CBP in 2013 amounting to Rp 132.750 million, 110,79% and its realization up 2012's Rp 40.143,35 million or only 366,97% of the realization in 2012.

Source of funds for the investment are taken from accumulated depreciation and leasing. CBP rise above investments due to investments in subsidiaries are carried out in December 2013.

Financial performance based on Decree of State Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) number: KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 PT. BRANTAS Abipraya (continued) for the year 2013 with a score of 96,00 categorized Healthy ("AAA").

Tinjauan Keuangan

Realisasi & RKAP Kinerja Keuangan tahun 2013 & 2012

Financial Review

Realization & RKAP for Financial Performance in 2013 & 2012

NO.	Kategori Kinerja	RKAP 2013	REALISASI 2013	REALISASI 2012	REALISASI 2011	PROSENTASE TERHADAP		PERFORMANCE CATEGORY
						RKAP 2013 (%)	REALISASI 2012 (%)	
1	Aspek Keuangan	65,75	66,00	63,75	68,75	100,38	103,52	Financial Aspect
2	Aspek Operasional	15	15	15	15	100,00	100,00	Operational Aspect
3	Aspek Administrasi	15	15	15	15	100,00	100,00	Administrative Aspect
4	Jumlah	95,75	96,00	93,75	98,25	100,26	102,40	TOTAL
5	TINGKAT KINERJA	SEHAT	SEHAT	SEHAT	SEHAT			
		(AAA)	(AAA)	(AA)	(AA)			

Analisa & Pembahasan Manajemen

Management Discussion & Analysis

Aspek Keuangan

Realisasi & RKAP Penilaian Aspek Keuangan
2013 & 2012

Financial aspects

Realization & RKAP Financial Aspect
Assessment in 2013 & 2012

NO.	Indikator	RKAP 2013	REALISASI 2013	Realisasi 2012	Realisasi 2011
1	Likuiditas				
2	Current Ratio	277,22	178,82	151,39	122,33
3	Quick Ratio	215,52	151,53	145,69	114,21
4	Cash Ratio	92,91	130,53	45,57	20,40
5	Profitabilitas				
6	Profit Margin	2,98	3,25	4,33	3,19
7	Restabilitas	6,16	6,32	44,92	7,25
8	Return On Equity (ROE)	43,42	45,05	31,08	15,92
9	Leverage				
10	Total Debt to Equity	304,97	294,87	328,38	530,04
11	Total Asset to Total Debt (Solvency)	133,02	133,71	130,85	126,47
12	ACONY				
13	Fixed Asset Turn Over	399,65	-	1.542,37	895,05
14	Receivables Turn Over		482,34	458,89	774,98
15	Average Collection Period of Receivable		75,67	79,54	47,10





Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

1. Ringkasan Kinerja Keuangan Berdasarkan Key Performance Indicators

1. Financial Performance Summary Based on Key Performance Indicators

NO.	Kategori Kinerja	RKAP	Pencapaian Target
1	KEBIJAKAN DAN PASAR	20,00	20,46
2	FOKUS PELANGGAN	24,00	24,37
3	EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES	18,00	18,36
4	FOKUS TENAGA KERJA	20,00	21,00
5	KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA	18,00	18,06
6	Total Skor KPI (TSK)	100,00	102,25

Kinerja Keuangan Berdasarkan Target-Target Key Performance Indicators (KPI)

Berdasarkan surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor : S-676/MBU/2004 tanggal 22 Desember 2004 perihal Penerapan Key Performance Indicators (KPI) , dan berdasarkan RUPS Pengesahan RKAP Perusahaan Tahun 2012 Nomor : RIS-05/D3.MBU/2011 tanggal 12 Januari 2012

Financial Performance Based on Key Performance Indicators (KPI) Targets

According to the letter of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) number: S-676/MBU/2004 dated 22nd December 2004 on Key Performance Indicators (KPI) Application, and based on the General Meeting of Shareholders on the Validation of the Company's 2012

yang memuat Kontrak Manajemen antara PT. Brantas Abipraya (Persero) dan Kuasa Pemegang Saham PT Brantas Abipraya (Persero). KPI dan Kontrak Manajemen merupakan komplemen dari penilaian tingkat kesehatan BUMN, sehingga Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 masih berlaku.

Realisasi pencapaian target sebagaimana tertuang dalam kontrak manajemen sebesar 101,22 dari target 100 atau mencapai 101,22%, sehingga secara keseluruhan dikategorikan diatas KPI yang ditargetkan dalam RUPS.

aspek leadership sebesar 11,34 % yang berarti dibawah bobot yang ditargetkan sebesar 12 %, dan aspek financial performance sebesar 42,20 % yang berarti dibawah dari bobot yang ditargetkan sebesar 42%.

which specifies a Management Contract between PT. Brantas Abipraya (Persero) and Attorneys of the Shareholders of PT. Brantas Abipraya (Persero). The KPI dan Management Contract is a complement of the State-Owned Enterprises healthy rate assessment. Thus, the Decree of the State Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP 100/MBU/2002 dated 4th June 2002 remains effective.

The materialization of target accomplishment as mentioned in a management contract is 101.22 of the target of 100 or reached 101.22%. Thus, in whole, it is categorized above KPI which is targeted in the General Meeting of Shareholders.

The leadership aspect is 11.34% which means under the targeted weight of 12%, and the financial performance aspect is 42.20% which means under the targeted weight of 42%.

2. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Hasil Assessment Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Brantas Abipraya (Persero) tahun 2013 yang mencakup enam aspek governance, yaitu: Komitmen Terhadap penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan, Pemegang Saham / RUPS, Dewan Komisaris, Direksi Pengungkapan Informasi dan Transparansi, serta Aspek lainnya.

Berdasarkan Assessment terhadap penerapan GCG pada PT Brantas Abipraya (Persero) untuk periode tahun 2013 yang dilakukan sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT Brantas Abipraya (Persero) mencapai skor 75,56 dari skor maksimal 100, berada dalam kategori predikat **"BAIK"**

SKOR PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE THL 2013 PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

NO	ASPEK GOVERNANCE	BOBOT	CAPAIAN		PENJELASAN
			AKTUAL	(%)	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	4,64	66,33	Cukup Baik
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,00	7,65	85,03	Sangat Baik
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,00	29,08	83,10	Baik
IV	Direksi	35,00	28,51	81,46	Baik
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	5,67	62,98	Cukup Baik
	Sub Total	95,00	75,56		
VI	Aspek Lainnya	5,00	0,00		
	TOTAL	100,00	75,56		Baik

2. Good Corporate Governance (GCG)

The Assessment Result of the 2013 Good Corporate Governance (GCG) Application to PT. Brantas Abipraya (Persero) which includes six governance aspects, namely: Continuous Commitment on Management application, Shareholders/General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, Information Disclosure and Transparency, and other Aspects.

Based on the Assessment on GCG application at PT. Brantas Abipraya (Persero) for 2013, which is conducted from 18th November 2013 to 23rd January 2014, it may be concluded that the GCG application condition at PT. Brantas Abipraya (Persero) reaches a score of 75.56 of the maximum score of 100 and it is within the **"GOOD"** title category.

3. Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

Dalam tahun 2013, PT Brantas Abipraya pertama kali di audit KPKU dengan skor 385,5 kategori Early Improvement, dengan rincian sebagai berikut :

3. Assessment Criteria for Performance Excellence (KPKU)

In 2013, PT. Brantas Abipraya was audited for the first time by KPKU and scored 385.5 within the Early Improvement category, by these following details:

SUMMARY SKOR KPKU TAHUN 2013 PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

SUB KATEGORI (A)		TOTAL POINT (B)	PRESENTASE SKOR (C)	SKOR (D)=(B)x(C)
1,1	Kepemimpinan Senior	70	50%	35
1,2	Tatakelola dan Tanggung Jawab Komazasyarakat	50	45%	22,5
2,1	Pengembangan Strategi	40	45%	18
2,2	Implementasi Strategi	45	45%	20,25
3,1	Suara Pelanggan	45	30%	13,5
3,2	Keterikatan Pelanggan	40	35%	14
4,1	Pengukuran, Analisa dan Peningkatan Kinerja	45	40%	18
4,2	Pengelolaan Informasi, Pengetahuan, dan Teknologi Informasi	45	45%	20,25
5,1	Lingkungan Tenaga Kerja	40	45%	18
5,2	Keterikatan Tenaga Kerja	45	35%	15,75
6,1	Sistem Kerja	45	45%	20,25
6,2	Proses Kerja	40	40%	16
TOTAL NILAI DIMENSI PROSI'S				231,5
7,1	Kinerja Produk dan Proses	110	35%	38,5
7,2	Kinerja Fokus Pelanggan	90	30%	27
7,3	Kinerja Fokus Tenaga Kerja	80	30%	24
7,4	Kinerja Hasil Kepemimpinan	80	30%	24
7,5	Kinerja Keuangan dan Pasar	90	45%	40,5
TOTAL NILAI DIMENSI HASIL				154
TOTAL SKOR		1000		385,5
RAND SKOR			Early Improvement	

4. BUMN Bersih

4. Upright State-Owned Enterprises

Upaya Internal / Dokumen Aplikasi	di atas 7,50				
	5,00 – 7,50				PT Brantas Abipraya (7,60-6,80)
	2,5 – 5,00				
	s.d. 2,5				
		s.d. 2,5	2,5 - 5,00	5,00 - 7,50	di atas 7,50
Persepsi / Kuesioner					

Pada tahun 2013 PT Brantas Abipraya pertama kalinya di audit BUMN bersih oleh BPKP hasilnya perusahaan dikategorikan "cukup berkomitmen" dalam menerapkan BUMN bersih

In 2013, PT. Brantas Abipraya was audited in terms of an upright State-Owned Enterprise for the first time by BPKP. Then, the company is categorized as "sufficiently committed" in applying an upright State-Owned Enterprise.

BAGIAN LABA JOINT OPERATION

Bagian Laba Joint Operation selama tahun 2012 sebesar Rp 79.163,77 juta lebih tinggi sebesar Rp 43.163,77 juta atau 45,58 % bila dibandingkan dengan RKAP yang sebesar Rp 36.000 juta. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp 27.809,46 juta, terdapat kenaikan sebesar Rp 51.354,31 juta atau 35,47 %.

PROFIT SHARE OF JOINT OPERATION

Joint Operation Profit for the year 2012 amounted to USD 79163.77 million higher at USD 43,163.77 million or 45.58% when compared to CBP's Rp 36,000 million. Meanwhile, when compared with the year 2011 amounted to USD 27809.46 million, there is an increase of USD 51,354.31 million or 35.47%.





PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN /
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2012 / FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2012**

DAN / AND

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

DAFTAR ISI / CONTENT

HLB

Hadori Sugiarto Adi & Rekan

Certified Public Accountants

HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan is a member of  HLB International. A world - wide organization of accounting firms and business advisers

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK /
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
DAFTAR ISI / LIST OF CONTENT
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
AUDITOR'S INDEPENDENT REPORT
UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL /
FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2013 DAN 2012 / DECEMBER 31, 2013 AND 2012

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN / AUDITOR'S INDEPENDENT REPORT	HALAMAN / PAGES
LAPORAN KEUANGAN / FINANCIAL STATEMENTS	1 - 5
▪ UMUM / GENERAL	6 - 9
▪ KEPEMILIKAN SAHAM KEPADA ENTITAS ANAK / SHARE OWNERSHIP TO SUBSIDIARIES	9 - 11
▪ KEBUJUKAN AKUNTANSI / ACCOUNTING POLICIES	11 - 26
▪ PENJELASAN POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN / EXPLANATION ITEMS CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION	77 - 87
▪ PENJELASAN POS-POS LABA RUKSI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN / EXPLANATION ITEMS CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME	68 - 80
▪ TRANSAKSI DENGAN PIHAK HUBUNGAN BERELASI / TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES	81
▪ TANGGUNGJAWAB ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN / MANAGEMENT RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENT	81
LAPORAN / APPENDIX	
▪ LAPORAN KEUANGAN AUDITED (INDUK PERUSAHAAN SAJA) UNTUK TAHUN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 / AUDIT FINANCIAL REPORT (PARENT COMPANY ONLY) FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013 AND 2012	

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI /
BOARD OF DIRECTORS STATEMENT**



Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA
 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14, Telp. (021) 8518288, Fax. (021) 3614886, Jakarta 12248
 http://www.brantas-abipraya.com

Certified :
 ISO 9001
 OHSAS 18001
 ISO 14001

SURAT PERNYATAAN DIREKSI / DIRECTORS' STATEMENT LETTER
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN /
RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 /
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013 AND 2012
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK /
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK /
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan di bawah ini /
 we are undersigned :

Nama / Name : Bambang E. Marsono
 Alamat Kantor / Office Address : Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur

Alamat elektronik / nomor KIP
 atau Kartu Identitas Lain /
 Domestic address / ID card
 or Other Identity Card : J. Cipinang Cempedak II No. 173 RT. 011 RW 005
 Cipinang - Cempedak - Jakarta Timur

Jabatan / Position : Direktur Utama / Managing Director

Nama / Name : Sukarno Joesoeparto
 Alamat Kantor / Office Address : Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur

Alamat elektronik / nomor KTP
 atau Kartu Identitas Lain /
 Domestic address / ID card
 or Other Identity Card : Jl. Flamboyan No. 7 Cibesing - Bintara Jaya
 Bekasi Barat

Jabatan / Position : Direktur Keuangan & SDM / Director of Finance & Human Resources

Menyatakan bahwa :

Declare that :

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Konsolidasian. 2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dibuat secara jujur dan benar.
 b. Laporan keuangan berdasarkan fakta dan tidak ada fakta material yang tidak benar, dan tidak menyembunyikan informasi atau fakta material. 4. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Responsible for the preparation and presentation of Financial Statements. 2. Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standard in Indonesia. 3. a. All information in the Consolidated financial statements are complete and correct.
 b. The consolidated financial statements do not contain material information or facts that are not true, and do not contain material information and 4. Responsible for the system of internal control within the company. |
|---|--|

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made in good faith.

Jakarta, 14 Februari 2014 / February 14, 2014



Bambang E. Marsono
 Direktur Utama / Managing Director

Sukarno Joesoeparto
 Direktur Keuangan & SDM / Director of Finance & Human Resources

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT



No. 010/LAI-BAJIKT2/11/14

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT Bantas Abipraya (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bantas Abipraya (Persero) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2013, serta laporan laba-rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk menaati kode etik serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan keahliannya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

No. 010/LAI-BAJIKT2/11/14

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors

PT Bantas Abipraya (Persero)

We have audited the consolidated financial statements of PT Bantas Abipraya (Persero) and its subsidiaries attached within, which consist of the consolidated statements of financial position dated December 31, 2013, as well as the consolidated statements of comprehensive income, consolidated statements of changes in equity and consolidated statements of cash flows for the year ended on the date, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility of consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, and on internal control as deemed necessary by management to enable the preparation of consolidated financial statements and that are free from material misstatement, whether caused by fraud or error.

The Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audits report. We conducted our audits based Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and Auditing Standards set by the State Audit Board of the Republic of Indonesia. Those standards require compliance with ethical standards and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free of material misstatement.

Audit reports involve implementation of procedures to obtain audit evidence regarding the numbers and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of risks of material misstatements in the financial statements, whether due to fraud or error. In conducting the risk assessment, the auditor considers internal control relevant to the preparation and fair presentation of the financial statements of the entity to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of stating an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall consolidated financial statement presentation.



PT Bantas Abipraya (Persero)

No. 010/LAI-BAJIKT2/11/14

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bantas Abipraya (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2013, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal - Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka love-pending terhadap laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 14 Februari 2013.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Bantas Abipraya (Persero) dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 telah lengkap dilaksanakan dengan tujuan untuk meneruskan opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Bantas Abipraya (Persero) sebagai entitas induk terlampir terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2013, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut diatas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut diatas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta diaudit dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang ditetapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut diatas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

PT Bantas Abipraya (Persero)

No. 010/LAI-BAJIKT2/11/14

We are confident that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Bantas Abipraya (Persero) and its subsidiaries dated December 31, 2013, as well as financial performance and its consolidated cash flows for the year ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

Other Things

The financial statements of the Company and its subsidiaries dated December 31, 2012 and for the year ended on that date, which serves as the figures that corresponds with the consolidated financial statements dated December 31, 2013 and for the year then ended, and is audited by other auditors that were prepared without any modifications from the consolidated financial statements as at February 14, 2013.

Our audit report of the consolidated financial statements of PT Bantas Abipraya (Persero) and its subsidiaries for the years ended December 31, 2013 is attached and carried out which allow to formulate an opinion on these consolidated financial statements. The financial information PT Bantas Abipraya (Persero) as the parent entity consisting of the attached balance sheet dated December 31, 2013, and the statements of comprehensive income, statement of changes in equity and cash flow statement for the year ended December 31, 2013, and an overview significant accounting policies and other explanatory information referred to as "Parent Entity Financial Information". These statements are presented as additional information to the consolidated financial statements mentioned above and are presented for purposes of additional analysis and are not part of the consolidated financial statements at the top of the required by the Financial Accounting Standards in Indonesia. Parent Entity Financial Information is responsible for the management and resulting from and directly related to the accounting records and other records that are used to construct the underlying consolidated financial statements mentioned above. Parent Entity Financial Information has become the object of the auditing procedures applied in the audit of the consolidated financial statements based on Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. According to the Company financial information it is fairly stated, in all material respects, the consolidated financial statements relates to the foregoing as a whole.

PT Bina Raya Abipriya (Persero)
 No. 010/LAL-BAJKT2/11/14

Laporan atas Kebatuhan Peraturan Perundang-undangan
 Lain

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan audit kami. Pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut kami laksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Standar Audit sektor BCU yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal, dilaksanakan secara terpisah kepada masing-masing masing dalam laporan kami nomor: 10/LK-UU-BAJKT2/11/14 dan nomor: 10/LK-KC-BAJKT2/11/14 tanggal 14 Februari 2014.

PT Bina Raya Abipriya (Persero)
 No. 010/LAL-BAJKT2/11/14

Report on the Provisions Other Legislation

This report has also been performed under tests of compliance with the specific legislation. Compliance with laws and regulations is the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on compliance with laws and regulations based on our audit. In accordance to the test of compliance with laws and regulations; we have entered by the State Auditing Standards issued by the audit Board of the Republic of Indonesia and Auditing Standards established by section 003 Indonesian Institute of Accountants.

Report compliance with laws and regulations and internal control, management delivered separately to each of the numbers in our report: 10/LK-UU-BAJKT2/11/14 and number: 10/LK-KC-BAJKT2/11/14 dated February 14, 2014.



Dr. Jimmy Jansen, Ak. CPA

Member Registrasi Akuntan Publik AR 0001 /Public Accountant Registered Number AR 0001
 14 Februari 2014, February 2014

LAPORAN KEUANGAN / FINANCIAL STATEMENT

	2013	Salinan / Notes	2012	
ASET LANCAR				CURRENT ASSET
Kas dan setara kas	441.187.037.947	3e, 3f, 4	190.179.348.212	Cash and cash equivalent
Piutang usaha		3e, 3g, 5, 17, 33		Account receivable
- Pihak-pihak berelasi	185.535.696.879	3d, 35	129.131.247.423	Related parties -
- Pihak ketiga	28.013.944.681		5.026.100.564	third party -
Piutang lain-lain				Others receivable
- Pihak-pihak berelasi	2.901.000.000	3e, 3g, 5, 35	1.200.306.934	Related parties -
- Pihak ketiga	1.268.036.460		9.673.858.221	Third party -
Tagihan bruto kepada pemberi kerja		3e, 3g, 7, 33		Gross amount due from employer
- Pihak-pihak berelasi	53.036.107.496	3d, 35	104.471.128.700	Related parties -
- Pihak ketiga	21.997.244.130		35.474.430.262	Third party -
Persediaan	37.474.611.083	3h, 8	24.201.265.150	Inventories
Uang muka	29.884.241.627	9	14.282.679.364	Advances
Beban dibayar di muka	19.770.305.689	3a, 10	15.048.295.863	Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	30.216.689.650	3a, 11a	11.408.534.886	Prepaid taxes
JamINAN	10.730.031.040	12	7.001.270.007	Guarantee
Jumlah Aset Lancar	681.125.431.880		642.720.887.425	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON CURRENT ASSET
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 107.636.147.505,- dan Rp 78.487.691.891,- pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012	279.591.747.851	3i, 3j, 13, 17, 22, 29, 31	263.511.693.278	Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp 107,636,147,505 - and Rp 78,487,691,891 - on December 31, 2013 and 2012
Aset lain-lain - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 4.466.201.023,- pada 31 Desember 2013 dan 2012	-	3e, 3g, 3k, 14	-	Other assets - net of accumulated depreciation of Rp 4,466,201,023 - December 31, 2013 and 2012
Beban langgutan	10.012.371.300	3p, 15	3.733.552.271	Deferred charges
Jumlah Aset Tidak Lancar	289.604.119.151		267.245.245.549	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET	1.151.329.551.030		910.574.312.574	TOTAL ASSETS

	2013	Salinan / Notes	2012	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				SHORT-TERM LIABILITIES
Utang usaha - pihak ketiga	323.110.037.443	16	236.288.034.666	Account payable - third parties
Utang bank - jatuh tempo satu tahun	1.345.145.427	13, 17	55.854.216.551	Bank loan - one year maturity
Utang lain-lain - pihak-pihak berelasi	-	3d, 16, 35	78.161.100	Others payable - related parties
Utang pajak	1.170.606.510	3n, 11	1.515.762.705	Tax payable
Utang muka pemberi kerja - jatuh tempo satu tahun	71.826.728.150	19	85.401.031.535	Advance from employer - one year maturity
Pendapatan diterima dimuka	17.274.108.777	3l, 20	6.477.679.344	Unearned revenue
Biaya yang sudah harus dibayar	42.294.000.791	3m, 21	24.499.700.990	Accrued expenses
Utang sewa pembiayaan - jatuh tempo satu tahun	17.938.751.264	3j, 13, 22	9.433.066.341	Lease payable - one year maturity
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	481.559.738.362		424.547.796.134	Total Short-term Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				LONG-TERM LIABILITIES
Liabilitas diestimasikan atas imbalan kerja	7.574.832.371	3o, 23	10.968.966.747	Estimated liabilities on employee benefits
Utang non bank	144.300.000.000	24	-	Non bank loan
Utang bank - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun	-	13, 17	221.090.729.604	Bank loan - net of one year maturity portion
Utang muka pemberi kerja - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun	146.495.269.497	19	31.235.636.551	Advance from employer - net of one year maturity portion
Utang sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun	6.117.482.546	3j, 13, 22	7.597.512.067	Lease payable - net of one year maturity portion
Surat berharga jangka menengah	75.000.000.000	25	-	Medium-term securities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	373.430.364.414		279.632.646.363	Total Long-term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	861.050.322.776		695.440.643.103	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - Nilai nominal Rp 1.000.000,- per saham				Capital stock - Rp 1,000,000 - per share
Modal dasar - 600.000 lembar saham				Authorized capital - 600,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 161.555 lembar saham	161.555.000.000	28	161.555.000.000	Subscribed and paid up capital - 161,555 shares -
Cadangan	32.311.000.000		7.584.891.200	Reverse
Saldo laba	90.845.472.307		42.653.057.826	Retained Earning
Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik saham biasa	204.711.472.307		211.792.949.026	Total equity attributable to equity holders of holding
Kepentingan non pengendali	5.567.755.757	3b, 37	2.741.320.845	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas	290.279.228.064		214.534.269.871	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.151.329.551.030		910.574.312.574	Total Liabilities and Equity

Uraian lebih lanjut mengenai konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi

See notes to the consolidated financial statements which are integral part of these consolidated financial statements

	2013	Salinan / Notes	2012	
PENDAPATAN USAHA	1.441.255.486.449	31, 28	923.407.084.230	OPERATING INCOME
BEBAN LANGSUNG	(728.733.223.337)	3m, 29	(630.607.255.337)	DIRECT EXPENSES
LABA KOTOR - SEBELUM BAGIAN LABA JOINT OPERATION	155.461.483.114		32.791.828.893	GROSS PROFIT BEFORE JOINT OPERATION PROFIT PORTION
Bagian laba joint operation	74.171.434.256	31, 30	79.163.771.888	Joint operation profit portion
LABA KOTOR	229.632.917.371		171.955.600.781	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	3m, 31			OPERATING EXPENSES
Pegawai	41.506.444.976		34.477.233.656	Employee
Umum dan administratif	10.022.388.560		12.061.755.596	General and administrative
Penyusutan	2.488.757.185		2.550.745.340	Depreciation
Perjualan	4.844.548.768		2.299.506.290	Sales
Pengembangan usaha			696.181.418	Business development
Jumlah Beban Usaha	63.662.146.817		57.885.479.295	TOTAL OPERATING EXPENSES
LABA (RUGI) USAHA	161.298.757.255		119.876.178.482	OPERATING PROFIT
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHERS INCOME (EXPENSES)
Penghasilan lain-lain	5.300.954.262	32	10.845.967.735	Others income
Beban lain-lain	(24.607.750.043)	3m, 33	(17.673.594.708)	Others expenses
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(19.306.795.681)		(6.827.626.973)	Total Others (Income) Expenses
LABA SEBELUM BEBAN BUNGA DAN PAJAK PERCHASE AM	141.973.971.273		119.358.551.815	INCOME BEFORE INTEREST AND TAXES
BEBAN BUNGA	(32.632.012.963)	34	(39.953.492.170)	INTEREST EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	109.341.958.310		72.297.828.243	INCOME BEFORE TAXES
MANFAAT (PERILAI) PAJAK PERCHASE AM				INCOME TAX BENEFITS (EXPENSES)
Pajak Bruto	(38.557.200.116)	31, 11c	(21.459.618.217)	Fiscal tax
Pajak Misi	-		-	Current tax
Pajak Tanggutan	-		-	Deferred tax
Jumlah Ruben Pajak Penghasilan	(38.557.200.116)		(21.459.618.217)	Total Income Tax Expenses
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	72.783.958.193		50.837.441.032	INCOME FOR THE YEAR
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	72.783.958.193		50.837.441.032	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA :				INCOME FOR THE YEAR THAT ATTRIBUTABLE TO :
Pemilik entitas induk	72.918.523.281		50.816.120.301	Owner of holding
Keperingan non pengendali	(134.565.088)	31, 27	21.320.731	Non-controlling interest
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	72.783.958.193		50.837.441.032	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Uraian catatan atas laporan keuangan ini terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See notes to the consolidated financial statements which are integral part of these consolidated financial statements.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/ PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN / CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
 TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 / AS OF DECEMBER 31, 2013 AND 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Saham / Capital Stock	Penyetoran Modal Negara / State Capital	Partisipasi	Cadangan / Reserve	Saldo Laba (Rugi) / Retained Earning (Loss)	Jumlah Ekuitas / Total of Shareholders Equity	Keperingan Non Pengendali atas Aset Bersah Entitas Anak / Non- Controlling Interest of Subsidiaries Asset Netto	Jumlah Ekuitas / Total Equity
Saldo 1 Januari 2012 / Balance on January 1, 2012	10.000.000.000	181.954.480.000	-	7.585.411.200	(7.642.607.897)	161.487.063.304	500.000.113	162.017.063.417
Setoran modal / Paid in capital	181.954.480.000	-	-	-	-	151.555.000.000	-	151.555.000.000
Penyetoran modal negara / State Capital Participation	-	(181.954.480.000)	-	-	-	(151.554.460.000)	-	(151.554.460.000)
Cadangan / Reserve	-	-	-	(620.000)	-	(620.000)	-	(620.000)
Program Kemiripan dan Lingkup / Emiratized Development and Partnership Program	-	-	-	-	(520.254.578)	(520.254.578)	-	(520.254.578)
Labanya komprehensif tahun 2012 / Comprehensive Income for 2012	-	-	-	-	50.816.120.301	50.816.120.301	21.320.731	50.837.441.032
Keperingan non pengendali / Non- controlling interest	-	-	-	-	-	-	2.200.000.000	2.200.000.000
Saldo 31 Desember 2012 / Balance on December 31, 2012	161.555.000.000	-	-	7.514.891.200	42.653.057.326	211.792.949.026	2.741.320.845	214.534.269.871
Cadangan / Reserve	-	-	-	24.726.108.800	(24.726.108.800)	-	-	-
Labanya komprehensif tahun 2013 / Comprehensive Income for 2013	-	-	-	-	72.918.523.281	72.918.523.281	(134.565.088)	72.783.958.193
Keperingan non pengendali / Non- controlling interest	-	-	-	-	-	-	2.961.000.000	2.961.000.000
Saldo 31 Desember 2013 / Balance on December 31, 2013	161.555.000.000	-	-	32.311.000.000	90.845.472.307	284.711.472.307	5.587.755.757	290.279.228.064

Uraian catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian /
 See notes to the consolidated financial statements which are integral part of these consolidated financial statements.

	2013	2012	
Arus Kas dari aktivitas operasi			Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan dari pelanggan	1.548.519.304.125	984.936.597.324	Receipt from customers
Pembayaran kepada: Pemasok, subkontraktor, Manula, Karyawan, JO dan Pihak Ketiga	(1.126.208.862.546)	(895.528.081.874)	Payments to: Suppliers, sub contractor, Manula, employees, JO and third parties
Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	422.310.441.580	89.408.515.450	Cash in from operating activities
bunga deposito dan jasa giro	2.119.524.015	1.593.644.256	Time deposit and current account interests
Pembayaran sewa pajak	-	(35.649.470)	Tax rental payments
Pembayaran bunga	(32.632.812.963)	(39.953.492.170)	Interest payments
Pembayaran pajak	(86.125.896.237)	(17.974.154.973)	Tax payments
Penerimaan restitusi pajak	21.015.175.162	20.644.027.042	Receipt from tax restitution
Hasil klaim dan penerimaan (penjualan) bliana	(27.152.473.191)	(8.385.621.849)	Claim result and sales credit amount
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	314.454.057.354	48.298.843.086	Net Cash Flows Provided by Operating Activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash Flows from Investing Activities
Penambahan aset tetap	(16.080.054.573)	(178.459.251.600)	Addition of fixed assets
Penjualan aset tetap	806.233.000	-	Sales of fixed assets
Pengurangan property investasi	-	151.889.480.000	Reduction of property investment
Beban dibayarkan	(6.878.819.029)	(3.733.552.271)	Accrued expenses
Program Kerjasama dan Dana Lingkungan Kepentingan non-pengendali	-	(220.254.570)	Environment development and partnership program
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi	(19.191.620.093)	(28.502.257.717)	Non-controlling interest
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash Flows from Financing Activities
(Pembayaran) penambahan utang bank	(275.599.800.728)	139.833.414.944	(Payment) Addition of bank loan
(Pembayaran) penambahan utang non bank	144.300.000.000	(100.560.000.000)	(Payment) Addition of non bank payable
Penambahan surat berharga jangka menengah	75.000.000.000	-	Issuance of medium-term note
Penerimaan utang sewa pembiayaan	7.086.666.402	6.932.363.796	Addition of lease payable
Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(49.274.145.326)	45.205.778.739	Net Cash Flows Provided by Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	265.988.291.935	65.001.590.108	INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	185.171.346.812	130.177.755.004	CASH AND CASH EQUIVALENTS IN THE BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	441.167.637.347	195.179.345.012	CASH AND CASH EQUIVALENTS IN THE END OF YEAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN / NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT

Isi dari catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

See notes in the consolidated financial statements which are integral part of these consolidated financial statements

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Brantas Abipraya (Persero) didirikan sebagai hasil pemecaran dari Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Kali Brantas yang lebih dikenal dengan sebutan Proyek Brantas, berdasarkan akta notaris No. 88 tanggal 12 November 1980 Kartini Mufjadi, S.H., di Jakarta. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya adalah:

- Perubahan anggaran dasar perusahaan dengan akta No.15 tanggal 12 Agustus 2008 notaris Tjpto - Pranowo, S.H., di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dan Menteri Kehakuman dan HAM sesuai Surat Kepmen No.AH/02128/AH/01.02. tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Perubahan terakhir anggaran dasar perusahaan dengan akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya, notaris Retno Santi Prasetyadi, SH di Jakarta No. 32 tanggal 16 Agustus 2012 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-57022.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 7 November 2012.

b. Kegiatan Perusahaan

Kegiatan utama Perusahaan adalah kontraktor umum dan bidang usaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan utama tersebut. Perusahaan mempunyai Kantor Wilayah dan Divisi sebagai berikut:

- Kantor Wilayah I Medan
- Kantor Wilayah II Jakarta
- Kantor Wilayah III Surabaya
- Kantor Wilayah IV Makassar
- Kantor Wilayah V Samarinda
- Divisi I
- Divisi II
- Divisi III
- Divisi Perawatan

Proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dalam tahun 2013 dan 2012 sebagian besar merupakan proyek-proyek pemerintah, bidang pemeliharaan hampir 70%, sisanya jalan, jembatan, gedung dan proyek kehutanan.

Dalam rangka mengembangkan usaha konstruksi, perusahaan melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan mitra Nasional dalam menanganai proyek - proyek skala besar dan proyek - proyek yang padat teknologi.

1. GENERAL

a. The Company's Establishment

PT Brantas Abipraya (Persero) was established as a corporation result of the Holding Expansion Project of Brantas River Development, better known as the Brantas Project, based on notarial deed No. 88 dated November 12, 1980 Kartini Mufjadi, S.H., in Jakarta. The Company's articles have been amended several times, which are:

- Changes in the company's articles of association by deed No. 15 dated August 12, 2008 Notary of Tjpto-Pranowo, S.H., in Jakarta, which has approval from the Ministry of Justice and Human Rights issued on its Decree Letter No. AH/02128/AH/01.02. year 2008 on Approval of Company's Amended Articles of Association.
- The latest amendment of the Company's Extraordinary Shareholders articles of association deed of PT Brantas Abipraya (Persero), notary Retno Prasetyadi Sant, SH in Jakarta No. 32 dated August 15, 2012 which was approved by the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-57022.AH.01.02.year 2012 dated November 7, 2012.

b. The Company's Activities

The main activity of the Company is the general contractor and other business sectors that can support the main activities. The Company has Regional Offices and Divisions as follows:

- Medan Regional Office I
- Jakarta Regional Office II
- Surabaya Regional Office III
- Makassar Regional Office IV
- Samarinda Regional Office V
- Division I
- Division II
- Division III
- Equipment Division

The projects undertaken by PT Brantas Abipraya (Persero) in 2013 and 2012 are largely the government projects, 70% of field irrigation, the remaining roads, bridges, buildings and electrical projects.

In order to develop construction business, Companies do Joint Operation (JO) with national partners in addressing the large scale projects and technology-intensive projects.

1. UMUM (Lanjutan)

b. Kegiatan Perusahaan (Lanjutan)

Berdasarkan Akta No 13 tanggal 12 Agustus 2008 notaris Tjpto Pranowo, S.H., maksud & tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha dibidang konstruksi, industri, pabrikasi, jasa persewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan bidang konstruksi, teknologi informasi, dan pengembangan untuk menghasilkan barang dan jasa bermutu tinggi dan bernilai tinggi. serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan pelaksanaan konstruksi pekerjaan sipil (sekarah sektor pembangunan), pekerjaan mekanikal, elektrikal termasuk jaringan, radio, telekomunikasi dan instrumentasi, jaringan telekomunikasi serta perbaikan / pemeliharaan / renovasi bangunan.
- 2) Perencanaan dan pengawasan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil dan pekerjaan mekanikal, elektrikal termasuk jaringannya.
- 3) Pelayanan jasa konsultasi (konsultan manajemen dan rekayasa industri).
- 4) Building management
- 5) Pabrikasi bahan dan komponen bangunan.
- 6) Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi.
- 7) Pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik.
- 8) Penyewaan peralatan konstruksi.
- 9) Layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta perbaikan konstruksi
- 10) Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang perantara, sarana dasar (infrastruktur), industri.
- 11) Melakukan usaha di bidang agro industri.
- 12) Ekspor impor.
- 13) Perdagangan umum.
- 14) Pengelolaan kawasan.
- 15) Sistem development
- 16) Layanan jasa di bidang teknologi informasi.
- 17) Layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi.
- 18) Pengembang yang meliputi properti dan realty.

1. GENERAL (Continued)

b. The Company's Activities (Continued)

Based on Deed No. 13 dated August 12, 2008 notary Tjpto Pranowo, SH, purpose and objectives of the Company is doing business in the construction, industrial manufacturing, rental services, agency services, investment, agro industry, trade, area management, capacity building construction services, information technology, and development to produce the high quality and strong competitiveness goods and services, as well as the pursuit of profit in order to increase the value of the Company.

To achieve its goals and objectives, the Company carries on business as follows:

- 1) The work of civil works construction (all sectors of construction), mechanical electrical jobs, including network, radio, telecommunications and instrumentation, telecommunications networks and repairs / maintenance / renovation of buildings.
- 2) Planning and controlling construction of civil works and includes mechanical, electrical work, including its network.
- 3) Consultancy services (management consulting and engineering industries).
- 4) Building management
- 5) Manufacturing materials and building components.
- 6) Fabrication of components and construction equipment.
- 7) Manufacture of metal goods, wood, rubber and plastic.
- 8) Rental of construction equipment.
- 9) Agency services of building materials and components as well as the construction
- 10) Investment and / or business management in the field of infrastructure, basic services (infrastructure), industry.
- 11) Doing business in the field of agro industry.
- 12) Exports and imports.
- 13) General trading
- 14) Area management.
- 15) System development
- 16) Services in the field of information technology.
- 17) Services of upgrading in the field of construction services.
- 18) Development in property and realty.

1. UMUM (Lanjutan)

a. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : SK-245/MBU/2012 tanggal 2 Juli 2012 dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : SK-373/MBU/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : SK-247/MBU/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya dan Akta Penyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya Nomor : 10 notaris Retno Santi Prasetyadi, SH tanggal 27 Mei 2013, susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

2013

Komisaris Utama	:	Hedyanto W. Husaini	:	Chief Commissioner
Komisaris	:	Eko Subekti	:	Commissioner
Komisaris	:	Ramly Ibrahim	:	Commissioner
Komisaris	:	Adhy Duriat Soemoro	:	Commissioner

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor :SK-245/MBU/2012 tanggal 2 Juli 2012 dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : SK-373/MBU/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya dan Akta Penyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya Nomor: 28 notaris Retno Santi Prasetyadi, SH tanggal 20 Nopember 2012, susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

2012

Komisaris Utama	:	Djoko Murjanto	:	Chief Commissioner
Komisaris	:	Eko Subekti	:	Commissioner
Komisaris	:	Ramly Ibrahim	:	Commissioner
Komisaris	:	Adhy Duriat Soemoro	:	Commissioner

Sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-10/MBU/2009 tanggal 15 September 2009 dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-140/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan, dan sesuai dengan Akta Penyataan Penggantian Direksi Perusahaan PT Brantas Abipraya Nomor 7 tanggal 8 Juli 2011 Notaris Tjpto-Pranowo, S.H. di Jakarta susunan Direksi per 31 Desember 2013 dan 2012 sebagai berikut :

1. GENERAL (Continued)

a. Board of Commissioners and Directors

Based on the Decision of Company's Shareholders of PT Brantas Abipraya (Persero) Outside of The General Meeting of Shareholders Number : SK-245/MBU/2012 dated July 2, 2012 and the Decision of Minister of State-Owned Enterprises as a General Meeting of Shareholders Number : SK-373/MBU/2012 on the Termination and Appointment of Company's Members of Board of Commissioners of PT Brantas Abipraya (Persero), Decree of the Minister of State-Owned Business Entities as a General Meeting of Shareholders No. : SK-247/MBU/2013 on Termination and Appointment of Company's Member of Board of Commissioners PT Brantas Abipraya (Persero) and Deed of Shareholders Decision of PT Brantas Abipraya (Persero) Number : 10 notary Retno Prasetyadi Sant, S.H. dated May 27, 2013, the Board of Commissioners on December 31, 2013 are as follows :

Based on the Decision of Company's Shareholders of PT Brantas Abipraya (Persero) Outside of The General Meeting of Shareholders Number : SK-245/MBU/2012 dated July 2, 2012 and the Decision of Minister of State-Owned Enterprises as a General Meeting of Shareholders Number : SK-373/MBU/2012 on the Termination and Appointment of Company's Members of Board of Commissioners of PT Brantas Abipraya (Persero) and Deed of Shareholders Decision of PT Brantas Abipraya (Persero) Number : 28 notary Retno Santi Prasetyadi, SH dated November 20, 2012, the Board of Commissioners on December 31, 2012 are as follows :

In accordance with the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. Kep-10/MBU/2009 dated September 15, 2009 and the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. KEP-140/MBU/2011 dated June 20, 2011 on Termination and Appointment of Members - Member Board of Directors, and in accordance with the Deed of Company Directors Replacement PT Brantas Abipraya No. 7 dated July 8, 2011 Notary Tjpto-Pranowo, S.H. in Jakarta, the Board of Directors by December 31, 2013 and 2012

1. UMUM (Lanjutan)

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi (Lanjutan)

Direktur Utama	:	Bambang E Marsoro	:	Managing Director
Direktur Keuangan & SDM	:	Sukarno Jusupaputro	:	Finance & HRD Director
Direktur Operasi I	:	C. Thomas Pangaribuan	:	Operation Director I
Direktur Operasi II	:	Eludjati Tunggalgani	:	Operation Director II

Jumlah pegawai dalam tahun 2013 dan 2012 masing-masing 357 orang dan 322 orang.

(the number of employees in 2013 and 2012 each 357 and 322 people.)

1. GENERAL (Continued)

c. Board of Commissioners and Directors (Continued)

2. KEPENILIKAN SAHAM KEPADA ENTITAS ANAK

Perusahaan memiliki penyerahan saham secara langsung kepada PT Brantas Energi sesuai dengan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Brantas Energi No. 06 tanggal 12 Desember 2011 notaris Suparman, S.H., M.Kn di Bogor. Berdasarkan akta tersebut, modal dasar PT Brantas Energi berjumlah Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan dicairkan sejumlah 52.000 (lima puluh dua ribu) masing-masing PT Brantas Abipraya (Persero) sebesar Rp 51.480.000.000 dan Koperasi Karyawan Brantas Abipraya sebesar Rp 520.000.000,-. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 28 Desember 2011 tentang pengesahan RKAP PT Brantas Energi tahun 2012 telah disetujui penambahan setoran modal sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). PT Brantas Abipraya (Persero) telah melakukan tambahan setoran modal tersebut pada tanggal 27 Desember 2012, dan sesuai dengan akta pernyataan keputusan rapat PT Brantas Energi No. 13 notaris Suparman, S.H., M.Kn di bogor tanggal 23 Januari 2013, susunan Pemegang Saham PT Brantas Energi per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham / Name of Shareholders	Persentase / Percentage	Jumlah / Total (Rp)
PT Brantas Abipraya (Persero)	98%	71.400.000.000
Koperasi Karyawan Brantas Abipraya	1%	520.000.000
Jumlah / Total	100%	72.000.000.000

Pada tahun 2013 Perusahaan melakukan penambahan modal dicairkan kepada PT Brantas Energi (entitas anak) sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Berdasarkan Akta Penyataan Keputusan Rapat PT Brantas Energi No.5 notaris Vity Yusriani, S.H., M.Kn tanggal 23 Desember 2013, susunan Pemegang Saham PT Brantas Energi per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham / Name of Shareholders	Persentase / Percentage	Jumlah / Total (Rp)
PT Brantas Abipraya (Persero)	99,7%	171.400.000.000
Koperasi Karyawan Brantas Abipraya	0,3%	520.000.000
Jumlah / Total	100%	172.000.000.000

2. SHARE OWNERSHIP TO SUBSIDIARIES

The company has its shares directly to PT Brantas Energi according to the Deed of Establishment of the Limited Company PT. Brantas Energi No. 06 dated December 12, 2011 notary Suparman, S.H., M.Kn in Bogor. Based on the deed, the authorized capital of PT Brantas Energi amounted to Rp 200,000,000,000 (two hundred billion rupiah) divided into 200,000 (two hundred thousand) shares, each share nominal value Rp 1,000,000 (one million rupiah). From the authorized capital has been issued and paid up amounted to 52,000 (two thousand) each are PT Brantas Abipraya (Persero) amounting to Rp 51,480,000,000,- and Koperasi Karyawan Brantas Abipraya amounting to Rp 520,000,000,-. Based on General Meeting of Shareholders on December 28, 2011 on the RKAP endorsement of PT Brantas Energi year 2012 has approved the addition of paid-up capital of Rp 20,000,000,000,- (twenty billion rupiah). PT Brantas Abipraya (Persero) has been add the paid-up capital on December 27, 2012, dan according to the Deed of Meeting Decision Statement of PT Brantas Energi No. 13 notary Suparman, S.H., M.Kn in Bogor dated January 23, 2013, the structure of shareholders of

In 2013, the Company increased paid up capital to PT Brantas Energi (subsidiaries) amounting to Rp 100,000,000,000 (one hundred billion rupiah). Based on Deed of Statement meeting of PT Brantas Energi No. 5 notary Vity Yusriani, S.H., M.Kn dated December 23, 2013, composition of Shareholders of PT Brantas Energi on December 31, 2013 as follows :

2. KEPEMILIKAN SAHAM KEPADA ENTITAS ANAK (Lanjutan)

2. SHARE OWNERSHIP TO SUBSIDIARIES (Continued)

Maksud dan tujuan PT Brantas Energi berusaha dalam bidang :

The purpose and objective of PT Brantas Energi is attempting in the field :

- Pembangunan untuk kegiatan usaha pengelolaan sumber daya alam tenaga listrik, usaha penunjang tenaga listrik, konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara dan dermaga, pembarangan pada umumnya (general contractor) dan pemasangan instalasi-instalasi.
- Perindustrian untuk industri pembangkit tenaga listrik, industri energi alternatif, industri sparepart turbin dan pompa, industri fabrikasi peralatan listrik dan elektronik, industri perbaikan komponen jodi (elektronika), industri peralatan teknik dan mekanikal, industri peralatan listrik, industri manufacturing dan fabrikasi, dan industri mesin listrik.
- Perdagangan untuk barang yang berkaitan dengan energi alternatif, export import dan perdagangan peralatan listrik dan elektronik, peralatan mekanikal / elektrikal / telekomunikasi / navigasi, distributor atau perwakilan dari badan perusahaan barang engineering (teknik), agen, grosir barang engineering dan export import barang-barang
- Jasa yang berkaitan dengan energi alternatif, jasa pemasangan dan perbaikan turbin dan pompa, jasa penilaian biaya, pengendalian biaya dan pemantauan, jasa studi kelayakan dan konsep rancangan, konsultasi bidang listrik elektronika, konsultasi bidang listrik (elektrikal) dan konsultasi bidang energi.

- Development for the business activities of electricity natural resource management, electricity supporting efforts, building construction, bridges, roads, airports and harbours, general contractor and installations.

- Industry for industrial power generation, alternative energy industry, industrial turbine and pump spare parts, industrial fabrication of electrical equipment and electronics, component manufacturing industry, mechanical engineering and industrial equipment, industry electrical equipment, manufacturing and fabrication industry, and the electrical machinery industry.

- Trade for goods related to alternative energy, import export and trade in electrical and electronic equipments, mechanical equipment / electrical / telecommunication / navigation, distributors or representatives of the goods engineering company (technique), wholesale agents and import export of engineering goods.

- Services relating to alternative energy, installation and service improvement turbine and pumps, cost estimates services, controlling costs and planer, viable study and design concept services, consultation in field of electricity electronic, consultation in the field of electricity (electrical) and consultation in the field of energy.

PT Brantas Energi (entitas anak) memiliki pemerluan saham per 31 Desember 2012 kepada beberapa Perusahaan sebagai berikut :

PT Brantas energi (subsidiary) has inclusion of shares per December 31, 2012 to several companies as follows:

- PT Perjaya Bravo Energi sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dengan kepemilikan saham 80 %.
- PT Sahung Brantas Energi sebesar Rp 1.426.900.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan kepemilikan saham 99 %.
- PT Brantas Calrawala Energi sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dengan kepemilikan saham 80%.

- PT Perjaya Bravo Energi amounted of Rp 3,600,000,000,- (three billion six hundred million rupiahs) with 80% share ownership.

- PT Sahung Brantas Energi amounted of Rp 1,426,900,000,- (one billion four hundred and twenty six million nine hundred thousand rupiahs) with 99% share ownership.

- PT Brantas Calrawala Energi amounted of Rp 4,000,000,000,- (four billion rupiahs) with 80% share ownership.

PT Brantas Energi (entitas anak) memiliki pemerluan saham per 31 Desember 2013 kepada beberapa perusahaan sebagai berikut :

PT Brantas energi (subsidiary) has inclusion of shares per December 31, 2013 to several companies as follows:

- PT Perjaya Bravo Energi sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dengan kepemilikan saham 80 %.
- PT Sahung Brantas Energi sebesar Rp 8.470.000.000,- (delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan kepemilikan saham 99,60%.

- PT Perjaya Bravo Energi amounted of Rp 3,600,000,000,- (three billion six hundred million rupiahs) with 80% share ownership.

- PT Sahung Brantas Energi amounted of Rp 8,470,000,000,- (eight billion four hundred and seventy million rupiahs) with 99,60% share

2. KEPEMILIKAN SAHAM KEPADA ENTITAS ANAK (Lanjutan)

2. SHARE OWNERSHIP TO SUBSIDIARIES (Continued)

- PT Brantas Calrawala Energi sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dengan kepemilikan saham 80%.
- PT Brantas Hidro Energi sebesar Rp 2.970.000.000,- (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan kepemilikan saham 80%.
- PT Brantas Prospek Energi sebesar Rp 9.300.000.000,- (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah) dengan kepemilikan saham 93%.
- PT Minahasa Brantas Energi sebesar Rp 19.999.000.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan kepemilikan saham 99,99%.

PT Brantas Calrawala Energi amounted of Rp 8,000,000,000,- (eight billion rupiahs) with 80% share ownership.

- PT Brantas Hidro Energi amounted of Rp 2,970,000,000,- (two billion nine hundred and seventy million rupiahs) with 80% share ownership.

PT Brantas Prospek Energi amounted of Rp 9,300,000,000,- (nine billion three hundred million rupiahs) 93% share ownership.

- PT Minahasa Brantas Energi amounted of Rp 19,999,000,000,- (nineteen billion nine hundred and ninety nine million rupiahs) with 99,99% share ownership

3. KEBUJUKAN AKUNTANSI

3. THE ACCOUNTING POLICIES

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

a. Basis of Preparation of Financial Statements

Sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2008) Penyajian Laporan Keuangan yaitu terminology baru (yaitu judul laporan keuangan) dan perubahan format dan penyajian laporan keuangan yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan Perusahaan, sebagai berikut :

In accordance with SFAS No. 1 (Revised 2008) Presentation of Financial Statements which is a new terminology (revised title of the financial statements) and changes in format and presentation of financial statements that affect the Company's financial statements, as follows :

- Laporan Neraca berubah nama menjadi Laporan Posisi Keuangan.
- Laporan Laba Rugi berubah nama menjadi Laporan Laba Rugi Komprehensif.
- liabilitas kewajiban menjadi liabilities, dan hak minoritas menjadi kepentingan non pengendali.
- Mengubah penyajian kepentingan non pengendali dan disajian di antara liabilitas dan ekuitas menjadi disajikan sebagai bagian dari ekuitas.
- Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas merestrukturisasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

- Balance Sheet changed its name to the Statements of Financial Position.
- Income Statement changed its name to the Statements of Comprehensive Income.
- Term liabilities became liabilities, and minority interests became non-controlling interest.
- Change the presentation of non controlling interest that before was presented between the liability and equity then be presented as part of
- Statement of Financial Position at the beginning of comparative period when the entity applies an accounting policy retrospectively or makes a restatement of financial statement items, or when the entity reclassifies items on its financial statements.

Laporan keuangan konsolidasian dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan dasar harga perolehan, konsep kesinambungan usaha dan prinsip akrual, kecuali akun tertentu yang dinyatakan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

The consolidated financial statements have been stated in Rupiah currency and prepared according to financial accounting standard in Indonesia based on acquisition cost, concept of business sustainability and accrual principle, except for certain accounts stated by other measurements as described in each accounting policy of those accounts.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung (direct method) dan dikelompokkan dalam kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Statements of consolidated cash flows are prepared using the direct method and are grouped into operating, investing and financing activities.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan secara konsisten kecuali apabila dinyatakan adanya penyesuaian dalam kebijakan akuntansi yang diuraikan.

Accounting policy is applied consistently unless otherwise the change in accounting policy professed.

3. KEBUAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan laporan keuangan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan, kecuali entitas anak yang apabila:

- Pengendalian dimaksudkan untuk sementara, karena saham Entitas Anak dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dialihkan dalam jangka pendek;
- Entitas Anak dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang yang mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam mentransfer dana kepada induk perusahaan.

Pengendalian dianggap ada apabila induk Perusahaan memiliki, baik secara langsung atau tidak langsung (melalui Entitas Anak), lebih dari 50% hak suara pada suatu Perusahaan. Walaupun suatu perusahaan memiliki hak suara 50% atau kurang, pengendalian tetap dianggap ada apabila dapat dibuktikan adanya salah satu kondisi berikut:

- Mempunyai hak suara lebih dari 50% berdasarkan perjanjian dengan investor lain;
Mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
- Mempunyai kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti mayoritas pengurus Perusahaan;
- Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

Proporsi bagian pemilikan pemegang saham minoritas atas entitas Entitas Anak yang dikonsolidasi disajikan dalam "Kepentingan Non Pengendali" pada laporan posisi keuangan konsolidasian, sedangkan proporsi bagian pemilikan pemegang saham minoritas atas laba rugi bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi, disajikan dalam "Kepentingan Non Pengendali atas Laba (Rugi) Bersih Perusahaan" pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Saldo dan transaksi, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan terkonsolidasi dieliminasi untuk mememinikan posisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila Entitas Anak menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan Entitas Anak tersebut. Apabila penyesuaian yang diperlukan tersebut tidak dapat dihitung, maka faktor tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian, serta proporsi unsur tersebut terhadap unsur sejenis dalam laporan keuangan konsolidasian.

3. THE ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. The Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and the financial statements of entities controlled by the Company, unless the subsidiaries if:

- Control is intended for temporary, because the Subsidiary shares purchased with aim to be sold or dispose in the short term;
- Subsidiary is limited by a long-term restrictions that significantly impair its ability to transfer funds to the holding company.

There is control if holding Company has, directly or indirectly (through the subsidiaries), more than 50% voting rights in a Company. Even the Company has 50% voting rights or less, there is still a control if there is any of the conditions as follows:

- Having voting right more than 50% based on an agreement with other investors;
Having voting right to regulate the financial and operational policies of the entity under a statute or an agreement;
- Has the power to appoint or change majority of the Company's management;
- Able to dominate the majority votes in management meeting.

The proportion of the minority shareholder ownership over the consolidated Subsidiaries equity is presented in "Non controlling interest" on the consolidated statements of financial position, while the proportion of the minority shareholder ownership over net income consolidated Subsidiaries, presented in "Non controlling interest on Company's profit (loss)" on consolidated statements of comprehensive income.

Balances and transactions, including unrealized intercompany transactions profit or loss over consolidated are eliminated to reflect the financial position and results of the company's businesses and subsidiaries as a business entity.

The consolidated financial statements prepared using the same accounting policies for similar transactions and events in similar circumstances. When an entity uses accounting policies that differ from the accounting policies used in the consolidated financial statements, then made the necessary adjustments to the financial statements of the Child Entity. When the necessary adjustments that cannot be calculated, then these facts should be disclosed in the notes to the consolidated financial statements, as well as the proportion of the item against a similar element in the consolidated financial statements.

3. KEBUAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Transaksi dan Balok dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian kurs yang timbul dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif dalam tahun yang bersangkutan. Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, kurs tengah yang digunakan masing-masing adalah Rp 12.189,- dan Rp 9.670,- untuk 1 Dollar Amerika Serikat.

d. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berelasi sesuai dengan PSAK No 7 (Revisi 2011) adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor), yaitu:

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika:
 - Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
 - Personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor
- 2) Sesuatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama.
 - Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu suatu kelompok usaha dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya.
 - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.
 - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi mempunyai relasi dengan entitas pelapor.
 - Orang yang diidentifikasi mempunyai relasi dengan entitas pelapor, yaitu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

3. THE ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Transaction and Balance in Foreign Currency

Company bookkeeping is done in Rupiah. Transaction in foreign currencies are recorded in Rupiah currency with exchange rate prevailing at the time of the transaction. At the statements of financial position date, monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated into Rupiah using the Bank Indonesia Middle exchange rate. Gains and losses arising are charged in the related year statements of comprehensive income. On December 31, 2013 and 2012, middle rate used respectively is Rp 12,189- and Rp 9,670- for 1 US Dollar.

d. Transactions with Related Parties

The definition of related parties is accordance with SFAS No 7 (Revised 2011) is the person or entity associated with a particular entity in preparing its financial statements (the reporting entity), namely:

- 1) The nearest person or family members have a relationship with the entity if:
 - Has control or joint control over the reporting entity;
 - Has significant influence over the reporting entity;
 - Key management person of the reporting entity or holding entity of the reporting entity
- 2) A related entities with the reporting entity if it meets one of the following:
 - The entity and reporting entity is a member of the same business group.
 - One entity is an associate or joint venture entity to another entity or associate or joint venture of a member of a business group in which the other entity is a member of the business group, in which the other entity is a member.
 - Both entities are joint venture from the same third parties.
 - One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity.
 - The entity is controlled or jointly controlled by a person identified to have the relationship with the reporting entity.
 - People who are identified to have a relationship with the reporting entity, is which has significant influence over the entity or the entity key management member (or the holding of the entity).

3. KEBUAKAM AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak Pihak Berelasi (Lanjutan)

Semua transaksi dengan pihak-pihak hubungan berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan syarat dan kondisi normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan berelasi, telah diungkapkan pada laporan keuangan.

e. Instrumen Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010) "Instrumen Keuangan : Penyajian" yang merevisi PSAK No. 50 (Revisi 2008) "Instrumen Keuangan - Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran", yang merevisi PSAK No. 55 (Revisi 2006). Penerapan PSAK-PSAK revisi ini dilakukan secara prospektif.

PSAK No.50 (Revisi 2010) mengatur persyaratan tentang penyajian dari instrumen keuangan dan informasi yang harus diungkapkan di dalam laporan keuangan, sedangkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan dan kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan. Pernyataan ini, antara lain, memberikan definisi dan karakteristik derivatif, kategori dari instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi untung rugi dan penetapan dari instrumen keuangan.

Dalam rangka penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2010) dan PSAK No. 55 (Revisi 2011), Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

1) Aset Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif (untuk diperdagangkan), pinjaman yang diberikan dan piutang, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif (untuk diperdagangkan).

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif adalah aset keuangan yang diperdagangkan, jika aset keuangan tersebut perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil untung dalam jangka pendek.

3. THE ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Transactions with Related Parties (Continued)

All transactions with related parties, whether do or do not conducted with normal terms and condition, so is done by those who do not have a relationship, have been disclosed in the financial statements.

e. Financial Instrument

Effective on January 1, 2012, the Company adopted SFAS No. 50 (Revised 2010) "Financial Instruments: Presentation" which revises SFAS No. 50 (Revised 2006) "Financial Instruments: Presentation and Disclosure" and SFAS No. 55 (Revised 2011) "Financial Instruments: Recognition and Measurement", which revises SFAS No. 55 (Revised 2006). The application of this revised SFAS was done prospectively.

SFAS No. 50 (Revised 2010) set the requirements for the presentation of financial instruments and information that must be disclosed in the financial statements, whereas SFAS No.55 (Revised 2011) establishes principles for recognizing and measuring financial assets, financial liabilities and some contracts to buy and sale non-financial items. This statement, among others, provide the definition and derivatives characteristics, the category of financial instruments, recognition and measurement, hedging accounting and determination of hedging.

In the application of SFAS No. 50 (Revised 2010) and SFAS No. 55 (Revised 2011), the Company classifies financial instruments in the form of financial assets and financial liabilities.

1) Financial Assets

The Company classifies its financial assets in the category of financial assets at fair value through the statements of comprehensive income (held for trading), loans and receivables, financial assets held to maturity and financial assets available for sale. The classification depends on the purpose for which the financial assets. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

(i) Financial assets that are measured at fair value through the statements of comprehensive income (held for trading).

Financial assets that are measured at fair value through the statements of comprehensive income are financial assets that are traded, if the financial assets acquired principally for selling or repurchasing in the near future, and there is evidence of a tendency to take short-term profit.

3. KEBUAKAM AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

1) Aset Keuangan (Lanjutan)

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif (untuk diperdagangkan).

Keuntungan dan kerugian yang timbul atas perubahan nilai wajar investasi berhubungan dengan aset keuangan yang diperdagangkan, diakui sebagai laba-rugi yang belum direalisasi diakui dalam laporan laba-rugi komprehensif tahun berjalan.

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan aset tersebut tidak ada di pasar bursa. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada nilai perolehan.

(iii) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan yang dikelompokkan dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh waktunya telah ditetapkan. Manajemen yakin untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali :

- investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif;
- investasi yang ditetapkan nilai perolehannya dalam kelompok tersedia untuk dijual;
- investasi yang sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui berdasarkan harga perolehan setelah dilurangi atau ditambahkan dengan amortisasi premi (diskonto).

(iv) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivatif yang ditujukan untuk dimiliki sampai periode yang tidak ditentukan, yang mana dapat dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga dan valuta asing.

3. THE ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Financial Instrument (Continued)

1) Financial Assets (Continued)

(i) Financial assets that are measured at fair value through the statements of comprehensive income (held for trading).

Gains and losses arising from changes in fair value of investments in connection with specified financial assets, are recognized as unrealized income or losses recognized in the statements of comprehensive income for the year.

(ii) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and the asset does not exist in the stock market. At the time of initial recognition, loans and receivables are recognized at cost.

(iii) Held to Maturity Financial Assets

Financial assets are classified as held to maturity are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities. Management is confident to have the financial assets to maturity, unless:

- investments are designated upon initial recognition as financial assets at fair value through the statements of comprehensive income;
- investment that is designated by entity as available for sale, and;
- investments as loans and receivables.

At the time of initial recognition, financial assets held to maturity are recognized at their acquisition cost net of or added by the premium (discount) amortization.

(iv) Available-for-Sale Financial Assets

Financial assets that are grouped as available for sale are non-derivative financial assets intended to be held until an unspecified period, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates and foreign exchange.

3. KEBUJUKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

1) Aset Keuangan (Lanjutan)

(v) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual dalam pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi. Selanjutnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajarnya sampai dengan dihentikan pengakuannya, dimana laba atau rugi atas perubahannya dicatat pada laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari valiasi kurs. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba dan rugi yang sebelumnya dicatat pada laporan perubahan ekuitas, dibalik pada laporan laba rugi komprehensif.

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat direkapitulasi untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila:

- i. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- ii. Perusahaan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyewaan dan (a) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tersebut dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan kewajiban baru yang ditanggung; dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

3. THE ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Financial Instrument (Continued)

1) Financial Assets (Continued)

(v) Derecognition of Financial Assets

At the time of initial recognition, available-for-sale financial assets are recognized at fair value plus transaction costs. Subsequently, available-for-sale financial assets are measured at fair value through derecognition, in which the gain or loss on changes recognized in the statement of changes in equity, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses. If the available-for-sale financial asset is impaired, the cumulative gain or loss previously recognized in the statement of changes in equity is recognized in the statements of comprehensive income.

Termination recognition of a financial asset, or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, occurs when:

- i. Contractual rights to receive cash flows from the financial asset are expire, or
- ii. The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows without material delay to a third party through a substitution agreement and (a) transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) does not transfer substantially all the risks and do not have and rewards of ownership of the financial assets, but has transferred control of the assets.

At the time of derecognition of the financial asset entirely, the difference between the carrying amount and the sum of (i) payments received, including the new acquired asset is reduced by the new liabilities incurred, and (ii) the cumulative gain or loss that had been recognized directly in equity, should be recognized in the statements of comprehensive income.

3. KEBUJUKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

1) Aset Keuangan (Lanjutan)

(vi) Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan mengasahui apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari salah satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak pemegang atau kelompok pihak pemegang mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak pemegang akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang.

2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2011) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif atau hutang dan pinjaman. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai hutang dan pinjaman.

Pengakuan awal liabilitas keuangan dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi hutang usaha dan hutang lainnya, hutang beresasi dan liabilitas keuangan lancar dan tidak lancar lainnya.

Setelah pengakuan awal, hutang dan pinjaman yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

3. The Accounting Policies (Continued)

c. Financial Instrument (Continued)

1) Financial Assets (Continued)

(vi) Impairment of Financial Assets

At each statements of financial position date, the Company assesses whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment of financial assets is deemed to have occurred if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (an adverse event), and that loss event has an impact on estimated future cash flows of the financial assets or group of financial assets that can be reliably estimated.

Evidence of impairment may include indicators of the borrower or group of borrowers experiencing significant difficult financial, default or delinquency in interest or principal payments, it is probable that the borrower will enter bankruptcy or financial reorganization, and at the time of observable date indicating a measurable decrease in estimated future cash flows.

2) Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of SFAS No. 55 (Revised 2011) are classified as financial liabilities at fair value through the statements of comprehensive income or loans and borrowings. At the statements of financial position date, the Company has no financial liabilities other than those classified as loans and loan.

Initial recognition of financial liabilities are carried at fair value plus transaction costs that are directly attributable.

The Company's financial liabilities include account payables and others payables, related payables and others current and non-current financial liabilities.

After initial recognition, loans and borrowings that are charged with interest, subsequently measured at cost which are amortized by using the effective interest rate.

3. KEBUJUKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

2) Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(f) Pengakuan dan Pengukuran Awal

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif ketika liabilitas tersebut diidentifikasi pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

(g) Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak tersebut diidentifikasi, atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dan pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut diakui sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

(h) Kating hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto/bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, bank, investasi jangka pendek dan deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dan tidak digunakan sebagai jaminan. Kas dan setara kas yang telah dikenakan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas.

g. Piutang dan Penyisihan Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai wajar sesuai PSAK No.51 (Revisi 2010) Instrumen Keuangan, Penyajian dan PSAK No.55 (Revisi 2011) Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran.

3. THE ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Financial Instrument (Continued)

2) Financial Liabilities

(f) Initial Recognition and Measurement

Gains and losses are recognized in the statements of comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process using the effective interest method.

(g) Derecognition of Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the liabilities specified in the contract is discharged, canceled or expired.

When a financial liabilities was changed with other financial liabilities and same lender of the terms that are substantially different, or if the terms of a financial liabilities are substantially modified, an exchange or modification of terms are stated as an initial derecognition of financial liabilities and recognition of new financial liabilities, and the difference between the carrying amount of each financial liabilities are recognized in the statements of comprehensive income.

(h) Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, there is a legal right to offset the carrying amount of financial assets and financial liabilities, and there is the intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liabilities simultaneously.

f. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash, short-term investments and current deposit with three-month maturities or less and are not used as collateral. Cash and cash equivalents appropriated or that can not be used freely does not categorized as cash and cash equivalents.

g. Receivables and Allowance for Doubtful

Receivables are stated at fair value in accordance with SFAS No. 50 (Revised 2010) Financial Instruments : Presentation and SFAS No. 55 (revised 2011) Financial Instruments : Recognition and

3. KEBUJUKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Piutang dan Penyisihan Piutang (Lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai wajar piutang usaha bila terjadi indikasi tidak terbagusnya piutang usaha dan penurunan nilai wajar piutang usaha (impairment) diatur dengan SK Direksi No.013/DK/PTS/XI/2010 tanggal 9 Desember 2010, sebagai berikut :

a. Piutang pada Pemerintah dan BUMN

Umur Piutang (Bulan) / Age Receivables
0-12
>12-15
>15-18
>18-21
>21-24
>24-27
>27-30
>30-33
>33-36

b. Piutang pada pihak swasta

Penurunan nilai piutang usaha dihitung masing-masing per individu setelah jatuh tempo pada tahun pertama menggunakan metode nilai kini dari arus kas masa depan (discounted cash flow) dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia, dan untuk tahun berikutnya menggunakan metode discounted cash flow dan penurunan nilai (impairment) sama dengan piutang pada Pemerintah dan BUMN.

c. Jika piutang pada pemerintah dan BUMN telah berumur lebih dari 1 tahun dan setelah dilakukan analisa risiko terdapat keyakinan bahwa piutang tersebut tidak dapat terbagih, maka dilakukan penurunan nilai piutang secara individu dengan menggunakan metode discounted cash flow dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia dan penurunan nilai.

h. Persediaan

Persediaan dituliskan atas dasar nilai perolehan (at cost) dan pemakaiannya menggunakan metode FIFO (First In First Out). Untuk memverifikasi nilai persediaan barang, secara berkala dilakukan stock opname.

Efektif tanggal 1 Januari 2009 Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 14 - Persediaan.

3. THE ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Receivables and Allowance for Doubtful (Continued)

Calculation of the impairment value of accounts receivable if there is indication of uncollectible account receivables and impairment value of accounts receivable is set by the Board of Directors' Decree No.013/DK/PTS/XI/2010 dated December 9, 2010, as follows :

a. Receivables to the Government and State-Owned Enterprises (SOE)

Persentase / Percentage
0%
5%
10%
20%
30%
40%
50%
50%
100%

b. Receivables in the private sector

Impairment value of account receivables are respectively calculated per individual after first year maturity held using the present value of future cash flows (discounted cash flow) with interest rate of Bank Indonesia, and for the next year using the discounted cash flow method and impairment equal to the receivables to the Government and State-Owned Enterprises (SOE).

c. If the government and SOE account receivables have been outstanding for more than 1 year after the risk analysis and there is confidence that the receivables are not collectible, it is done individually for impairment of receivables using the discounted cash flow interest rate of Bank Indonesia and impairment.

h. Inventaris

Inventories are recorded on acquisition value (at cost) and using FIFO (First In First Out). To verify the value of stock, stock taking is done periodically.

Effective on January 1, 2009, the Company has adopted SFAS No. 14 - Inventory.

3. KEBUJUKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

k. Persediaan (Lanjutan)

Perubahan mendasar pada standar yang direvisi antara lain Perusahaan hanya menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama dan pembelian persediaan dengan persyaratan penyelesaian tunggahan (deferred settlement terms), perbedaan antara harga beli untuk persyaratan kredit normal dan jumlah yang dibayarkan diakui sebagai beban harga selama periode pembiayaan. Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi atas penerapan PSAK No.14 (Revisi 2008) – Persediaan tersebut.

i. Properti Investasi

Efektif 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 13 (Revisi 2011) – Properti Investasi. Sesuai PSAK tersebut, properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee / penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak

- Digunakan untuk produksi atau penyediaan barang atau jasa atau tujuan administratif, atau
- Dijual dalam kegiatan sehari-hari.

Perusahaan menggunakan model harga perolehan (cost model) sebagai kebijakan akuntansinya dan sesuai ketentuan PSAK tersebut di atas. Perusahaan mengungkapkan nilai wajar properti investasi dalam catatan atas laporan keuangan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan (dijual atau disewakan sesuai sewa pembiayaan), laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada periode terjadinya.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif saat terjadinya.

Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) No.30.1/DKPTS/VII/2008 tanggal 28 Agustus 2008, tentang Pengalihan Kembali Bazeman Nilai Kapitalisasi Aset Tetap Perusahaan, ditetapkan sebagai berikut:

- Peralatan kantor & rumah tangga mulai dari Rp 15.000.000,- atau lebih.
- Peralatan umum mulai dari Rp 30.000.000,- atau lebih.

3. THE ACCOUNTING POLICIES (Continued)

k. Inventories (Continued)

Fundamental changes in the revised standards include the Company must use the same cost formula for all inventories that have similar nature and use and purchase of inventory with deferred settlement terms, the difference between the purchase price for normal credit terms and the amount paid recognized as interest expense over the period of financing. There is no change in the accounting policy for the application of SFAS 14 (Revised 2008) – the Inventory.

i. Investment Properties

Effective January 1, 2012, the Company adopted SFAS No. 13 (Revised 2011) – Investment Properties. Due to the SFAS, investment property is property (land or building or part of a building or both) are controlled (by the owner or lessee / finance lease) to earn rentals or for capital appreciation or both, and not to:

- Used for the production or supply of goods or services or administrative purposes, or
- Sold in daily activities.

The company uses a model of the acquisition cost (cost model) as its accounting policy and in accordance with SFAS mentioned above. Company discloses the fair value of investment property in the notes to the financial statements.

Investment property is derecognised upon disposal (sold or leased under finance lease), the gain or loss arising from the retirement or disposal are recognized in the statements of comprehensive income in the period incurred.

Maintenance and repair costs of investment property are recognized in the statements of comprehensive income as incurred.

Fixed assets are recorded at cost less accumulated depreciation.

Based on the Decision of the Directors of PT Brantas Abipraya (Persero) No. 30.1/DKPTS/VII/2008 dated August 28, 2008, on the Reselling Margin Fixed Asset Capitalization Company, determined as follows:

- Office Equipment & household ranging from Rp 15,000,000,- or more.
- General equipment ranging from Rp 30,000,000,- or more.

3. KEBUJUKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

j. Aset Tetap dan Penyusutan (Lanjutan)

Keputusan Lanjutan

- Kendaraan operasional mulai dari Rp 50.000.000,- atau lebih.
- Alat berat / kendaraan konstruksi mulai dari Rp 50.000.000, atau lebih.
- Perbaikan Gedung/Bangunan dan Pengrusakan Surat-surat sampai dengan Rp 100.000.000,- atau lebih.

Nilai perolehan atas pengadaan yang nilainya dibawah ketentuan diatas, diperlakukan sebagai barang yang habis pakai dan menjadi beban di unit usaha / proyek. Barang-barang tersebut diakui secara extra comptable dan wajib dilaporkan ke kantor pusat setiap 3 (tiga) bulan. Setelah proyek selesai barang-barang tersebut dijual, dan hasil penjualannya mengurangi pos beban di unit usaha/proyek yang bersangkutan.

Biaya perbaikan besar (recondisi / overhaul), pemugaran yang menambah umur aset tetap dikapitalisasi menambah nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Untuk overhaul yang sampai dengan akhir suatu periode tahun buku belum selesai, dikelompokkan kedalam perkiraan aset lain-lain yang akan dikapitalisasi setelah pelaksanaan overhaul selesai.

Beban penyusutan dihitung dengan menggunakan Declining Balance Method, kecuali untuk biaya penyusutan golongan gedung / bangunan menggunakan Straight Line Method sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI No.828/KMK/04/1984 tanggal 9 Agustus 1984 sebagai penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan RI No.981/KMK-04/1983 tertanggal 31 Desember 1983 tentang penentuan jenis-jenis harta dalam masing-masing golongan harta untuk keperluan penyusutan.

Beban penyusutan setiap tahun dihitung dengan mengalikan tarif penyusutan tiap golongan harta dengan harga buku yang bersangkutan, kecuali untuk golongan IV (Bangunan/Gedung) yang didasarkan atas harga perolehannya.

Tarif penyusutan setiap golongan aset tersebut adalah sebagai berikut:

- Golongan I	:	50 % X Harga buku / book value	:	Group I	-
- Golongan II	:	25 % X Harga buku / book value	:	Group II	-
- Golongan III	:	10 % X Harga buku / book value	:	Group III	-
- Golongan IV	:	5 % X Harga buku / book value	:	Group IV	-

3. THE ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Fixed Assets and Depreciation (Continued)

Direct decision

- Operational vehicles ranging from Rp 50,000,000,- or more.
- Heavy equipment / construction vehicles ranging from Rp 50,000,000,- or more.
- Building repair and clearance letters ranging from Rp 100,000,000,- or more.

Acquisition value over the value of procurement under the provisions above, are treated as consumable items and a burden on business unit / project. These items are recorded in extra comptable and must be reported in the central office every 3 (three) months. Once the project is completed these items are sold, and the proceeds reduce the burden on the postal business unit / project.

Major repairs cost (reconditioning / overhaul), which adds in the life of the restoration of fixed assets are capitalized adding the book value of the concerned fixed assets. To overhaul the period up to the end of a financial year that has not been completed, estimates were grouped into other assets that will be capitalized after the implementation of the overhaul is completed.

Depreciation expense is calculated using the Declining Balance Method, except for buildings that is using the Straight Line Method in accordance to the Decree of Minister of Finance of Indonesian Republic No.828/KMK/04/1984 dated August 9, 1984 as a refinement of the Decree of the Minister of Finance of Republic Indonesia No.981/KMK-04/1983 dated December 31, 1983 on determination of the types of property in each class of property for depreciation purposes.

Each year, the depreciation expense are calculated by multiplying the depreciation rates for each class of assets with related book value, except for group IV (Building) which is based on the acquisition price.

Depreciation rates of each class of assets are as follows:

- Group I	-
- Group II	-
- Group III	-
- Group IV	-

3. KEBUAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

j. Aset Tetap dan Penyusutan (Lanjutan)

Sehubungan dengan proyek yang memerlukan investasi peralatan proyek dengan pertimbangan tertentu (kelemparan, peralatan khusus ataupun karena medan penggunaan proyek lain belum pasti), sehingga perhitungan penyusutan dipercepat selama masa pelaksanaan proyek dengan nilai sisa buku sebesar Rp 1.000.000,- berdasarkan keputusan Direksi Nomor: 285/DKPTS/XI/0013 tanggal 17 Nopember 2013 tentang Penyusutan Dipercepat Aset Tetap Perusahaan.

Aset dalam pelaksanaan dinyatakan sebagai biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Aset Sewa

Aset tetap yang diperoleh dengan sewa pembiayaan dianggap sejumlah nilai tunai dan seluruh pembayaran sewa ditambah harga opsi yang harus dibayar pada akhir periode sewa. Kontribusi yang terkait juga diakui dan setiap pembayaran angsuran dialokasikan sebagai pelunasan dan beban keuangan. Aset sewa disusutkan dengan metode yang sama seperti aset yang dimiliki langsung.

Keuntungan atau kerugian atas transaksi penjualan dan penyewaan kembali ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang masa sewa.

Efektif tanggal 1 Januari 2012 perusahaan telah menerapkan PSAK No.10 (Revisi 2011) – Aset Tetap dan PSAK No.30 (Revisi 2011) – Sewa.

Sesuai dengan PSAK No. 10 (Revisi 2011) – Aset Tetap, Perusahaan diharuskan memilih antara model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan harus diterapkan secara konsisten terhadap semua aset tetap dalam kelompok yang sama. Perusahaan memilih untuk menggunakan model biaya, dimana setelah pengakuan sebagai aset tetap, aset tetap pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Sesuai dengan PSAK No. 30 (Revisi 2011) – Sewa, klasifikasi sewa didasarkan atas sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada dalam lessor atau lessee. Perusahaan menerapkan PSAK No. 30 revisi secara prospektif. Perakuan akuntansi sebelumnya untuk transaksi dan saldo sewa telah diterapkan dengan benar, sehingga tidak ada perubahan kebijakan akuntansi atas penerapan PSAK No. 30 (Revisi 2011) tersebut.

3. THE ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Fixed Assets and Depreciation (Continued)

When a project requires investment in equipment projects with particular consideration (irregular, special equipment or because the uncertain risk of use of other projects), so the calculation of depreciation accelerated during the execution of the project with a book value of Rp 1,000,000.- based on the Board's decision No : 285 /DKPTS/2013 dated November 17, 2013 about the Accelerated Depreciation of Company's Fixed Assets.

Assets in the implementation are stated at cost. The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets when completed and ready for use.

Lease assets

Property and equipment acquired under finance leases are presented with a present value of all lease payments plus the option price to be paid at the end of the lease period. Related liabilities also recognized and each installment is allocated for settlement and finance charges. Leased assets are depreciated using the same method as assets held directly.

Gains or losses on sale and leaseback transactions are deferred and amortized over the lease term.

Effective January 1, 2012, the company has implemented SFAS No. 16 (Revised 2011) - Fixed Assets and SFAS No. 30 (Revised 2011) - Lease.

In accordance with SFAS No. 16 (Revised 2011) - Fixed Assets, the Company is required to choose either the cost model or the revaluation model as its accounting policy and should be set consistently to all fixed assets in the same group. The company chose to use the cost model, where after recognition as fixed assets, fixed assets at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses.

In accordance with SFAS No. 30 (Revised 2011) - Lease, lease classification based on the extent to which risks and rewards incidental to ownership of the leased asset lie under the lessor or lessee. The Company applies SFAS No. 30 revised prospectively. Previous accounting treatment for transactions and balances of lease have been implemented correctly, so there is no change in the application of accounting policy of SFAS No. 30 (Revised 2011).

3. KEBUAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

k. Penurunan Nilai Aset

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya dievaluasi untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai hilangnya terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengidentifikasi bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai aset.

l. Pengakuan Pendapatan

1) Usaha Pokok

Pendapatan usaha pokok diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian pekerjaan. Persentase penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun buku dihitung berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Rencana Progress Fisik yang ditandatangani oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dan pemberi kerja. Nilai pendapatan diperoleh dengan mengalikan persentase tersebut terhadap nilai kontrak, sehingga pendapatan yang diakui dalam suatu tahun buku

- Procento penyelesaian pekerjaan yang sudah dibayar
- Prestasi penyelesaian pekerjaan yang sudah ditagihkan tetapi belum dibayar
- Prestasi penyelesaian pekerjaan yang sudah diakui / disetujui oleh pemberi kerja tetapi belum ditagihkan.

2) Pendapatan Joint Operasi/Kerjasama Operasi (JO) / Kerjasama Operasi (KSO) dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu secara Integrated dan Job Splitting.

- Secara Integrated
Dalam hal ini Perusahaan menyertakan sebagian modal berupa kas atau peralatan sesuai kesepakatan dan laba (rugi) JO dicatat sebesar persentase kontribusi Perusahaan pada JO (intraaccountable).
- Secara Job Splitting
Dalam hal ini, Perusahaan bekerjasama dengan kontraktor lain untuk menyelesaikan proyek berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat sebelum tender dengan pemberi kerja.

Pendapatan risiko dan risiko sebesar nilai porsi Perusahaan, ditambah dengan coordination fee yang diperoleh dari mitra KSO, dalam hal Perusahaan sebagai leading firm.

3. THE ACCOUNTING POLICIES (Continued)

k. Impairment in Assets

Fixed assets and other non current assets are reviewed to find out whether there is loss on impairment if any event or change in condition that identified that the recorded value of the assets cannot be recovered. Loss caused by the impairment are recognized as much as the difference between recorded value with the recoverable value of the assets. The recoverable value is the higher value between net sale and used value assets.

l. Revenue Recognition

1) Principal business

Principal operating revenues are recognized based on the percentage of completion method. The percentage of completion of work at the end of the financial year is calculated based on the Joint Collaboration of Physical Progress signed by PT Brantas Abipraya (Persero) and employer. The revenue obtained by multiplying the percentage of the contract value, so that the recognized revenue in the fiscal year include:

- Achievement completion of the work that has been paid
- Achievement completion of the work that has been charged but not yet paid
- Achievement completion of the work that has been recognized / approved by the employer but not yet charged.

2) Joint Operation Revenue / Joint Operation (JO) / Kerjasama Operasi (KSO) are carried out with 2 (two) ways, namely as an Integrated and Job Splitting.

- In Integrated
In this case, the Company includes some of the capital in the form of cash or equipment as agreed and JO gain (loss) are recorded at the percentage contribution to the JO (intraaccountable).
- In Job Splitting
In this case, the Company cooperates with another contractor to complete the project by mutual agreement work prior to the tender with the employer.

Revenues are recognized and recorded at the value of Company's portion, added by coordination fee obtained from the KSO partners, in which case the Company as a leading firm.

3. KEBUAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

l. Pengakuan Pendapatan (Lanjutan)

3) Usaha Jasa Lainnya (Sewa Peralatan)

Pendapatan usaha sewa alat diakui setelah alat diperasikan dengan batasan jam minimum tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pendapatan jam operasi alat didasarkan atas Laporan Harian Operasi (LHO) yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Pendapatan usaha sewa alat dihitung dengan mengalikan jumlah jam operasi alat pada tahun berjalan terhadap tarif sewa moving-moving alat yang bersangkutan. Beban-belan usaha sewa alat diakui pada saat dikeluarkan/terjadi atau pada saat terhutang untuk menghasilkan pendapatan sewa alat dalam tahun yang bersangkutan.

m. Pengakuan Beban

Beban-belan produksi (beban langsung) dan beban usaha diakui pada saat terjadinya (annual basis). Khusus biaya perbaikan peralatan proyek (alat berat, peralatan umum, kendaraan) sesuai Nota Dinas Direksi No. 11/DMD/KEUK/2008 tanggal 11 Oktober 2008 dibedakan atas 2 (dua) jenis kriteria sebagai berikut:

- Biaya pemeliharaan dan perbaikan kecil (maintenance & repair) dibebankan langsung pada tahun buku yang bersangkutan.

Biaya perbaikan besar (overhaul / renovasi) yang bermanfaat untuk menambah umur alat dikapitalisasi menambah nilai buku peralatan yang bersangkutan.

n. Perpajakan

Beban pajak kini dihitung berdasarkan laba kena pajak periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat kelengkapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut ditetapkan.

Pada tanggal 4 Juni 2009 diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 tahun 2008.

3. THE ACCOUNTING POLICIES (Continued)

l. Revenue Recognition (Continued)

3) Other Service Business (Rental Equipment)

Operating revenues are recognized after the tool rental equipment is operated with a certain minimum hours restrictions agreed by both parties. Determination of the operating hours of the tool based on the Daily Report of Operations (LHO) which was approved by both parties.

Equipment rental business revenue is calculated by multiplying the number of hours of tool operation in current year to the unit rate of each instrument in question. Expenses for equipment rental businesses are recognized when incurred or owed to generate rental income during the year.

m. Expense Recognition

The burden of production (direct expenses) and operating expenses are recognized when incurred (annual basis). Special project cost in repairing the equipment (heavy equipment, general equipment, vehicles) in accordance with Directors Official Memorandum No. 11/DMD/KEUK/2008 dated October 11, 2008 divided into 2 (two) types / criteria as follows:

- Maintenance cost and minor repairs (maintenance and repair) are charged directly to the relevant financial year.

Major repair cost (overhaul/renovating) which are useful to increase usage life of equipment are capitalized in adding the book value of equipment.

n. Taxation

Current tax expense is calculated based on taxable income for the period based on applicable tax rates.

Correction to tax liabilities are recorded when the assessment is received or, if appealed against, when the results of the appeal is determined.

On June 4, 2009, Government Regulation (PP) No. 40 year 2009 was issued concerning Amendment to the Government Regulation (PP) No. 51 year 2008.

3. KEBUAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

m. Perpajakan (Lanjutan)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi yang menetapkan bahwa atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 3% untuk Pelaksanaan Konstruksi dan 4% untuk Perencanaan atau Pengawasan Konstruksi. Perusahaan tidak lagi memperhitungkan adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan karena tidak ada lagi perbedaan lemporer dalam perhitungan pajak kini. Sedangkan terhadap penghasilan yang tidak final, Perusahaan juga tidak memperhitungkan adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan, karena beda lemporer yang timbul tidak signifikan untuk diperhitungkan.

o. Imbalan Kerja

(1) Program Pensiun

Perusahaan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti berdasarkan Peraturan Dana Pensiun PT Brantas Abipraya (Persero) yang berkaitan dengan hak dan besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana diakhiri oleh Menteri Keuangan RI No. KEP-053/KM.17/2000 tanggal 14 Februari 2000. Kebijakan pendanaan terdiri dari iuran normal, iuran tambahan dan manfaat pensiun. Besaran iuran normal yang diperlukan adalah sebesar 20,56% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) terakhir. Dari jumlah tersebut peserta aktif harus membayar sebesar 5% dari PhDP dan Pemberi Kerja sebesar 15,56% dari PhDP. Iuran tambahan Dana Pensiun yang ditetapkan oleh aktuaris dari Pemberi Kerja untuk menutupi defisit. Beban pensiun selama tahun yang bersangkutan dibebankan pada laba rugi komprehensif berjalan.

(2) Imbalan Pensiun Kerja

Perusahaan membutuhkan kewajiban atas imbalan pasca kerja bagi karyawan berdasarkan Undang-Undang No.13/2003 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan PUSAK No.24 (revisi 2010) mengenai Imbalan Kerja.

Imbalan kerja yang didasarkan pada masa kerja karyawan dan penghasilan karyawan dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit yang mencerminkan jasa pekerja pada saat penilaian.

Tidak terdapat pendanaan yang diakhiri oleh Perusahaan selubung dengan estimasi kewajiban tersebut.

3. THE ACCOUNTING POLICIES (Continued)

n. Taxation (Continued)

In accordance with Government Regulation (PP) No. 51 year 2008 dated July 23, 2008 on Income Tax of Income from Construction Services which provides that on income from construction services subject to final income tax of 3% Construction and 4% Implementation for Planning or Construction Supervision, the Company no longer take into account existence of assets or deferred tax liabilities due to temporary differences which do not exist anymore in the current tax calculation. While the income is not final, the Company also does not take into account the existence of deferred assets or liabilities, which arise because of temporary differences are not significant to be taken into account.

o. Employee Benefits

(1) Pension Plan

The Company has a Defined Benefit Pension Plan by the Pension Fund Regulatory PT Brantas Abipraya (Persero) relating to the rights and magnitude of Retirement Benefits as approved by the Ministry of Finance of Republic Indonesia NO. KEP-053/KM.17/2000 dated February 14, 2000. Funding policy consists of the normal fees, additional fees and retirement benefits. The amount of the normal contribution required is equal to 20.56% of last Basic Retirement Income (PhDP). From the amount, active participants must pay for 5% of PhDP and Employer for 15.56% of PhDP. Additional Contribution Pension Fund established by the actuary of the Employer to cover the deficit. Pension expense for the year is charged to current year statements of comprehensive income.

(2) Post-Employment Benefits

The Company recorded a liability for post-employment benefits for employees based on the Act No.13/2003 on Employment in accordance with SKAS No. 24 (revised 2010) on Employee Benefits.

Employee benefits based on years of employment and employee earnings are calculated by an independent actuary using the projected unit credit method which reflects services worker at the time of assessment.

There is no funding set aside by the Company in relation with the estimated liability.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBLIKAMAN AKUNTANSI (Lanjutan)

p. Beban Tanggungan

Beban-beban yang terjadi sehubungan dengan pengurusan dan persiapan proyek-proyek dalam pengembangan ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang umur proyek pada saat proyek tersebut berjalan atau dibebankan pada saat proyek yang sedang ditangguhkan dipastikan tidak didapat atau tidak dapat diteruskan.

q. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi.

3. THE ACCOUNTING POLICIES (Continued)

p. Deferred Expenses

Expenses incurred relating managing and preparation of projects in suspended development and amortized using straight line method along the project is running or changed when the developed project certainty can not get or forwarded.

q. The use of estimates

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	2013	2012
Kas	5.834.000.000	2.003.284.000
Bank:		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (termasuk USD 105.482,18 dan USD 452.712,45 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012)	101.440.000.000	100.331.888.500
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	15.051.000.000	5.090.201.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	1.822.230.424	4.880.418.720
PT Bank Bukopin, Tbk (termasuk USD 2.000,70 dan USD 2.113,04 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012)	88.110.000	157.724.143
PT Bank Syariah Mandiri	-	21.894.875
PT Bank SumselBabel	112.678.018	112.802.085
PT Bank Lampung	-	1.700.000
PT Bank Jalor Banten	2.870.394.727	7.480.007.641
PT Bank Riau	4.791.300	4.791.300
PT BPD Papua	10.200.232.320	218.881.155
PT Bank DBS Indonesia	9.330.000.000	2.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	812.253.517	3.820.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	308.281.803	8.898.410
PT BPD Sulawesi Tengah	-	654.494
PT Permata Syariah	3.100.000	3.140.354
PT Bank UOB	20.658.478	1.048.204.435
PT BPD Bengkulu	3.511.174.738	-
Sub jumlah	145.282.941.297	127.486.881.329
Dewanah:		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	105.000.000.000	40.000.000.000
PT Bank Muarajat	40.000.000.000	-
PT Bank Mega	20.000.000.000	-
Bank Permata Syariah	20.000.000.000	-
PT Bank DBS Indonesia	40.000.000.000	40.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	5.000.000.000	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	-	15.000.000.000
Sub jumlah	230.000.000.000	65.000.000.000
Jumlah	441.967.637.547	195.178.346.012

4. CASH AND CASH EQUIVALENT

This account consists of:

	2012	Cash Bank:
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (including USD 105,482.18 and USD 452,712.45 on December 31, 2013 and 2012)	100.331.888.500	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	5.090.201.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	4.880.418.720	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
PT Bank Bukopin, Tbk (including USD 2,000.70 and USD 2,113.04 on December 31, 2013 and 2012)	157.724.143	PT Bank Bukopin, Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	21.894.875	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank SumselBabel	112.802.085	PT Bank SumselBabel
PT Bank Lampung	1.700.000	PT Bank Lampung
PT Bank Jalor Banten	7.480.007.641	PT Bank Jalor Banten
PT Bank Riau	4.791.300	PT Bank Riau
PT BPD Papua	218.881.155	PT BPD Papua
PT Bank DBS Indonesia	2.000.000.000	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	3.820.000	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	8.898.410	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
PT BPD Sulawesi Tengah	654.494	PT BPD Sulawesi Tengah
PT Permata Syariah	3.140.354	PT Permata Syariah
PT Bank UOB	1.048.204.435	PT Bank UOB
PT BPD Bengkulu	-	PT BPD Bengkulu
Sub total	127.486.881.329	Sub total
Dewanah:		Dewanah:
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	40.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT Bank Muarajat	-	PT Bank Muarajat
PT Bank Mega	-	PT Bank Mega
Bank Permata Syariah	-	Bank Permata Syariah
PT Bank DBS Indonesia	40.000.000.000	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	15.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
Sub total	65.000.000.000	Sub total
Total	195.178.346.012	Total

3. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2013	2012
a. Pihak-Pihak Berelasi:		
Piutang Jasa Konstruksi	100.815.595.104	44.838.740.827
Piutang Joint Operation	20.258.778.848	43.104.871.494
Piutang Retensi	55.211.440.372	41.079.294.050
Piutang Jasa Alat	80.381.408	110.540.048
Piutang Produk Beton	62.525.000	-
Sub jumlah	185.535.696.879	129.131.247.423
b. Pihak Ketiga	28.013.844.661	5.028.100.504
Jumlah	213.549.541.540	134.157.347.927

3. ACCOUNT RECEIVABLE

This account consists of:

	2012	Third parties:
a. Related parties:		Construction Services Receivable
Construction Services Receivable	44.838.740.827	Joint Operation Receivable
Joint Operation Receivable	43.104.871.494	Retention Receivable
Retention Receivable	41.079.294.050	Equipment Services Receivable
Equipment Services Receivable	110.540.048	Concrete Product Receivable
Concrete Product Receivable	-	Sub total
Sub total	129.131.247.423	Sub total
b. Third parties:		Third parties:
Third parties:	5.028.100.504	Third parties:
Total	134.157.347.927	Total

5. PIUTANG USHAHA (Lanjutan)

5. ACCOUNT RECEIVABLE (Continued)

Rincian adalah sebagai berikut :		Details are as follows :	
a. Pihak-Pihak Berelasi :		a. Related Parties :	
Pelaksana Jasa Konstruksi Pemberi Kerja / Employer	Proyek / Project	2013	2012
Dep. PU Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII / Minister of Civil Work River Area VIII of Sumatera VIII	Proyek Irigasi Air Labitan 2 / Air Labitan 2 Irrigation Project	8.604.804.040	1.940.100.022
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air - Departemen Pekerjaan Umum / Directorate general of Water Resources - Department of Civil Works	Proyek Irigasi Komerling Stage II / Komerling Stage II Irrigation Project	3.302.541.004	-
Pemerintah RI yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Wilayah -3 Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII / Republic of Indonesia represents by the Commitment Matter of Irrigation Area - 3 Large Hall River Area Sumatera VIII	Proyek Komerling Paket IG0 6 / Komerling Package IG0 6 Project	13.180.383.128	-
Departemen Pekerjaan Umum Dirjen SDA / Department of Civil Works Directorate General of natural resources	Proyek Saluran Limping / Limping Stream Project	2.754.225.021	-
Dep. PU Dirjen Sumber Daya Air Salin Balai Besar Wilayah Sungai Cilung-Cicadane / Department of Civil Works Water Resources Large Hall of Cilung-Cicadane River Area	Proyek Normalisasi Kali Sunter / Sunter River Normalization Project	4.452.070.043	-
Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belasi / Department of Tourism, Culture, Youth and Sport of Belasi District	Proyek Kolam Renang Belasi II / Belasi II Swimming Pool Project	8.045.210.090	-
Dinas Bangunan Pemerintah Kabupaten Belasi / Department of Building of Government of Belasi District	Proyek Gedung E2 Rumah Sakit Belasi / Belasi Hospital Building E2 Project	17.232.245.693	-
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur / Department of Civil Works of East Kalimantan Province	Proyek Longsoran Gajamada / Gajamada Landslide Project	1.628.081.072	-
Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta / Department of Civil Works, Government of DKI Jakarta	Proyek Jeda Gunung Sahari JUFMP 1 / Gunung Sahari JUFMP-1 Jeda Project	3.520.030.473	-
Jumlah dipindahkan / The amount transferred		65.771.774.454	1.849.190.922

5. PIUTANG USHAHA (Lanjutan)

5. ACCOUNT RECEIVABLE (Continued)

a. Pihak-Pihak Berelasi (Lanjutan) : Pelaksana Jasa Konstruksi (Lanjutan)		a. Related Parties (Continued) : Construction Services Receivable (Continued)	
Pemberi Kerja / Employer	Proyek / Project	2013	2012
Jumlah pindahan / Amount of transfer		65.771.774.454	1.849.190.922
PPK Sungai Pantai II, SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Brantas / PPK Beach River II, SNVT Network Executor of Brantas Water Resources	Proyek Wonokromo Paket 3 / Wonokromo Package 3 Project	5.120.050.748	-
PT PLN (Persero)	Proyek MHP Santang -Lombok / MHP Santang - Lombok Project	1.002.883.258	72.889.276
PT PLN (Persero)	Proyek MHP Prati-Papua Barat / MHP Prati-Papua Barat Project	-	2.020.377.081
PT PLN (Persero)	Proyek MHP Ndungga-Flores / MHP Ndungga - Flores Project	3.176.689.547	3.583.883.461
PT Perhutani	Proyek Pabrik Plywood / Plywood Factory Project	1.711.147.876	14.695.848.938
SNVT PPK Pembangunan Jalan Malaka-Toliki-Umu / SNVT PPK Malaka-Toliki-Umu Street Construction	Proyek Pembangunan Jalan ESH Lakuan Buoi / ESH Lakuan Buoi Street Construction Project	372.909.830	372.909.830
PPK Bidang Bina Marga Unas Pekerjaan Umum Provinsi Riau / PPK Field of River Marga of Civil Works Department of Riau Province	Proyek Jln Bunut I eluk Meranti / Bunut Street Meranti Day Project	13.845.078.884	18.403.438.467
Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belasi / Department of Tourism, Culture, Youth and Sports of Belasi District	Proyek Kolam Renang Belasi II / Belasi II Swimming Pool Project	-	3.057.010.385
PT Angkasa Pura 1 (Persero)	Proyek Rapih Exit Taxway Bandara Juanda / Rapih Exit Taxway Juanda Airport	1.730.528.140	-
Perum Perikanan Indonesia Galang Jakarta / Indonesian Fisheries Public Housing Branch Jakarta	Proyek rehab Jaringan Instalasi PDAM Perum Perikanan / Rehabilitation of network installation PDAM of Fisheries Public Housing	3.812.751.190	-
JO BA-Waskita-Wika	Proyek Tunnel Bendung Jatiharang / Dam Tunnel Jatiharang Project	13.388.183.737	2.031.203.847
Sub jumlah / Sub total		189.912.362.164	44.836.740.927

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PILITANG USAHA (Lanjutan)

5. ACCOUNT RECEIVABLE (Continued)

a. Pihak-pihak Berelasi / Related Parties:

a. Related Parties (Continued):

Pembiaya / Employer	Proyek / Project	2013	2012
PT Bengawan Solo / Civil of Works of Bengawan Solo	JO Proyek Bendung Sembayat / Sembayat Dam JO Project	-	10.519.830.287
Departemen Pekerjaan Umum, Dirjen Sumberdaya Air, balai besar wilayah sungai Pemali Juana, SNVT Pembangunan Waduk Jatibarang / Civil of Works, Directorate General Water Resources, Large Hall River Area of Pemali Juana, SNVT Construction of Jatibarang Dam	JO Proyek Sabodara Merapi / Sabodara Merapi JO Project	-	12.300.801.074
SNVT Pelaksanaan Jaringan SDA Serayu Opak BBWS Serayu Opak, Dirjen SDA Pekerjaan Umum / SNVT of Network Implementation of Serayu Opak BBWS Serayu Opak, Department Natural Resources of Civil Works		7.287.321.080	-
PT. PLN (Persero), Jakarta	JO Proyek Bintang Baru / Bintang Baru JO Project	3.704.883.048	20.284.049.273
SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Nusa Tenggara I Provinsi NTB, BMS Nusa Tenggara I, Dirjen SDA, Kementerian P.U. / SNVT of Network Implementation of South-east Nusa I Water Resources, Directorate General of Natural Resources of Ministry of Civil Works		5.751.088.145	-
PT Angkasa Pura 1 (Persero)	JO Gedung Bandara Juanda / Juanda Airport Building JO	3.423.470.287	-
Sub jumlah / Sub total		20.258.778.848	43.184.671.434
Piutang relensi / Retention receivable		55.211.448.372	41.079.294.058
Piutang jasa alat / Equipment services receivable		89.301.490	110.340.940
Piutang produk beton / Concrete product receivable		82.626.000	-
Jumlah / Total		185.535.896.879	129.134.247.423

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PILITANG USAHA (Lanjutan)

5. ACCOUNT RECEIVABLE (Continued)

b. Pihak Ketiga / Third Parties:

b. Third Parties:

Pembiaya Kerja / Employer	Proyek / Project	2013	2012
PT Pembangunan Jaya Ancol	Proyek Ancol Geolube / Ancol Geolube Project	7.182.717.000	-
PT Poso Energy	Proyek PLTA Poso II / PLTA Poso II Project	1.477.347.907	1.477.347.907
PT Jaya Dinamika Geohydroenergi	Proyek PLTMH Gianlen / PLTMH Gianlen Project	8.905.080.814	-
PT Jaya Dinamika Geohydroenergi	Proyek PLTMH Gianlen 3 / PLTMH Gianlen 3 Project	2.945.883.838	-
PT Megapower Malmur	Proyek PLTMH Bantaeng-1 / PLTMH Bantaeng-1 Project	207.240.000	-
PT. Bio Jatropha Indonesia	Proyek PLMTH Gibalapung / PLMTH Gibalapung Project	-	2.481.311.980
Sub jumlah / Sub total		18.898.979.217	3.958.658.787
Piutang relensi / Retention receivable		8.034.200.818	1.087.441.100
Piutang jasa konsultan / Consultant services receivable		170.704.545	-
Jumlah / Total		28.813.944.881	5.026.180.564

Piutang usaha dijamin pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BPD Jawa Barat & Banten, Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebagai jaminan dari fasilitas kredit yang diterima. (lihat catatan No. 3c,3d,3g,17,33 dan 35)

Account receivables pledged in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BPD Jawa Barat & Banten, Tbk and PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk as collateral from the loan obtained. (see notes No. 3c,3d,3g,17,33 and 35)

6. PILITANG LAIN-LAIN

6. OTHERS RECEIVABLE

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2013	2012	
a. Pihak-pihak berelasi / Related parties:			
PT Fortius Investment Asia	1.700.000.000	-	PT Fortius Investment Asia
PT Caltransa Energi Nusantara	1.000.000.000	-	PT Caltransa Energi Nusantara
PT Prospekt Engineering	700.000.000	-	PT Prospekt Engineering
Koperasi Karyawan Brantas Abipraya JO Jatibarang	1.000.000	1.200.308.804	Koperasi Karyawan Brantas Abipraya Jatibarang JO
Sub jumlah	2.591.899.899	1.200.308.804	Sub total
b. Pihak ketiga / Third parties:			
Lapindo Brantas Inc.	1.188.835.000	8.288.835.000	Lapindo Brantas Inc.
Pegawai	70.210.000	33.400.000	Employee
PT Poso Energy	-	1.298.563.319	PT Poso Energy
Lain-lain	8.181.480	52.258.802	Others
Sub jumlah	1.268.836.480	9.673.858.221	Sub total
Jumlah	4.169.836.480	10.874.185.155	Total

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Piutang PT Caltrawala Energi Nusantara per 31 Desember 2013 merupakan piutang PT Brantas Caltrawala Energi - (entitas anak PT Brantas Energi).

Piutang PT Fortius Investment Asia per 31 Desember 2013 merupakan piutang PT Perjaya Brafo Energi - (entitas anak PT Brantas Energi).

Piutang PT Prospekt Engineering per 31 Desember 2013 merupakan piutang PT Brantas Prospekt Energi - (entitas anak PT Brantas Energi).

Piutang lain-lain kepada PT Poso Energy per 31 Desember 2012 merupakan klaim keterlambatan pembayaran tagihan atas proyek pembangunan pemukiman air dan headpond PT TA Poso II. Piutang tersebut telah diterima pencairannya tahun 2013.

Piutang kepada Lapindo Brantas Inc. per 31 Desember 2013 dan 2012 sesuai dengan akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Antara PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Lapindo Brantas, Inc. No. 02 tanggal 8 Desember 2012 notaris Wilek Widi Astuti, SH bahwa penyelesaian kewajiban oleh pihak Lapindo Brantas Inc. dilakukan dengan pembayaran melalui bilyet giro BNI nomor BE 347881 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan bilyet giro BNI nomor BE 347884 tanggal 4 Februari 2013 sebesar Rp 8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah) yang telah diganti dengan bilyet giro Bank Mega No. GJ 246141 tanggal 4 Februari 2013 sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah), bilyet giro Bank Mega No. GJ 246142 tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank Mega No. GJ 246144 tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah). Pada tahun 2012 telah diterima oleh Perusahaan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan tahun 2013 sebesar Rp 7.100.000.000,- (tujuh milyar seratus juta rupiah) (lihat Catatan No.3d.3e.3g.33 dan 35).

6. OTHERS RECEIVABLE (Continued)

Receivable to PT Caltrawala Energi Nusantara on December 31, 2013 is receivable of PT Brantas Caltrawala Energi - (subsidiary of PT Brantas Energi).

Receivable to PT Fortius Investment Asia on December 31, 2013 is receivable of PT Perjaya Brafo Energi - (subsidiary of PT Brantas Energi).

Receivable to PT Prospekt Engineering on December 31, 2013 is receivable of PT Brantas Prospekt Energi - (subsidiary of PT Brantas Energi).

Others receivable from PT Poso Energy on December 31, 2012 is a claim of delay in payment billed for water development project and headpond headpond PT TA Poso II. The receivable was received disbursement in 2013.

Receivable from Lapindo Brantas Inc. on December 31, 2013 and 2012 in accordance with the Deed of Settlement Agreement Between PT Brantas Abipraya (Persero) and Lapindo Brantas, Inc. No. 02 dated December 8, 2012 notary Wilek Widi Astuti, SH that settlement obligations by Lapindo Brantas Inc. made with payment via BNI bilyet giro number BE 347 881 dated December 20, 2012 amounted of Rp 1,500,000,000.- (one billion five hundred million rupiahs) and BNI bilyet giro number BE 347884 dated February 4, 2013 amounted of Rp 8,500,000,000.- (eight billion five hundred million rupiahs) which has been replaced with Mega Bank bilyet giro No. GJ 246141 dated February 4, 2013 amounting to Rp 1,600,000,000.- (one billion six hundred million rupiahs) Mega Bank bilyet giro No. GJ 246142 dated February 18, 2013 amounting to Rp 1,600,000,000.- (one billion six hundred million rupiahs) and Mega Bank bilyet giro No. GJ 246144 dated March 4, 2013 amounting to Rp 5,300,000,000.- (five billion three hundred million rupiahs). In 2012, Company has received total amount to Rp 1,500,000,000.- (one billion five hundred million rupiahs) and in 2013 total amount to Rp 7,100,000,000.- (seven billion one hundred million rupiahs). (see Note

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA

Akun ini terdiri dari:

a. Pihak-pihak Berelasi:

Pemberi Kerja / Employer

PT Adhi Karya (Persero), Tbk Cabang II Riau-Sumbar / PT Adhi Karya (Persero), Tbk Branch II Riau - West Sumatra

JO BA-Wackka-Wika

Direktoral Jenderal Sumber Daya Air - Departemen Pekerjaan Umum / Water Resources Directorate General - Department of Civil Works

Dep. PU Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII / Department of Civil Work River Area VIII of Sumatera VIII

PT PLN (Persero)

PT PLN (Persero)

PT PLN (Persero)

SNVT PPK Pemukiman Jalan Malaka-Toliki-Umu / SNVT PPK Malaka-Toliki-Umu Street Construction

PPK Sungai Pantai II, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Brantas / PPK Beach River II, SNVT Malawik Implementation of Brantas Water Resources

PPK Sungai Pantai II, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Brantas / PPK Beach River II, SNVT Malawik Implementation of Brantas Water Resources

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pengembangan Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau & Sumber Daya Air Propinsi Sumatra Barat / Power of Budget User of Management Development Program & River, Lake Conservation of Water Resources of West Sumatra Provinces

Jumlah dipindahkan / The amount transferred

7. GROSS AMOUNT DUE FROM EMPLOYER

This account consists of:

a. Related Parties:

2013

2012

Pemb. Jln Dak2, Mahabo, Simp. Menggala / Unit2, Mahabo, Simp. Menggala Street Construction

8.288.878.231

8.288.878.231

Proyek Tunnel Bandung Jabbarang / Dara Tunnel Jabbarang Project

1.003.885.205

12.088.599.300

Proyek Irigasi Komereng Stage II / Komereng Stage Irrigation Project

1.828.037.808

9.851.456.478

Proyek Air Labitan 2 / Air Labitan 2 Project

1.258.235.705

2.518.507.258

Proyek MHPP Sarung / MHPP Sarung Project

7.275.784.084

8.143.986.350

Proyek MHPP Prati-Papua Barat / MHPP Prati-Papua Barat Project

1.561.855.198

12.008.011.448

Proyek MHPP Nanggung Flores / MHPP Nanggung Flores Project

501.870.001

17.020.485.500

Proyek Pembangunan Jalan ESH Lakoran Buol / ESH Lakoran Buol Street Construction Project

1.727.188.870

12.184.280.754

Proyek Wonoremo Paket 3 / Wonoremo Package 3 Project

1.540.747.742

-

Proyek Wonoremo Paket 3 / Wonoremo Package 3 Project

722.488.853

-

Proyek Embung Limpato / Embung Limpato Project

-

88.877.330

23.718.052.627

81.235.143.789

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMEBER KERJA (Lanjutan) 7. GROSS AMOUNT DUE FROM EMPLOYER (Continued)

a. Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan): Pemberi Kerja / Employer		a. Related Parties (Continued):	
Projek / Project	2013	2012	
Jumlah pindahan / Amount of transfer	23.718.852.897	81.239.143.799	
Pemerintah RI yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Wilayah - 3 Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VII / Republic of Indonesia represents by the Commitment Maker of Irrigation Area - 3 Large Hall River Area Sumatera VII	2.131.185.217	14.155.585.024	
Dinas Pekerjaan Umum Prop. Kalimantan SDA / Department of Civil Works of East Kalimantan Province in the field of Natural Resources	-	8.221.538.454	
Departemen Pekerjaan Umum Dirjen SDA / Directorate of Civil Works Directorate General of Natural Resources	5.585.185.598	1.723.517.702	
PPK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau / PPK field of Bina Marga of Civil Works Department of Riau Province	-	52.547.208	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat / Disaster Prevention Board of West Sumatera Area	-	408.000.000	
PPK Irigasi dan Rawa IV SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII / PPK Irrigation and Swamp IV SNVT of Network Water Implementation of Sumatera VII River Area Large Hall	-	2.502.890.000	
Badan Penanggulangan Bencana / Disaster Prevention Board	-	8.255.888.842	
Serikat Non Vertikal tertentu Pelaksana Pengelola SDA Brantas / Certain Non Vertical Working Unit of Management Implementor of Brantas Natural Resources	308.098.058	38.122.423.055	
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Provinsi Papua (Puncak Jaya) / Working Unit Implementor of Papua Province Area V National Street (Puncak Jaya)	-	21.577.070.000	
Jumlah dipindahkan / The amount transferred	31.842.481.468	170.347.296.794	

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMEBER KERJA (Lanjutan) 7. GROSS AMOUNT DUE FROM EMPLOYER (Continued)

a. Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan): Pemberi Kerja / Employer		a. Related Parties (Continued):	
Projek / Project	2013	2012	
Jumlah pindahan / Amount of transfer	31.842.481.468	170.347.296.794	
SNVT Pelaksanaan Jaringan SDA Serayu Opak BBWS Serayu Opak, Dirjen SDA Pekerjaan Umum / SNVT Natural Resources Network Implementation of Opak BBWS Serayu Opak, Directorate General of Natural Resources of Civil Works	3.702.108.784	3.702.108.784	
PT Parhutani	-	4.376.110.780	
SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi / Provinsi Sulawesi Utara / SNVT Network Water Implementation Sulawesi / of North Sulawesi	1.868.874.730	-	
SNVT Pelaksanaan Jaringan SDA Serayu Opak BBWS Serayu Opak, Dirjen SDA Pekerjaan Umum / SNVT Natural Resources Network Implementation of Opak BBWS Serayu Opak, Directorate General of Natural Resources of Civil Works	10.288.728.730	-	
Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta / Indonesian Fisheries Public Housing Branch Jakarta	472.802.085	-	
Pemerintah DKI Jakarta / Government of DKI Jakarta	2.034.032.014	-	
PT PLN (Persero)	-	790.701.750	
PT Angkasa Pura 1 (Persero)	2.054.513.191	-	
PPK-11 Pembangunan Jembatan Kelok-8 / PPK-11 Kelok-8 Bridge Construction	434.872.788	-	
PT Sanghyang Sari (Persero)	-	15.805.810.361	
Selub jumlah / Sub total	53.825.182.486	134.421.124.794	

7. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA (Lanjutan)

7. GROSS AMOUNT DUE FROM EMPLOYER (Continued)

b. Pihak Ketiga :		b. Third Party :	
Pembiayai Kerja / Employer	Proyek / Project	2013	2012
Pemerintah Republik Timur Leste / Government of Republic of Timor Leste	Proyek Rehab Reibere / Rehabilitation Reibere Project	3.891.752.831	-
PI Pembangunan Pasaka Parahangan	Proyek PLIM Pasaka 1 & 3 / PLTM Pasaka 1 & 3 Project	5.413.817.041	-
PT Pembangunan Jaya Anas, Tbk	Proyek Anas Gekube / Anas Gekube Project	230.878.881	31.048.413.015
PT Bio Jatropha Indonesia	Proyek PLTM Cibacapung / PLTM Cibacapung Project	5.272.731.235	1.502.842.311
PT Jaya Dinamika Geohydroenergi	Proyek PLTM Gianem / PLTM Gianem Project	0.240.177.123	320.174.850
PT Megapower Malmur	Proyek PLTM Bantarang 1 / PLTM Bantarang 1 Project	902.248.828	-
PT Jaya Dinamika Geohydroenergi	Proyek PLTM Gianem 3 / PLTM Gianem 3 Project	230.740.290	-
Sub jumlah / Sub total		21.997.244.130	35.474.430.282
Jumlah / Total		75.822.346.616	229.895.554.991

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan prestasi fisik pekerjaan yang telah disetujui oleh pemberi kerja, akan tetapi belum dilagihkan karena pembelian langgah antara pemberi kerja prestasi fisik dengan pengajuan pengalihan pada tanggal laporan posisi keuangan. (lihat catatan No. 3d, 3e, 3g, 3j dan 3k)

Gross amount due from employer is a physical accomplishment of work that has been approved by the employer, but has not been charged because of the difference between the date of the minutes of physical achievement with billing submission on the statements of financial position. (see notes No. 3d, 3e, 3g, 3j and 3k)

8. PERSEDIAAN

8. INVENTORIES

Alun ini terdiri dari :	2013	This account consists of : 2012	
Bahan untuk konstruksi	33.631.827.310	22.307.045.380	Material for construction
DDM dan pelumas	2.111.804.118	807.701.627	Fuel oil and lubricant
Suku cadang	248.712.800	252.215.280	Spare parts
Tanah	190.250.000	190.250.000	Land
Lainnya	1.282.118.852	893.252.867	Other
Jumlah	37.474.611.883	24.250.265.150	Total

Berdasarkan pemeriksaan terhadap kondisi fisik persediaan pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penyisihan untuk persediaan tidak diperlukan karena tingkat popubaran persediaan yang cukup tinggi.

Based on the review of inventories' physical condition at the end of the year, the Company's management believes that the allowance for inventory is not necessary because turnover level of inventories is quite high.

Hersediaan tanah merupakan persediaan tanah yang berasal dari pelunasan piutang yang dibayar dengan 3 (tiga) bidang Tanah di Bontol, sertifikat No. 02377, 02378 dan 02374 sesuai dengan akta Kuasa Menjual No. 51, 52, 53 dan 54 tanggal 28 Maret 2007. (lihat catatan no.3h)

Land inventory is an inventory of land which derived from the settlement of receivables paid with three (3) parcels of land in Bontol, certificates No. 02377, 02378 and 02374 in accordance with the Deed of Authorization to Sell No. 51, 52, 53 and 54 dated March 28, 2007. (see note no.3h)

9. UANG MUKA

9. ADVANCES

Alun ini terdiri dari :	2013	2012	
Supplier / pemasok	17.908.343.830	10.548.148.521	Supplier
Subkontraktor	10.729.636.708	3.734.428.833	Subcontractor
Konsultan	368.200.500	-	Consultant
Jumlah	29.006.181.037	14.282.577.354	Total

Uang muka supplier / pemasok merupakan uang muka atas pembelian dan pengadaan bahan / material untuk konstruksi sesuai dengan surat perjanjian jual beli yang akan diperhitungkan dengan pembayaran tagihan supplier

Uang muka subkontraktor merupakan uang muka yang dibayarkan Perusahaan kepada subkontraktor sesuai dengan kontrak, untuk pelaksanaan suatu proyek yang akan diperhitungkan dengan pembayaran tagihan subkontraktor.

This account consists of:

Supplier advances represents an advance on purchase and procurement of materials for construction in accordance with the purchase agreement letter which will be offset by the payment of supplier bills

Subcontractor advances represents advances paid by Company to subcontractors in accordance with the contract, for the implementation of a project which will be offset with the payment of subcontractor bill

10. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

10. PREPAID EXPENSES

Alun ini terdiri dari :	2013	2012	
Pekerjaan persiapan	7.858.183.048	2.395.108.450	Preparation works
Peralatan proyek	5.938.858.282	4.473.708.201	Project equipment
Proses bank dan jaminan	4.118.770.800	5.640.032.330	Bank process and guarantee
Sewa rumah dan lahan	988.833.077	503.807.042	House and land rents
Asuransi	971.915.707	1.211.407.037	Insurance
Peralatan kantor/rumah tangga	158.707.741	325.151.818	Office equipment / household
Lain-lain	-	500.000.000	Others
Jumlah	19.778.385.683	15.049.295.883	Total

Beban dibayar dimuka peralatan proyek merupakan peralatan umum, kantor dan kendaraan yang akan dibayarkan selama umur proyek sesuai dengan Nota Dinas Direksi No. 11/DINDAG/2008 tanggal 11 Oktober 2008. (lihat catatan No.3m)

Prepaid expenses of project equipment is general equipment, office and vehicles that will be expensed over the life of the project in accordance with the Official Memorandum of Director No. 11/DINDAG/2008 dated October 11, 2008 (see note No.3m)

11. PFRPAJAKAN

11. TAXATION

a. Pajak Dibayar Dimuka	2013	2012	
Alun ini terdiri dari :			
Pajak Pertambahan Nilai	23.008.002.034	6.035.861.268	Value Added Tax
PPH final konstruksi	6.218.082.040	1.448.782.708	Construction final income tax
PPH pasal 22	71.824.875	22.800.820	Income tax art 22
PPH pasal 4 ayat (2)	17.810.000	-	Income tax art 4 paragraph 2
Jumlah	39.219.699.650	11.498.534.886	Total
b. Utang Pajak			
Alun ini terdiri dari :			
PPH Final	6.172.325.480	5.530.072.000	Final income tax
PPH Pasal 23	900.000.887	970.383.271	Income tax art 23
PPH Pasal 21	500.000.580	372.150.100	Income tax art 21
PPH Pasal 4 ayat (2)	178.508.537	-	Income tax art 4 paragraph 2
PPH Pasal 29	-	18.600.000	Income tax art 29
PPH Wapu	-	817.557.310	Value Added Tax - Wapu
Jumlah	7.779.604.910	7.515.712.785	Total

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas pajak Perusahaan dan tidak terdapat kemungkinan hasil pemeriksaan berbeda dengan saldo utang pajak tersebut.

a. (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan

Alam ini terdiri dari:

	2013
Pajak penghasilan final	(36.557.200.116)
Pajak kini	-
Pajak tangguhan	-
Jumlah	(36.557.200.116)

Pajak Final

Merupakan pajak penghasilan final atas pendapatan konstruksi tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 36.557.200.116, dan Rp 21.458.618.217, sesuai PP No. 40 Tahun 2009

Pajak Kini

Perhitungan pajak kini sebagai berikut:

	2013
Laba konsolidasi sebelum beban pajak penghasilan	100.341.168.210
Diturangi:	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan - entitas anak	(3.457.102.412)
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	112.798.280.722
Perbedaan permanen:	
Laba atas pendapatan yang lebih dikenakan PPh final	(112.798.280.722)
Laba kena pajak	-
Jumlah pajak penghasilan	-

Pada tahun 2013 dan 2012, seluruh pendapatan jasa konstruksi telah dikenakan PPh Final.

Tidak terdapat (beban) manfaat pajak tangguhan dan aset (keajiban) pajak tangguhan sampai dengan Desember tahun 2013 dan 2012 karena seluruh penghasilan perusahaan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sehingga tidak terdapat beda temporer yang akan dikompensasikan dimasa yang akan datang.

Perusahaan telah menerima Surat Kelelapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) sebagai berikut:

Tahun 2013:

- Surat Kelelapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) Nomor: KEP-00047.PPN/WPJ.18/KP.0403/2013 tanggal 7 Maret 2013 untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus - Desember 2012 sebesar Rp 15.421.201.514,-.

11. TAXATION (Continued)

Regarding the prevailing regulations, the Director General of Taxation can conduct tax audit for the Company and it is possible that the examination results differ from the tax payable balance.

a. Income (Expenses) Income Tax

This account consists of:

	2013	
Pajak penghasilan final	(21.458.618.217)	Final income tax
Pajak kini	-	Current tax
Pajak tangguhan	-	Deferred tax
Jumlah	(21.458.618.217)	Total

Final Tax

Is a final income tax on the construction income in 2013 and 2012 each amounting to Rp 36,557,200,116, and Rp 21,458,618,217, according to PP No. 40 year 2009

Current Tax

Current tax calculation as follows:

	2013	
Laba konsolidasi sebelum beban pajak penghasilan	72.267.068.210	Profit consolidation before income tax expenses
Diturangi:		Less:
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan - entitas anak	98.088.700	Profit (loss) before income tax of subsidiaries
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	72.167.072.640	Profit before income tax of the holding company
Perbedaan permanen:		Permanent differences:
Laba atas pendapatan yang lebih dikenakan PPh final	(72.167.072.640)	Profit base income that has charged by final income tax
Laba kena pajak	-	Taxable income
Jumlah pajak penghasilan	-	Total income tax

In 2013 and 2012, all construction services revenue have been subjected to final income.

There is no deferred tax benefit (expense) and deferred tax assets (liabilities) until December 2013 and 2012 as the Company's total income is subjected to final income tax so that there are no temporary differences will be compensated in the future

The Company has received a Letter of Tax Refund Excess Payment (SKPKPP) as follows:

Year 2013:

- Letter of Tax Refund Excess Payment (SKPKPP) Number: KEP-00047.PPN/WPJ.18/KP.0403/2013 dated March 7, 2013 for Value Added Tax for tax period of August to December 2012 amounting to Rp 15,421,201,514,-.

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Tahun 2013: (Danjutan)

- Surat Kelelapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) Nomor: KEP-00130.PPN/WPJ.18/KP.0403/2013 tanggal 20 Juni 2013 untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2013 sebesar Rp 15.593.973.640,-.

Atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut telah diterima oleh Perusahaan tahun 2013.

Tahun 2012:

- Surat Kelelapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) Nomor: KEP-00029.PPN/WPJ.18/KP.0303/2012 tanggal 8 Maret 2012 untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2011 sebesar Rp 3.845.345.821,-.
- Surat Kelelapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) Nomor: KEP-00027.PPN/WPJ.18/KP.0403/2012 tanggal 25 Juli 2012 untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2012 sebesar Rp 6.130.316.789,-.
- Surat Kelelapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) Nomor: KEP-00052.PPN/WPJ.18/KP.0403/2012 tanggal 13 September 2012 untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari-April 2012 sebesar Rp 6.040.951.338,-.
- Surat Kelelapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) Nomor: KEP-00089.PPN/WPJ.18/KP.0403/2012 tanggal 19 November 2012 untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei-Juli 2012 sebesar Rp 7.828.013.794,-.

Atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut telah diterima oleh Perusahaan tahun 2012. (lihat catatan No. 3a)

11. TAXATION (Continued)

a. Income (Expenses) Income Tax (Continued)

Year 2013: (Continued)

- Letter of Tax Refund Excess Payment (SKPKPP) Number: KEP-00130.PPN/WPJ.18/KP.0403/2013 dated June 20, 2013 for Value Added Tax for tax period of March 2013 amounting to Rp 15,593,973,640,-.

All of tax overpayment refund have been received by the Company in 2013.

Year 2012:

- Letter of Tax Refund Excess Payment (SKPKPP) Number: KEP-00029.PPN/WPJ.18/KP.0303/2012 dated March 8, 2012 for Value Added Tax for Tax Period of October 2011 amounting to Rp 3,845,345,821,-.
- Letter of Tax Refund Excess Payment (SKPKPP) Number: KEP-00027.PPN/WPJ.18/KP.0403/2012 dated July 25, 2012 for Value Added Tax for Tax Period of January 2012 amounting to Rp 6,130,316,789,-.
- Letter of Tax Refund Excess Payment (SKPKPP) Number: KEP-00052.PPN/WPJ.18/KP.0403/2012 dated September 13, 2012 for Value Added Tax for tax period of February - April 2012 amounting to Rp 6,040,951,338,-.
- Letter of Tax Refund Excess Payment (SKPKPP) Number: KEP-00089.PPN/WPJ.18/KP.0403/2012 dated November 19, 2012 for Value Added Tax for tax period of May-July 2012 amounting to Rp 7,828,013,794,-.

All of tax overpayment refund have been received by the Company in 2012. (see note No. 3a)

12. JAMINAN

Alam ini terdiri dari:

	2013
Jaminan fasilitas SKIRUM	9.244.011.240
Jaminan pemeliharaan	332.008.832
Jaminan uang muka	818.857.347
Jaminan pelaksanaan	57.347.120
Jumlah	10.758.831.648

Merupakan saldo dana Perusahaan yang dijamin oleh pihak bank dan lembaga keuangan non bank.

12. GUARANTEE

This account consists of:

	2013	
Jaminan fasilitas SKIRUM	6.903.942.003	SKIRUM facility guarantee
Jaminan pemeliharaan	413.218.847	Maintenance guarantee
Jaminan uang muka	218.857.347	Advance guarantee
Jaminan pelaksanaan	544.558.410	Implementation guarantee
Jumlah	7.681.578.897	Total

Is the fund balance held by the bank and non-bank financial institutions.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP

13. FIXED ASSETS

Akan di level detail	This account consists of:			
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Addition	Pengurangan / Deduction	Saldo Akhir / Ending Balance
2013				
Nilai Perolehan / Acquisition cost:				
Perilikan langsung / Direct Owned:				
Hak atas tanah / Right on land	179.956.580.000	400.000.000	-	179.436.580.000
Bangunan / Building	4.991.509.000	-	-	4.991.509.000
Bangunan kantor pusat / Head office building	43.097.780.167	-	-	43.097.780.167
Alat besar / Heavy equipment	37.330.036.987	6.364.062.900	2.468.080.570	41.226.019.317
Kendaraan / Vehicle	1.442.350.411	-	82.410.980	1.359.939.431
Peralatan umum / General equipment	28.209.440.207	2.141.444.190	18.750.000	29.552.134.397
Peralatan kantor RT Office equipment / household	1.963.397.333	-	-	1.963.397.333
Sub jumlah / Sub total	294.971.883.185	6.905.507.290	2.550.251.550	301.327.138.925
Aset Sewa Pembiayaan / Lease equipment:				
Alat besar / Heavy equipment	43.231.629.640	38.812.255.439	-	82.043.885.079
Peralatan umum / General equipment	4.176.896.364	-	-	4.176.896.364
Sub jumlah / Sub total	47.408.526.004	38.812.255.439	-	86.220.781.443
Jumlah / Total	341.929.389.189	47.727.761.737	2.550.251.550	387.227.885.376
Akumulasi Penyusutan / Accumulated Depreciation:				
Perilikan langsung / Direct Owned:				
Bangunan / Building	1.375.877.405	249.575.419	-	1.625.452.824
Bangunan kantor pusat / Head office building	3.232.333.512	2.154.888.008	-	5.387.222.520
Alat besar / Heavy equipment	31.086.171.505	2.630.679.915	2.457.930.950	31.273.920.470
Kendaraan / Vehicle	1.416.786.208	8.254.299	82.410.980	1.248.629.527
Peralatan umum / General equipment	19.243.851.318	3.539.890.408	18.750.000	21.763.591.726
Peralatan kantor RT Office equipment / household	1.728.748.037	87.738.349	-	1.816.486.386
Sub jumlah / Sub total	58.655.511.125	7.665.127.519	2.550.091.930	68.205.546.714
Aset Sewa Pembiayaan / Lease equipment:				
Alat besar / Heavy equipment	17.686.853.206	73.685.916.190	-	41.301.419.396
Peralatan umum / General equipment	2.806.670.460	342.503.976	-	3.149.174.436
Sub jumlah / Sub total	20.493.523.666	74.031.830.166	-	44.450.593.532
Jumlah / Total	79.149.034.791	31.717.547.544	2.550.091.930	107.626.147.265
Nilai Utang / Credit Value	262.511.354.278			279.201.744.801

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (Lanjutan)

13. FIXED ASSETS (Continued)

2013	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Addition	Pengurangan / Deduction	Saldo Akhir / Ending Balance
	2013			
Nilai Perolehan / Acquisition cost:				
Perilikan langsung / Direct Owned:				
Hak atas tanah / Right on land	26.745.100.000	152.211.480.000	-	179.956.580.000
Bangunan / Building	12.622.036.000	-	7.630.527.000	4.991.509.000
Bangunan kantor pusat / Head office building	36.043.358.567	6.104.421.608	-	43.097.780.167
Alat besar / Heavy equipment	34.107.644.437	4.000.000.000	777.607.500	37.330.036.987
Kendaraan / Vehicle	1.442.350.411	-	-	1.442.350.411
Peralatan umum / General equipment	24.901.032.867	1.907.607.500	-	26.808.640.367
Peralatan kantor RT Office equipment / household	1.628.392.333	355.000.000	-	1.983.392.333
Sub jumlah / Sub total	108.470.714.585	164.578.508.108	8.408.134.508	264.641.088.185
Aset Sewa Pembiayaan / Lease equipment:				
Alat besar / Heavy equipment	28.573.258.640	14.656.350.000	-	43.231.629.640
Peralatan umum / General equipment	4.176.896.364	-	-	4.176.896.364
Sub jumlah / Sub total	32.749.544.804	14.656.350.000	-	47.408.526.004
Jumlah / Total	171.178.668.589	179.234.858.108	8.408.134.508	311.991.385.193
Akumulasi Penyusutan / Accumulated Depreciation				
Perilikan langsung / Direct Owned				
Bangunan / Building	2.843.170.600	249.575.450	1.716.888.575	1.375.877.475
Bangunan kantor pusat / Head office building	924.833.964	2.307.494.548	-	3.232.333.512
Alat besar / Heavy equipment	30.936.372.341	740.950.201	302.130.157	31.375.192.385
Kendaraan / Vehicle	1.437.894.587	6.366.811	82.410.980	1.416.786.398
Peralatan umum / General equipment	16.327.832.143	2.915.768.175	-	19.243.600.318
Peralatan kantor RT Office equipment / household	1.553.271.331	175.476.706	-	1.728.748.037
Sub jumlah / Sub total	53.103.394.366	6.405.238.591	2.202.629.762	57.306.003.195
Aset Sewa Pembiayaan / Lease equipment:				
Alat besar / Heavy equipment	13.106.565.082	4.476.938.224	-	17.583.503.306
Peralatan umum / General equipment	2.349.990.433	456.671.967	-	2.806.670.460
Sub jumlah / Sub total	15.456.555.515	4.933.610.191	-	20.390.173.706
Jumlah / Total	68.559.949.881	11.338.848.782	2.202.629.762	79.691.228.905
Nilai Utang / Credit Value	101.718.267.888			107.626.147.265

Aset tetap dijamin pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai jaminan dan fasilitas kredit yang diterima.

Aset tetap bangunan dan peralatan diasuransikan terhadap risiko gempa bumi, kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan beberapa paket polis asuransi, dengan nilai pertanggungan sebagai berikut:

Fixed assets pledged in PT Bank Mandiri (Persero), Tbk as collateral from the loan obtained.

Fixed assets in the form of building and equipment are insured against the risk of earthquake, fire and other risks under some insurance policy package, with coverage as follows:

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (Lanjutan)

13. FIXED ASSETS (Continued)

		Tahun 2013 / Year 2013		
Penanggung / Insurer	Jenis Aset / Assets	Nomor Polis / Policy Number	Jangka Waktu / Time Period	Nilai / Value (Rp)
Jasa Raharja Polco	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	02.00.70.13.0000701.13.0002	52/13-52/14	62.007.500.000
Jasa Raharja Polco	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	02.00.21.00.12.0118012.12.0079	182/12-181/13	3.700.000.000
Jasa Raharja Polco	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	02.00.70.13.0000701.13.0002	136/13-136/14	4.077.440.000
Jasa Raharja Polco	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	02.00.70.13.0000701.13.0002	136/13-129/14	2.546.225.000
Jasa Raharja Polco	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	02.00.70.13.0000701.13.0002	136/13-129/14	1.376.046.000
Asika Sebayu Finance (ACC)	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	02.00.00.00.00.000000000	13/11/12-13/11/13	1.743.505.000
Asika Sebayu Finance (ACC)	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	091200003337	13/11/12-13/11/13	1.943.525.000
Asika Sebayu Finance (ACC)	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	091200000005	13/11/12-13/11/13	1.943.525.000
Asika Sebayu Finance (ACC)	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	091200003332	13/11/12-13/11/13	1.943.525.000
Asika Sebayu Finance (ACC)	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	091200000009	13/11/12-13/11/13	2.200.200.000
Asika Sebayu Finance (ACC)	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	091200003340	13/11/12-13/11/13	2.200.200.000
Asika Sebayu Finance (ACC)	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	091200003342	13/11/12-13/11/13	1.476.460.000
Asika Sebayu Finance (ACC)	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	091200003528	13/11/12-13/11/13	2.403.700.000
Asika Sebayu Finance (ACC)	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	091200003524	13/11/12-13/11/13	2.403.700.000
Asika Sebayu Finance (ACC)	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	091300005731	26/13-26/14	1.036.800.000
Asika Sebayu Finance (ACC)	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	091300005732	26/13-26/14	1.036.800.000
Asika Sebayu Finance (ACC)	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	091300005733	26/13-26/14	1.036.800.000
Asika Sebayu Finance (ACC)	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	091300005734	26/13-26/14	666.400.000
Asika Sebayu Finance (ACC)	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	091300005735	16/13-16/14	799.500.000
PT BUMITOMO (BMFL)	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	DN2:0057000001-00	132/13-132/14	3.762.546.300
PT BUMITOMO (BMFL)	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	DN2:0057000001-00	132/13-124/14	5.580.460.000
PT BUMITOMO (BMFL)	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	DN2:0040000001-00	12/13-12/14	2.655.000.000
PT BUMITOMO (BMFL)	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	DN2:0057000001-00	286/13-286/14	3.010.800.000
PT BUMITOMO (BMFL)	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	DN2:0040000001-00	36/13-36/14	2.465.500.000
PT Jasmaharja Polco	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	02.00.70.13.000039	22/12/13-22/12/14	850.700.000
PT Jasmaharja Polco	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	02.00.70.13.000040	22/12/13-22/12/14	12.211.000.000
PT Jasmaharja Polco	Kantor Pusat & Fasilitas / Head Office & Facilities	02.00.13.13.000000	33/12/13-33/12/14	34.000.000.000
PT Jasmaharja Polco	Kantor Pusat & Fasilitas / Head Office & Facilities	02.00.13.13.000000	22/12/13-22/12/14	30.000.000.000

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (Lanjutan)

13. FIXED ASSETS (Continued)

		Tahun 2013 / Year 2013		
Penanggung / Insurer	Jenis Aset / Assets	Nomor Polis / Policy Number	Jangka Waktu / Time Period	Nilai / Value (Rp)
PT Jasmaharja Polco	Bangunan Sideraja / Sideraja Building	102000121121300002	22/12/13-22/12/14	1.570.000.000
PT Jasmaharja Polco	Bangunan Sideraja / Sideraja Building	102000122121300001	22/12/13-22/12/14	1.578.000.000
PT Jasmaharja Polco	Bangunan Meles / Meles Building	102000121121300001	33/12/13-33/12/14	424.000.000
PT Jasmaharja Polco	Bangunan Meles / Meles Building	102000122121300002	22/12/13-22/12/14	571.000.000
Tahun 2012 / Year 2012				
Penanggung / Insurer	Jenis Aset / Assets	Nomor Polis / Policy Number	Jangka Waktu / Time Period	Nilai / Value (Rp)
PT Jasmaharja Polco	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	02.00.70.12.000014	16/11/12-16/11/13	1.625.766.000
PT Jasmaharja Polco	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	02.00.70.12.000015	22/12/12-22/12/13	12.211.000.000
PT Jasmaharja Polco	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	02.00.70.12.000014	22/12/12-22/12/13	860.700.000
PT Jasmaharja Polco	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	02.00.70.12.000011	12/11/12-12/11/13	1.760.000.000
PT Jasmaharja Polco	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	02.00.70.12.000012	12/11/12-12/11/13	1.662.000.000
PT Jasmaharja Polco	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	02.00.70.12.000013	12/11/12-12/11/13	481.468.740
PT Jasmaharja Polco	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	12020120000003	27/05/12-27/05/13	5.543.563.250
PT Jasmaharja Polco	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	02.00.70.12.000009	11/05/12-11/05/13	11.807.800.000
PT Jasmaharja Polco	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	02.00.70.12.000005	15/02/12-15/02/13	2.745.700.000
PT Jasmaharja Polco	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	02.00.70.12.000006	27/02/12-27/02/13	1.527.400.000
PT Jasmaharja Polco	Kantor Pusat & Fasilitas / Head Office & Facilities	02.00.13.13.000005	33/12/13-33/12/14	20.000.000.000
PT Jasmaharja Polco	Kantor Pusat & Fasilitas / Head Office & Facilities	02.00.13.13.000007	22/12/12-22/12/13	20.000.000.000
PT Jasmaharja Polco	Bangunan Nalang / Nalang Building	02.00.10.12.000289	22/11/12-22/11/13	1.512.000.000
PT Jasmaharja Polco	Bangunan Nalang / Nalang Building	02.00.10.12.000290	33/11/13-33/11/14	1.417.000.000
PT Jasmaharja Polco	Bangunan Bilar / Bilar Building	02.00.10.12.000284	22/11/12-22/11/13	133.000.000
PT Jasmaharja Polco	Bangunan Bilar / Bilar Building	02.00.10.12.000285	22/11/12-22/11/13	133.000.000
PT Jasmaharja Polco	Bangunan Sideraja / Sideraja Building	02.00.10.12.000283	22/11/12-22/11/13	1.578.000.000
PT Jasmaharja Polco	Bangunan Sideraja / Sideraja Building	02.00.10.12.000282	22/12/12-22/12/13	1.578.000.000
PT Jasmaharja Polco	Bangunan Meles / Meles Building	02.00.10.12.000281	22/12/12-22/12/13	571.000.000
PT Jasmaharja Polco	Bangunan Meles / Meles Building	02.00.10.12.000280	22/12/12-22/12/13	571.000.000
PT Jasmaharja Polco	Asi - Asil Beral / Heavy equipment	02.00.70.12.000001	16/11/12-16/11/13	1.760.000.000

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (Lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas aset tetap yang diasuransikan tersebut adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi. (lihat catatan No. 31, 36, 17, 22, 29 dan 31)

13. FIXED ASSETS (Continued)

Management believes that the insurance on the assets of the insured is adequate to cover possible losses. (see notes No. 31, 36, 17, 22, 29 and 31)

14. ASET LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2013	2012	
Aset non produktif	2.975.575.411	2.975.575.411	Non productive assets
Akumulasi penyusutan			Accumulated depreciation:
aset tetap non produktif	(2.975.575.411)	(2.975.575.411)	Non productive assets
Material / suku cadang non produktif	488.298.332	488.298.332	Material / Non productive spare part
Penyisihan penurunan material /			Allowance for impairment material /
suku cadang non produktif	(488.298.332)	(488.298.332)	non productive assets
Piutang ragu-ragu	320.147.809	320.147.809	Allowance for doubtful account
Penyisihan penurunan piutang	(320.147.809)	(320.147.809)	Allowance for impairment of receivable
Jumlah	-	-	Total

14. OTHER ASSETS

This account consists of:

15. BEBAN TANGGUHAN

Akun ini terdiri dari:

	2013	2012	
Sosialisasi dan perjanjian	4.108.475.855	1.808.000.000	Socialization and negotiation
Survei	1.388.125.183	420.889.042	Survey
Konsultan	3.148.450.800	1.088.000.000	Consultant
Pembebasan tanah	1.384.056.941	-	Land
Presentasi	945.082.342	578.503.130	Presentation
Perjalanan dinas	31.180.088	31.180.088	Official travel
Jumlah	18.612.371.388	3.735.552.271	Total

Beban pengembangan tanggungan tersebut tersebut dalam proyek-proyek yang sedang dipaparkan oleh anak dengan rincian sebagai berikut:

PT Perjaya Brantas Energi yang merupakan entitas anak pada PT Brantas Energi, dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) di Bendung Gerak Perjaya.

PT Brantas Calerwala Energi yang merupakan entitas anak pada PT Brantas Energi, dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) yang berlokasi di Batang Pelandai Gadang Kecamatan Rana Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) yang berlokasi di Batang Tapan Sei Gambar Sako Tapan, Kecamatan Rana Ampok Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

PT Saling Brantas Energi yang merupakan entitas anak pada PT Brantas Energi, dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) yang berlokasi di Desa Bungin Tambun I dan II Kecamatan Padang Gudul Hulu Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu.

15. DEFERRED CHARGES

This account consists of:

Development deferred expenses are spread in development projects being worked by subsidiaries with the following details:

PT Perjaya Brantas Energi which is a subsidiary of PT Brantas Energi, in the framework of construction of Minihydro Power Plants (PLTM) in Gerak Perjaya Weir.

PT Brantas Calerwala Energi which is a subsidiary of PT Brantas Energi, in the framework of the construction of Minihydro Power Plants (PLTM) located in the Batang Pelandai Gadang District of Rana Pesisir, South Pesisir District and construction of Minihydro Power Plants (PLTM) located in Batang Tapan Sei Gambar Sako Tapan, Rana Ampok Balai Sub district, South Pesisir district, West Sumatera.

PT Saling Brantas Energi which is a subsidiary of PT Brantas Energi, in the framework of construction of Minihydro Power Plants (PLTM) located in Desa Bungin Tambun I and II Kecamatan Padang Gudul Hulu Sub district, Kaur District in Bengkulu Province.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. BEBAN TANGGUHAN

PT Brantas Hidro Energi yang merupakan entitas anak pada PT Brantas Energi, dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) yang berlokasi di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu.

PT Brantas Prospek Energi yang merupakan entitas anak pada PT Brantas Energi, dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) yang berlokasi di Pangkajene Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan.

PT Minahasa Brantas Energi yang merupakan entitas anak pada PT Brantas Energi, dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) yang berlokasi di Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara.

15. DEFERRED CHARGES

PT Brantas Hidro Energi is a subsidiary of PT Brantas Energi, in the framework of the construction of Minihydro Power Plants (PLTM) located in Kaur Sub district in Bengkulu Province.

PT Brantas Prospek Energi which is a subsidiary of PT Brantas Energi, in the framework of the construction of Minihydro Power Plants (PLTM) located in Pangkajene, North Luwu District, South Sulawesi Province.

PT Minahasa Brantas Energi which is a subsidiary of PT Brantas Energi, in the framework of the construction of Minihydro Power Plants (PLTM) located in Amurang, South Minahasa District, North Sulawesi Province.

16. UTANG UBAHA PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari:

	2013	2012	
Supplier / pemasok	188.628.611.873	102.141.328.172	Suppliers
Sub kontraktor	115.131.113.840	107.803.738.184	Subcontractors
Alat	27.278.857.217	20.273.371.888	Equipment
Mandor	14.173.554.704	5.178.853.380	Foreman
Jumlah	325.190.837.443	235.288.894.565	Total

Rincian adalah sebagai berikut:

a. Supplier / pemasok	2013	2012	
PT Antariksa Laksana	11.891.000.000	-	PT Antariksa Laksana
UD Kios	9.025.782.885	-	UD Kios
P1 Geotechnical Sistemindo	7.980.380.000	18.819.013.200	P1 Geotechnical Sistemindo
PT Adhima	7.874.544.440	6.708.235.800	PT Adhima
Santosa Chandra	6.582.842.000	-	Santosa Chandra
PT Wika Beton	6.143.880.000	-	PT Wika Beton
PT Wahana Sinar Mas	4.808.020.400	-	PT Wahana Sinar Mas
CV Jaya Indah	4.546.108.548	-	CV Jaya Indah
PT Wirabumi Sejati	3.411.008.440	-	PT Wirabumi Sejati
PT Halaeston	3.330.751.304	-	PT Halaeston
PT Agrapana	3.310.583.800	-	PT Agrapana
PT Baja Prima Lestari	3.086.571.479	-	PT Baja Prima Lestari
CV Marhama Mitra Mandiri	2.914.874.163	-	CV Marhama Mitra Mandiri
PT Belacumende Mizerindo	2.788.287.500	890.850.000	PT Belacumende Mizerindo
PT Swarna Baja Pacific	2.657.588.580	-	PT Swarna Baja Pacific
CV Bumi Gresik	2.581.828.084	-	CV Bumi Gresik
PT Sekasa Mitra Utama	2.518.348.380	-	PT Sekasa Mitra Utama
P1 Naga Insan Hidayat	2.185.861.888	181.851.500	P1 Naga Insan Hidayat
PT PPI Senem Padang	2.142.122.475	1.072.022.474	PT PPI Senem Padang
PT APR	2.082.813.000	-	PT APR
PT Barawaja Makassar	2.078.808.058	2.078.808.058	PT Barawaja Makassar
PT Varia Usaha Beton	2.058.750.800	-	PT Varia Usaha Beton
P1 Ebrawa Steel	2.035.825.377	-	P1 Ebrawa Steel
PT Apom	1.700.210.784	-	PT Apom
PT Bwana Brata	1.691.390.000	85.725.000	PT Bwana Brata
PT Washita Karya Beton	1.580.550.000	-	PT Washita Karya Beton
Jumlah dipindahkan	182.688.431.129	29.824.471.918	The amount transferred

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

16. ACCOUNT PAYABLE - THIRD PARTY (Continued)

a. SupPLIER (Lanjutan)

a. Suppliers (Continued)

	2013	2012
Jumlah pindahan	102.688.431.158	29.824.471.918
PT Oscar Putra	1.531.018.872	-
PT Gila Bekti	1.487.700.708	-
Mahendra	1.441.095.568	-
PT Sarana Aspal Nusantara	1.382.000.000	-
Gunung Turun	1.380.000.168	-
Homante	1.154.106.478	-
PT TAO	1.108.218.815	124.850.000
Syahil Efendi	1.105.758.842	-
PT Century Nusantara	1.104.332.083	-
PT Trimatra Bias Inti	1.083.888.732	-
P1 Egyt Hirono	1.062.873.200	-
UD Mwanli Jaya	1.071.510.740	3.740.801.120
PT Ols	1.018.400.000	-
PD Sinar Abadi	875.011.500	-
PT Bewasanda Mustika	832.000.000	281.425.000
P1 Tetrasa Geosarindo	805.000.000	-
CV Putra Madaram Sakti	838.424.250	-
PT Dalima Jaya Mlc	798.730.000	1.020.880.000
CV Arlamora Jaya (Ende)	775.828.858	-
PT Harapan Widyadama P	770.470.435	-
P1 Setasainti	745.883.770	-
CV Sinar Berkelindo	731.448.200	-
KOP Roudhotul Muradho	715.740.800	-
Ginez	708.234.418	-
PT Muliantha Graha Mandi	677.188.883	-
P1 Muzra Dua	651.100.000	-
CV Anugrah	645.210.000	-
PT Sinar Masi SCF	644.051.821	-
CV Khassarah	641.482.000	-
CV Mangku Alam	628.840.000	-
CV Sinar Karya-Windi	625.101.380	-
UD Mwanang Maju	620.388.080	1.345.328.000
Sumber Alam/Samsi	618.310.000	-
PT Dwi Karya Prima	607.328.000	-
CV Moedjarto MU	588.185.000	-
Karya Sukses Makmur	584.074.180	-
PT Inli Sumber Beton	501.357.351	117.228.258
PT Indo Daya Surya P	543.772.783	-
PT Line Solusi Pratama	535.750.000	-
Supriyano	528.000.000	-
Seta Agung Pratama	518.314.283	-
PT Gwangi Berlian Molur	504.000.000	-
Tom Haripan	483.387.577	-
PT Surya Naga Bekti	481.536.000	-
PT Alpindo Jit	480.370.383	-
P1 Esal Anugrah	478.488.208	-
PT Sumber Baja S	470.883.038	-
PT Woroasari Jaya	469.000.000	145.800.000
PT Mario Kajuwara	463.185.000	-
Teguh Abadi	461.448.568	-
P1 Lonmesh	436.525.000	-
Buimin	428.000.000	-
Ade Ruswandi	401.248.000	-
Jumlah dipindahkan	143.253.567.867	36.688.537.297

The amount of transfer
PT Oscar Putra
PT Gila Bekti
Mahendra
PT Sarana Aspal Nusantara
Gunung Turun
Homante
PT TAO
Syahil Efendi
PT Century Nusantara
PT Trimatra Bias Inti
P1 Egyt Hirono
UD Mwanli Jaya
PT Ols
PD Sinar Abadi
PT Bewasanda Mustika
P1 Tetrasa Geosarindo
CV Putra Madaram Sakti
PT Dalima Jaya Mlc
CV Arlamora Jaya (Ende)
PT Harapan Widyadama P
P1 Setasainti
CV Sinar Berkelindo
KOP Roudhotul Muradho
Ginez
PT Muliantha Graha Mandi
P1 Muzra Dua
CV Anugrah
PT Sinar Masi SCF
CV Khassarah
CV Mangku Alam
CV Sinar Karya-Windi
UD Mwanang Maju
Sumber Alam/Samsi
PT Dwi Karya Prima
CV Moedjarto MU
Karya Sukses Makmur
PT Inli Sumber Beton
PT Indo Daya Surya P
PT Line Solusi Pratama
Supriyano
Seta Agung Pratama
PT Gwangi Berlian Molur
Tom Haripan
PT Surya Naga Bekti
PT Alpindo Jit
P1 Esal Anugrah
PT Sumber Baja S
PT Woroasari Jaya
PT Mario Kajuwara
Teguh Abadi
P1 Lonmesh
Buimin
Ade Ruswandi
The amount transferred

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

16. ACCOUNT PAYABLE - THIRD PARTY (Continued)

a. SupPLIER (Lanjutan)

a. Suppliers (Continued)

	2013	2012	
Jumlah pindahan	143.253.567.867	36.688.537.297	The amount of transfer
P1 Gila Bekti	386.800.000	-	P1 Gila Bekti
Jon	380.750.540	-	Jon
CV Indra Jaya Transindo	378.870.450	-	CV Indra Jaya Transindo
PT Indra Motor	371.700.000	-	PT Indra Motor
Tk Tri Sukses Cemerlang	368.880.000	-	Tk Tri Sukses Cemerlang
Prasasrabang	301.538.888	-	Prasasrabang
BA-Yasa KSO	353.387.084	353.387.084	BA-Yasa KSO
Tobiyanto	340.540.800	022.582.800	Tobiyanto
Insam Indhi K.	339.572.118	-	Insam Indhi K.
PT Saeti Concreteindo Raya	330.750.000	-	PT Saeti Concreteindo Raya
Saput	318.388.048	-	Saput
Seta Agung Pratama	311.800.005	-	Seta Agung Pratama
Maksum	304.500.000	-	Maksum
Sahir	303.420.000	-	Sahir
Surya Perhari	298.543.358	-	Surya Perhari
Ioko Bies Biengawan Agung	298.000.000	-	Ioko Bies Biengawan Agung
CV Sahabat K, / Arif Suherm	285.470.063	-	CV Sahabat K, / Arif Suherm
Aminda	274.340.000	-	Aminda
Ajun	264.000.000	-	Ajun
CV Jaya Lesari	252.058.180	-	CV Jaya Lesari
Sanyaya Putra	250.000.000	-	Sanyaya Putra
PT Geoforce Ind	240.000.000	251.250.000	PT Geoforce Ind
PT Dahana	229.307.730	-	PT Dahana
CV Fibriz Aladin	228.331.838	-	CV Fibriz Aladin
CV Hydroraya (Lesi)	213.744.400	-	CV Hydroraya (Lesi)
Thomas Bourbon	204.150.000	-	Thomas Bourbon
Desi Wicaksono	188.500.000	-	Desi Wicaksono
UD Sinar Mahabari	187.848.880	188.852.080	UD Sinar Mahabari
Village Building Star	182.000.870	-	Village Building Star
PT Geosuney Inti	180.000.000	-	PT Geosuney Inti
Huben NABYal	181.400.000	-	Huben NABYal
PT Teknindo Geosistem	184.250.000	-	PT Teknindo Geosistem
CV Kambang Pring	183.518.241	-	CV Kambang Pring
Aminuddin	178.828.000	-	Aminuddin
KSU Hidayah	178.250.000	1.512.884.372	KSU Hidayah
CV Cipta Pratama	168.183.884	-	CV Cipta Pratama
Purani Pakaya	168.040.000	-	Purani Pakaya
CV Lagan Jaya	168.528.890	-	CV Lagan Jaya
Wawan	168.457.888	-	Wawan
Chandra-Vibro	160.884.882	237.834.882	Chandra-Vibro
Ujung Lima Cable Tansam	158.153.150	-	Ujung Lima Cable Tansam
Budi Hartono	157.003.780	-	Budi Hartono
Regan (Pasir)	154.200.880	-	Regan (Pasir)
CV Sinar Gemilang Perkasa	151.250.000	-	CV Sinar Gemilang Perkasa
Luis	150.800.080	-	Luis
Agus,Batu Pecah	150.000.000	-	Agus,Batu Pecah
Priyana	150.000.000	-	Priyana
PT Inli Sumber Baja Sakti	-	11.728.830.312	PT Inli Sumber Baja Sakti
PT Beton Kalim	-	4.548.085.500	PT Beton Kalim
Jumlah dipindahkan	154.751.556.831	56.343.873.837	The amount transferred

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

16. ACCOUNT PAYABLE - THIRD PARTY (Continued)

a. Suplier (Lanjutan)	2013	2012	a. Suppliers (Continued)
Jumlah piandahan	154.751.556.831	56.343.873.837	The amount of transfer
PT Tri Tunggal BM	-	4.500.000.000	PT Tri Tunggal BM
Suhardi	-	2.000.000.000	Suhardi
PT Prima Karya Anugrah M	-	2.572.285.000	PT Prima Karya Anugrah M
PT Altrak 1978	-	1.878.575.000	PT Altrak 1978
PT Abdirajo Teknik L	-	1.700.145.000	PT Abdirajo Teknik L
PT Jangka Indonesia	-	1.026.000.000	PT Jangka Indonesia
PT Hanson Indonesia	-	1.400.000.000	PT Hanson Indonesia
PT Saka Baja Mulya	-	1.373.818.000	PT Saka Baja Mulya
PT Sarana Cipta Infirusa	-	1.040.000.000	PT Sarana Cipta Infirusa
PT Bertak Tiron In	-	821.400.000	PT Bertak Tiron In
Arif Suprayitno	-	107.753.750	Arif Suprayitno
PT Olin Prima Dayu	-	888.580.000	PT Olin Prima Dayu
PT Kencana Cahra Buana	-	885.848.000	PT Kencana Cahra Buana
Teguh Abadi	-	584.038.728	Teguh Abadi
Sumber Rejeki 2	-	561.383.724	Sumber Rejeki 2
PT Hiji Indonesia	-	500.000.000	PT Hiji Indonesia
PT JHS	-	488.872.000	PT JHS
CV Puji Dira	-	478.884.752	CV Puji Dira
PT Pyramida	-	467.840.000	PT Pyramida
PT Sumber Niaga	-	468.018.895	PT Sumber Niaga
Acak Yustanto	-	426.419.787	Acak Yustanto
PT Sinar Sukses Semesta	-	422.421.000	PT Sinar Sukses Semesta
Ermawan	-	450.108.312	Ermawan
PT Antamusa Beton	-	448.000.000	PT Antamusa Beton
PT Arlen Asri P	-	328.130.150	PT Arlen Asri P
Robin	-	322.870.038	Robin
Daris	-	317.787.000	Daris
CV Wijji Dinda Pratama	-	310.384.000	CV Wijji Dinda Pratama
PT Sukses Karimun Jaya	-	308.101.000	PT Sukses Karimun Jaya
Marjuni	-	288.085.880	Marjuni
Marsah	-	287.000.400	Marsah
Toko Besi Baja Intan	-	280.200.000	Toko Besi Baja Intan
Besit	-	281.032.070	Besit
A. Gani	-	285.081.548	A. Gani
CV Bina Krida	-	264.750.000	CV Bina Krida
PT Beton Perkasa	-	258.078.173	PT Beton Perkasa
Alinin	-	257.088.500	Alinin
Habarun	-	258.895.000	Habarun
PT Harapan Sejati	-	242.187.500	PT Harapan Sejati
Ganison	-	238.382.500	Ganison
Dispenda	-	238.051.794	Dispenda
Kalabang	-	188.123.120	Kalabang
Sumarta Yasper	-	103.053.710	Sumarta Yasper
Rahmat Sembosa	-	173.852.000	Rahmat Sembosa
Rasmin - Solar	-	235.812.500	Rasmin - Solar
Daryono	-	252.342.500	Daryono
Regen (pasir)	-	231.710.000	Regen (pasir)
CV Mitra Muda Padalia	-	108.588.000	CV Mitra Muda Padalia
Aswadi	-	108.344.000	Aswadi
Ucak	-	178.205.000	Ucak
Toko Sumber Rejeki	-	174.240.000	Toko Sumber Rejeki
Buby Parji Saputra	-	173.080.000	Buby Parji Saputra
Jumlah dipindahkan	154.751.556.831	83.778.881.444	The amount transferred

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

16. ACCOUNT PAYABLE - THIRD PARTY (Continued)

a. Suplier (Lanjutan)	2013	2012	a. Suppliers (Continued)
Jumlah piandahan	154.751.556.831	83.778.881.444	The amount of transfer
TB Melly Jaya	-	170.300.000	TB Melly Jaya
Sulhin	-	187.728.100	Sulhin
Halim	-	182.250.000	Halim
CV Lagan Jaya	-	180.000.000	CV Lagan Jaya
UD Herman	-	158.882.484	UD Herman
Sudirman	-	154.280.288	Sudirman
Budi	-	154.380.000	Budi
Alan Subur	-	153.525.000	Alan Subur
Jono	-	150.700.000	Jono
Lain-lain	-	-	Others
(di bawah Rp 150.000.000,-)	11.778.854.842	10.834.081.555	(below Rp 150,000,000,-)
Sub jumlah	166.528.511.673	102.141.333.172	Sub total
b. Subkontraktor	2013	2012	b. Subcontractors
PT Sunny Hydro E.G	5.135.801.785	2.015.505.408	PT Sunny Hydro E.G
PT Barata Indonesia	12.478.183.087	7.808.823.754	PT Barata Indonesia
PT Tri Perkasa	5.688.507.585	2.888.761.481	PT Tri Perkasa
PT Bukit Ranle Kambala	5.238.481.580	-	PT Bukit Ranle Kambala
PT Bumi Ayu Perhai	5.147.153.844	-	PT Bumi Ayu Perhai
Topas Tali Linao	4.673.853.080	1.725.500.000	Topas Tali Linao
PT Horizon	4.618.806.700	-	PT Horizon
Salfacon	3.441.375.000	-	Salfacon
PT Raja Intirayyan NTB	3.053.224.874	-	PT Raja Intirayyan NTB
CV Indonesia Bangun	2.848.222.828	-	CV Indonesia Bangun
PT Hakim	2.830.083.158	-	PT Hakim
CV Gema Berkasa (Bali)	2.602.867.860	-	CV Gema Berkasa (Bali)
PT Pradja Mulia	2.548.327.488	-	PT Pradja Mulia
PT ITSA	2.514.143.880	2.223.488.458	PT ITSA
PT Saputra Karindo	2.110.387.847	-	PT Saputra Karindo
PT Urip Jaya	2.007.418.200	-	PT Urip Jaya
CV Melki Jaya	1.826.288.567	3.338.728.345	CV Melki Jaya
PT Sumatera Unggul	1.782.503.318	182.027.884	PT Sumatera Unggul
Khari Herman - Jedi	1.645.828.451	-	Khari Herman - Jedi
Arenix	1.528.881.817	-	Arenix
PT Sukses Abadi	1.280.000.000	-	PT Sukses Abadi
PT Henda Projabana	1.288.460.000	-	PT Henda Projabana
PT Linico Indonesia	1.282.187.228	-	PT Linico Indonesia
Surya Graha Mandiri	1.248.880.351	-	Surya Graha Mandiri
PT Indra Karya	818.238.888	1.584.717.713	PT Indra Karya
PT Elpa Indonesia	1.081.551.210	-	PT Elpa Indonesia
CV Central Design	1.064.804.400	-	CV Central Design
PT Bukaka	987.185.840	-	PT Bukaka
CV Tilan (Brian Meslito)	987.247.800	-	CV Tilan (Brian Meslito)
PT Adyanwisa	880.000.000	-	PT Adyanwisa
BMAP Konsorsium	838.522.004	-	BMAP Konsorsium
PT Gapura Mandiri	834.717.888	-	PT Gapura Mandiri
Sugianto	830.280.832	353.584.770	Sugianto
PT Trimadra Bias Inti	818.788.340	-	PT Trimadra Bias Inti
PT Bina Sakti Geolama	854.105.888	-	PT Bina Sakti Geolama
PT Debarosa	845.850.148	8.427.488.845	PT Debarosa
CV Rahmat Berkasa	787.240.605	1.607.248.686	CV Rahmat Berkasa
Jumlah dipindahkan	81.984.844.825	32.345.678.862	The amount transferred

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

16. ACCOUNT PAYABLE - THIRD PARTY (Continued)

a. Supplier (Lanjutan)

b. Subcontractors (Continued)

	2013	2012	
Jumlah piandahan	51.184.844.925	32.345.679.862	The amount of transfer
PI Abdi Negeri	785.215.115	9.255.850.388	PI Abdi Negeri
CV Marbania Mitra Mandiri	707.771.097	2.574.051.555	CV Marbania Mitra Mandiri
CV Cansara Dua C	723.013.128	-	CV Cansara Dua C
PT Ingris Pratama Capita	722.588.337	-	PT Ingris Pratama Capita
Akrista	721.180.431	2.334.528.800	Akrista
Intiboot	712.409.887	10.855.340.712	Intiboot
PT Elba Senana Jaya	705.550.000	-	PT Elba Senana Jaya
Pikamas Dada Sempurna	686.012.345	-	Pikamas Dada Sempurna
PT Sanjar	678.168.330	-	PT Sanjar
PT Seniosa Adisala	673.380.520	-	PT Seniosa Adisala
Aryo Anggoro	663.488.857	-	Aryo Anggoro
IKK Aston	652.709.090	-	IKK Aston
PT Triha Abd	618.710.537	-	PT Triha Abd
PT Punggur Kharisma	602.743.008	-	PT Punggur Kharisma
PT Duta Info Nusantara	591.138.048	-	PT Duta Info Nusantara
(DED) Detail Engineering D	575.000.000	-	(DED) Detail Engineering D
PT Pralana Widya	580.737.711	3.455.407.483	PT Pralana Widya
CV Sempurna Jaya (Gihari)	555.825.800	-	CV Sempurna Jaya (Gihari)
Darid	543.448.400	-	Darid
CV Mekar Sari	478.818.748	-	CV Mekar Sari
CV Ary Bangun Perkasa	448.873.555	-	CV Ary Bangun Perkasa
PT Eggf H	437.789.380	-	PT Eggf H
Kharli Herman Susanto	437.407.070	-	Kharli Herman Susanto
PT Gelora Mahakam Lesari	418.333.278	7.857.008.348	PT Gelora Mahakam Lesari
PT Alam PR	413.808.798	-	PT Alam PR
CV Catur Daya Mandiri	401.805.995	-	CV Catur Daya Mandiri
PT Mega Multi Mandiri	387.889.275	-	PT Mega Multi Mandiri
PT IndoDayaSurya Persada	378.780.094	-	PT IndoDayaSurya Persada
CV Arlamara Jaya (Ende)	354.489.887	-	CV Arlamara Jaya (Ende)
Slamet	326.159.800	-	Slamet
Budiman	308.281.348	-	Budiman
Joni	280.084.811	-	Joni
Adang Supriadi	262.843.583	-	Adang Supriadi
Hendi	251.288.580	-	Hendi
PT Rafia	244.523.824	483.780.884	PT Rafia
PT Ganda Graha Utama	238.018.008	348.190.100	PT Ganda Graha Utama
Kami	214.412.500	-	Kami
Apara Indonesia	212.448.332	-	Apara Indonesia
Dulkah	210.189.500	-	Dulkah
Teddy	181.725.857	-	Teddy
PT Geowater Mandiri	178.462.000	-	PT Geowater Mandiri
Ong Sabria Veri	165.520.000	-	Ong Sabria Veri
Slamet Haryono	161.553.000	-	Slamet Haryono
Penerangan W.Way	159.250.000	-	Penerangan W.Way
PT Tigenco GP	145.818.887	-	PT Tigenco GP
CV Andang Perkasa	144.828.140	-	CV Andang Perkasa
PT Indonesia Hydro Consortium	144.101.258	-	PT Indonesia Hydro Consortium
Wasan	140.840.800	-	Wasan
Sulrisno	135.521.142	-	Sulrisno
Sulriawan	135.041.840	-	Sulriawan
Teuku Asfan	128.008.140	-	Teuku Asfan
Jumlah dipindahkan	112.134.898.852	63.618.716.191	The amount transferred

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

16. ACCOUNT PAYABLE - THIRD PARTY (Continued)

a. Supplier (Lanjutan)

b. Subcontractors (Continued)

	2013	2012	
Jumlah piandahan	112.154.898.852	69.618.716.191	The amount of transfer
Karya Baja	110.428.048	582.882.285	Karya Baja
PT Tala Guna Papan	112.488.000	112.488.000	PT Tala Guna Papan
Sultrason	101.527.470	-	Sultrason
PT TOTAL	101.500.000	-	PT TOTAL
PT MGM	-	13.851.824.433	PT MGM
PT Delta Systech Indo	-	5.229.821.623	PT Delta Systech Indo
CV Widya Kinawa	-	2.822.100.387	CV Widya Kinawa
Didin	-	1.834.445.275	Didin
PT A-Mara Subur	-	1.358.170.878	PT A-Mara Subur
PT Berdikari Pondasi	-	1.088.870.142	PT Berdikari Pondasi
H. Sudirman	-	1.056.880.438	H. Sudirman
CV Ancha Anugrah	-	1.031.070.688	CV Ancha Anugrah
HSPE	-	980.304.870	HSPE
Garnaty Nusa	-	943.420.831	Garnaty Nusa
Samuel Riga	-	854.789.878	Samuel Riga
PT Daya Guna Semesta	-	775.482.358	PT Daya Guna Semesta
Mansil	-	788.822.004	Mansil
CV Jaya Indah	-	485.058.881	CV Jaya Indah
PT Imanifa	-	302.874.408	PT Imanifa
Kardi HS	-	301.780.000	Kardi HS
Garnaty	-	282.840.087	Garnaty
Ujung Lina	-	281.405.187	Ujung Lina
Jaya Teknik	-	214.000.000	Jaya Teknik
PT Flora Utama	-	208.283.585	PT Flora Utama
Supernisi WRT	-	187.000.000	Supernisi WRT
Peran Js Tirta	-	171.301.115	Peran Js Tirta
Subandi	-	150.548.330	Subandi
CV Nusantara	-	152.358.098	CV Nusantara
Sugiharto	-	123.125.000	Sugiharto
Basan	-	111.488.480	Basan
PT Centra TM	-	102.500.000	PT Centra TM
Lain-lain	-	-	Others
(di bawah Rp 100.000.000,-)	2.545.070.838	1.869.488.638	(below Rp 100.000.000,-)
Sub jumlah	115.131.813.849	807.893.736.164	Sub Total
c. Aki	27.270.857.217	20.273.371.608	Equipment c.
d. Manajer	14.178.664.704	5.179.853.380	Foreman d.
Jumlah	323.119.837.443	235.288.894.565	Total

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended

December 31, 2013 and 2012

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG BANK

Akun ini terdiri dari:

	2013	2012
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	-	171.080.729.604
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	1.345.145.427	4.408.945.718
PT BPD Jawa Barat & Banten, Tbk	-	51.380.837.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	-	60.000.000.000
PT Bank DBS Indonesia	-	58.333.333
Jumlah	1.345.145.427	276.944.946.155
Diturunkan dengan bagian jalah tempo 1 (satu) tahun	(1.345.145.427)	(55.854.218.551)
Utang bank jangka panjang - sebelum dilunasi bagian jalah tempo 1 (satu) tahun	-	221.090.729.604
Terdidial:		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	-	171.080.729.604
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	-	50.000.000.000
Utang bank jangka panjang - sebelum dilunasi bagian jalah tempo 1 (satu) tahun	-	221.090.729.604

a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Utang bank Perusahaan pada PT Bank Mandiri (Persero),
Tbk adalah sebesar Rp 171.080.729.604,- pada tanggal
31 Desember 2012.

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai berikut:

- Fasilitas kredit modal kerja revolving dengan limit
sebesar Rp 42.151.206.822,- (empat puluh dua miliar
seratus lima puluh satu juta dua ratus enam ribu
delapan ratus dua puluh dua rupiah) sesuai dengan
Perjanjian Kredit No. 011/03297/KUHP tanggal
28 Maret 1997.

Fasilitas Non Cash Loan (NCL) dengan limit sebesar
Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) sesuai
Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan
Nomor: KP-COD/028/KP-NCL/2004, akta Nomor: 32
tanggal 15 Oktober 2004 notaris Haji Abu Jusuf di
Jakarta.

Kredit modal kerja rolpond dengan limit sebesar
Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah), bagian
digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan
modal kerja kontraktor, jangka waktu tanggal
22 Desember 2008 s/d 21 Desember 2014.
Perusahaan telah melunasi kewajiban kredit modal
kerja rolpond dan tunggakan bunga yang masih
harus dibayar sesuai surat PT Brantas Abipraya
(Persero) No. 423/DK/001/2011, tanggal
18 Desember 2011.

Fasilitas kredit modal kerja revolving dan fasilitas Non
Cash Loan (NCL) tersebut di atas telah mengalami
beberapa kali perubahan perjanjian dan perpanjangan,
terakhir tahun 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

17. BANK LOAN

This account consists of:

	2013	2012
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	-	171.080.729.604
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	1.345.145.427	4.408.945.718
PT BPD Jawa Barat & Banten, Tbk	-	51.380.837.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	-	60.000.000.000
PT Bank DBS Indonesia	-	58.333.333
Total	1.345.145.427	276.944.946.155
Net of portion of one year maturity	(1.345.145.427)	(55.854.218.551)
Long term bank loan - net of one year maturity portion	-	221.090.729.604
Consists of:		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	-	171.080.729.604
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	-	50.000.000.000
Long term bank loan - net of one year maturity portion	-	221.090.729.604

a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Company's bank loan in PT Bank Mandiri (Persero),
Tbk is amounted to Rp 171,080,729,604,- on
December 31, 2012.

The Company obtained credit facility from PT Bank
Mandiri (Persero), Tbk as follows:

- A revolving working capital credit facility with a
limit of Rp 42,151,206,822,- (forty two billion one
hundred and fifty one million two hundred and six
thousand eight hundred and twenty two rupiah)
in accordance with the Credit Agreement No.
011/03297/KUHP dated March 26, 1997.

Non Cash Loan Facility (NCL) with a limit of
Rp 100,000,000,000,- (one hundred billion
rupiah) according Non Cash Loan Facility
Granting Agreement Number :
KP-COD/028/KP-NCL/2004, Deed Number : 32
dated October 15, 2004 notary Haji Abu Jusuf in
Jakarta.

Approved working capital credit with limit of
Rp 12,000,000,000,- (twelve billion rupiah), the
purpose is used to meet most of the needs of
contractors working capital, term dated
December 22, 2008 until December 21, 2014.
The Company has paid facilities rolpond
working capital loans and its accrued interest in
accordance with letter of PT Brantas Abipraya
(Persero) No. 423/DK/001/2011, dated
December 18, 2011.

Revolving working capital credit facility and Non Cash
Loan (NCL) facility above have been amended and
extended several times, most recently in 2013 and
2012 as follows:

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended

December 31, 2013 and 2012

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Lanjutan)

- Sesuai surat PT Bank mandiri (Persero), Tbk No.
CBG.CBNSPPK.072/2011 tanggal 1 Desember 2011
dan surat No. TOP.CRO/CLA.57BAD/02/2011 tanggal
21 Desember 2011 bahwa menyetujui perpanjangan
fasilitas kredit modal kerja revolving limit sebesar
Rp 42.151.206.822,- (empat puluh dua miliar seratus
lima puluh satu juta dua ratus enam ribu delapan
ratus dua puluh dua rupiah), tingkat bunga 10% dan
jangka waktu diperpanjang sampai dengan tanggal
22 Desember 2012.

- Sesuai Akta Addendum V (Kelima) atas Perjanjian
Pemberian Fasilitas Non Cash Loan Nomor
KP-COD/028/KP-NCL/2004 notaris Lulani Kumiali
Indram-Idroes, SH,LLM di Jakarta Nomor 25 tanggal
21 Desember 2012 dan surat PT Bank Mandiri
(Persero), Tbk No. CAG.001/S/1PK.072/2011
tanggal 01 Desember 2011 bahwa memperjini
jumlah plafond fasilitas Non Cash Loan (NCL)
dari semula Rp 100.000.000.000,- (seratus
miliar rupiah) menjadi Rp 600.000.000.000,- (enam
ratus miliar rupiah), biaya akseptasi 1% per tahun
dan jangka waktu diperpanjang sampai dengan
tanggal
22 Desember 2012.

- Sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja
(Transaksional) Nomor: GHO.KP/354/KMK/11
notaris Lulani Kumiali Indram-Idroes, SH,LLM di
Jakarta Nomor 24 tanggal 21 Desember 2012 bahwa
Perusahaan memperoleh fasilitas modal kerja
transaksional dengan plafond sebesar
Rp 210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar
rupiah), tingkat bunga 10% per tahun, provisi 0,75%
per tahun dan jangka waktu sampai dengan tanggal
22 Desember 2012.

17. BANK LOANS (Continued)

a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Continued)

- Based on letter of PT Bank Mandiri (Persero),
Tbk No.CBG.CBNSPPK.072/2011 dated
December 1, 2011 and letter No.
TOP.CRO/CLA.57BAD/02/2011 dated
December 21, 2011 that approved the extension
of revolving working capital credit facility with
limit of Rp 42,151,206,822,- (forty two billion
one hundred and fifty one million two hundred
and six thousand eight hundred and twenty two
rupiah), 10% interest rate and time period was
extended until December 22, 2012.

- Based on the Deed of Addendum V (5th) on
Non Cash Loan Facility Granting Agreement
Number : KP-COD/028/KP-NCL/2004 notary
Lulani Kumiali Indram-Idroes, SH,LLM in Jakarta
Number 25 dated December 21, 2012 and letter
of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk No.
CAG CR1/SPPK 072/2011 dated
December 1, 2011 that approved an additional
plafond Non Cash Loan facility (NCL) from
Rp 100,000,000,000,- (one hundred billion
rupiah) to Rp 600,000,000,000,- (six hundred
billion rupiah), acceptance cost 1 % per year
and the term was extended until
December 22, 2012.

- In accordance with the Deed of Working Capital
Credit Agreement (Transactional) Number :
GRO.KP/354/KMK/11 notary Lulani Kumiali
Indram-Idroes, SH, LLM in Jakarta Number 24
dated December 21, 2012 that the Company
obtained a transactional working capital facility
with a plafond of Rp 210,000,000,000,- (two
hundred and ten billion rupiah), 10% interest
rate per year, 0,75% provision provision per year
and the period up to December 22, 2012.

17. UTANG BANK (Lanjutan)

a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Lanjutan)

- Sesuai surat PT Bank Mandiri (Persero), Tbk No. CBG.CB1/SPPK.100/2012 tanggal 17 Desember 2012 bahwa menyetujui penurunan limit fasilitas kredit modal kerja revolving dari semula Rp 42.151.206.022,- (empat puluh dua miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) menjadi Rp 42.000.000.000,- (empat puluh dua miliar rupiah), sekaligus pemisahan menjadi kredit modal kerja revolving dengan limit sebesar Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar rupiah) dengan tingkat bunga 10% dan kredit modal kerja fixed sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dengan tingkat bunga 9,30%, menyetujui tambahan fasilitas KMK Revolving Transaksional dari semula Rp 210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) dengan tingkat bunga 9,50% dan menyetujui tambahan fasilitas non cash loan dari semula Rp 600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah) menjadi Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah) yang diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Desember 2013.
- Sesuai dengan surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor CBG.CB1/SPPK.100/2013 tanggal 18 Januari 2013 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) bahwa fasilitas kredit modal kerja transaksional dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk semula dengan limit sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) menjadi Rp 210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar rupiah), tingkat bunga menjadi 9,25% per tahun, proses pemberian BKG tender dan semula 1% menjadi 0,75% dan Perusahaan dapat memberitahukan secara tertulis dalam hal akan memperoleh fasilitas kredit baru atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain.

17. BANK LOANS (Continued)

a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Continued)

- According to the letter of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk No.CBG.CB1/SPPK.100/2012 dated December 17, 2012 that approved the limit deduction of a revolving working capital credit facility from Rp 42,151,206,022,- (forty two billion one hundred and fifty one million two hundred and six thousand eight hundred and twenty two rupiahs) to Rp 42,000,000,000,- (forty two billion rupiahs), as well as separation into revolving working capital loan with a limit of Rp 22,000,000,000,- (twenty two billion rupiahs) with 10 % interest rate and a fixed working capital credit amounting to Rp 20,000,000,000,- (twenty billion rupiahs) with 9.30 % interest rate, and approved the additional Transactional Revolving Working Credit facility from Rp 210,000,000,000,- (two hundred and ten billion rupiahs) to Rp 500,000,000,000,- (five hundred billion rupiahs) with 9.50 % interest rate and approved the additional non-cash loan facility from Rp 600,000,000,000,- (six hundred billion rupiahs) to Rp 1,500,000,000,000,- (one billion five hundred billion rupiahs) that extended until December 22, 2013.
- In accordance with letter of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Number CBG.CB1/SPPK.002/2013 dated January 18, 2013 concerning the Offering Credit Letter (SPPK) that transactional working capital credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk formerly with the limit amounting to Rp 500,000,000,000,- (five hundred billion rupiahs) to Rp 210,000,000,000,- (two hundred and ten billion rupiahs), the 9.25% interest rate per year, provision publication of Tender BK from 1% decrease to 0.75% and the Company may provide a written notice in case the Company will obtain new credit facility or other loans from other financial institutions.

17. UTANG BANK (Lanjutan)

a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Lanjutan)

- Sesuai surat PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor : TOP.CROKLA.696/ADD/2013, Nomor : TOP.CROKLA.697/ADD/2013, dan Nomor : TOP.CROKLA.698/ADD/2013 tanggal 23 Desember 2013 bahwa fasilitas kredit modal kerja revolving dengan limit sebesar Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar rupiah), tingkat bunga 11% per tahun, fasilitas kredit modal kerja non revolving (semua KMK revolving fixed loan) dengan limit sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), tingkat bunga 10,50%. Fasilitas modal kerja transaksional dengan limit sebesar Rp 210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar rupiah), tingkat bunga 11% per tahun, fasilitas non cash loan dengan limit sebesar Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah), fasilitas trust receipt (TR) merupakan sub limit dari LC/SKBDN dengan limit Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dan fasilitas supply chain financing (sublimit dari NCL) dengan limit menjadi sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) yang diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Desember 2014.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah sebagai

a. Aset tetap, terdiri dari :

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 090/Sei Selaumbang B, luas 1.741 m² yang terletak di jalan Kasuari No. 8 Kelurahan Sei Kambang Kecamatan Medan Sunggul Kabupaten Medan Sumatera Utara berikut bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah.
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 78 / Gadinglaxari, luas 738 m² yang terletak di Kelurahan Gadinglaxari Kecamatan Kojen Kolamadya Malang Propinsi Jawa Timur berikut bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut.
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 86/Desa Ngoro, luas 10.614 m² yang terletak di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur berikut bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut.
- Tiga (3) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01660/Cipinang Gempadak luas 2.815 m², Nomor: 1651/Cipinang Gempadak luas 23 m², dan Nomor:1650/Cipinang Gempadak luas 23 m² yang terletak di Jalan D.I Pangeran Sepren 14 Kelurahan Cipinang Gempadak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur berikut bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut.

17. BANK LOANS (Continued)

a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Continued)

- As per the letter of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk No. TOP.CROKLA.696/ADD/2013, No. TOP.CROKLA.697/ADD/2013, and No. TOP.CROKLA.698/ADD/2013 stated December 23, 2013 that the working capital revolving credit facility with a limit of Rp 22,000,000,000,- (twenty-two billion dollars), the interest rate 11 % per year, working capital credit facility of non-revolving (NCR originally fixed revolving loan) with a limit of Rp 20,000,000,000,- (twenty billion dollars), the interest rate of 10.50 %, transactional working capital facility with a limit of Rp 210,000,000,000,- (two hundred and ten billion dollars), the interest rate of 11 % per annum, non-cash loan facility with a limit of Rp 1,500,000,000,000,- (one billion five hundred billion dollars) and supply chain financing facility (sublimit of NCL) with a limit to Rp 200,000,000,000,- (two hundred billion dollars) is extended up to dated December 22, 2014.

Collaterals for the credit facility are as follows :

a. Collateral fixed assets, consisting of :

- A piece of land with Building Rights Certificate Number : 090/Sei Selaumbang B, area of 1,741 m² located of Kasuari Street No. 8 Medan Sunggul Sub district, Municipal District of Medan, North Sumatera including buildings that were erected on the land.
- A piece of land with Building Rights Certificate Number : 78 / Gadinglaxari, area of 738 m² located in the Gadinglaxari District, Kojen Sub district, Malang Municipal, East Java Province including buildings that were erected on the land.
- A piece of land with Building Rights Certificate Number : 86/Desa Ngoro, area of 10,614 m² located in the Ngoro Village, Ngoro Sub district, Mojokerto District, East Java Province including buildings that were erected on the land.
- Three (3) parcels of with Building Rights Certificate Number : 01660/Cipinang Gempadak, area of 2,815 m², Number : 1651/Cipinang Gempadak area of 23 m², and No. : 1650 / Cipinang Gempadak area of 23 m² Gempadak located at D.I Pangeran Sepren Lot 14, Cipinang Gempadak District, Jatinegara, East Jakarta including buildings were erected on the land.

17. UTANG BANK (Lanjutan)

- a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Lanjutan)
- a. Agunan fixed aset, terdiri dari : (Lanjutan)
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1/ Ngreco, luas 27.530 m² yang terletak di Desa Ngreco Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur berturut bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut.
 - Dua (2) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 339/Kejapanan luas 15.830 m² dan Nomor: 2/Karangrejo luas 345 m² yang terletak di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur berturut bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut.
 - Sebidang tanah seluas 2,4 Ha yang terletak di Jalan Yos Sudarso - Jakarta Utara yang akan dilidat dengan hak tanggungan peringkat pertama dengan pengalihan minimal Rp 151.000.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar rupiah).
- b. Agunan non fixed aset, terdiri dari :
- Seluruh tagihanpiutang usaha Perusahaan sehubungan dengan proyek-proyek yang biayai oleh bank yang telah dilidat dengan jaminan fidusia.
 - Seluruh tagihanpiutang usaha dan tuntutan-tuntutan (klaim) yang dimiliki Perusahaan yang telah dilidat dengan jaminan fidusia.
 - Seluruh mesin dan peralatan (alat berat, kendaraan konstruksi, peralatan plant dan umum) yang dimiliki Perusahaan yang telah dilidat dengan jaminan fidusia.
 - Seluruh persediaan yang dimiliki Perusahaan yang timbul sehubungan dengan proyek-proyek yang pengerjaannya dibiayai oleh bank yang akan dilidat dengan jaminan fidusia.

- b. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
- Utang pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk per 31 Desember 2013 merupakan hutang atas pembelian 1 unit Trailer Concrete Pump, tingkat suku bunga 13,25%, jangka waktu 24 bulan sesuai dengan surat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 2491/SKGS.M.KLUW/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dan hutang atas pembelian 3 Unit Excavator, 3 unit Drilling Machine dan grading machine, serta 5 unit truck mixer, tingkat bunga 12,25%, jangka waktu 24 bulan sesuai dengan surat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 1904/SKGS.M.KLUW/2012 tanggal 9 Juli 2012.

Jaminan pokok berupa alat-alat berat tersebut, pengalihan agunan dilidat secara fidusia yang dicover dengan asuransi all risk sesuai syarat klausula bank PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.

17. BANK LOANS (Continued)

- a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Continued)
- a. Collateral fixed assets, consisting of : (Continued)
- A piece of land with Building Rights Certificates Number : 1/Ngreco, area of 27,530 m² located in Ngreco Village, Selorejo Sub district, Blitar District, East Java Province including buildings that were erected on the land.
 - Two (2) parcels of land with Building Rights Certificates No : 339/Kejapanan area of 15 830 m² and Number : 2/Karangrejo, area of 345 m² located in Gempol Sub district, Pasuruan District, East Java Province including buildings that were erected on the land.
 - A piece of land of 2.4 hectares located at Yos Sudarso - North Jakarta which will be tied to the first ranking mortgage with the binding of at least Rp 151,000,000,000.- (one hundred and fifty one billion rupiahs).
- b. Collateral non-fixed assets, consisting of :
- All bill/receivable receivables of the Company related to projects financed by the bank that has been tied by fiduciary.
 - All bill/receivables receivable and claims owned by Company which have been tied by fiduciary.
 - All machinery and equipment (heavy equipment, construction vehicles, plant and general equipment) owned by Company which has been tied by fiduciary.
 - The entire inventories owned by Company relating to projects financed by bank that the process will be bound by fiduciary guarantee.

- b. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
- Debt on DTN (Persero), Tbk on December 31, 2013 is payable on the purchase of 1 unit of Trailer Concrete Pump, 13.25% interest rate, 24 months term in accordance with the letter of PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk No. 2491/SKGS.M.KLUW/2011 dated October 20, 2011 and payable on purchase of 3 units Excavator, 3 units Drilling Machine and grading machine, and 5 units truck mixers, 12.25% interest rate, 24 months term in accordance with letter of PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk No. 1904/SKGS.M.KLUW/2012 dated July 9, 2012

Principal collateral in the form of the heavy equipment, the collateral binding is done fiduciary covered by all risks insurance as terms clause of PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.

17. UTANG BANK (Lanjutan)

- e. PT BPD Jawa Barat & Banten, Tbk
- Hutang pada PT BPD Jawa Barat & Banten, Tbk per 31 Desember 2012 merupakan fasilitas kredit modal kerja non revolving (clean up basis) sesuai dengan akta Perjanjian Kredit 107687/KRD-GLB/2012 Nomor: 18 tanggal 20 Juli 2012 notaris Popy Kusnari Subesana, SH, M Hum. dengan ketentuan sebagai berikut :
- Fasilitas cash loan (kredit modal kerja konsultasi standby loan) sebesar Rp 230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh miliar rupiah) untuk lambatan modal kerja usaha jasa konsultasi dan pengadaan untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBN/WAPED/BUMN, tingkat bunga 0,75% per tahun, provisi 0,2% per tahun dan jangka waktu tertibung sampai dengan tanggal 20 Juli 2013.
 - Fasilitas non cash loan sebesar Rp 270.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah) untuk sarana disposisi transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Letter of Credit (L/C) dan bank garansi, provisi 1% per tahun dan jangka waktu tertibung sampai dengan tanggal 20 Juli 2013. Fasilitas non cash loan (bank garansi) dapat diterbitkan apabila jangka waktu bank garansi lebih dari 12 bulan namun mengikuti ketentuan urusan bank garansi perihal minimum margin deposit dan kontra garansi.
- Jaminan fasilitas kredit tersebut adalah segala harta milik Perusahaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak kecuali yang sudah terlebih dahulu diagunkan kepada pihak lain, tagihan-tagihan sebesar Rp 870.000.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh miliar rupiah) yang dilidat dengan akta fidusia sebesar Rp 623.000.000.000,- (enam ratus dua puluh tiga miliar rupiah) dan jaminan pengganti yang bentuk dan nilainya sama dan dapat disetujui oleh pihak bank.

- d. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
- Utang pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk per 31 Desember 2012 merupakan fasilitas kredit modal kerja transaksional maksimum sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sebagai lambatan modal kerja Proyek Pembangunan Bendungan Pandanuri, tingkat bunga 10% per tahun, provisi 0,5% per tahun dan jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014. Jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah tagihan Proyek Pembangunan Bendungan Pandanuri sesuai dengan Perjanjian Gessie Nomor 2012/Gessie/018 tanggal 28 November 2012.

- e. PT Bank DBS Indonesia
- Utang pada PT Bank DBS Indonesia per 31 Desember 2012 merupakan fee atas fasilitas SKBDN (lihat Catatan No. 5 dan 13).

17. BANK LOANS (Continued)

- e. PT BPD Jawa Barat & Banten, Tbk
- Debt on PT BPD Jawa Barat & Banten, Tbk on December 31, 2012 is a non revolving working capital credit facility (clean-up basis) in accordance with the Deed of Credit Agreement 107687/KRD-GLB/2012 Number 18/2012 dated July 20, 2012 of notary Popy Kusnari Subesana, SH, M Hum. with the following conditions :
- Cash loan facilities (construction working capital credit of standby loan) is Rp 230,000,000,000.- (two hundred and thirty billion rupiahs) for additional working capital of construction and procurement for project, funded by the State budget / Regional budget / State-owned enterprises, 0.75% interest rate per year, 0.2% provision fee per year and up to a period of July 20, 2013.
 - Non-cash loan facilities amounting to Rp 270,000,000,000.- (two hundred and seventy billion rupiahs) in order of disposition transactions of Domestic Letter of Credit (SKBDN), Letter of Credit (L/C) and bank guarantee, 1% provision of per year and loan starting July 20, 2013. Non-cash loan facility (bank guarantee) may be issued if bank guarantee period more than 12 months but follow the general provisions regarding the minimum deposit margin and counter-
- Collateral of credit facility is any property owned by Company either movable or immovable except those already pledged in advance to another party, receivables amounting to Rp 870,000,000,000.- (nine hundred and seventy billion rupiahs) that are tied by fiduciary deed of Rp 623,000,000,000.- (six hundred and twenty-five billion rupiahs) and a replacement guarantee that the form is equal and be approved by the bank.

- d. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
- Debt on PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk per December 31, 2012 is a transactional working capital credit facility maximum of Rp 50,000,000,000.- (fifty billion rupiahs) as additional working capital for Pembangunan Dan Development Project, interest rate of 10% per year, provision 0.5% per year and the period up to August 31, 2014. Credit collateral is bill for Pandanuri Dan Construction Project in accordance with Gessie Agreement Number 2012/Gessie/018 dated November 28, 2012.

- e. PT Bank DBS Indonesia
- Debt on PT Bank DBS Indonesia on December 31, 2012 is fee for SKBDN facility (see Notes No. 5 and 13).

18. UTANG LAIN-LAIN PIHAK BERELASI

Merupakan dana tabungan yang diterima PT Brantas Calramala Energi (entitas anak PT Brantas Energi) dari PT Calramala Energi Nusantara - pemegang saham yang digunakan untuk operasional pada bulan Desember 2012 sebesar Rp 78.101.100,-. Pinjaman tersebut telah dilunasi pada bulan Januari 2013.

18. OTHERS PAYABLE - RELATED PARTIES

This is borrow obtained by PT Brantas Calramala Energi (subsidiary of PT Brantas Energi) from PT Calramala Energi Nusantara - share holders, which is used for operational on December 2012 amounted to Rp 78,101,100,-. The loan has been paid on January 2013.

19. UANG MUKA PEMBERI KERJA

Akun ini terdiri dari:

	2013	2012	
Jumlah uang muka pemberi pekerjaan	216.324.897.647	116.830.070.060	Total of advance from employers
Dilurangi uang muka pemberi kerja yang jatuh tempo dalam 1 tahun	(71.876.779.150)	(85.401.031.535)	Net of advance from employers with one year maturity
Jumlah uang muka pemberi pekerjaan - jangka panjang	146.498.269.497	31.235.638.551	Total long term advance from employers

Uang muka pemberi kerja merupakan uang muka yang diterima dari jasa konstruksi saat kontrak kerja ditandatangani dan akan diperhitungkan dengan pembayaran termin.

19. ADVANCE FROM EMPLOYERS

This account consists of:

	2013	2012	
Jumlah uang muka pemberi pekerjaan	216.324.897.647	116.830.070.060	Total of advance from employers
Dilurangi uang muka pemberi kerja yang jatuh tempo dalam 1 tahun	(71.876.779.150)	(85.401.031.535)	Net of advance from employers with one year maturity
Jumlah uang muka pemberi pekerjaan - jangka panjang	146.498.269.497	31.235.638.551	Total long term advance from employers

Advances from employers represents advances received from construction services when the contract is signed and will be calculated with the payment terms.

Rincian adalah sebagai berikut:

Details are as follows:

a. Jatuh tempo 1 tahun	Projek / Project	2013	2012
Pemberi Kerja / Employers			
Departemen Pekerjaan Umum Dirjen SDA / Department of Civil Works Directorate General of Natural Resources	Projek Saluran Lempuing / Lempuing Stream Project	12.213.549.030	14.768.019.300
PTK Irigasi dan Rawa IV SNVT Pelabangan Jaringan Pemertanian Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatra VII / PTK Irrigation and Swamp IV SNVT of Network Water Implementation of Sumatra VII River Area Large Hall	Projek Rehab Jer. Dr. Pasut Delta Saleh / Network Rehabilitation of Dr Pasut Delta Saleh Project		8.238.545.455
Saliner Non Vertical Tertentu Pelaksana Pengelola SDA Brantas / Certain Non Vertical Working Unit of Management Implementer of Brantas Natural Resources	Projek Bajulmasi 2 / Bajulmasi 2 Project	2.544.126.573	6.940.291.834
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Provinsi Papua (Puncak Jaya) / Working Unit Implementer of Papua Province Area V National Street (Puncak Jaya)	Projek Jalan Dekai Oksabil / Dekai Oksabil Street Project	13.147.550.002	38.340.545.455
Jumlah dipindahkan / Amount of Transferred		27.905.234.411	65.326.961.094

19. UANG MUKA PEMBERI KERJA (Lanjutan)

19. ADVANCE FROM EMPLOYERS (Continued)

a. Jatuh tempo 1 tahun	Projek / Project	2013	2012
Pemberi Kerja / Employers			
Jumlah pindahan / Amount of transfer		27.905.234.411	65.326.961.094
SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemertanian Air Sulawesi I Provinsi Sulawesi Utara / SNVT Network Water Implementation Sulawesi I of North Sulawesi	Projek Irigasi Sangkep Kiri / Irigasi Sangkep Kiri Project		6.805.457.300
PT Jaya Anas, Tbk.	Projek Anas Geotube / Anas Geotube Project	1.040.078.000	-
JO Washita-Wika	Projek Tunnel Bendungan Jajbarang	1.748.555.343	2.329.112.576
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov Sulleng / Ministry of Civil Works Directorate General of Bina Marga of National Street Implementation Unit Works of Area II Southeast	Projek Penggantian Jembatan Dolago / Replacement of Dolago Bridge Project		-
PT PLN (Persero)	Projek MHPP Ndungga Flores / MHPP Ndungga Flores Project	4.323.448.402	-
PT PLN (Persero)	Projek MHPP Sarlang / MHPP Sarlang Project	2.154.188.470	4.389.943.470
PT PLN (Persero)	Projek MHPP Prati Papua Barat / MHPP Prati Papua Barat Project	1.528.809.208	2.080.435.226
PT. Jaja Dinamika Geohydroengji	Projek PLTM Cianten / PLTM Cianten Project	2.401.887.131	4.329.121.861
PT. Jaja Dinamika Geohydroengji	Projek PLTM Cianten 3 / PLTM Cianten 3 Project	12.787.731.420	-
Pembek Tarakan, Dinas PU dan Tata Ruang / Tarakan City Government, Department of Civil works and Layout	Projek Lapangan Tenis Tarakan / Tarakan Tennis Court Project	8.334.920.737	-
		8.803.623.888	-
Sub Jumlah / Sub total		71.528.728.150	85.401.031.535
Uang muka jasa konsultan / Consultant service advances			
PT Sangpala Hidro Kasmur	Projek PLTM Pangkong / PLTM Pangkong Project	150.000.000	-
PT Sangpala Hidro Kasmur	Projek PLTM Baliase / PLTM Baliase Project	148.500.000	-
Sub Jumlah / Sub total		298.500.000	-
Jumlah / Total		71.826.728.150	85.401.031.535

19. UANG MUKA PEMBERI KERJA (Lanjutan)

19. ADVANCE FROM EMPLOYERS (Continued)

A. Jabah/Tempo Lebih dari 1 Tahun Pemberi Kerja / Employer	B. Masa Lebih dari 12 bulan More Than One Year Maturity	2013		2012	
		Projek / Project		Projek / Project	
Dep. PU, Dirjen Sumber Daya Air Sektor Balai Besar Wilayah Sungai Gihung-Ciadane / Department of Civil Works Water Resources Large Hall of Gihung- Ciadane River Area	Projek Normalisasi Kali Sunter / Sunter River Normalization Project		700.402.277		1.852.235.530
Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) / Jawa, Bali and Southeast Nusa Main Power Station and Networks PT PLN (Persero)	Projek Pek. Accessroad Upper Cetakan/ Accessroad Upper Gosakan Waru Project		24.544.705.714		24.544.705.714
PT Bio Jabropha Indonesia	Projek PLTMH Cibacapung / PLTMH Cibacapung Project		1.425.034.894		5.038.117.787
Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta / Department of Civil Works, Government of DKI Jakarta Province	Projek Jeda Gunung Sahari JUM-1/1 Gunung Sahari JUM-1/1 Jeda Project		25.834.545.454		-
PPK-11 Pembangunan Jembatan Keok-8 / PPK of Keok-8 Bridge Construction	Projek Fly Over Bukit Tinggi / Fly Over Bukit Tinggi Project		12.141.438.300		-
PPK Sungai Pantai II, SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Brantas / PPK Beach River II, SNVT Network Executor of Brantas Water Resources	Projek Wawakrona Paket 3 / Wawakrona Package 3 Project		13.852.817.408		-
PT Pembangunan Pusaka Parahangan	Projek PLTM Pusaka 1 & 3 / PLTM Pusaka 1 & 3 Project		13.400.000.000		-
PT Megapower Matmur	Projek PLTMH Bantaeng 1 / PLTMH Bantaeng 1 Project		8.860.000.000		-
PT Saungca Hirin Ranti	Projek PLTMH Cibacapung 2 & 3 / PLTMH Cibacapung 2&3 Project		14.100.000.000		-
Kementerian Pekerjaan Umum Direktoral Jendral SDA Sektor Kerja NNT Pelaksanaan Jaringan Air Papua / Ministry of Civil Works Directorate General of Natural Resources Unit Work of NNT Papua Water Network Implementation	Projek Bendung Wariri / Wariri Dam Project		21.272.721.213		-
PPK Sungai Pantai SNVT PISA Sulawesi II / PPK River Beach SNVT PISA Sulawesi II	Projek Bolango River Paket 5 / Bolango River Package 5 Project		8.308.830.520		-
Jumlah / Total			146.488.268.487		31.235.638.551
Jumlah / Total			218.324.997.647		116.635.678.886

20. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

20. UNEARNED REVENUE

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

Pemberi Kerja / Employer	Projek / Project	2013		2012	
Kementerian Pekerjaan Umum Direktoral Jendral Bina Marga Sektor Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Pro Sulawesi / Ministry of Civil Works Directorate General of Bina Marga of National Street Implementation Unit Works of Area II Sulawesi	Projek Penggantian Jembatan Dolago / Replacement of Dolago Bridges Project		4.417.007.137		-
Sektor Non Vertikal Terentu Pelaksana Pengelola SDA Brantas / Certain Non Vertical Working Unit of Management Implementor of Brantas Natural Resources	Projek Bajusadi 2 / Bajusadi 2 Project		8.883.885.810		-
Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Timur / Department of Civil Works of East Kalimantan	Projek Lanjutan Bendung Di Serasut / Advance Di Serasut Dam Project		322.086.803		-
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMRK Pembek Bonang / Industrial, Trade, Koperasi UMRK of Bonang City Government	Projek Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bonang / Bonang Gases Transmission Network and Distribution Project		2.801.828.497		-
Kementerian Pekerjaan Umum Direktoral Jendral SDA Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II / Ministry of Civil Works Directorate General of Natural Resources of Southeast Nusa II	Projek Bendung Kodii / Kodii Dam Project		1.280.000.302		-
Universitas Negeri Gorontalo / Gorontalo State University	Penjualan Peningkat ME Gedung Lanjutan UNG / ME Supporting Equipment of Advance UNG Building		1.258.270.173		-
Dep. PU, Dirjen Sumber Daya Air Sektor Balai Besar Wilayah Sungai Gihung-Ciadane / Department of Civil Works Water Resources Large Hall of Gihung- Ciadane River Area	Projek Normalisasi Kali Sunter / Sunter River Normalization Project		-		5.588.444.310
Universitas Negeri Gorontalo / Gorontalo State University	Universitas Negeri Gorontalo / Gorontalo State University		-		816.930.000
Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) / Jawa, Bali and Southeast Nusa Main Power Station and Networks PT PLN (Persero)	Projek Pek. Accessroad Upper Cetakan/ Accessroad Upper Gosakan Waru Project				
Jumlah / Total			84.304.885		84.304.884
			17.274.108.177		6.417.673.344

Akun ini merupakan pendapatan atas pekerjaan jasa konstruksi yang telah dibayar pemberi kerja sedangkan fisik belum selesai dilaksanakan. (lihat catatan No.3)

This account is an income above the construction work that has been paid by the employers while the physical yet completed. (see note No.3)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	2013
Kantor pusat	21.061.604.417
Unit / proyek	15.400.710.813
Unit peralatan	5.760.587.372
Entitas anak	58.468.080
Jumlah	42.281.368.751

Biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2013 dan 2012 antara lain - biaya gaji dan bonus, bunga, premi asuransi, telepon, listrik dan air yang merupakan biaya yang masih harus dibayar di kantor pusat, wilayah-wilayah dan unit/proyek. Biaya ini adalah biaya-biaya tahun berjalan yang pada akhir pertutupan buku belum dibayar dan dibayarkan tahun berikutnya.

Biaya yang masih harus dibayar unit peralatan merupakan biaya-biaya perbaikan (repair). (lihat catatan No. 3m)

Biaya masih harus dibayar entitas anak antara lain perjalanan dinas dan transport, jamsetek, beban rapat dan sewa kendaraan. (lihat catatan No. 3m)

21. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

	2013	2012	
	15.340.482.428	7.028.341.733	Head office
	2.104.074.588	25.005.220	Unit / project
	21.298.783.983		Equipment unit
			Subsidiaries
			Total

Accrued expenses on December 31, 2013 and 2012, mainly offices - salaries and bonuses expenses, interest, insurance premiums, telephone, electricity and water that are accrued in head office, regions and units (projects). These costs are the costs for the year that at the end of the book has not been paid and will be paid on the following year.

Accrued expenses on equipment unit are repair costs. (see note No. 3m)

Accrued expenses of subsidiaries among others - official travel and transport, jamsetek, meeting expenses and vehicle rent. (see note No. 3m)

22. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Akun ini terdiri dari:

	2013
PT Astra Sedaya Finance	10.915.858.235
PT Adira Finance	-
PT ORIX Indonesia Finance	7.564.568.819
PT Sunilomo (SMFL) Leasing Indonesia	5.575.807.750
Jumlah	24.056.233.819

Bagian jangka pendek dari utang sewa pembiayaan:

PT Astra Sedaya Finance	9.053.048.042
PT Adira Finance	1.827.000.677
PT ORIX Indonesia Finance	4.510.678.248
PT Sunilomo (SMFL) Leasing Indonesia	4.368.024.878
Jumlah	17.538.751.264

Utang sewa pembiayaan jangka panjang, kecuali diturangi bagian jangka pendek:

PT Astra Sedaya Finance	1.862.008.183
PT ORIX Indonesia Finance	3.047.081.573
PT Sunilomo (SMFL) Leasing Indonesia	1.207.782.780
Jumlah	6.117.482.546

Utang sewa pembiayaan kepada PT Astra Sedaya Finance per 31 Desember 2013 dan 2012 merupakan utang sewa pembiayaan atas perolehan alat-alat besar proyek, jangka waktu pembiayaan 24 sampai dengan 36 bulan dengan tingkat suku bunga berkisar 8,80% - 13,57% per tahun.

Utang sewa pembiayaan kepada PT Adira Finance per 31 Desember 2012 merupakan sewa pembiayaan atas perolehan 10 unit dump truck mitsubishi TN 527 dan 5 unit dump truck Hino FM 280, jangka waktu pembiayaan 24 sampai dengan 36 bulan dengan tingkat suku bunga 12,50% setahun.

22. LEASE PAYABLE

This account consists of:

	2013	2012	
	12.370.328.331	1.827.000.677	PT Astra Sedaya Finance
	2.833.248.500	-	PT Adira Finance
	17.038.578.488		PT ORIX Indonesia Finance
			- PT Sunilomo (SMFL) Leasing Indonesia
			Total

Short-term portion from lease payable:

	9.902.001.480		PT Astra Sedaya Finance
	1.827.000.677		PT Adira Finance
	1.144.004.274		PT ORIX Indonesia Finance
	9.433.006.341		- PT Sunilomo (SMFL) Leasing Indonesia
			Total

Long-term lease payable, net of short-term portion:

	5.908.288.841		PT Astra Sedaya Finance
	1.808.245.220		PT ORIX Indonesia Finance
	7.597.512.067		PT Sunilomo (SMFL) Leasing Indonesia
			Total

Lease payable to PT Astra Sedaya Finance on December 31, 2013 and 2012 is a lease payable for the acquisition of major project equipments, the financing term of 24 to 36 months with interest rates ranging from 8.80% - 13.57% per year.

Lease payable to PT Adira Finance on December 31, 2012 is a finance lease for the acquisition of 10 units of dump trucks Mitsubishi TN 527 and 5 units of dump trucks Hino FM 280, the financing period of 24 to 36 months with interest rate of 12.50% per year.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (Lanjutan)

Utang sewa pembiayaan kepada PT ORIX Indonesia Finance per 31 Desember 2013 dan 2012 merupakan pembiayaan atas perolehan alat-alat besar proyek, jangka waktu pembiayaan rata-rata 36 bulan dengan tingkat bunga 13,3%

Utang sewa pembiayaan kepada PT Sunilomo (SMFL) Leasing Indonesia per 31 Desember 2013 merupakan pembiayaan atas perolehan alat-alat besar proyek, jangka waktu pembiayaan rata-rata 24 sampai dengan 30 bulan dengan tingkat bunga berkisar 8,20% - 12,75% per tahun. (lihat catatan No.3j dan 13).

22. LEASE PAYABLE (Continued)

Lease payable to PT ORIX Indonesia Finance on December 31, 2012 is a finance lease for the acquisition of heavy project equipments, the financing period of 36 months with interest rate of 13.30% per year.

Lease payable to PT Sunilomo (SMFL) Leasing Indonesia on December 31, 2013 was used to finance the acquisition of major project equipments, the average financing period of 24 to 30 months with an interest rate ranging from 8.20% - 12.75% per years. (see notes no.3j and 13).

23. LIABILITAS DITESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA

Akun ini terdiri dari:

	2013
Liabilitas program pensiun	2.430.504.236
Liabilitas estimasi imbalan pasca kerja	5.144.218.128
Liabilitas iuran tambahan pensiun	-
Jumlah	7.574.832.371

a. Program Pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun PT Brantas Abipraya (Persero) yang berkaitan dengan hak dan besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana disahkan oleh Menteri Keuangan RI No. KEP-053/KM.17/2000 tanggal 14 Februari 2000. Dana pensiun PT Brantas Abipraya (Persero) merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dengan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Kebijakan pendanaan terdiri dari iuran normal, iuran tambahan dan manfaat pensiun. Besaran iuran normal yang dipertukan adalah sebesar 20,26% dari penghasilan dasar pensiun (PhDP) terakhir. Dari jumlah tersebut Peserta aktif harus membayar sebesar 5% dari PhDP dan Pemberi Kerja sebesar 15,56% dari PhDP. Iuran tambahan Dana Pensiun yang diletakkan oleh Aktuaris dari Pemberi Kerja untuk menutup defisit.

Penilaian beban dan liabilitas dana pensiun dilakukan oleh PT Dian Artha Tama Aktuaris, aktuaris independen, sesuai dengan laporannya No. 030BPSAK/DAT/2014 Tanggal 10 Januari 2014 dan No. 788 tanggal 7 Januari 2013. Asumsi yang digunakan untuk tahun 2013 dan 2012 sebagai berikut:

23. ESTIMATED LIABILITIES ON EMPLOYEE BENEFITS

This account consists of:

	2013	2012	
	3.128.541.207	5.052.672.070	Pension program liabilities
	1.888.853.401		Estimated liabilities of employee benefit
	10.968.966.747		Additional fees liabilities
			Total

a. Pension Plan

Company pension plans by the Pension Fund Regulatory PT Brantas Abipraya (Persero) relating to the rights and magnitude of Retirement Benefits as approved by the Ministry of Finance of Republic of Indonesia No. KEP-053/KM.17/2000 dated February 14, 2000. Pension fund PT Brantas Abipraya (Persero) is an Employer Retirement Fund (DPPK) to the Defined Benefit Pension Plan (PPMP). Funding policy consists of the normal fees, additional fees and retirement benefits. The amount of the normal fees required is 20.26% of last pension base earnings (PhDP). From the amount, active participant must pay an amount of 5% of PhDP and Employer of 15.56% of the PhDP. Additional Pension Fund established by the Actuary of the Employer to cover the deficit.

Pension fund expenses and liabilities assessment conducted by PT Dian Artha Tama Aktuaris, an independent actuary, according to the report No. 030BPSAK/DAT/2014 dated January 10, 2014 and No. 788 dated January 7, 2013. The assumptions used for 2013 and 2012 are as follows:

23. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA (Lanjutan) 23. ESTIMATED LIABILITIES ON EMPLOYEE BENEFITS (Continued)

a. Program Pensiun (Lanjutan)		a. Pension Plan (Continued)	
Usia Pensiun	: 55 tahun / 55 years	:	Pension Age
Tingkat Kematian	: GAM - 1871	:	Mortality rate
Tingkat cacat	: 0,1% per tahun / per year	:	Disability level
Tingkat pengurangan diri	: 0,1% per tahun / per year	:	Resign level
Selisih usia suami/istri	: 5 tahun / 5 years	:	Difference age of husband/wife
Kenaikan PhDP	: 7,0 % per tahun	:	Increase of PhDP
Tingkat bunga : Kewajiban	: 8,5 % untuk tahun 2013 / 8,5 % for year 2013	:	Interest rate : liabilities
	: 5,5 % untuk tahun 2012 / 5,5 % for year 2012	:	
Asel	: 8,5 % untuk tahun 2013 / 8,3 % for year 2013	:	Assets
	: 5,5 % untuk tahun 2012 / 5,5 % for year 2012	:	
Pajak Dibayar	: Dana Pensiun / Pension Fund	:	Paid tax
Biaya pengelolaan	: Tidak dibebankan pada iuran / Uncharged on fees	:	Management cost
Metode	: <i>Projected Unit Credit</i>	:	Method
Rekonsiliasi liabilitas program dana pensiun sebagai berikut :			
	2013	2012	
Saldo awal liabilitas	3.129.541.207	2.107.402.414	Beginning balance of liabilities
Pembayaran Manfaat	-	-	Payment of benefit
Beban (pendapatan) iuran pemberi kerja	2.906.517.593 (3.805.474.505)	3.918.577.975 (2.894.438.182)	Expenses (income) Fees of employers
Saldo akhir liabilitas	2.438.564.295	3.129.541.207	Ending balance of liabilities
Penetapan beban (pendapatan) imbalan pasca kerja sebagai berikut :			
	2013	2012	
Biaya jasa kini	2.262.300.076	2.464.120.320	Current service cost
Biaya bunga	1.760.850.688	1.879.858.414	Interest cost
Hasil yang diharapkan dari asset	(1.848.385.400)	(997.302.411)	Expected result from assets
Laba (rugi) Aktuaris	480.148.788	818.280.080	Gain (loss) actuary
Biaya jasa lalu :			Past service cost :
a. Vested	-	-	a. Vested
b. Non Vested	61.601.552	61.601.552	b. Non vested
c. Transisi	-	-	c. Transition
Beban (pendapatan) yang diakui	2.586.517.593	3.516.577.975	Recognized expense (income)

b. Imbalan Pasca Kerja
Perusahaan menyelenggarakan program manfaat PTK karyawan (*post-employment benefit*) sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon. Tidak ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan program imbalan pasca kerja tersebut. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 357 karyawan.

b. Post-Employee Benefits
The Company provides employee benefit plan termination (*post-employment benefits*) according to the Employment Act No. 13 of 2003 on the Settlement of Employment Termination and Severance Pay Determination. No funding is made with relating to the employee benefit programs. The number of employees who are entitled to such benefits are 357 employees.

23. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA (Lanjutan) 23. ESTIMATED LIABILITIES ON EMPLOYEE BENEFITS (Continued)

b. Imbalan Pasca Kerja (Lanjutan)		b. Post-Employee Benefits (Continued)	
Penilaian beban manfaat karyawan sesuai dengan PSAK No.24 (Revisi 2010) untuk tahun 2013 dan 2012 dilakukan oleh PT Dian Artha Tama Aktuaria, aktuaris independen, sesuai dengan laporannya No. 030A/PSAK/DAT/2014 tanggal 10 Januari 2014 dan No.78A tanggal 7 Januari 2013 dengan menggunakan asumsi aktuaris sebagai berikut :			
Usia Pensiun	: 55 tahun / 55 years	:	Pension age
Tingkat Kematian	: GAM - 1871	:	Mortality rate
Tingkat cacat	: 0,1% per tahun / 0,1% per year	:	Disability rate
Tingkat pengurangan diri	: 0,1% per tahun / 0,1% per year	:	Resign rate
Kenaikan Gaji (Ujrah)	: 7,0% per tahun / 7,0% per year	:	Increase in Salary (Wages)
Tingkat bunga	: 8,5% tahun 2013 / 8,5% year 2013	:	Interest rate
	: 5,5% tahun 2012 / 5,5% tahun 2012	:	
Metode	: <i>Projected Unit Credit</i>	:	Method
Rekonsiliasi liabilitas manfaat karyawan diestimasi yang rinci di laporan proksi keuangan sebagai berikut :			
	2013	2012	
Saldo awal liabilitas	5.952.572.079	7.482.887.118	Beginning balance of liabilities
Pembayaran manfaat	(1.240.704.388)	(1.228.008.530)	Payment of benefit
Beban (pendapatan)	438.448.456	(312.025.604)	Expenses (income)
Saldo akhir liabilitas	5.144.216.147	5.952.572.079	Ending balance of liabilities
Penetapan beban (pendapatan) imbalan pasca kerja sebagai berikut :			
	2013	2012	
Biaya jasa kini	490.538.214	174.258.871	Current service cost
Biaya bunga	108.857.071	18.357.581	Interest cost
Hasil yang diharapkan dari asset	-	-	Expected result from assets
Laba (rugi) aktuaris	(161.655.830)	(504.839.038)	Gain (loss) actuary
Biaya jasa lalu :			Past service cost :
a. Vested	-	-	a. Vested
b. Non vested	-	-	b. Non vested
c. Transisi	-	-	c. Transition
Beban (pendapatan) yang diakui	438.448.456	(312.025.384)	Recognized expense (income)
(lihat Catatan No.3a)			(see note no. 3a)

24. UTANG NON BANK

Akun ini merupakan utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 144.300.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2013 berupa fasilitas modal kerja revolving maksimal total plafond sebesar Rp 100.000.000.000,- untuk pembiayaan proyek infrastruktur, bunga sebesar 9% per tahun, provisi 0,5%, dan jangka waktu tanggal 8 Agustus 2013 sampai dengan 8 Agustus 2014 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 14 tanggal 31 Agustus 2013 notaris Lolani Kurniati Inham - Idroes SH,LLM di Jakarta. Jaminan fasilitas pembiayaan tersebut adalah tagihan/piutang atas Proyek Pembangunan Jalan Delai-Oksibil sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 16 tanggal 31 Juli 2013 oleh notaris yang sama.

24. NON-BANK LOANS

This account is owed to PT Sarana Multi Infrastructure (Persero) amounting to Rp 144,300,000,000,- on December 31, 2013 in the form of revolving working capital facility with maximum ceiling of Rp 100,000,000,000,- for financing the infrastructure project, interest at 9% per year, 0.5% provisions, and the time period of August 8, 2013 until August 8, 2014 and can be extended according to the agreement of both parties in accordance with the deed of Agreement Amendment to the Financing Agreement Number : 14 dated August 31, 2013 notary Lolani Kurniati Inham - Idroes SH, LLM in Jakarta. Collateral financial facility is bill/receivables of Delai-Oksibil Road Construction Project in accordance with the Fiduciary Deed Nomor 16 dated July 31, 2013 by the same notary.

25. SURAT BERHARGA JANGKA MENENGAH

Akun ini terdiri dari:

	2013
MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap I	50.000.000.000
MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap II	25.000.000.000
Jumlah	75.000.000.000

a. Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) tahun 2013 Seri A Tahap I sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), jangka waktu 380 hari sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan 7 Januari 2015 dengan bunga sebesar 9,25% per tahun. Pemegang surat berharga dan penerbit telah menunjuk PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Agen Pemantau.

b. Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap II sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), jangka waktu 380 hari sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan 9 Januari 2015 dengan bunga sebesar 9,25% per tahun. Pemegang surat berharga dan penerbit telah menunjuk PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Agen Pemantau.

25. MEDIUM-TERM SECURITIES

This account consists of:

	2013	2012
MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap I	-	50.000.000.000
MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap II	-	25.000.000.000
Jumlah	-	75.000.000.000

a. Issuance of Medium-Term Securities (Medium Term Notes/MTN) MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) of 2013 Seri A Phase I amounting to Rp 50,000,000,000,- (fifty billion rupiahs), a period of 380 days from December 18, 2013 until January 7, 2015 with an interest rate of 9.25% per year. Holders of securities and the issuer have appointed PT Bank CIMB Niaga Tbk as the Monitoring Agent.

b. Issuance of Medium-Term Securities (Medium Term Notes/MTN) MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) of 2013 Seri A Phase II amounting to Rp 25,000,000,000,- (twenty five billion rupiahs), a period of 380 days from December 20, 2013 until January 9, 2015 with an interest rate of 9.25% per year. Holders of securities and the issuer have appointed PT Bank CIMB Niaga Tbk as the Monitoring Agent.

26. MODAL SAHAM

Derivaskan akta notaris No.15 tanggal 12 Agustus 2000 Tjpto Pranowo, S.H. di Jakarta, modal dasar ditetapkan sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diseor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham atau sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya yang dibuat di hadapan notaris Rebo Satri Prastiyati, SH di Jakarta No.37 tanggal 15 Agustus 2012, menyetujui peningkatan modal dasar perseroan dari semula Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) menjadi

Rp 600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah), menyetujui pengalokasian/pemindahan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 151.555 (seratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau seluruhnya seharga Rp 151.555.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia dan untuk memenuhi pengeluaran/pemindahan saham tersebut sebesar Rp 151.554.480.000,- (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berasal dari pengalokasian barang milik negara pada Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya, dan sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan. Modal saham Perusahaan per

	2013
Modal dasar:	
600.000 saham	
per 31 Desember 2013 dan 2012	
nilai nominal @ Rp1.000.000,-	600.000.000.000
Modal dalam portepel	(436.440.000.000)
Modal ditempatkan dan diseor	163.560.000.000

26. CAPITAL STOCK

According to notarial deed No. 15 dated August 12, 2000 of Tjpto Pranowo, S.H., in Jakarta, the Authorized capital is set of Rp 40,000,000,000,- (forty billion rupiahs) divided into 40,000 (forty thousand) shares, each with a nominal value of Rp 1,000,000,- (one million rupiahs). The authorized capital has been subscribed and fully paid by the Republic of Indonesia as many as 10,000 (ten thousand) shares or Rp 10,000,000,000,- (ten billion rupiahs).

According to Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Company PT Brantas Abipraya (Persero) made in the presence of notary Rebo Satri Prastiyati, SH in Jakarta No. 37 dated August 15, 2012, approved the increase in authorized capital from Rp 40,000,000,000,- (forty billion rupiahs) to Rp 600,000,000,000,- (six hundred billion rupiahs), approved the expenditure / shares placement that are still in the deposit (treasury) amounted to 151,555 (one hundred and fifty one thousand five hundred and fifty five) shares with a nominal value of Rp 1,000,000,- (one million rupiahs) or entirely worth of Rp 151,555,000,000,- (one hundred and fifty one billion five hundred and fifty five million rupiahs) which is entirely taken by the Republic of Indonesia and to meet expenditure/share placement amounted to Rp 151,554,480,000,- (one hundred and fifty one billion five hundred and fifty four million four hundred and eighty thousand rupiahs) derived from the transfer of state property on the Ministry of Civil Works as stated in the Indonesian Government Regulation Nomor 63 of 2010 on the Addition of the Share Investment of the Republic of Indonesia to the Capital Stock of the Company (Persero) PT Brantas Abipraya and amount to Rp 520,000,- (five hundred and twenty thousand rupiahs) derived from the capitalization reserve of the Company. Capital stock of the Company as of December 31, 2013 and 2012 are as

	2013	2012
Authorized capital:		
600,000 shares		
on December 2013 and 2012		
nominal value @ Rp 1,000,000,-	600,000,000,000	600,000,000,000
Shares in treasury	(436,440,000,000)	(436,440,000,000)
Subscribed and paid capital	163,560,000,000	163,560,000,000

27. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

Preparasi kepemilikan pemegang saham non pengendali atas ekuitas dan laba (rugi) entitas anak yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

	2013
Saldo awal	2.741.320.845
Tambahan modal disor	2.081.000.000
Bagian dari laba (rugi) yang diatribusikan	(134.585.088)
Jumlah	5.567.735.757

(lihat notaris No. 2, 3b, 3c)

27. NON-CONTROLLING INTERESTS

The ownership portion of non-controlling shareholders in equity and gain (loss) of consolidated subsidiaries are as follows:

	2013	2012
Beginning balance	520.000.113	2.200.000.000
Additional paid in capital	2.081.000.000	
Portion of attributable gain (loss)	21.320.731	
Total	2.741.320.845	

(See notes no. 2, 3b, 3c)

28. PENDAPATAN USAHA

28. OPERATING INCOME

Akun ini terdiri dari:

	2013	2012	
Pendapatan jasa konstruksi	1.407.055.481.714	910.532.625.542	Construction services income
Pendapatan jasa peralatan	33.281.120.620	12.874.438.888	Equipment services income
Pendapatan produk beton	124.707.000	-	Concrete product income
Pendapatan jasa konsultan	814.000.000	-	Consultant service income
Jumlah	1.641.255.806.484	923.407.064.430	Total

Rincian adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Jasa Konstruksi		a. Construction Services Income	
Pembiayai Kerja / Employer	Proyek / Project	2013	2012
SNVT PPK Pembangunan Jalan Malaka-Toliki-Umu / SNVT PPK Malaka-Toliki-Umu Street Construction	Proyek Jalan Laksan Buol / Laksan Buol Street Project	8.061.247.440	44.730.778.283
Dinas PU Kab. Buol Sulawesi / Department of Civil Works of Buol district Southeast Sulawesi	Proyek Air Terang / Air Terang Project	-	73.711.773
Dep. PU Dirjen SDA Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII / Minister of Civil Work River Area Hall of Sumatera VIII	Proyek Air Lakikan 2 / Air Lakikan 2 Project	19.067.008.814	15.780.358.382
Dep. PU Timnas Penanggulangan semburan lumpur, Sidoarjo / Department of Civil Works, National team of Sidoarjo Mud spill Alleviation	Proyek Lumpur Sidoarjo BPLS III / Sidoarjo Mud BPLS III Project	-	300.508.780
Dep. PU Timnas Penanggulangan semburan lumpur, Sidoarjo / Department of Civil Works, National team of Sidoarjo Mud spill Alleviation	Proyek Migasi 3 / Migasi 3 Project	-	58.837.008.638
PPK Prop.Kalim / PPK of East Kalimantan Province	Proyek Lampeong / Lampeong Project	-	20.708.181.830
JO PT BA-Waskita-Wika	Proyek Tunnel Jabbarang / Jabbarang Tunnel Project	2.924.207.128	15.080.322.670
Direktoral Jenderal Sumber Daya Air - Departemen Pekerjaan Umum / Directorate General of Water Resources - Department of Civil Works	Proyek Irigasi Komerang Stage II / Komerang Irrigation Stage II Project	21.308.128.780	42.227.868.290
PT PLN (Persero)	Proyek MHPP Prati- Papua Barat / MHPP Prati Project - West	22.131.018.782	10.024.512.109
PT PLN (Persero)	Proyek MHPP Ndungga - Flores / MHPP Ndungga Project - Flores	28.440.088.045	20.365.001.805
PT PLN (Persero)	Proyek MHPP Sarlong - NTB / MHPP Sarlong Project - NTB	15.342.830.710	10.823.757.159
Jumlah dipindahkan / Amount of transferred		116.309.284.658	244.434.715.880

28. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

28. OPERATING INCOME (Continued)

a. Pendapatan Jasa Konstruksi (Lanjutan)		a. Construction Services Income (Continued)	
Pembiayai Kerja / Employer	Proyek / Project	2013	2012
Jumlah dipindahkan / Amount of transferred			
Dep PU - SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Papua Barat / Department of Civil Works - SNVT of West Papua Roads and Bridges Construction	Proyek Warli B / Warli B Project	116.309.284.658	244.434.715.880
Sallew Non Vertical berliku Pelaksana Pengelola SDA Brantas / Certain Non Vertical Working Unit of Management Implementer of Brantas Natural Resources	Proyek Bendungan Bajulmati / Bajulmati Dam Project	-	3.444.880.304
PPK Irigasi Wilayah 2 Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII / PPK Irrigation Area - 3 Big Hall of Sumatera River Area	Komerang Paket ICB 8 / Komerang Package ICB 8	22.874.588.500	50.705.588.804
KPA Program Pengembangan Pengaliran & Konservasi Sungai Danau & Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat / Power of Budget User of Management Development Program & River, Lake Conservation of Water Resources of West Sumatera Province	Proyek Embung Limpau / Embung Limpau Project	-	4.813.434.518
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Bidang Sumber Daya Air / Department of Civil Works of East Kalimantan Province in the field of Natural Resources	Bendungan Marangkayu 6 / Marangkayu 6 Dam	7.430.277.818	25.044.127.834
PPK Sungai & Pantai SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Gunung Usadane / PPK River & Beach SNVT of Gunung Usadane Water Resources Network Implementer	Proyek Normalisasi Kali santer / Santer River Normalization Project	87.828.171.362	77.822.072.845
Dep.PU - Dirjen SDA Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Prov. Kalimantan Selatan / Department of Civil Works - Directorate General of Kalimantan II River Area Large Hall of South Kalimantan	Proyek Rehabilitasi Saluran Alabio / Alabio Stream Rehabilitation Project	-	10.868.054.148
PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	Proyek Ruko Pademangan Ancol / Pademangan Ancol House Office Project	180.770.000	12.867.170.188
Jumlah dipindahkan / Amount of transferred		244.637.102.368	442.785.551.876

28. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

28. OPERATING REVENUES (Continued)

Peserta Kerja / Employer	Proyek / Project	2013	2012
Jumlah pindahan / Amount of transfer		234.437.102.389	442.785.524.576
Badan Penanggulangan Bencana / Disaster Prevention Board	Proyek Merapi VI / Merapi VI Project	-	20.430.578.833
Badan Penanggulangan Bencana / Disaster Prevention Board	Proyek Merapi VII / Merapi VII Project	-	3.022.108.784
PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	Proyek Ancol Geolube / Ancol Geolube Project	88.248.046.088	23.848.413.016
Satuan Non Vertikal Terentu Pelaksana Pengelola SDA Brantas / Certain Non Vertical Working Unit of Management Implementor of Brantas Natural Resources	Proyek Bendungan Bajulmati 2 / Bajulmati 2 Dam Project	71.622.780.680	86.070.042.668
SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Genduy PPK Irigasi dan Rawa / SNVT of Network Implementation of Genduy Water Utilization PPK Irrigation and Swamp	Proyek Rehab Sitaraja Cihaur / Sitaraja Cihaur Rehab Project	-	10.104.126.488
Satuan Kerja Non Vertikal Terentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bangka Belitung / Certain Non Vertical Unit Works of Water Resources Network Implementation of Bangka Belitung Province	Proyek Pantai Madras Bangka Belitung / Madras Beach Bangka Belitung Project	-	26.802.308.540
Departemen Pekerjaan Umum Uryen SUA / Department of civil works Directorate General of Natural Resources	Proyek Saluran Lempuing	77.738.134.267	1.773.517.707
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga	Proyek Pemeliharaan Jalan Mas Mansyur / Mas Mansyur Street Maintenance Project	-	13.154.546.465
Balai besar pelaksanaan jln nasional wilayah VII, Banjarmasin / Large Hall of National Street Implementation Area II, Banjarmasin	Proyek Jln Tiong Chang-Long pahlangai / Tiong Chang-Long pahlangai Street Project	-	14.005.810.000
Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi / Department of Tourism, Culture, Youth and Sport of Bekasi District	Proyek Kolam Renang Bekasi Tahap 2 / Bekasi Stage 2 Swimming Pool Project	-	8.288.861.071
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat / Disaster Prevention Board of Sumatera Area	Proyek Infrastruktur SDA Pariaman / Pariaman Natural Resources Infrastructure Project	-	4.544.093.981
Jumlah dipindahkan / Amount of transferred		422.539.343.181	645.878.578.914

28. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

28. OPERATING INCOME (Continued)

a. Pendapatan Jasa Konstruksi (Berjalan)		a. Construction Services Income (Continued)	
Peserta Kerja / Employer	Proyek / Project	2013	2012
Jumlah pindahan / Amount of transfer		422.539.343.181	645.878.578.914
PPK Irigasi dan rawa IV SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VII / PPK Irrigation and Swamp IV SNVT of Network Water Implementation of Sumatera VII River Area Large Hall	Proyek Rehab Jar. Dr. Pasut Della Saleh / Network Rehabilitation of Dr Pasut Della Saleh Project	-	58.730.100.000
Badan Penanggulangan Bencana Nasional / National Disaster Prevention Board	Proyek Bencana Alam Solo / Solo Natural Disaster Project	-	17.950.001.818
Satuan MNT PJ Pemanfaatan Air SDA Nusa Tenggara II Prov. NTT / MNT PJ Unit Works of Water Natural Resources Implementation of Southeast Nusa II East Southwest Nusa Province	Proyek Jaringan Irigasi D J Tilong / D J Tilong Irrigation Network Project	-	9.181.818.032
PT Perhutani	Proyek Pabrik Plywood / Plywood Factory Project	-	34.222.857.525
PT Bio Jatropha Indonesia	Proyek PLTMH Gibalapung / PLTMH Gibalapung Project	41.008.702.148	7.811.004.441
PT Jaya Dinamika Geoteknologi	Proyek PLTM Gantun / PLTM Gantun Project	20.388.546.325	325.174.058
PT Sang Hyang Sari (Persero)	Proyek Cetak Sawah Kelapaang / Kelapaang Field Print Project	1.445.530.723	15.885.810.381
Pemkab. Banyuwangi / Banyuwangi District Government	Proyek Sistem Sarana Air Bersih / Clean Water Facility system Project	-	162.100.762
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur / Unit Works of National Street Implementation of Area I East Kalimantan Province	Proyek Jalan Sp Blusuh Ibp 4 / Sp Blusuh Stage 4 Street Project	-	6.866.363.739
SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Jakarta / SNVT National Street	Proyek Underpass Cibubur / Cibubur Underpass Project	-	43.836.290.000
Pojabot Pembuat Kramoran - 15 - Muara Tegeh - Berangin - Lampeong - Batas Prov. Kalimantan / Government Maker - 15 - Muara Tegeh - Berangin - Lampeong - The headwaters of East Kalimantan Province	Proyek Lampeong Pemeliharaan Berkala / Lampeong Periodic Maintenance Project	-	5.208.181.818
PPK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau / PPK in the field of Bina Marga Department of Civil Works of Riau Province	Proyek Jl Burut Teluk Meranti / Burut Teluk Meranti Street Project	-	-
Jumlah dipindahkan / Amount of transferred		811.848.075.035	14.785.708.437
		609.137.894.472	886.915.915.770

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

28. OPERATING INCOME (Continued)

a. Pendapatan Jasa Konstruksi (Berjalan)		a. Construction Services Income (Continued)	
Peserta Kerja / Employer	Proyek / Project	2013	2012
Jumlah dipindahkan / Amount of transfer		609.137.894.672	886.915.915.770
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Provinsi Papua (Puncak Jaya) / Working Unit implementor of Papua Province Area V National Street (Puncak Jaya)	Proyek Jalan Dekai Oribil / Dekai Oribil Street Project		
		108.440.365.044	21.577.970.000
SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau / SNVT Water Resources Network Implementation of Riau Island Province, PPK River and Beach I	Proyek Pantai Pelampong Batam / Pelampong Batam Beach Project	-	12.872.778.740
PPK Penyediaan Air Baku SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemantauan Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau / PPK Supplier of Standard Water, SNVT Water Network Implementation Sumatera IV of Riau Island Province	Proyek Embung Pulau Nipah / Embung Pulau Nipah Project	-	3.000.012.121
Satker SNVT PJSa Pompa Jeneberang Prov. Sulawesi Barat / Unit Works of SNVT PJSa Pompa Jeneberang of West Sulawesi Province	Proyek Pantai Takabiding Palman / Takabiding Palman Beach Project	-	17.731.341.818
PPK Irigasi dan Rawa-II Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV / PPK Irrigation and Swamp II Sulawesi IV River Area Hall	Proyek Bendung Di Lambadia Kuku / Di Lambadia Kuku Dam Project	-	20.173.070.000
Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu-Sulteng / Palu Sulawesi River II Area Hall Southeast Sulawesi	Proyek Rencana Alam Parigi Moutong / Parigi Moutong Natural Disaster Project	-	10.126.888.547
PPK Universitas Negeri Gorontalo / PPK Gorontalo State University	Proyek Universitas Negeri Gorontalo / Gorontalo State University Project	918.030.051	15.800.577.938
Dinas Pekerjaan Umum Pura Kalimantan Timur / Department of Civil Works of East Kalimantan Province	Proyek Peningkatan Bendung Semunt / Semunt Dam Improvement Project	11.873.414.084	-
Unitas Bangunan Pemerintah Kabupaten Bekasi / Department of Building of Government of Bekasi District	Proyek Gedung E2 Rumah Sakit Bekasi / Bekasi Hospital Building E2 Project	21.540.431.805	-
Jumlah dipindahkan / Amount of transferred		749.618.035.366	916.532.625.542

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

28. OPERATING INCOME (Continued)

a. Pendapatan Jasa Konstruksi (Berjalan)		a. Construction Services Income (Continued)	
Peserta Kerja / Employer	Proyek / Project	2013	2012
Jumlah dipindahkan / Amount of transfer		749.618.035.366	916.532.625.542
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur / Department of Civil Works of East Kalimantan	Proyek Longsor Gajamada / Gajamada Landslide Project	12.827.272.727	-
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Pemkot Bontang / Industri, Trade, Koperasi UKM of Bontang City Government	Proyek Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Daring / Daring Gasco Network Transmission and Distribution Project	13.782.834.784	-
Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Timur / Department of Civil Works of East Kalimantan	Proyek Lanjutan Bendung Di Semunt / Advance Di Semunt Dam Project	2.188.181.438	-
Unitas Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Iukoba Jakarta / Department of Civil Works, Government of DKI Jakarta	Proyek Jeda Gunung Sakti JUFMP-1 / Gunung Sakti JUFMP-1 Jeda Project	8.487.186.233	-
PPK-11 Pembangunan Jembatan Kelok-8 / PPK-11 Kelok-8 Bridge Construction	Proyek Flyover Bukit Tinggi / Bukit Tinggi Flyover Project	8.803.464.604	-
PPK Sungai Pantai II, SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Brantas / PPK Beach River II, SNVT Network Executor of Brantas Water Resources	Proyek Wadukrona Paket 3 / Wadukrona Package 3 Project	29.501.108.529	-
SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemantauan Air Sulawesi I Provinsi Sulawesi Utara / SNVT Network Water Implementation Sulawesi I of North Sulawesi	Proyek Irigasi Sanglap Kiri / Irigasi Sanglap Kiri Project	33.462.887.788	-
SNVT Pelaksanaan Jaringan SDA Serayu Opak BBWS Serayu Opak, Ditjen SDA Pekerjaan Umum / SNVT Natural Resources Network Implementation of Opak BBWS Serayu Opak, Directorate General of Natural Resources of Civil Works	Proyek Tanggap Darurat Gunung Merapi Kalbar / Merapi Kalbar Mountain V8 Project	10.288.728.730	-
Kementerian Perumahan Rakyat RI Deputy Bidang Perumahan Formal Satker Penyediaan Perumahan / Ministry of Public Housing of Republic of Indonesia Deputy Field of Formal Housing, Housing Supply Unit Work	Proyek Pembangunan Kawasan WIL III / Kawasan Area III Construction Project	20.061.711.983	-
Jumlah dipindahkan / Amount of transferred		886.518.129.785	916.532.625.542

28. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

28. OPERATING INCOME (Continued)

a. Pendapatan Jasa Konstruksi (lanjutan)		a. Construction Services Income (Continued)	
Pemilik Kerja / Employer	Proyek / Project	2013	2012
Jumlah dipindahkan / Amount of transfer		886.916.129.785	918.532.625.542
Pemerintah Republik Timor Leste / Government of Republic of Timor Leste	Proyek Rehab Reibere / Reibere rehabilitation Project	3.601.752.831	-
Kementerian PU Direktorat Jenderal SDA Balai Besar Wilayah Sungai Pompaan Jemberang / Ministry of Civil Works, Natural Resources Directorate General of Pompaan Jemberang river	Proyek Bencana Alam Manasa / Manasa Natural Disaster Project	468.181.818	-
PT Sanghyang Seri (Persero)	Proyek Celak Sawah Ketapang 2 / Ketapang Field Pind Project	82.240.008.012	-
Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta / Indonesian Fisheries Public Corporation Jakarta Branch	Proyek Rehab Jaringan Instalasi PTAM Perum Perikanan / PTAM Installation Network Rehabilitation Project of Fisheries Public Corporation	4.285.363.255	-
PI Jaya Uranita Geoteknologi	Proyek PLTM Gantem 3 / PLTM Gantem 3 Project	15.063.820.717	-
PT Pembangunan Pustaka Parahiangpan	Proyek PLTM Pucaka 1 & 3 / PLTM Pucaka 1 & 3 Project	5.413.017.041	-
Pemerintah DKI Jakarta / Government of DKI Jakarta	Proyek Pengeboran Sumur Resapan / Drilling Infiltration Well Project	5.807.471.896	-
Kementerian Pekerjaan Umum Saliter Non Vertikal Tertentu Palabana Jaringan Sumber Air Sumatera IV Propinsi Kepulauan Riau / Ministry of Civil Works Certain Non Vertical Unit Works of Sumatera IV Water Resources Network Implementation of Riau Island Province	Proyek Pengaman Pantai Pelampung Tahap 2 / Pelampung Beach Stage 2 Security Project	7.520.738.881	-
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal SDA Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II / Ministry of Civil Works Directorate General of Natural Resources of Southeast Nusa II River Area	Proyek Bendung Kodi / Kodi Dam Project	10.108.055.425	-
Badan Penganggulangan Lumpur Sidoarjo / Sidoarjo Mud (part Alleviation Board)	Proyek Frontage Relokasi Jalan Arteri Porong Siring / Porong Siring Arterial Road Relocation Frontage Project	16.188.680.000	-
PT Megapower Makmur	Proyek PLTMH Barbaeng 1 / PLTMH Barbaeng 1 Project	2.473.348.828	-
Jumlah dipindahkan / Amount of transferred		1.849.960.103.978	918.532.625.542

28. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

28. OPERATING INCOME (Continued)

a. Pendapatan Jasa Konstruksi (lanjutan)		a. Construction Services Income (Continued)	
Pemilik Kerja / Employer	Proyek / Project	2013	2012
Jumlah dipindahkan / Amount of transfer		1.849.960.103.978	918.532.625.542
SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Jakarta / SNVT Nasional Street Implementation of Metropolitan I Jakarta	Proyek Underpass Cibubur Lanjutan / Advance Cibubur Underpass Project	28.188.077.731	-
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur / Unit Works of Area I National Road Implementation of East Kalimantan Province	Proyek Jalan Sp Blusuh Thp 5 / Sp Blusuh Stage 5 Road Project	15.138.075.082	-
Saliter Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Kalimantan Tengah / Unit Works of Area III National Road Implementation of Central Kalimantan Province	Proyek Pemeliharaan Lampong 2 / Lampong 2 Maintenance Project	4.400.320.570	-
Saliter Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Kalimantan Tengah / Unit Works of Area III National Road Implementation of Central Kalimantan Province	Proyek Peningkatan Jalan Lampong 3 / Lampong 3 Improvement Road Project	34.108.148.810	-
PPK Ruas Jalan Bnd-Bts Kota Tobili / PPK of Road - Boundary City of Tobili	Proyek Peningkatan Laluan Laulabang / Laluan Laulabang Improvement Project	18.788.771.006	-
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prop Sulang / Ministry of Civil Works Directorate General of Bina Marga of National Road Implementation Unit Works of Area II Southeast Sulawesi	Proyek Penggantian Jembatan Dolago / Replacement of Dolago Bridges Project	8.321.224.124	-
PT Angkasa Pura 1 (Persero)	Proyek Rapih Exit Taxiway Bandara Juanda / Rapih Exit Taxiway of Juanda Airport Project	14.028.058.531	-
PT PLN (Persero)	Proyek Gedung PLN Pekanbaru / PLN Pekanbaru Building Project	41.381.877.811	-
PT PLN (Persero)	Proyek Gedung PLN Wilayah Riau dan Riau Kepulauan / PLN Building of Riau and Riau Island Area Project	730.201.750	-
Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi / Department of Tourism, Culture, Youth and Sport of Bekasi District	Proyek Kolam Renang Bekasi Tahap 3 / Bekasi Swimming Pool Stage 3 Project	28.025.221.206	-
Jumlah dipindahkan / Amount of transferred		1.285.062.708.291	918.532.625.542

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

28. OPERATING INCOME (Continued)

a. Pendapatan Jasa Konstruksi (berjalan) Pembeli Karya / Employer	a. Construction Services Income (Continued) Project / Project	2013		2012	
Jumlah pindahan / Amount of transfer					
PPK Irigasi dan Rawa-II Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV / PPK Irrigation and Swamp-II of Sulawesi IV River Area Hall	Proyek Erabung Anggola / Erabung Anggola Project		1.285.062.708.291		918.532.625.542
SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sulawesi II / SNVT Water Resources Network Implementation of Sulawesi II	Proyek Dolango River Paket 5 / Dolango River Package 5 Project		10.634.727.273		-
PPK Universitas Negeri Gorontalo / PPK Gorontalo State University	Proyek Universitas Negeri Gorontalo - Lanjutan / Gorontalo State University Project		722.488.653		-
PPK Universitas Negeri Gorontalo / PPK Gorontalo State University	Proyek Penunjang ME Universitas Negeri Gorontalo / ME Supporting of Gorontalo State University Project		33.308.544.545		-
PPK Irigasi dan Rawa-II Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV / PPK Irrigation and Swamp-II of Sulawesi IV River Area Hall	Proyek Bencana Alam Sulawesi Tenggara / Southeast Natural Disaster Project		2.418.828.100		-
Dep. PU Timor Penanggulangan Semburan Lumpur, Sidoarjo / Department of Civil Works, National team of Sidoarjo Mud spill Mitigation	Proyek Mitigasi 5 / Mitigasi 5 project		4.771.824.545		-
Dep. PU Timor Penanggulangan Semburan Lumpur, Sidoarjo / Department of Civil Works, National team of Sidoarjo Mud spill Mitigation	Proyek Mitigasi 6 / Mitigasi 6 project		17.000.534.580		-
			84.388.727.717		-
			1.407.031.081.714		518.532.625.542
Jasa alat / Equipment services			33.281.126.828		12.874.458.688
Produk beton / Concrete product			124.117.100		-
Jasa konsultan / Consultant services			914.000.000		-
Jumlah / Total			1.844.255.486.488		823.487.884.230

29. BEBAN LANGSUNG

29. DIRECT EXPENSES

Alun ini terdiri dari:	This account consists of:		
	2013	2012	
Bahan material	451.832.635.849	304.108.303.884	Materials
Upah langsung	104.180.086.011	70.108.280.383	Direct wages
Peralatan	287.727.882.688	177.480.632.020	Equipment
Penyusutan	28.208.780.438	8.201.941.584	Depreciation
Subkontraktor	223.758.759.319	106.078.258.888	Subcontractor
Persiapan dan penyelesaian proyek	86.474.658.889	30.898.212.759	Preparation and settlement of project
beban umum proyek:			Project General Expenses
Administrasi bank dan keuangan	14.780.016.280	6.805.267.787	Bank and financial administration
Pogorai	52.188.273.077	37.517.258.188	Employee
Kendaraan	9.508.000.525	6.841.738.275	Vehicle
Umum dan administrasi	36.104.081.569	22.835.383.752	General and administration
Jumlah	1.285.793.923.335	838.887.255.337	Total

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2013 and 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. BAGIAN LABA JOINT OPERATION

30. JOINT OPERATION PROFIT PORTION

Alun ini merupakan bagian laba yang diperoleh dari proyek-proyek yang dilaksanakan dengan Pola Kerjasama (Joint Operation) tahun 2013 dan 2012. Proyek-proyek yang dikerjakan dengan Pola Kerjasama (Joint Operation) meliputi proyek-proyek Sipil Umum berupa jalan, jembatan dan bendungan dengan rincian sebagai berikut:

This account is profit portion derived from projects implemented by Pattern Cooperation (Joint Operation) in 2013 and 2012. The projects undertaken by Pattern Cooperation (Joint Operation) includes General Civil projects such as roads, bridges and dams with the following details:

Nama Perusahaan Joint Operation / Name of Company of Joint Operation	Proyek / Project	2013	2012
Brantas - Iwah JO	Proyek Keumala Geumpang / Keumala Geumpang Project	2.070.619.708	-
PT Brantas Abipraya - PT Hutama Karya - PT Nindya Karya JO	Proyek Kali Gribuku dan Kali Madian / Gribuku and Madian Rivers Project	-	(204.578.580)
PT Hutama Karya - PT Brantas Abipraya JO	Proyek Jalan Porong Siring II Paket IV / Porong Siring II Package IV Road Project	1.318.873.521	2.411.240.626
PT Brantas - PT Tri Citra Perdana - PT Tri Citra Abadi JO	Proyek Tebas Singkawang / Tebas Singkawang Project	38.104.103	-
PT BA-Waskita - Wika JO	Proyek Bendungan Jabibarang (Pura) / Jabibarang Dam Project (Pura)	10.531.888.275	11.582.354.279
PT BA - Waskita - Wika JO	Proyek Bendungan Jabibarang (Integrasi) / Jabibarang Dam Project (Integrated)	181.270.000	56.180.000
KSO Brantas - Nindya	Proyek Normalisasi Kali Cilimung Paket 3 / Normalization of Cilimung River Stage 3 Project	1.514.858.878	-
PT Brantas - PT Waskita Karya JO	Proyek Sabodam Merapi II / Sabodam Merapi II Project	22.522.380.488	-
PT Brantas - PT Waskita Karya JO	Proyek Bendungan Sanglup / Sanglup Dam Project	-	(2.288.080.000)
PT Brantas - PT Waskita Karya JO	Proyek Jalan Buhutumba / Buhutumba Road Project	-	804.480.000
PT Brantas - PT Waskita Karya JO	Proyek Gedung Terminal Selatan Bandara / South Part of Airport Building Project	2.823.040.786	-
KSO Brantas - Minarta Driahutama	Proyek Sarana Air Batu Lahat / Lahat Water Standard Facility Project	1.324.018.320	-
PT Brantas Abipraya - PT Citra Gealing Acirama KSO	Proyek Bendungan Biring Baru / Biring Baru Dam Project	6.406.414.047	4.646.480.013
PT Brantas - PT Hutama Karya JO	Proyek Jabung / Jabung Project	1.385.441.159	1.487.388.710
PT Brantas - PT Nindya Karya JO	Proyek Tilah / Tilah Project	1.127.820.000	1.206.115.300
PT Brantas - PT Bumi Karya JO	Proyek Lalikan 3 JO / Lalikan 3 JO Project	81.784.325	(4.138.858.551)
PT Brantas - PT Hutama JO	Proyek Citarum / Citarum Project	18.088.789.302	23.728.122.070
Jumlah dipindahkan / Amount of transferred		66.280.078.885	39.312.882.859

33. BEBAN LAIN-LAIN

Alun ini terdiri dari:

	2013	2012
Cadangan bonus	20.000.000.000	15.000.000.000
Proyek Banyuwani	4.548.753.814	-
Selisih kurs	177.351	-
Penyisihan piutang & eskalasi	-	1.328.038.180
Pembiayaan PKBL	-	8.000.000
PPH atas pengembalian terrain	-	206.525.241
Legalisasi notaris	-	315.425.800
Penyelesaian proyek Lamongan	-	350.000.000
Denda pajak	-	35.848.470
Denda keterlambatan proyek	-	188.703.500
Lainnya	60.518.878	172.251.187
Jumlah	24.687.738.343	17.673.354.798

Beban penyisihan piutang tahun 2012 merupakan penurunan nilai atas tagihan bruto untuk Proyek Pembangunan Jalan Daku-Daku Mahado Simpang Menggala sebesar Rp 826.387.034,-, penurunan nilai atas piutang konstruksi proyek PLTA Poso II sebesar Rp 214.215.445,- dan penurunan nilai piutang main PT Poso Energy sebesar Rp 188.436.881,-. (lihat catatan no. 3m)

33. OTHER EXPENSES

This account consists of:

	2013	2012
Bonus allowance	20.000.000.000	15.000.000.000
Banyuwani project	4.548.753.814	-
Foreign exchange	177.351	-
Allowance for doubtful & escalation	-	1.328.038.180
PKBL maintenance	-	8.000.000
VAT on terra	-	206.525.241
Notary legalization	-	315.425.800
Lamongan project completion	-	350.000.000
Tax penalty	-	35.848.470
Project delay penalty	-	188.703.500
Other	60.518.878	172.251.187
Total	24.687.738.343	17.673.354.798

Allowance for doubtful expense in 2012 is impairment value of gross bill for Road Construction Project for Daku-Daku Mahado Menggala Intersection project amounting to Rp 826,387,034,-, impairment value on receivable of PLTA Poso II construction project amounting to Rp 214,215,445,- and the impairment value of receivables claim of PT Poso Energy amounting to Rp 188,436,881,-.

34. BEBAN BUNGA

Alun ini terdiri dari:

	2013	2012
Bunga Bank Mandiri	10.458.385.155	21.288.445.013
Bunga PT Sarana Multi Infrastruktur	6.480.718.888	4.945.288.880
Bunga Bank Negara Indonesia	2.950.230.400	823.378.282
Bunga Bank Jawa Bank	2.888.831.834	2.927.406.070
Bank UOB	887.500.000	82.500.000
Biaya Penerbitan MTN	148.028.475	-
Bunga Bank Syariah Mandiri	-	814.234.385
Bunga PT Danareksa Finance	-	1.906.252.082
Bunga premi agunan etal	-	1.251.083.818
Bunga Bank Rakyat Indonesia	-	1.583.341.884
Bunga SKBDN Bank DBS	-	4.135.852.330
Bunga Bank Niaga	-	435.841.530
Jumlah	32.632.812.963	39.953.492.170

34. INTEREST EXPENSES

This account consists of:

	2013	2012
Bank Mandiri interest	10.458.385.155	21.288.445.013
PT Sarana Multi Infrastruktur interest	6.480.718.888	4.945.288.880
Bank Negara Indonesia interest	2.950.230.400	823.378.282
Bank Jawa Bank interest	2.888.831.834	2.927.406.070
Bank UOB	887.500.000	82.500.000
Issuance cost of MTN	148.028.475	-
Bank Syariah Mandiri interest	-	814.234.385
PT Danareksa Finance interest	-	1.906.252.082
Interest premium of	-	1.251.083.818
Bank Rakyat Indonesia interest	-	1.583.341.884
SKBDN Bank DBS interest	-	4.135.852.330
Bank Niaga interest	-	435.841.530
Total	32.632.812.963	39.953.492.170

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK HUBUNGAN BERELASI

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak hubungan berelasi adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN merupakan pemegang saham Perusahaan sebesar 100 % per 31 Desember 2013 dan 2012. Perusahaan dan BUMN lain memiliki hubungan afiliasi melalui penyerahan modal Negara Republik Indonesia.
- Perusahaan memiliki, baik secara langsung atau tidak langsung (melalui Entitas Anak) lebih dari 50% saham pada suatu perusahaan atau merupakan Entitas Asosiasi Perusahaan.
- Perusahaan menempatkan dana dan memiliki pinjaman dana pada bank/bank BUMN dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
- Perusahaan mengadakan perjanjian dalam rangka usaha Perusahaan dengan BUMN-BUMN lain maupun anak Perusahaan BUMN serta badan-badan/lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang.
- Perusahaan membentuk beberapa proyek kerjasama (Joint Operation) dengan beberapa partisipan lain dalam pemberian jasa konstruksi.

35. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Details of the nature and type of material transactions with related parties are as follows:

- The Government of the Republic of Indonesia, represented by the Minister of State Enterprises is a shareholder of the Company at 100% on December 31, 2013 and 2012. Company and other State-Owned Enterprises have affiliate relationships through equity participation of the Republic of Indonesia.
- Company owns, either directly or indirectly (through Subsidiaries) more than 50% shares in a company or an Entity Association.
- Company has set funds and loan funds to the state-owned banks with the requirements and normal interest rate as applicable to third-party customers.
- Company has made covenant in form of business with other State-Owned Enterprises and Subsidiaries of State-Owned Enterprises and government authorized institutions.
- The company formed several cooperation projects (Joint Operation) with several other participants in the provision of construction services.

36. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang masing-masing diselesaikan tanggal 14 Februari 2014 dan 28 Februari 2013.

MANAGEMENT RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS

The Company's management is responsible for the preparation of financial statements for the years ended December 31, 2013 and 2012 respectively were completed on February 14, 2014 and February 28, 2013.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2013 AND 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2013	2012	
ASET LANCAR			CURRENT ASSET
Kas dan setara kas	431.002.700.203	185.804.148.033	Cash and cash equivalent
Piutang usaha			Account receivable
- Pihak-pihak berelasi	185.535.880.879	129.131.247.423	Related parties -
- Pihak ketiga	27.843.240.130	5.028.100.584	Third party -
Piutang lain-lain			Others receivable
- Pihak-pihak berelasi	371.855.403	1.200.308.804	Related parties -
- Pihak ketiga	1.264.036.480	8.673.858.771	Third party -
Tagihan bruto kepada pemberi kerja			Gross amount due from employer
- Pihak-pihak berelasi	53.025.102.485	184.421.124.700	Related parties -
- Pihak ketiga	21.887.244.130	35.474.430.282	Third party -
Persediaan	37.474.811.083	24.201.285.150	Inventories
Uang muka	28.835.080.537	14.282.570.354	Advances
Beban dibayar di muka	18.770.385.880	15.040.285.883	Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	28.810.003.321	11.401.807.871	Prepaid taxes
Jaminan	10.163.821.848	7.881.678.007	Guarantee
Penyertaan Saham	171.480.000.000	71.480.000.000	Investment in Shares
Jumlah Aset Lancar	1.019.129.453.974	704.827.896.171	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NON CURRENT ASSET
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 107.638.147.505,- dan Rp 78.487.691.891,- pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012	279.591.747.851	263.511.693.278	Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp 107,638,147,505 - and Rp 78,487,691,891.- on December 31, 2013 and 2012
Aset lain-lain - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 4.466.201.023,- pada 31 Desember 2013 dan 2012	-	-	Others assets - net of accumulated depreciation of Rp 4,466,201,023.- December 31, 2013 and 2012
Jumlah Aset Tidak Lancar	279.591.747.851	263.511.693.278	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET	1.298.721.201.825	968.339.589.449	TOTAL ASSETS

LAPORAN KEUANGAN INDUK

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2013 AND 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2013	2012	
ASET LANCAR			CURRENT ASSET
Kas dan setara kas	431.002.700.203	185.804.148.033	Cash and cash equivalent
Piutang usaha			Account receivable
- Pihak-pihak berelasi	185.535.886.879	128.131.247.423	Related parties -
- Pihak ketiga	27.843.240.136	5.028.100.584	Third party -
Utang lain-lain			Others receivable
- Pihak-pihak berelasi	371.855.403	1.200.308.834	Related parties -
- Pihak ketiga	1.268.026.480	8.673.858.771	Third party -
Tagihan bruto kepada pemberi kerja			Gross amount due from employer
- Pihak-pihak berelasi	53.025.102.486	184.421.124.708	Related parties -
- Pihak ketiga	21.887.244.130	35.474.430.282	Third party -
Persediaan	37.474.811.083	24.201.286.150	Inventories
Uang muka	28.835.880.537	14.282.578.354	Advances
Beban dibayar di muka	18.770.385.888	15.040.285.883	Prepaid expenses
Hajak dibayar di muka	28.810.003.321	11.401.881.871	Prepaid taxes
Jaminan	10.163.821.848	7.881.678.007	Guarantee
Penyertaan Saham	171.480.000.000	71.480.000.000	Investment in Shares
Jumlah Aset Lancar	1.019.129.453.974	704.827.896.171	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NON CURRENT ASSET
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 107.638.147.505,- dan Rp 78.487.691.891,- pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012	279.591.747.851	263.511.693.278	Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp 107,638,147,505 - and Rp 78,487,691,891 - on December 31, 2013 and 2012
Aset lain-lain - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 4.466.201.023,- pada 31 Desember 2013 dan 2012	-	-	Others assets - net of accumulated depreciation of Rp 4,466,201,023 - December 31, 2013 and 2012
Jumlah Aset Tidak Lancar	279.591.747.851	263.511.693.278	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET	1.298.721.201.825	968.339.589.449	TOTAL ASSETS

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
AS OF DECEMBER 31, 2013 AND 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2013	2012	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK			SHORT-TERM LIABILITIES
Utang usaha - pihak ketiga	322.888.888.187	235.288.084.565	Account payable - third party
Utang bank - jatuh tempo satu tahun	1.346.146.427	66.864.218.661	Bank loan - one year maturity
Utang lain-lain - pihak-pihak berelasi	150.358.488.487	81.325.218.887	Others payable - related party
Utang pajak	7.843.230.545	7.478.384.705	Tax payable
Uang muka pemberi kerja - jatuh tempo satu tahun	71.528.228.150	85.401.031.535	Advance from employer - one year maturity
Penerimaan diterima dimuka	17.274.108.777	8.477.879.344	Unearned revenue
Biaya yang masih harus dibayar	42.237.902.702	24.473.878.760	Accrued expenses
Uang sewa pembiayaan - jatuh tempo satu tahun	17.838.751.204	9.433.000.341	Lease payable - one year maturity
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	631.223.339.339	483.731.370.668	Total Short-term Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			LONG-TERM LIABILITIES
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	7.574.832.371	10.968.988.747	Estimated liabilities on employee benefits
Utang non bank	144.300.000.000	-	Non bank payable
Utang bank - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun	-	221.080.729.804	Bank loan - net of one year maturity portion
Uang muka pemberi kerja - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun	146.498.289.497	31.235.638.551	Advance from employer - net of one year maturity portion
Uang sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun	8.117.182.618	7.607.612.087	Lease payable - net of one year maturity portion
Surat berharga jangka menengah	75.000.000.000	-	Medium-term securities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	379.490.584.414	270.892.846.969	Total Long-term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	1.010.716.123.953	756.624.417.637	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal saham - Nilai nominal Rp 1.000.000,- per saham			Capital stock - Rp 1,000,000 - par value per share
Modal dasar - 600.000 lembar saham			Authorized capital - 600,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 161.555 lembar saham	161.555.000.000	161.555.000.000	Subscribed and paid up capital - 161,555 shares -
Cadangan	32.311.000.000	7.584.891.200	Reverse
Saldo laba	94.139.077.872	42.575.280.611	Retained Earnings
Jumlah Ekuitas	288.005.077.872	211.715.171.811	Total equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.298.721.201.825	968.339.589.449	Total Liabilities and Equity

Uraian lebih lanjut atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

See notes to financial statements which are integral part of these financial statements

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG DERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013 AND 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2013	2012	
PENDAPATAN USAHA	1.448.441.312.348	923.407.084.230	OPERATING INCOME:
BEBAN LANGSUNG	(1.285.898.025.798)	(830.607.255.337)	DIRECT EXPENSES
LABA KOTOR - SEBELUM			GROSS PROFIT BEFORE
BAGIAN LABA JOINT OPERATION	155.343.289.750	92.799.029.893	JOINT OPERATION PROFIT PORTION
Bagian laba joint operation	74.171.434.258	79.163.771.888	Joint operation profit portion
LABA KOTOR	229.514.724.007	171.963.899.781	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA			OPERATING EXPENSES
Pegawai	(30.743.030.617)	(34.477.233.655)	Employee
Umum dan administrasi	(17.534.804.215)	(12.961.755.598)	General and administrative
Penjualan	(4.844.548.788)	(2.299.508.290)	Sales
Penyusutan	(2.486.757.105)	(2.550.740.340)	Depreciation
Pengembangan usaha	-	(598.181.418)	Business development
JUMLAH BEBAN USAHA	(55.609.139.905)	(52.885.422.299)	TOTAL OPERATING EXPENSES
LABA (RUGI) USAHA	164.833.384.181	119.078.178.482	OPERATING PROFIT
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			OTHERS INCOME (EXPENSES)
Pendapatan lain-lain	5.145.440.528	10.748.881.028	Others income
Beban lain-lain	(24.007.750.943)	(17.073.594.798)	Others expenses
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(18.862.310.417)	(6.998.713.772)	Total Others (Income) Expenses
LABA SEBELUM BEBAN BUNGA DAN PAJAK PENGHASILAN	145.431.073.685	112.159.864.710	INCOME BEFORE INTEREST AND TAXES
BEBAN BUNGA	(32.832.812.943)	(39.933.492.170)	INTEREST EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	112.798.260.721	72.197.372.540	INCOME BEFORE TAXES
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			INCOME TAX BENEFITS (EXPENSES)
Pajak final	(30.508.354.881)	(21.459.618.217)	Final tax
Pajak kini	-	-	Current tax
Pajak tangguhan	-	-	Deferred tax
Jumlah Relaksasi Pajak Penghasilan	(30.508.354.881)	(21.459.618.217)	Total Income Tax Expenses
LABA TAHUN BERJALAN	76.289.906.869	50.738.354.323	INCOME FOR THE YEAR
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	76.289.906.869	50.738.354.323	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Uraian lebih lanjut atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

See notes to financial statements which are integral part of these financial statements

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) / PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS / STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 / AS OF DECEMBER 31, 2013 AND 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) / (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Saham / Capital Stock	Persyaratan Modal Negara / Stated Capital	Cadangan / Reserve	Saldo Laba (Rugi) / Retained Earning (Loss)	Jumlah Ekuitas / Total Equity
Saldo 1 Januari 2012 / Balance on January 1, 2012	10.000.000.000	151.554.480.000	7.535.411.200	(7.642.818.134)	161.497.072.067
Setoran modal / Paid in capital	151.666.000.000	-	-	-	151.666.000.000
Persyaratan modal negara / Stated Capital Participation	-	(161.666.480.000)	-	-	(151.554.480.000)
Cadangan / Reserve	-	-	(520.000)	-	(520.000)
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan / Environment Development and Partnership Program	-	-	-	(520.254.578)	(520.254.578)
Labas komprehensif tahun 2012 / Comprehensive income for 2012	-	-	-	50.738.354.323	50.738.354.323
Saldo 31 Desember 2012 / Balance on December 31, 2012	161.555.000.000	-	7.534.891.200	42.575.280.611	211.715.171.811
Cadangan / Reserve	-	-	24.726.106.800	(24.726.106.800)	-
Labas komprehensif tahun 2013 / Comprehensive income for 2013	-	-	-	76.289.906.060	76.289.906.060
Saldo 31 Desember 2013 / Balance on December 31, 2013	161.555.000.000	-	32.311.000.000	94.139.077.872	288.005.077.872

Uraian lebih lanjut atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan /
See notes to financial statements which are integral part of these financial statements

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013 AND 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2013	2012	
Arus Kas dari Aktivitas Operasional			Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan dari pelanggan	1.562.577.417.782	984.936.507.304	Receipt from customers
Pembayaran kepada: Pemasok, Subkontraktor, Direksi, Karyawan, JO dan Pihak Ketiga	(1.110.450.293.403)	(896.212.130.056)	Payment to: Suppliers, sub contractor, Director, employee, JO and third parties
Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	452.127.124.380	88.724.458.458	Cash in from operating activities
Bunga deposito dan jasa giro	1.884.432.555	1.469.805.200	Time deposit and current services interests
Pembayaran denda pajak	-	(35.649.470)	Tax penalty payment
Pembayaran bunga	(32.632.012.963)	(39.953.492.170)	Interest payment
Pembayaran pajak	(85.867.635.683)	(17.974.154.973)	Tax payment
Penerimaan restitusi pajak	31.015.175.162	23.644.827.842	Receipt from tax restitution
Hasil kumulatif dan penerimaan (pengeluaran) lainnya	(22.152.996.480)	(8.410.362.047)	Other result and items except payment
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasional	321.373.296.940	47.465.432.850	Net Cash Flows Provided by Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			Cash Flows from Investing Activities
Pencatatan aset tetap	(16.080.054.573)	(178.459.251.680)	Addition of fixed assets
Penjualan aset tetap	806.253.508	-	Sales of fixed assets
Pengurangan property investasi	-	151.389.400.000	Deduction of property investment
Program Kemitraan dan Dana Lingkungan Bina Lingkungan	-	(528.254.570)	Environment development and partnership program
Penyerahan anak perusahaan	(100.000.000.000)	(19.380.000.000)	Investment in Shares
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi	(119.273.801.065)	(46.370.026.178)	Net Cash Flows Used for Investing Activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash Flows from Financing Activities
(Pembayaran) penambahan utang bank	(275.599.800.728)	139.833.414.944	(Payment) Addition of bank loan
(Pembayaran) penanaman utang non bank	144.300.000.000	(100.560.000.000)	(Payment) Addition of non bank payable
Penambahan utang anak Perusahaan	89.838.267.680	9.960.218.867	Addition of subsidiaries payable
Penerimaan utang sewa pembiayaan	7.025.655.432	5.932.363.795	Addition of lease payable
(Pembayaran) penambahan MTN	75.000.000.000	-	(Payment) Addition of MTN
Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	39.723.822.254	55.155.937.808	Net Cash Flows Provided by Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	241.823.318.129	56.251.403.476	INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	185.804.348.833	129.552.744.555	CASH AND CASH EQUIVALENTS IN THE BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	427.627.666.962	185.804.348.833	CASH AND CASH EQUIVALENTS IN THE END OF YEAR

Uraian catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

See notes to financial statements
which are integral part of these financial statements

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT. BRANTAS ABIPRAYA

Pedoman Good Corporate Governance (GCG) PT. Brantas Abipraya (Persero) merupakan penjabaran dari kaidah-kaidah GCG, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara, Anggaran Dasar Brantas (yang perubahannya telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-62129.AH.01.02 Tahun 2008), Visi dan Misi Perseroan serta praktik-praktik terbaik dalam GCG.

Pedoman GCG ini merupakan dasar dan acuan dalam pengelolaan Perseroan. Diharapkan seluruh aktivitas Perseroan akan selaras dengan standar GCG. Pedoman GCG memuat prinsip-prinsip yang berlaku bagi seluruh aktivitas Perseroan. Brantas akan secara konsisten menginformasikan Pedoman GCG ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan sehingga dapat memahami dan memaklumi standar kerja Perseroan yang sesuai dengan GCG.

Pedoman GCG ini merupakan acuan bagi peraturan Perseroan yang lebih detil sesuai dengan kebutuhan unit-unit organisasi dalam Perseroan. Mengingat lingkungan bisnis yang dinamis, maka Brantas akan selalu mengkaji Pedoman GCG ini secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar kerja yang terbaik bagi Perseroan.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE AT PT. BRANTAS ABIPRAYA

The Good corporate Governance (GCG) Guidelines of PT. Brantas Abipraya (Persero) entail a broad description of GCG rules, Law Number 1 of 1995 regarding Limited Liability Company, Ministerial Decree of State-Owned Enterprise Number Kep-117/M-MBU/2002 regarding Application of GCG Practices in State-Owned Enterprise, Articles of Association (of which its amendment is authorized by the Minister of Law and Human Rights through a Decree Number AHU-62129.AH.01.02 of 2008), corporate Vision and Mission and best practices of GCG.

This GCG Guidelines constitutes a foundation and hint for the company management. A fine-tuned company activity with such GCG standard is expected. The GCG Guidelines contains principles that apply to the entire company activities. Brantas will consistently inform the GCG Guidelines to all related parties in order to grasp knowledge and understanding of the corporate standard of the work in conformity to the GCG.

This GCG Guidelines must be referred for more detailed company regulations matching the needs of the organizational units under the Company. Given the dynamic business environment, Brantas will at all time review the GCG Guidelines on continual basis in order to achieve the best work standard for the Company.

Keberhasilan penerapan GCG ini bukan hanya karena tersedianya sarana/acuan tata kelola Perseroan seperti Pedoman GCG, Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct), Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter), Piagam Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit Charter), dan sebagainya, melainkan terletak pada komitmen dari pimpinan tertinggi Perseroan yang diikuti oleh seluruh staf dan karyawan serta didukung oleh Dewan Komisaris. Pedoman GCG ini merupakan acuan langkah awal dalam pengelolaan Perseroan yang sehat dan beretika serta memberikan gambaran yang objektif dan transparan kepada stakeholders Perseroan.

Manajemen dan seluruh karyawan Persero Brantas mempunyai komitmen bersama menjalankan proses bisnis mengacu kepada persyaratan standar Sistem Manajemen Mutu ISO-9001:2000, OHSAS 18001:1999 dan SMK3, ISO 14000, serta prinsip-prinsip GCG, untuk membangun Perseroan yang tangguh dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan, keuntungan dan nilai tambah bagi Pemegang Saham, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan bagi para karyawannya serta mampu memenuhi harapan Stakeholder lainnya.

A. Keselamatan, Kesehatan & Keamanan Lingkungan (K3L)

Manajemen dan seluruh karyawan bertanggung jawab dan terlibat langsung di dalam pemeliharaan dan penyempurnaan K3L di area kerjanya masing-masing, dengan maksud untuk:

A successful application for this GCG is not only due to availability of corporate governance facility/reference such as GCG Guidelines, Code of Conduct, Audit Committee Charter, Internal Audit Charter, and the like, but also the corporate top leader as followed by the entire staffs and employees with a full support of the Board of Commissioners. This GCG Guidelines constitutes a reference for the primary steps in sound and ethical management while providing the Company stakeholders with an objective and transparent overview.

The Brantas management and employees share a commitment to provide the business process with reference to the certified Quality Management System requirement of ISO-9001:2000, OHSAS 18001:1999 and SMK3, ISO 14000, as well as the GCG principles in order to build a strong Company that is able to provide services for the customer's satisfaction, profit and added value for the Shareholders, improved competence and wealth for the employees while meeting the expectation of other Stakeholders.

A. Environmental Safety, Health & Security (K3L)

The management and employees are responsible and directly involved in the nurturing and perfection of K3L in their respective working areas for the purpose of:



Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

- Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan kerja
- Mengeliminasi kerugian waktu dan sumber daya Perseroan yang diakibatkan oleh K3L
- Memelihara dan menyempurnakan Keamanan Kerja, Keselamatan, Kesehatan Karyawan dan Lingkungan.

- Avoiding any accident and health disorder at work
- Eliminating possible corporate time and resources losses due to K3L
- Nurturing and perfection of Environmental and Employment Security, Safety, and Health.

B. Mutu Produk dan / atau Pelayanan

Kendali proses dan mutu secara efektif dan efisien ditetapkan dan secara terus menerus disempurnakan. Setiap pemilik proses di semua tingkatan harus bertanggung jawab untuk melaksanakan, mengendalikan dan menyempurnakan mutu prosesnya dalam memenuhi persyaratan pelanggan.

B. Quality Product and/or Service

Effective and efficient quality and process control is defined and refined on continual basis. Each of the process owners at respective levels must be responsible for the implementation, control, and refinement of their process quality to meet the customers' requirements.

C. Biaya

Pengendalian biaya didasarkan pada pengendalian proses, aktifitas (proses) yang tidak memberi nilai tambah dan yang tidak sesuai, akan disempurnakan secara terus menerus dengan maksud untuk :

- Memelihara dan menyempurnakan mutu proses dan mutu produk
- Menurunkan biaya proses
- Meningkatkan nilai tambah

C. Cost

The cost control is based on the process control in which any unsuitable activity with fewer added values will be continually perfected for the purpose of:

- Nurturing and perfection of quality process and product
- Reducing the process cost
- Improving added value

D. Penyerahan

Tim manajemen proyek melaksanakan dan menyerahkan pekerjaan dengan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu seperti disyaratkan dalam kontrak, serta peraturan-peraturan lain yang terkait.

D. Delivery

The project management team will implement and deliver works in such a timely manner at an appropriate quantity and quality as required by the contract as well as other applicable rules and regulations.

E. Sumber Daya Manusia

Membangun sikap mental dan kompetensi seluruh karyawan sesuai dengan budaya Perseroan dan prinsip manajemen yang baik, untuk mencapai Sasaran Perseroan serta harapan Stakeholder.

Dalam setiap aktivitasnya, Brantas senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip GCG

E. Human Resources

Building the employees' mental attitude and competence in accordance with the corporate culture and sound management principles toward achieving the corporate targets and Stakeholders' expectation.

In each of its activities, Brantas keeps referring to the GCG principles

PRINSIP-PRINSIP GCG

A. Transparansi (Transparency)

Transparansi ialah keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perseroan. Transparansi ini diwujudkan oleh Brantas dengan selalu berusaha untuk memelopori pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan Brantas dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disarankan oleh praktik terbaik GCG.

Implementasi prinsip transparansi yang dilakukan PT Brantas Abipraya antara lain :

1. Laporan Tahunan Brantas memuat informasi penting dalam pengelolaan Perseroan, antara lain tetapi tidak terbatas kepada :
 - a. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Usaha, dan Strategi Perseroan;
 - b. Kondisi keuangan hasil audit oleh eksternal auditor

GCG PRINCIPLES

A. Transparency

Transparency signifies openness in disclosing material and relevant information as to the Company. This is embodied by Brantas through its best efforts at all time to pioneer the disclosure of both financial and non-financial information to whomever it may concern without limiting to that with obligatory nature. Such disclosure of information is applied by Brantas while remain in compliance with the applicable rules and regulations and as suggested by the GCG best practices.

In relation to the principle of transparency, PT Brantas Abipraya reflects it in several issues as follows:

1. Brantas Annual Report entails material information with respect to company management, including but not limited to:
 - a. corporate Vision, Mission, Objective, Target, and Strategy;
 - b. Financial condition audited by External Auditors

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> c. Susunan pengurus (Direksi dan Komisaris) d. Informasi Pemegang Saham Pengendali e. Kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dan Perseroan lainnya yang memiliki benturan kepentingan f. Sistem manajemen risiko g. Sistem pengawasan dan pengendalian internal h. Sistem dan pelaksanaan GCG dan tingkat kepatuhannya i. Kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perseroan j. Biodata anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris k. Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris l. Rapat-rapat yang diadakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris | <ul style="list-style-type: none"> c. Organization Structure (the Board of Directors and the Board of Commissioners) d. Majority Stakeholders Information e. Shareholding by the members of both the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as their relatives and other Companies having conflict of interests f. Risk management system g. Internal control system h. GCG system and implementation and compliance level i. Key issues affecting the company condition j. Curriculum vitae of the members of both the Board of Directors and the Board of Commissioners k. Remunerations of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners l. Meetings held by the Board of Directors and the Board of Commissioners |
|---|---|
2. Perseroan akan mengungkapkan informasi penting kepada stakeholder antara lain:
- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan triwulanan yang berisi laporan rutin manajemen, disampaikan kepada Pemegang Saham b. Prosedur pengadaan dan hubungan dengan rekanan; c. Ketaatan dalam pembayaran pajak; | <ul style="list-style-type: none"> a. Quarterly Report containing regular management description, submitted to the Stakeholders b. Procedures for procurement and relationship with partners; c. Tax compliance; |
|---|---|

- d. Mekanisme manajemen SDM, sesuai dengan PKB.

- d. HR management mechanism in accordance with the PKB.

B. Keadilan (Fairness)

Keadilan ialah kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Brantas menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Implementasi Brantas pada prinsip keadilan antara lain :

1. Pemegang Saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Perseroan akan memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan;
3. Perseroan akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai dengan kemampuan Perseroan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Perseroan akan memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

C. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ dan seluruh jajaran Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Brantas meyakini bahwa akuntabilitas

B. Fairness

Fairness signifies the equal satisfaction of rights of the stakeholders arising from agreement as well as applicable laws and regulations. Brantas warrants that any concerned party is treated as fair to the broadest extent of applicable laws and regulations.

The implementation of fairness principles at Brantas includes as follows:

1. The stakeholders have rights to attend and vote in the GMOS (General Meeting of Shareholders) subject to applicable rules;
2. The Company will ensure a fair and transparent treatment to its partners;
3. The Company will ensure a good and secure working condition for every employee subject to corporate ability and applicable laws and regulations.
4. The Company will ensure a fair and unbiased treatment to its employees regardless of their race, faith, origin, gender and other unrelated backgrounds to performance.

C. Accountability

Accountability signifies a clarified function, performance and liability of the Organ and the Company at all levels toward an effective corporate implementation. Brantas believes that it closely relates to an embodiment of a

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan / atau organ yang ada di Perseroan maupun hubungan antara perseroan dengan pihak yang berkepentingan.

Brantas menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi agency problem yang timbul sebagai konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan Perseroan maupun kepentingan Perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara Organ Perseroan (RUPS, Komisaris dan Direksi).

RUPS sebagai organ tertinggi yang memegang semua kekuasaan yang tidak diberikan kepada organ yang lain. Komisaris melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat. Direksi bertanggung jawab dalam pengurusan Perseroan. Sedangkan akuntabilitas seluruh jajaran Perseroan berarti setiap orang bertanggungjawab atas setiap tugas yang diamanatkan kepadanya.

Brantas menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan / atau organ Perseroan menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya.

Implementasi Brantas pada prinsip Akuntabilitas adalah :

1. Perseroan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perseroan (Direksi, Dewan Komisaris, SPI, SEKPER dan Organ Struktural lainnya) dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perseroan (corporate values), dan strategi Perseroan.

system that controls over relationship between individuals and/or organs within the Company and between the Company and other related parties.

Brantas applies this principle as one solution to agency problems arising as a logical consequence of diverse interests either between individuals and the Company or between the Company and other related parties. The accountability can be achieved through an effective control building upon a balanced power among the company organs (GMOS, the Board of Commissioners, and the Board of Directors).

Being the highest in the hierarchy, the GMOS holds a full power which is not given to any other organs. The Board of Commissioners undertakes control and endorsement tasks. Meanwhile, the Board of Directors is responsible for the company management activities. On the other hand, the corporate accountability at all levels indicates that each person is responsible for respective job assigned to him/her.

Brantas applies the accountability by encouraging corporate personnel and/or organs to recognize their rights and obligations, tasks and responsibilities and authorities.

The implementation of accountability principles at Brantas includes as follows:

1. The Company defines a clear job description for each of the company organs (the Board of Directors, the Board of Commissioners, SPI, Corporate Secretary and other Structural Organs) and employees in accordance with the corporate values and strategy.

2. Perseroan terus berupaya agar semua organ Perseroan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
3. Perseroan menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Perseroan.
4. RUPS antara lain berwenang untuk mengesahkan rencana jangka panjang, rencana anggaran tahunan, menyetujui laporan tahunan, menetapkan pembagian keuntungan dan deviden yang dibayarkan
5. Rincian tugas Dewan Komisaris sebagaimana butir 1 sekurang-kurangnya mencakup pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan, rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan tindak lanjut Keputusan RUPS.
6. Rincian tugas Direksi sebagaimana butir 1 meliputi pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan untuk menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

D. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

2. The Company keeps striving for the best efforts both the company organs and the employees build capacity that suits their tasks, responsibilities, and functions in the GCG implementation.
3. The Company creates an effective internal control system throughout the company management.
4. The GMOS authorities includes validating the long-term and annual budget plans, approving the annual report, and determining the share of paid profit and dividend
5. The Board of Commissioners' job description as mentioned above at least includes the provision of control over the company management carried out by the Board of Directors and recommendation for the same including the development plan, long-term plan, work plan and corporate annual budget, implementation of articles of association and follow-up of the GMOS Resolutions.
6. The Board of Directors' job description as mentioned above includes the company management activities in line with the agreed purposes and objectives and continues to improve efficiency and effectiveness of the Company in order to operate, maintain and manage the corporate wealth.

D. Responsibility

Responsibility in this particular signifies the suitability of the company management with applicable laws and regulations and sound

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Brantas bertanggung jawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha yang tidak sehat, kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya.

Implementasi Brantas pada prinsip Pertanggungjawaban adalah :

1. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik;
2. Mematuhi ketentuan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan;
3. Melaksanakan kewajiban pembinaan masyarakat sekitar, misalnya dengan ikut melakukan pembinaan usaha kecil dan koperasi.
4. Melaksanakan Undang-Undang Tenaga Kerja (UU No.13 tahun 2003), UU Jasa Konstruksi No.19 tahun 1999 beserta peraturan pelaksanaannya.
5. Community Development (0,3% anggarannya) Kepedulian terhadap masyarakat dalam meningkatkan kehidupan (pendidikan, kesehatan, fasilitas keagamaan) bagi masyarakat tidak mampu.
6. Melaksanakan undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya yang menyangkut kegiatan Perseroan serta seluruh peraturan Perseroan yang berlaku.

company core values. Brantas is responsible for complying with the applicable laws including regulations with respect to employment, taxation, business competition, health and safety, and others.

The implementation of the responsibility principles at Brantas includes as follows:

1. Well fulfillment of taxation liability;
2. Compliance with work and environmental safety and health laws;
3. Fulfillment of liability to develop the surrounding community, for example by participating in developing small businesses and cooperation.
4. Compliance with the Labor Law (Law No.13 of 2003), Construction Service Law No.19 of 1999 as complemented with respective implementing regulations.
5. Community Development (0.3% of budget) Social responsibility to improve the community livelihood (education, health, faith-related facilities) for the poor.
6. Compliance with other laws and regulations with respect to company activities and with other applicable corporate rules.

E. Kemandirian (Independency)

Kemandirian adalah sesuatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Kemandirian ini oleh Brantas diimplementasikan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Organ Perseroan. Brantas meyakini bahwa dengan implementasi prinsip kemandirian secara optimal, seluruh Organ Perseroan dapat bertugas dengan baik dan maksimal dalam membuat keputusan dan pengelolaan yang terbaik bagi Perseroan.

Implementasi Brantas pada prinsip kemandirian antara lain :

1. Diantara organ Perseroan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggungjawab masing-masing, tidak saling mendominasi satu sama lain.
2. Selain organ Perseroan tidak boleh mencampuri pengurusan Perseroan;
3. Komisaris, Direksi serta pegawai perseroan dalam pengambilan keputusan selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan.

E. Independency

This principle reflects a state in which the Company is managed in such a professional manner without conflict of interest and influence/duress by any party whatsoever potentially violating either applicable laws or sound corporate principles. At Brantas, it is applied by respecting the rights and obligations, tasks and responsibilities and authorities of each of the company organs. Brantas believes that given an optimized implementation of this principle, the entire company organs are able to perform well at their best in the company decision making as well as management.

The implementation of independency principles by Brantas includes as follows:

1. Mutual respect between company organs in terms of their respective rights and obligations, tasks and responsibilities and authorities rather than dominating each other.
2. No other than the company organs may interfere with the company management;
3. Avoidance of conflict of interests between the Boards of Commissioners and the Board of Directors as well as employees in the decision making process.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

A. PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pengertian :

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Pemegang Saham PT Brantas Abipraya adalah Negara Republik Indonesia. Menteri Negara BUMN bertindak selaku RUPS dan Pemegang Saham PT Brantas Abipraya (Persero).

Umum :

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya yang disebut RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
2. RUPS merupakan forum bagi Komisaris dan Direksi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham.
3. RUPS menyetujui/mengesahkan Laporan Tahunan, RKAP, dan RJPP dengan tepat waktu.
4. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan

STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE

A. SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMOS)

Definition:

The General Meeting of Shareholders (GMOS) is a company organ with the highest controlling power having every authority unlike that given to either the Board of Directors or the Board of Commissioners. The Shareholder of PT Brantas Abipraya is the Government of the Republic of Indonesia. The Minister of State-Owned Enterprise shall act as the GMOS and Shareholder of PT Brantas Abipraya (Persero).

General:

1. The GMOS comprises both annual and extraordinary GMOS in which the latter may be held from time to time as deemed necessary.
2. The GMOS serves as a forum for the Board of Commissioners and the Board of Directors to present their accountability report on their task implementation and performance to the Shareholders.
3. The GMOS gives sanction/validation upon the Annual Report, RKAP, and RJPP in punctual manner.
4. The approval for the Annual Report, including financial report validation by the GMOS, indicates an acquit et de charge for the two Boards' members on their management and control activities

dan pembebasan (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata (tergambar) dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Pemegang Saham memiliki mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi.
6. Pemegang Saham memiliki mekanisme penilaian kinerja Perseroan dan penilaian kinerja masing-masing Komisaris dan Direksi.
7. Pemegang saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Hak – Hak :

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS.
2. Memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.
3. Memperoleh informasi material mengenai Perseroan secara tepat waktu dan teratur.
4. Menerima pembagian dari keuntungan Perseroan dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan lainnya.

performed during the passing year, to the extent that such performance is best illustrated in the annual report, which includes executive and financial summaries, and in compliance with the applicable provisions.

5. The Shareholders have a special mechanism for the Board of Commissioners and the Board of Directors assignment and removal.
6. The Shareholders have a special mechanism for performance evaluation of either the corporate or the Board of Commissioners and the Board of Directors.
7. The Shareholders may not interfere with the corporate operational activities for which the Board of Directors is responsible.

The Rights:

1. To attend and vote in the GMOS.
2. To obtain complete explanation and accurate information with respect to the implementation of the GMOS.
3. To obtain material information with respect to the company in punctual and periodic manner.
4. To receive shared corporate profit in the form of dividend as well as other types of profit distribution.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

B. KOMISARIS

Pengertian :

Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan.

Umum :

1. Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
2. Sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggota Komisaris berasal dari luar Perseroan yang bebas sehingga diharapkan dapat membangun peningkatan profesionalisme di Perseroan.
3. Komposisi Dewan Komisaris seyogyanya mencerminkan berbagai keahlian yang saling mendukung pelaksanaan tugas Komisaris. Apabila diperlukan, Komisaris dapat membentuk komite-komite atau mendatangkan staf ahli yang diperlukan untuk membantu tugasnya atas beban Perseroan.
4. Komisaris memiliki Sekretaris Komisaris yang dapat menjalankan fungsi kesekretariatan secara memadai.
5. Untuk membantu tugas-tugas pengawasan Perseroan, Komisaris wajib membentuk Komite Audit.

B. THE BOARD OF COMMISSIONERS

Definition:

The Board of Commissioners is the company organ assigned to provide control and recommendation for the Board of Directors in the execution of company management.

General:

1. The members of the Board of Commissioners are appointed in the considerations of integrity, dedication, understanding on the company management issues in relation to any management functions, having excellent knowledge of the company business field, and being able to dedicate sufficient time to carry out their tasks.
2. No less than 20% (twenty percent) of the Board members come from independent persons outside the Company that an improved professionalism within the Company can be expected.
3. The Board of Commissioners should reflect a broad extent of expertise for mutual support in their task implementation. When necessary, the Board of Commissioners may either form committees or introduce expert staff as required to facilitate their tasks at the company expenses.
4. The Board of Commissioners has the Board of Commissioners' Secretary to carry out satisfactorily administrative functions.
5. In order to help the company control activities, the Board of Commissioners shall introduce an Audit Committee.

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
2. Komisaris berhak memperoleh informasi Perseroan secara tepat waktu dan lengkap.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
4. Komisaris harus memantau efektivitas pelaksanaan GCG yang diterapkan Perseroan.

C. DIREKSI

Pengertian :

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Umum :

1. Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.

Tasks and Responsibilities:

1. The Board of Commissioners in good faith and full responsibility is to carry out their tasks for the best interests of the Company.
2. The Board of Commissioners reserves the rights to obtain information with respect to the company in punctual and complete manner.
3. In performing their tasks, the Board of Commissioners must comply with the articles of association as well as applicable laws and must realize such principles as professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility and fairness.
4. The Board of Commissioners must monitor the effectiveness of the GCG implementation by the Company.

C. THE BOARD OF DIRECTORS

Definition:

The Board of Directors is the company organ responsible for the company management for the best interests of the Company while acting as its representatives whether inside or outside the court.

General:

1. The Board members are appointed in considerations of their expertise, integrity, leadership, experience, good attitude and eminent dedication for the company progress and development.

2. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis.
3. Paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota Direksi harus berasal dari kalangan di luar Perseroan yang bebas dari pengaruh anggota Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta Pemegang Saham.
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
5. Pendalaman pengetahuan sebagai bagian dari program peningkatan kompetensi bagi tiap anggota Direksi sangat penting untuk menjamin agar Direksi tetap mengikuti perkembangan baru dalam industri jasa konstruksi.

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Direksi bertugas untuk mengelola Perseroan dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham.
2. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan

2. The Board must be such composed that an effective, appropriate and quick decision making can be realized in addition to independence in that every action is free of interests which may alter their ability to carry out their tasks in an independent and critical manner.
3. No less than 20% (twenty percent) of the Board members come from outside the company circle to ensure freedom of influences by the members of the Board of Commissioners, fellow members of the Board of Directors, and the Shareholders.
4. The job and authority distribution of each member is determined by the GMOS. In respect of the GMOS does not determine such job and authority distribution, it shall thus be determined based on the resolution of the Board of Directors.
5. Intensified know-how as part of the competence improvement program for each member is highly essential to ensure that the Board is kept updated with the new development in the construction service industry.

Tasks and Responsibilities:

1. The Board of Directors is to undertake the company management and account for their task implementation to the Shareholders.
2. In carrying out the company management activities, the Board is to perform as guided

dengan peraturan perundang undangan dan/atau Anggaran Dasar.

3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perseroan.
5. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dan secara tanggung renteng bertanggung jawab atas keputusan Direksi.
6. Direksi wajib membantu dan memberi dukungan sepenuhnya kepada SPI dalam melaksanakan tugasnya, serta melakukan tindak lanjut atas hasil temuan SPI.

D. Komite Audit

Pengertian :

Komite Audit adalah organ pendukung yang dibentuk Komisaris untuk membantu dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan. Salah seorang anggota Komite adalah anggota Komisaris yang sekaligus berkedudukan sebagai Ketua Komite.

by the GMOS to the extent that no laws and/or articles of association are violated.

3. Each of the Board members in good faith and full responsibility is to perform their tasks for the best interests of the Company and in compliance with the applicable laws and regulations.
4. In implementing their task, the Board members dedicate all efforts, thoughts and attentions fully on their tasks and liabilities as well as achievement of the company objectives.
5. Each of the Board members takes full and personal responsibility if found to be at fault or negligence in their performance and is severally responsible for the Board's decision making.
6. The Board facilitates and fully supports the SPI in carrying out their tasks and takes follow-up actions upon the SPI findings.

D. Audit Committee

Definition:

The Audit Committee serves as a supporting organ introduced by the Board of Commissioners to assist in the company management control function. One member of this Committee is of the Board of Commissioners to act as a committee chairman.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Komite Audit bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
2. Komite Audit bertugas membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Auditor Internal (SPI).
3. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Komisaris.
4. Anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan di bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.
5. Ruang lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit akan diuraikan lebih rinci dalam Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter).

E. SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)

Pengertian :

Satuan Pengawasan Intern merupakan aparat pengawas intern Perseroan yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Main Task and Function:

1. The Audit Committee works as a team to assist the Board of Commissioners' task implementation.
2. The Audit Committee assists the Board of Commissioners in ensuring an effective internal control system and effective task implementation either External or Internal Auditor (SPI).
3. The Audit Committee is independent in its task implementation and reporting and be responsible directly to the Board of Commissioners.
4. The Audit Committee must reflect good integrity and knowledge in addition to sufficient work experience in the field of control/audit and other specialties as deemed necessary in order to perform its function optimally.
5. The scope of work, authority and responsibility of Audit Committee is described in more details in the Audit Committee Charter.

E. INTERNAL CONTROL UNIT (SPI)

Definition:

The Internal Control Unit comprises the company control apparatus responsible to the President Director.

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. SPI bertugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional Perseroan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perseroan serta memberikan saran-saran perbaikan.
2. SPI memberdayakan diri sebagai strategic business partner bagi Direksi dengan memberikan masukan masukan dan pertimbangan terhadap hal-hal strategis yang dihadapi Perseroan.
3. SPI didukung oleh personil dengan kualitas, kompetensi, dan kuantitas yang memadai untuk pelaksanaan tugasnya.
4. Untuk menjaga kualitas hasil audit, SPI bekerja secara independen sesuai dengan Standar Profesi Auditor Internal dan Pedoman Kerja SPI.
5. SPI wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan pekerjaan lainnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit/Komisaris dan pihak-pihak lain yang dianggap tepat.
6. Personil SPI senantiasa mengembangkan keahlian dan pengetahuan guna menjamin kualitas auditnya.
7. Kedudukan, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban SPI dituangkan dalam internal Audit Charter (Piagam Audit SPI).

Main Task and Function:

1. The SPI assists the President Director in the internal audit of company financial and operational and in the assessment of company control, management and implementation and gives recommendations for improvement.
2. The SPI empowers itself as a strategic business partner for the Board of Directors by providing feedback and considerations with respect to strategic issues dealt with by the Company.
3. The SPI is supported by personnel with adequate quality, competence and quantity to perform their tasks.
4. To maintain the quality audit result, the SPI will work independently subject to the Internal Auditor Professional Standard as well as the SPI Work Guidelines.
5. The SPI submits the audit result as well as other report and deliveries to the President Director with a carbon copy to the Audit Committee/Board of Commissioners and other concerned parties as deemed appropriate.
6. The SPI personnel at all time develops their expertise and knowledge to ensure a quality audit.
7. The position, authority, responsibility and accountability of SPI are specified in the Internal Audit Charter.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

F. AUDITOR EKSTERNAL

Pengertian :

Auditor Eksternal adalah pihak yang independen dan profesional yang melakukan audit keuangan atas laporan keuangan Perseroan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Auditor Eksternal dapat juga melakukan audit non keuangan, seperti audit khusus, audit mutu, audit investigasi, dsb.
2. Untuk menjaga independensinya, maka :
 - Auditor Eksternal bertanggungjawab kepada Pemegang Saham
 - Auditor Eksternal harus bebas dari pengaruh dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Komisaris, Direksi, dan pihak yang berkepentingan di Perseroan (stakeholders).
 - Auditor Eksternal tidak boleh memberikan jasa lain di luar audit selama periode audit.
 - Auditor Eksternal tidak boleh mempunyai kepentingan keuangan yang material baik langsung maupun tidak langsung dan hubungan bisnis dengan Perseroan.
3. Audit oleh Auditor Eksternal dilakukan sesuai dengan standar audit dan kode etik profesi.

F. EXTERNAL AUDITOR

Definition:

External Auditor is an independent and professional outside party performing audit on the corporate financial report to provide opinions as to the objectivity, compliance and suitability of such report with the Indonesian Financial Accounting Standard as well as applicable laws and regulations.

Main Task and Function:

1. The External Auditor also performs audits for non-financial aspects such as special, quality and investigation audits, etc.
2. To ensure their independence:
 - The External Auditor reports to the Stakeholders
 - The External Auditor must be free of interference and have no conflict of interests with such entities as the Board of Commissioners, the Board of Directors and related stakeholders.
 - The External Auditor provides no other services than audit during the audit period.
 - The External Auditor may not have any material financial interest and business relationship to the Company either directly or not.
3. An audit by any External Auditor shall be carried out in accordance with the audit standard and professional code of conduct.

4. Auditor Eksternal harus memberitahu Direksi dan atau Komisaris melalui Komite Audit bila menemukan kejadian atau indikasi pelanggaran di dalam Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberitahukan kepada Pemegang Saham dan atau instansi pemerintah sebagai regulator/pengawas selambat-lambatnya tiga hari kerja jika ditemukan adanya pelanggaran dan hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan Perseroan dan kepentingan publik lainnya.
6. Kecuali disyaratkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Auditor Eksternal harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya

G. SEKRETARIS PERSEROAN

Pengertian :

Sekretaris Perseroan merupakan penghubung (liaison officer) antara Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham serta wakil Perseroan dalam berhubungan dengan regulator, lembaga atau asosiasi lain yang berkaitan dengan Perseroan.

1. Sekretaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi serta bertanggungjawab kepada Direksi.
2. Sekretaris Perseroan harus memiliki kualifikasi akademis yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
3. Sekretaris Perseroan harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang mendukung pelaksanaan fungsinya.

4. The External Auditor must notify the Board of Directors and/or Commissioners through the Audit Committee upon finding either event or indication of breach in the Company to any applicable laws and regulations.
5. Notify the Shareholders and/or the public regulator/inspector within no later than three business days upon finding of violation and issues harming the company financial status as well as other public interests.
6. Except otherwise required in the articles of association and applicable laws, the External Auditor must keep confidential information obtained during performing their audit tasks.

G. CORPORATE SECRETARY

Definition:

The corporate secretary serves as a liaison officer between the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Shareholders as well as corporate representatives in dealing with the regulators and other institutions or associations with respect to the Company.

1. The corporate secretary is appointed and dismissed by and be responsible to the Board of Directors.
2. The corporate secretary must have adequate academic qualification in order to perform well in fulfilling his/her task and responsibility.
3. The corporate secretary must have supporting experience and knowledge in order to perform his/her function.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

4. Sekretaris Perseroan mempunyai tugas menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi maupun RUPS.
5. Sekretaris Perseroan harus memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi.
6. Sekretaris Perseroan bertanggungjawab atas pengelolaan informasi Perseroan.

4. The corporate secretary is to carry out the corporate administration and document storage, including but not limited to the List of Shareholders, Special List, and minutes of the Board of Directors and GMOS meetings.
5. The corporate secretary must ensure that the Company complies with applicable rules on the transparency underlying the application of GCG principles and must provide information with respect to his/her tasks to the Board of Directors.
6. The corporate secretary is responsible for the management of company information.

PROSES TATA KELOLA PERUSAHAAN

A. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi dilakukan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
2. Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dilakukan secara transparan, profesional, mandiri, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

CORPORATE GOVERNANCE PROCESS

A. APPOINTMENT AND DISCHARGE OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

1. The appointment and discharge of the Board of Commissioners and the Board of Directors is to be carried out by GMOS through a transparent process.
2. The fit and proper test mechanism must take into consideration the principles of transparency, professionalism, independence and accountability.
3. The candidate member of the Board of Directors, upon notification of having passed the fit and proper test, must sign a management contract prior to his/her official inauguration.

4. Komisaris dan Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali selama satu kali masa jabatan berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya.
5. Komisaris yang diangkat harus menyusun Term of Reference (TOR) yang memuat rencana kerja, sasaran/target yang ingin dicapai dan mengkomunikasikannya kepada Pemegang Saham.
6. Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
7. Bagi anggota Komisaris dan/atau Direksi yang berhenti sebelum ataupun setelah masa jabatannya berakhir harus menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham/RUPS untuk dimintakan pengesahannya.

B. PROGRAM PENGENALAN PERSEROAN

1. Komisaris dan/atau Direksi yang baru wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan yang bersangkutan.
2. Tanggungjawab untuk mengadakan program pengenalan Komisaris yang baru berada pada Komisaris Utama.
3. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan Direksi yang baru berada pada Direktur Utama.
4. Program pengenalan meliputi:

4. The Board of Commissioners and the Board of Directors whose official period has expired may be considered for reappointment for next official period subject to the evaluation of their performance during the preceding period.
5. The selected Board of Commissioners must prepare Term of Reference (TOR) containing their work plan, target and communicate it to the Shareholders.
6. The Board of Commissioners and Board of Directors may from time to time be discharged based on the GMOS Resolutions by stating the reasons.
7. Any member(s) of the Board of Commissioners and/or Board of Directors that resigns at an earlier stage of their official period must prepare their implementation report to submit to the Shareholders/GMOS for validation as required.

B. COMPANY INTRODUCTION PROGRAM

1. Newly assigned Board of Commissioners and/or Board of Directors is to be provided with the related company introduction program.
2. The responsibility for the implementation of company introduction program to the newly assigned Board of Commissioners is assumed by the Chief Commissioner.
3. The President Director is responsible for carrying out an introductory program to the newly assigned Board of Directors.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

- Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan.
- Gambaran mengenai Perseroan.
- Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
- Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi.

C. RJPP, RKAP, dan SCI

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dengan disetujui Komisaris, dan disahkan oleh RUPS.
2. Direksi wajib mengirimkan usulan RKAP kepada Komisaris dan Pemegang Saham untuk dimintakan pengesahan kepada RUPS Tahunan selambat-lambatnya 60 hari sebelum tahun buku baru mulai berlaku.
3. Komisaris memberikan masukan-masukan pada saat penyusunan RJPP dan RKAP, serta melakukan pembahasan bersama-sama dengan Direksi sebelum memberikan persetujuannya.
4. RUPS Tahunan mengesahkan RKAP tahun buku berikutnya yang diadakan selambat-lambatnya pada hari ke-30 bulan pertama setelah tahun buku baru dimulai.
5. Direksi bertanggung jawab atas

4. The Company Introduction Program includes:
 - Adaptation of GCG principles by the Company.
 - Description about the Company.
 - Description about the delegated authority, internal and external audit, internal control system and policy, including Audit Committee.
 - Description about the tasks and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors.

C. RJPP, RKAP, AND SCI

1. The Board of Directors must prepare the Company Work Plan and Budget (RKAP) and Company Long-Term Plan (RJPP) to be approved by the Board of Commissioners and validated by the GMOS.
2. The Board of Directors must submit the proposed RKAP to the Board of Commissioners and Shareholders for validation by the Annual GMOS by no later than 60 days prior to the new fiscal year becomes effective.
3. The Board of Commissioners is to give feedback and recommendations during the RJPP and RKAP preparation, and shall enter into a discussion with the Board of Directors before any approval is given.
4. The Annual GMOS must validate the next fiscal year's RKAP by no later than the 30th day of the first month of the new fiscal year.

pelaksanaan RJPP dan RKAP serta melaksanakan evaluasi dan pengendaliannya..

6. Setiap perubahan RKAP harus disetujui oleh RUPS, kecuali ditentukan lain dalam keputusan RUPS.
7. Komisaris memantau pelaksanaan RKAP dan kesesuaiannya dengan RJPP, serta memberikan masukan-masukan dalam upaya pencapaiannya.
8. Perjanjian Penunjukan Anggota Direksi (Statement of Corporate Intent/SCI) ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan kuasa Pemegang Saham pada saat penunjukan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi, yang memuat persyaratan penunjukan dan pemberhentian termasuk peran dan tanggung jawab

D. KONFLIK KEPENTINGAN

1. Konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang karena kedudukan atau wewenang yang dimiliki di Perseroan, mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perseroan secara objektif. Konflik kepentingan menimbulkan adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perseroan.
2. Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. The Board of Directors must be responsible for the execution of RJPP and RKAP as well as their evaluation and control.
6. Any amendment of RKAP must be approved by the GMOS, except otherwise provided for in the GMOS Resolutions.
7. The Board of Commissioners must monitor the execution of RKAP and its compatibility with RJPP in addition to providing feedback and recommendations for achievements.
8. The Statement of Corporate Intent/SCI is to be ratified by the respective members of the Board of Directors and Shareholder representatives by the time the respective member is assigned as the member of the Board of Directors, and shall contain the requirements for assignment and discharge including their roles and responsibilities.

D. CONFLICT OF INTERESTS

1. Conflict of interests represents a situation in which a person for his/her position or authority in the Company shows personal interests affecting the objective implementation of the tasks assigned by the Company. It creates variation between personal economic interests and that of the Company.
2. The Shareholders may not interfere with the corporate operational activities for which the Board of Directors is responsible as stated in the Articles of Association and applicable laws and regulation.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

3. Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 4. Komisaris dan Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
 5. Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuan untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap Direksi.
 6. Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, kecuali persetujuan RUPS.
 7. Komisaris dan Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan yang bersangkutan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai Direksi dan Komisaris, yang ditentukan oleh RUPS.
 8. Antara para anggota Direksi maupun anggota Komisaris dan antara anggota Komisaris dengan anggota Direksi tidak
3. The Board of Commissioners is forbidden to take concurrent membership in any other State or Regional Owned Enterprise, or any private enterprise, and other official position that may cause conflict of interests.
 4. The Board of Commissioners and the Board of Directors report to the Company on their shareholding or that of their relatives in the Company or any other Company.
 5. The Board of Commissioners may not have interests which may alter their ability to carry out their tasks in an independent and critical manner in the relationship with each other and with the Board of Directors.
 6. The Board of Commissioners may not take concurrent membership of the Board of Directors in any other State or Regional Owned Enterprise, any private enterprise, other structural or functional position in either central or regional government instance, and other official position that may create conflict of interests, except approved by GMOS.
 7. The Board of Commissioners and Board of Directors may not deal with transaction with conflict of interests and take personal advantages from the company activities other than remuneration and allowances they earn from being the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as determined by GMOS.
 8. Between the members either the Board of Directors or the Board of Commissioners and vice versa may exist up to the third

boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

9. Jajaran/Karyawan PT Brantas Abipraya tidak boleh merangkap jabatan lain pada usaha swasta yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perseroan.
10. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah :
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan Perseroan dengan Perseroan.
11. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.

degree, either straight or to the side line as well as related by marriage (son/ daughter in law or brother/sister in law) are disallowed having the blood relatives.

9. PT Brantas Abipraya employees are disallowed taking concurrent assignment in any private enterprise that may create conflict of interests, whether directly or not, with the company interests.
10. In any event that the company interests should conflict with that of the members of Board of Directors and/or the members of Board of Commissioners, those eligible to represent the Company shall be:
 - a. Other members of the Board of Directors having no conflict of interests with the Company as appointed by the rest of the Board of Directors members that have no conflict of interests.
 - b. The Board of Commissioners in the event that all of the Board of Directors members have conflict of interests with the Company; or
 - c. Any other party appointed by the GMOS in the event that all members of the Board of Directors or the Board of Commissioners have conflict of interests with the Company.
11. In the event that all of the members of the Board of Directors have conflict of interests with the Company but none of the members of the Board of Directors does, the Company, thus, shall be represented by other parties appointed by the GMOS.



Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

E. MANAJEMEN RISIKO

1. Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilaksanakan Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi Perseroan untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan.
2. Proses analisis risiko meliputi estimasi atas signifikansi dampak yang akan timbul, penilaian mengenai tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan penetapan langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko tersebut.
3. Direksi melakukan identifikasi dan kajian terhadap potensi risiko yang dihadapi Perseroan.
4. Direksi menetapkan strategi dan kebijakan penanganan pengelolaan risiko serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.
5. Direksi mengungkapkan kebijakan yang diterapkan Perseroan menyangkut pengelolaan risiko dalam Laporan Tahunan.
6. Direksi menyusun pedoman penanganan masalah dengan stakeholders yang berkaitan dengan pengelolaan jasa konstruksi dan jasa lainnya, misalnya proses tender dan hubungan dengan mitra kerja.
7. Direksi memberikan informasi hasil analisis risiko yang dilakukan kepada Komisaris sesuai dengan tingkat kebutuhan.
8. Komisaris memantau pelaksanaan pengelolaan risiko Perseroan dan memberikan masukan untuk perbaikan.

E. RISK MANAGEMENT

1. The risk assessment comprises a set of actions taken by the Board of Directors in order to identify, analyze, and assess the risk the Company may come across in achieving the determined business targets.
2. The process includes estimating the significance of impact that may arise, assessment on the risk event likelihood and determining the required steps to overcome such risk.
3. The Board of Directors shall conduct identification and review on the potential risk for the Company.
4. The Board of Directors is to determine the risk management strategy and policy and supervise their implementation.
5. The Board of Directors must elaborate the policy applied by the Company with respect to the risk management in the Annual Report.
6. The Board of Directors must prepare the guidelines for problem solving with the stakeholders with respect to the management of construction and other services, i.e. bidding process and relation with partners.
7. The Board of Directors must provide the Board of Commissioners with the result of risk analysis carried out in accordance with the requirement level.
8. The Board of Commissioners monitors the risk analysis implementation

9. Dalam melaksanakan tugasnya SPI juga melakukan kajian terhadap kecukupan pengelolaan risiko yang diterapkan Perseroan sebagai bahan kajian risiko kepada Direksi.

F. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Semua keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika tidak dicapai kata sepakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak/voting.
2. Jika terdapat pendapat yang berbeda dalam rapat (dissenting opinion) harus didokumentasikan dalam notulen rapat.
3. Setiap keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan stakeholders Perseroan, risiko yang melekat, dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap pengambil keputusan.
4. Hak mengemukakan pendapat dijunjung tinggi dalam upaya memberikan masukan peningkatan kinerja Perseroan.
5. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat pula diambil tanpa diadakan rapat Komisaris/Direksi, sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
6. Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi harus konsisten dalam menjalankan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan.

9. The Company is to give recommendations for improvement.

F. DECISION MAKING

1. All decisions in any meeting are made through consultation for consensus and when agreement cannot be reached, it is to be made by voting.
2. Any event of dissenting opinions in a meeting should be documented in the minutes of meeting.
3. Each decision must be made by taking into account the best interests of the stakeholders, key risks, and authority held by each of the decision maker.
4. The right for opinion is highly upheld to ensure a provision of feedback for the improvement of company performance.
5. Binding decisions may also be made without the Board of Commissioners/the Board of Directors holding any meeting, provided that all of the Board members approve the method used and the materials on which the decision is made.
6. The Shareholders and the Board of Commissioners and the Board of Directors must show consistency in applying the decisions that have been made.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

G. MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1. Pemegang Saham, Komisaris, dan stakeholders lainnya berhak memperoleh informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu mengenai Perseroan secara proporsional.
2. Direksi bertanggungjawab untuk memastikan agar informasi mengenai Perseroan diberikan kepada Komisaris dan Pemegang Saham secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
3. Direksi melakukan komunikasi secara efektif dengan unit kerja, sesama Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham melalui media komunikasi yang tepat dan efisien.
4. Direksi menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan informasi termasuk klasifikasi kerahasiaan informasi.
5. Sekretaris Perseroan memastikan informasi yang dikelola valid, lengkap, akurat, tepat waktu dan relevan dalam membantu pengambilan keputusan.
6. Perseroan senantiasa mengoptimalkan penggunaan media komunikasi dan informasi yang tersedia.

H. PENDELEGASIAN WEWENANG

1. Direksi mendelegasikan sebagian wewenang pengelolaan Perseroan kepada jajaran di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan untuk menunjang kelancaran tugas dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

G. COMMUNICATION AND INFORMATION MEDIA

1. The Shareholders, the Board of Commissioners, and other stakeholders reserve the right to proportionally obtain complete, accurate, and punctual information with respect to the Company.
2. The Board of Directors is responsible to ensure the provision of complete, accurate and punctual information with respect to the Company for the Shareholders.
3. The Board of Directors establishes effective communication with the working units, fellow Board of Directors, the Board of Commissioners, and Shareholders through appropriate and efficient media.
4. The Board of Directors determines the policy on information management including confidentiality classification
5. The corporate secretary ensures that valid, complete, accurate, punctual and relevant information is managed in order to facilitate the decision making.
6. The Company at all time optimizes the use of available media of communication and information.

H. DELEGATION OF AUTHORITY

1. The Board of Directors delegates part of company management authorities to the ranks below subject to applicable laws and regulations in consideration of supporting an accelerated task implementation while improving efficiency and effectiveness.

2. Kepala unit kerja harus melaksanakan wewenang yang didelegasikan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan pelaksanaannya secara berkala kepada Direksi.
3. Pendelegasian wewenang dikaji secara periodik untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan Perseroan.
4. Pendelegasian wewenang yang dilakukan tidak melepaskan tanggung jawab Direksi.

I. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Keuangan Perseroan harus dikelola secara Professional dengan mempertimbangkan risiko serta menggunakan prinsip kehati-hatian.
2. Direksi bertanggung jawab untuk :
 - Menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
 - Meningkatkan pendapatan bersih Perseroan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana, meminimalkan biaya dan meningkatkan penjualan jasa Perseroan.
3. Penyusunan anggaran dilakukan melalui koordinasi antar unit untuk mensinergikan usulan anggaran setiap unit.
4. Penetapan anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan, sumber daya Perseroan, keterbatasan keterbatasan, serta analisis peluang pasar terhadap kemungkinan pencapaiannya (realistis).

2. The head of working unit must carry out such delegated authority in full responsibility and the report of which must be provided for the Board of Directors on a regular basis.
3. The delegation of the authority must be reviewed on a periodic basis for adjustment with the company development demand.
4. The delegation of the authority must not waive the Board of Directors' responsibility.

I. FINANCIAL MANAGEMENT

1. The corporate financial must be managed in such a professional manner taking into account any potential risks while utilizing the principles of precaution.
2. The Board of Directors is responsible for:
 - The preparation of financial report in accordance with the national accounting standard as applicable.
 - The increase of net profit of the Company by improving efficiency in the use of budget, reducing cost, and improving the sale of services offered by the Company.
3. The budget preparation through coordination between units to synergize the financial plan proposed by each unit.
4. The budget decision must take into consideration the company needs, resources, limitations, and realistic market analysis.

5. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan analisis terhadap variance yang terjadi dilakukan secara berkala di masing-masing unit dan/atau Perseroan secara menyeluruh.
6. Perseroan menetapkan kebijakan yang jelas dalam hal pelimpahan wewenang pemberian otorisasi terhadap pengeluaran uang.
7. Kegiatan Perseroan dilaksanakan dengan mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan.
8. Kegiatan Perseroan diluar anggaran yang telah ditetapkan harus dilaporkan kepada Komisaris.
9. Setiap unit kerja harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan di unit kerjanya masing-masing.
10. Pemantauan pengelolaan keuangan oleh Direksi dilakukan oleh Komisaris.

J. SUKSESI MANAJEMEN

1. Direksi menetapkan persyaratan jabatan dan proses seleksi untuk Kepala Biro / Divisi / Wilayah / Cabang dan jabatan lain dibawahnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dalam menjalankan strategi.
2. Penetapan untuk jabatan satu tingkat dibawah Direksi harus dilaporkan kepada Komisaris.
3. Direksi menetapkan program pengembangan kemampuan karyawan Perseroan baik fungsional maupun struktural secara transparan.

5. The evaluation of budget implementation and analysis of arising variances are carried out on a periodic basis both in respective unit and throughout the company.
6. The Company determines a clear policy with respect to the delegation of authority and authorization of expenditures.
7. The company activities are carried out with reference to the agreed budget.
8. The company activities excluded in the agreed budget must be reported to the Board of Commissioners.
9. Each working unit is responsible for their respective financial management.
10. The Board of Commissioners is to monitor the financial management by the Board of Directors.

J. MANAGEMENT SUCCESSION

1. The Board of Directors defines job requirements as well as selection process for Heads of Bureau/Division/Regional/Branch and other respective subordinate offices as required by the Company in carrying out its strategy.
2. The discharge of any one-level subordinate office must be reported to the Board of Commissioners.
3. The Board of Directors defines the employee capacity building program for both functional and structural lines in a transparent manner.

4. Komisaris memantau pengisian formasi jabatan satu tingkat dibawah Direksi dalam upaya menjangkau dan mengusulkan calon anggota Direksi kepada RUPS.
5. Penempatan dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja dan syarat-syarat objektif.

K. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

1. Direksi menetapkan dan menjalankan program Perseroan yang terkait dengan tanggung jawab sosial Perseroan secara periodik dan melaporkannya kepada Komisaris serta Pemegang Saham.
2. Direksi harus memastikan bahwa Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komisaris memantau dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program Perseroan yang terkait dengan tanggung jawab sosial Perseroan.
4. Pelaksanaan program Perseroan yang terkait dengan tanggung jawab sosial Perseroan dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan.
5. Direksi wajib memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

4. The Commissioner monitors the staffing formation one level below the Board of Directors in an attempt to select and propose membership candidate of the Board of Directors to the GMOS.
5. The office deployment is done by taking into consideration competence-based professionalism, work achievements, and objective requirements.

K. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

1. The Board of Directors is to define and carry out the programs with respect to the corporate social responsibility on a periodic basis and provide related report to the Board of Commissioners and Shareholders.
2. The Board of Directors must ensure that the Company has conducted its social responsibility in accordance with applicable laws and regulations.
3. The Board of Commissioners is to monitor and provide feedback to the program implementation with respect to the corporate social responsibility.
4. The program implementation with respect to the corporate social responsibilities to be included in the company annual report.
5. The Board of Directors must ensure that the company assets and business locations and other facilities are in compliance with the applicable laws and regulations with respect to conservation and occupational health and safety.

L. PENGENDALIAN INTERNAL

- Direksi harus menetapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.
- SPI melakukan penelaahan terhadap kecukupan sistem pengendalian internal Perseroan termasuk dalam penyusunan Laporan Keuangan Perseroan.
- Sistem Pengendalian Internal antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - Lingkungan pengendalian internal.
 - Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha.
 - Aktivitas pengendalian.
 - Sistem informasi dan komunikasi.
 - Monitoring.
- Direksi menindaklanjuti laporan hasil audit yang dilaksanakan SPI maupun Auditor Eksternal dan melaporkan perkembangan tindak lanjut tersebut kepada Komisaris.
- Komisaris memantau perkembangan tindak lanjut atas laporan hasil audit SPI maupun Auditor Eksternal.
- Komisaris memberikan penilaian dan masukan terhadap laporan hasil audit SPI dan Auditor Eksternal yang mencakup materi laporan, sasaran audit, ruang lingkup audit.
- Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dan tim manajemen dalam menjalankan peraturan perundang-undangan.

L. INTERNAL CONTROL

- The Company is to create an effective internal control system to safeguard the company investments and assets.
- SPI is to study an adequacy of the company internal control over system including that in the preparation of the company financial statement.
- The Internal Control System includes such issues as the following:
 - Internal Control Environment
 - Business risk analysis and management.
 - Control activities
 - Information and communication system.
 - Monitoring.
- The Board of Directors must follow up the audit reports submitted by either SPI or External Auditor and report the follow-up progress to the Board of Commissioners.
- The Board of Commissioners is to monitor the follow-up actions for either SPI or External Auditor's report.
- The Board of Commissioners must provide evaluation and feedback against the audit reports submitted by either SPI or External Auditor which include the report materials, audit targets, and scope of auditing work.
- The Board of Commissioners is to supervise and monitor the Board of Directors and management team's compliance with the laws and regulations.

M. PELAPORAN

- Dalam waktu lima bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan secara objektif.
- Laporan Tahunan disamping memuat hal-hal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, juga memuat mengenai perkembangan dan upaya Perseroan dalam penerapan GCG.
- Komisaris wajib membahas laporan tahunan secara bersama-sama dengan Direksi, sebelum menyetujui dan menyampaikannya kepada RUPS.
- Dengan ditandatangani bersama laporan tahunan, semua anggota Direksi dan Komisaris bertanggung jawab atas isi laporan tahunan dimaksud.
- Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan kerja Komisaris yang telah dilakukan dan program kerja Komisaris untuk periode selanjutnya kepada Pemegang Saham.
- Komisaris menyampaikan laporan penilaian kinerja masing-masing Direksi kepada Pemegang Saham.

M. REPORTING

- Within five months after the closing of current fiscal year, the Board of Directors must submit an annual report signed by all of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the GMOS for validation purpose.
- The Board of Directors must disclose material information in the company annual and financial statement in accordance with applicable laws and regulations in such a timely, accurate, clear-cut and objective manner.
- The annual report must not only contain issues determined by applicable laws and regulations, but also that with respect to the corporate progress and actions in the implementation of GCG.
- The Board of Commissioners must discuss the annual report with the Board of Directors before any approval and submission to the GMOS.
- Upon mutual ratification of the annual report, all of the members of both Boards are responsible for the content of the said annual report.
- The Board of Commissioners must submit their program implementation reports which also include the program for next period to the Shareholders.
- The Board of Commissioners must submit the performance evaluation report of the Board of Directors to the Shareholders.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

8. Direksi menyampaikan laporan khusus kepada Komisaris dan Pemegang Saham setiap ada kejadian penting dan/atau atas permintaan Komisaris/ Pemegang Saham.
9. Direksi menyampaikan Laporan Manajemen setiap triwulan kepada Komisaris paling lambat satu bulan setelah triwulan berakhir.
10. Direksi menetapkan mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban setiap unit kerja dalam suatu sistem pengendalian internal yang memadai.

N. RUPS, RAPAT LAINNYA dan RISALAH RAPAT

1. RUPS Tahunan diselenggarakan sebanyak dua kali, yaitu selambat-lambatnya pada hari ketiga puluh bulan pertama dan dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku.
2. RUPS Luar Biasa diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
3. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan untuk kepentingan Perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.
4. Rapat Komisaris dan Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
5. Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dilaksanakan tiga bulan sekali. Dalam kondisi tertentu, Rapat Gabungan dapat

8. The Board of Directors must submit their special reports to the Board of Commissioners and Shareholders in any event of special occasion and/or as requested by the Board of Commissioners and Shareholders.
9. The Board of Directors must submit their management reports on quarterly basis to the Board of Commissioners by no later than one month since the closing of the last quarter.
10. The Board of Directors defines an accountability report submission mechanism for each working unit in an adequate internal control system.

N. GMOS, OTHER MEETINGS AND MINUTES OF MEETING

1. Annual GMOS is conducted two times, i.e. no later than the thirtieth day of the first month and in June after the fiscal year closing.
2. Extraordinary GMOS is conducted when deemed necessary by the Board of Commissioners and/or the Board of Directors and/or the Shareholders.
3. The Board of Directors organizes Annual GMOS and for the company benefit is authorized to hold another GMOS.
4. Each Board meets on a periodic basis, i.e. at least once in a month.
5. A joint meeting of the two Boards is to be held once in every three months. On a special condition, joint meeting may occur

diadakan diluar jadwal tersebut untuk membahas hal-hal penting dan mendesak yang memerlukan persetujuan Komisaris. Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

6. Risalah rapat harus dibuat untuk setiap rapat dan dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan pendapat yang berbeda (dissenting comments) dengan apa yang diputuskan dalam rapat (bila ada).
7. Sekretaris Perseroan mendokumentasikan risalah Rapat Direksi maupun RUPS dan menyediakannya bila diminta oleh Pemegang Saham, Komisaris dan/atau Direksi.

O. PENILAIAN KINERJA

1. Pemegang Saham menilai kinerja Perseroan, Komisaris dan Direksi melalui mekanisme RUPS.
2. Komisaris menetapkan indikator penilaian kinerja untuk masing-masing Direksi dan menginformasikannya kepada Direksi yang bersangkutan dan Pemegang Saham.
3. Komisaris menyusun rencana kerja dan target kerja setiap awal tahun, melakukan evaluasi sendiri (self assessment) atas pencapaiannya.
4. Komisaris melaporkan kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala kemunduran kinerja Perseroan.
5. Direksi menetapkan tolok ukur kinerja masing-masing unit kerja untuk mendukung kinerja Perseroan.

outside the above schedules in order to discuss urgent issues for which the Board of Commissioners' approval is required. The minutes of meeting must be made by the Board of Commissioners' Secretary.

6. Minutes must be made for each meeting in which dissenting comments over what have been decided in the meeting, if any, shall be specified.
7. The corporate secretary documents the minutes of either the Board of Directors meeting or GMOS and makes them available upon request by the Shareholders and the Board of Commissioners and/or Directors.

O. PERFORMANCE EVALUATION

1. The Shareholders evaluate the performance of the Company and the two Boards through the GMOS.
2. The Board of Commissioners defines the performance evaluation indicators for each of the members of the Board of Directors and informs them to the concerned BoD as well as Shareholders.
3. The Board of Commissioners is to prepare the work plan and work target in the beginning of each year, and carry out a self-assessment on their achievements.
4. The Board of Commissioners must report to the Shareholders in any event of performance backward symptom of the Company.
5. The Board of Directors defines the performance benchmarks for each working unit in favor of the corporate performance.



6. Penilaian kinerja terhadap Divisi/Biro/ Wilayah/Cabang dilakukan setiap tahun dan secara transparan.
7. Komisaris meminta/mendapatkan laporan kinerja teknologi informasi dari Direksi.
8. Komisaris menilai pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko.

P. PROSES PENUNJUKAN DAN PERAN AUDITOR EKSTERNAL

1. Auditor Eksternal harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Komisaris.
2. Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS menyangkut alasan pencalonan dan besarnya honorarium/ imbal jasa yang diusulkan untuk Auditor Eksternal Perseroan.
3. Direksi dapat mengusulkan calon-calon Auditor Eksternal kepada Pemegang Saham melalui Komisaris.
4. Auditor Eksternal melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan secara independen dan profesional.
5. Perseroan harus menyediakan bagi Auditor Eksternal semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan.
6. Auditor Eksternal menyampaikan laporan hasil audit kepada Direksi dan Komisaris secara tepat waktu.

6. The performance evaluation for the Heads of Division/Bureau/Regional/Branch is done every year in a transparent manner.
7. The Board of Commissioners may obtain information technology performance report from the Board of Directors.
8. The Board of Commissioners is to evaluate the Board of Directors' accountability in the implementation of risk management.

P. SELECTION PROCESS AND ROLE OF EXTERNAL AUDITOR

1. The External Auditor is selected by GMOS from the candidates proposed by the Board of Commissioners.
2. The Board of Commissioners presents to the GMOS on the selection rationales and proposed amount of honorary of the company External Auditor.
3. The Board of Directors may propose any candidate for External Auditor to the Shareholders through the Board of Commissioners.
4. The External Auditor is to perform audit of the company financial statement to provide opinions on the objectiveness of the financial statement presentation in an independent and professional manner.
5. The Company must provide the External Auditor with the entire accounting records as well as supporting data as required.
6. The External Auditor submits the audit report to the two Boards in a punctual manner.

Q. MEKANISME KERJA KOMITE AUDIT, SPI, DAN AUDITOR EKSTERNAL

1. Komite Audit bertugas membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Auditor Internall (SPI).
2. Auditor Eksternal harus memberitahu Direksi dan atau Komisaris melalui Komite Audit bila menemukan kejadian atau indikasi pelanggaran di dalam Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komisaris memantau perkembangan tindak lanjut atas laporan hasil audit SPI maupun Auditor Eksternal.
4. Komite Audit melakukan penilaian atas proses penunjukan pemenang tender Auditor Eksternal yang dilakukan oleh panitia tender.

R. BUDAYA DAN ETIKA KERJA

1. Direksi wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etis (code of conduct) yang memuat nilai-nilai etika berusaha.
2. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh Perseroan harus mendukung visi, misi, tujuan dan strategi Perseroan serta harus diterapkan terlebih dahulu oleh jajaran pimpinan Perseroan untuk selanjutnya meresap kedalam jajaran Perseroan.
3. Setiap insan Perseroan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang dibangun dalam Perseroan.

Q. PERFORMANCE MECHANISM OF AUDIT COMMITTEE, SPI, AND EXTERNAL AUDITOR

1. The Audit Committee assists the Board of Commissioners in ensuring an effective internal control system and effective task implementation either External or Internal Auditor (SPI).
2. The External Auditor must notify the Board of Directors and/or Commissioners through the Audit Committee upon finding either event or indication of breach in the Company to any applicable laws and regulations.
3. The Board of Commissioners is to monitor the follow-up actions for either SPI or External Auditor's report.
4. The Audit Committee evaluates the process of award of External Auditor selection carried out by the bid committee.

R. CULTURE AND CODE OF CONDUCT

1. The Board of Directors prepares guidance for the code of conduct containing ethical principles of business.
2. The cultural values adopted by the Company must be in favor of its vision, mission, objective and strategy and must first be exercised by the company leaders to inspire the entire corporation.
3. Each of the company personnel must uphold the core values developed within the Company.

- | | |
|---|---|
| <p>4. Budaya kerja dibangun untuk menjaga berlangsungnya lingkungan kerja yang profesional, jujur, terbuka, peduli, dan tanggap terhadap setiap kegiatan Perseroan serta kepentingan pihak stakeholders.</p> <p>5. Budaya kerja dikembangkan untuk memotivasi karyawan dalam bekerja.</p> <p>6. Seluruh insan Perseroan harus menerapkan budaya kerja dan sikap mental dasar Perseroan secara konsisten dan melakukan evaluasi secara periodik.</p> <p>7. Anggota Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan dilarang untuk memberikan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>8. Pemberian atau penerimaan suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha, seperti hadiah, sumbangan atau entertainment tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.</p> <p>9. Direksi menetapkan kebijakan tentang batas maksimal suatu tanda terima kasih yang diterimanya sebagaimana tersebut pada butir 8 di atas.</p> | <p>4. The working culture is developed to preserve a professional, fair, transparent, prudent and responsive environment to any of the company activities as well as stakeholder's benefits.</p> <p>5. The working culture is developed to motivate the employees in their daily tasks.</p> <p>6. All company personnel must exercise the company working culture and key mental attitude in a consistent manner and evaluate them on a periodic basis.</p> <p>7. The two Boards' members and the employees are prohibited offering or accepting explicitly or implicitly anything of value to and from any customer or government official to influence or as a return for what has been done or any other actions as provided in applicable laws and regulations.</p> <p>8. In no way such an offering or acceptance to show gratitude in any business activity, i.e. gift, donation or entertainment should be done in any circumstance likely to be considered inappropriate.</p> <p>9. The Board of Directors determines policies on a maximum limit of acceptable expression of gratitude as stated in point 8 above.</p> |
|---|---|

S. PEMANTAUAN KETAATAN GCG

- Perseroan harus secara aktif mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip GCG dan masalah yang dihadapi.
- Pemegang Saham berpartisipasi dalam melaksanakan penerapan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- Direksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, dan prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran.
- Tim GCG yang dibentuk Direksi memastikan ketaatan terhadap aturan GCG dan secara berkala melaporkannya kepada Direksi dan Komisaris.
- SPI melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penerapan GCG secara periodik dan melaporkan hasilnya kepada Direksi dan Komisaris.
- Komisaris memantau efektivitas pelaksanaan praktik-praktik GCG yang diterapkan Perseroan dan melaporkannya kepada Pemegang Saham.

ORGAN PERSEROAN

A. HUBUNGAN ANTAR ORGAN PERSEROAN

Brantas meyakini bahwa hubungan yang wajar antar Organ Perseroan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan Perseroan dan implementasi GCG. Dengan

S. MONITORING GCG COMPLIANCE

- The Company must dynamically reveal the extent to which the GCG principles have been adapted as well as the problems encountered.
- The Shareholders participate in the GCG implementation in agreement with their authorities and responsibilities.
- The Board of Directors in carrying out their tasks must adapt the principles of professionalism and efficiency as well as that of GCG, i.e. transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.
- The GCG team introduced by the Board of Directors must ensure compliance with the GCG rules and report the same on a periodic basis to the Board of Commissioners and the Board of Directors.
- SPI must carry out evaluation to the GCG implementation on a periodic basis and report the same on a periodic basis to the Board of Commissioners and the Board of Directors.
- The Board of Commissioners is to monitor the effectiveness of the GCG practices applied by the Company and report the same to the Shareholders.

COMPANY ORGAN

A. RELATIONSHIP BETWEEN COMPANY ORGANS

Brantas believes that a fair relationship between the company organs will give a positive influence to a successful company management and GCG implementation. Hence, Brantas clearly distributes the tasks and functions

demikian, Brantas secara tegas memisahkan fungsi dan tugas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi sebagai Organ Perseroan.

Brantas mendorong Organ Perseroan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tugas dilandasi oleh itikad baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholder) maupun pelestarian lingkungan.

PT. Brantas Abipraya akan mendorong hubungan yang wajar antar Organ Perseroan. Masing-masing Organ Perseroan selalu menghormati dan bertindak sesuai fungsi dan peranan masing-masing, berhubungan atas dasar prinsip kesetaraan dan saling menghargai.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham dalam mempengaruhi Perseroan. RUPS merupakan forum bagi Komisaris dan Direksi dalam melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham. Agenda yang dibahas didalam RUPS antara lain adalah :

1. Penetapan arah dan strategi jangka pendek, jangka panjang Perseroan,
2. Pertanggungjawaban Direksi / Komisaris
3. Penilaian kinerja operasional dan keuangan,
4. Penetapan anggota Komisaris dan Direksi

between the three company organs of General Meeting of Shareholders (GMOS), the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Brantas also encourages the company organs to show a good faith at all time in their decision making and tasks performance abiding by the applicable laws and regulations with awareness of both company responsibility to the stakeholder and environmental conservation.

PT. Brantas Abipraya encourages a fair relationship between the company organs. Each of the company organs must at all time show a mutual respect and take any action according to their respective functions and roles, deal with each other on the principles of equality and mutual consideration.

B. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMOS)

The GMOS serves as a forum for the Shareholders to influence the Company. The GMOS also serves as a forum for the Board of Commissioners and the Board of Directors to present their accountability reports on their task implementation and performance to the Shareholders. The agenda of discussion during the GMOS will include:

1. Definition of both short and long-term direction and strategy of the Company,
2. Accountability of the two Boards
3. Operational and financial performance evaluation,
4. Introduction of members of the two Boards

5. Penetapan remunerasi Komisaris dan Direksi
6. Agenda lain yang diusulkan oleh Pemegang Saham/Dekom/Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Brantas berkewajiban untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan informasi yang akurat kepada setiap Pemegang Saham berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS. Berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS :

1. Perseroan memberikan panggilan kepada Pemegang Saham, memberikan informasi mengenai agenda RUPS, termasuk usulan yang diajukan oleh Direksi;
2. Pemegang Saham mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal lain dalam agenda RUPS yang diberikan sebelum dan / atau pada saat RUPS berlangsung;
3. Perseroan menjamin keputusan RUPS yang diambil melalui prosedur yang transparan dan adil;
4. Perseroan memberikan risalah RUPS bagi setiap Pemegang Saham jika diminta. Risalah RUPS yang dibuat akan memuat pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung terhadap keputusan yang dibuat;
5. Perseroan mengungkapkan kepada Pemegang Saham sistem penentuan gaji dan fasilitas bagi setiap anggota Komisaris dan Direksi serta rincian mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota Komisaris dan Direksi.

5. Introduction of remunerations of the two Boards
6. Other agenda as proposed by the Shareholders and the two Boards.

The GMOS comprises the Annual GMOS and Extraordinary GMOS. Brantas is obliged to provide complete explanation and accurate information for each of the Shareholder with respect to the GMOS implementation. In relation to the GMOS implementation:

1. The Company issues invitation to the Shareholders, provide information as to the GMOS agenda, including recommendations proposed by the Board of Directors;
2. The Shareholders is explained on additional issues to the GMOS agenda given beforehand and/or during the GMOS implementation;
3. The Company ensures that GMOS Resolutions are agreed through a transparent and fair process;
4. The Company provides minutes of the GMOS for each of the Shareholder upon request. Minutes of the GMOS should contain opinions in favor of as well as opinions against the resolution reached;
5. The Company provides the explanation for the Shareholders as to the judgment system of remuneration and facility given to each of the member of the Board of Commissioners and the Board of Directors along with a detailed summary of their take home pay.



C. KOMISARIS

Komisaris dalam menjalankan tugasnya berkewajiban :

- Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham saat RUPS mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang diusulkan Direksi
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, melaporkan dengan segera kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan atau hal-hal lain yang dipandang perlu untuk segera mendapat perhatian Pemegang Saham.
- Selalu berpegang teguh kepada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisaris dapat menggunakan saran profesional yang mandiri dan / atau membentuk Komite Khusus atas biaya Perseroan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Komisaris sendiri.

Implementasi pelaksanaan tugas Komisaris Brantas antara lain :

1. Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi terhadap rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C. THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners in carrying out their tasks is obliged to:

- Give opinion and recommendations to the GMOS on the Company Work Plan and Budget proposed by the Board of Directors.
- Keep informed on the company activity progress, immediately report to the Shareholders in any event of decreased performance of the Company or any other issues considered in need of attention of the Shareholders.
- Adhere at all time to the Articles of Association as well as applicable laws and regulations. The Board of Commissioners may make use of any independent professional advice and/ or establish a Special Committee at the company expenses in agreement with the procedures determined by the Board of Commissioners.

The task implementation of the Board of Commissioners at Brantas will include:

1. The Board of Commissioners provides control over the company management activities carried out by the Board of Directors and recommendation for the same including the development plan, long-term plan, work plan and company annual budget, implementation of Articles of Association and the GMOS Decisions as well as applicable laws and regulations.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

2. Komisaris melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
3. Komisaris bertugas melaksanakan kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
4. Komisaris bertugas meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut (sepanjang Komisaris setuju terhadap isi materi laporan tahunan);
5. Komisaris memantau ketaatan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku (compliance);
6. Komisaris melakukan evaluasi terhadap kemajuan penerapan praktik good corporate governance.

2. The Board of Commissioners carries out their tasks, authorities and responsibilities in conformity to the provisions set forth in both Articles of Association and GMOS resolutions;
3. The Board of Commissioners implements the corporate interests by taking into account the Shareholders interest while being responsible to the GMOS;
4. The Board of Commissioners studies and reviews the annual report prepared by the Board of Directors and then signs it (pending approval of material content of the report);
5. The Board of Commissioners monitors the corporate compliance;
6. The Board of Commissioners evaluates the implementation progress of good corporate governance.

Kriteria Anggota Komisaris

Brantas menyadari sepenuhnya bahwa Pemegang Saham memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Komisaris. Namun demikian, untuk menjamin efektifitas tugas Dewan maupun anggota Komisaris, maka Perseroan perlu menetapkan kebijakan tentang kriteria anggota Komisaris yang sesuai kebutuhan. Brantas menetapkan kriteria komisaris antara lain sbb:

Criteria for the Board of Commissioners Membership

At Brantas, it is well-recognized that the Shareholders hold a full authority to assign the membership of the Board of Commissioner. Nevertheless, to ensure an effective task implementation of the Board of Commissioners and its members, the Company needs to determine a policy regarding suitable criteria of the membership of the Board of Commissioners. At Brantas, such criteria are determined as follows:

1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu lima tahun sebelum pengangkatannya;
3. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota komisaris lain dan atau dengan anggota direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar);
4. Tidak boleh merangkap jabatan lain pada usaha swasta yang dapat menimbulkan perbenturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perseroan, kecuali dengan ijin dari RUPS dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memiliki integritas pribadi dan dedikasi;
6. Memahami manajemen Perseroan yang berkaitan dengan strategi bisnis usaha Perseroan;
7. Memiliki pemahaman mengenai industri konstruksi;
8. Memiliki latar belakang pendidikan formal dan informal yang relevan dengan bisnis perseroan;
9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
10. Mampu bekerja sama sebagai dewan.

1. Able to conduct legal action and never pronounced of bankruptcy or being fault to have caused bankruptcy of any company;
2. Never penalized due to any crime causing loss of state finance within a period of five years prior to their assignments;
3. No blood relatives between the members of either the Board of Directors or the Board of Commissioners and vice versa is allowed up to the third degree, either straight or to the side line as well as related by marriage (son/daughter in law or brother/sister in law);
4. No concurrent assignment in any private enterprise that may create conflict of interests, whether directly or not, with the company interests is allowed, except otherwise approved by the GMOS in accordance with applicable laws and regulations;
5. Dedicated personality with integrity;
6. Have good knowledge of company management relating to various business strategies of the Company;
7. Have good knowledge of construction industry;
8. Have both formal and informal education background relevant with the Company's business field;
9. Dedicate sufficient time in their task implementation;
10. Able to cooperate as a board member.



Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

Komisaris Perseroan harus dapat bekerja sama dengan anggota Komisaris lainnya dan dengan Direksi dengan tetap berpedoman pada tanggung jawab masing-masing. Bagi anggota Komisaris yang baru diangkat perlu diberikan program pengenalan berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan, kunjungan ke kantor wilayah dan kantor cabang atau program lainnya. Pengadaan program pengenalan ini merupakan tanggung jawab Komisaris Utama. Perseroan akan secara teratur mengadakan program pembelajaran yang berkelanjutan bagi Komisaris dengan agenda dan materi sesuai kebutuhan Komisaris.

Komisaris Independen

Meskipun Brantas belum menetapkan Komisaris Independen, namun Brantas menyadari pentingnya keberadaan Komisaris dari kalangan di luar yang independen. Selain persyaratan umum Komisaris tersebut di atas, Komisaris Independen harus memenuhi kriteria sbb. :

- Tidak memiliki keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan atau Perseroan yang menyediakan jasa dan produk kepada Brantas dan afiliasinya;
- Tidak bekerja kepada pemerintah termasuk departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
- Tidak menjabat sebagai Direksi di Perseroan yang terafiliasi dengan Brantas;
- Tidak bekerja di Brantas atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;

The member must be able to cooperate with fellow members of the Board of Commissioners and the Board of Directors while taking into account their respective responsibilities. Newly assigned members must be provided with an introductory program comprising presentation, meeting, a visit to company facility as well as branch or regional offices, and other similar programs. Such introductory program will be the responsibility of Chief Commissioner. On a regular basis, the Company also conducts a sustainable training program for the Commissioners with suitable agenda and materials.

Independent Commissioner

In fact, no independent commissioner has yet to be designated, Brantas, however, realizes the significance of one from independent external entity. In addition to the above general requirements, independent commissioner must meet these criteria:

- Have no financial relation, both directly and indirectly, with the Company or with other Companies supplying their products and services for Brantas and its affiliates;
- Have no employment relationship with the government including the ministry, instance and military in the last three years;
- Have no concurrent position as Director in any company affiliated with Brantas;
- Have no employment in Brantas or its affiliates in the last three years;

- Bebas dari kepentingan dan aktifitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan anggota Komisaris independen untuk bertindak atau perfikir secara bebas.

Rapat Komisaris

Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali sebulan. Rapat Komisaris terdiri dari rapat internal Komisaris dan atau rapat koordinasi dengan Direksi. Komisaris juga dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau atas usul sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Komisaris atau atas permintaan Direksi atau atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham minimal 10% dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Rapat Komisaris membicarakan berbagai permasalahan bisnis Perseroan serta evaluasi terhadap kinerja Perseroan, atau pengelolaan Perseroan. Undangan rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau salah satu Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama secara tertulis selambat-lambatnya tujuh hari sebelum terselenggaranya rapat. Undangan rapat dibuat mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat serta disertai bahan-bahan rapat undangan tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota hadir dalam rapat.

Rapat Komisaris adalah sah apabila dilakukan di wilayah Indonesia dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komisaris. Seorang

- Free of other business interests, activities, or relationship that may impede or delay the members from independence of action and thought.

The Board of Commissioners Meeting

The Board of Commissioners convenes a meeting at least once in a month. This meeting may comprise an internal meeting and coordination meeting with the Board of Directors. The Board of Commissioners may also hold meeting from time to time as deemed necessary by the Chief Commissioner or upon recommendation of no less than 1/3 (one thirds) of total members or upon request by the Board of Directors or upon request in writing by the Shareholders having at least 10% shares by specifying the issues to be discussed.

This meeting discusses various problems and evaluation with respect to either company performance or company management. The meeting invitation is issued by Chief Commissioner or one of the members assigned by the Chief Commissioner in writing by no later than seven days prior to the organization of meeting. The meeting invitation must specify the agenda, dates, time and venue of meeting while attaching related materials, no invitation will be needed should all of the members attend the meeting.

This meeting is considered valid if organized within any Indonesian jurisdiction and the decisions is so considered if attended or represented by more than 1/2 (a half) of the total members of the Board of Commissioners. A

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Kuasa tersebut diartikan mempunyai semua wewenang pemberi kuasa kecuali disebutkan lain. Seorang anggota Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Komisaris lainnya.

Seluruh Rapat Komisaris dibuatkan risalah rapat mencakup catatan atas segala sesuatu yang dibicarakan, argumentasi yang dikemukakan, keputusan yang diambil, serta pernyataan keberatan terhadap keputusan tersebut bila ada. Risalah tersebut ditandatangani oleh Ketua Rapat Komisaris dan oleh salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. Salinan risalah tersebut berhak diterima oleh seluruh anggota Komisaris, walaupun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat.

Risalah rapat yang telah selesai dibuat harus dikirimkan selambat-lambatnya satu minggu setelah rapat. Revisi dan keberatan oleh peserta rapat atas risalah dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan, maka disimpulkan risalah rapat tersebut sudah disetujui seluruh anggota Komisaris.

PT. Brantas Abipraya mengikuti prinsip GCG dalam praktik rapat Komisaris yang meliputi antara lain :

1. Setiap anggota Komisaris memiliki kesepakatan dan hak suara yang sama dalam mengemukakan pendapat. Tidak ada pihak yang mendominasi jalannya rapat;

member can only be represented by another fellow member based on a written authority specifically issued for the purpose. Such authority means to hold a full authority of the endorser except otherwise specified. A member can only represent another fellow member.

To every Commissioner meeting, the minutes can be made to include records on any discussed topics, arguments proposed, decisions made, and statements of objection against such decisions, if any. The minutes will be signed by the meeting chairman and one of the Board members as appointed by and among those present in the meeting. A copy of the minutes of meeting must be distributed to all of the members of the Board of Commissioners, although the concerned may have not attended the meeting.

The minutes must be submitted by no later than one subsequent week. Revisions and objections by the meeting participants on the minutes can be submitted within a period of 14 (fourteen days) since the date of submission. In the event that within such period no response has been given, it can be concluded that the minutes have been agreed by the whole members of the Board of Commissioners.

PT. Brantas Abipraya follows the GCG principles in organizing the commissioners meeting, among others:

1. Each member reserves equal agreement and voting rights in expressing their opinions. No one should dominate the meeting;

2. Keputusan Rapat Komisaris diambil atas dasar musyawarah mufakat, jika tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
3. Seorang anggota Komisaris berhak mengeluarkan satu suara untuk anggota Komisaris lain yang diwakilinya, apabila pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak;
4. Rapat Komisaris dapat mengundang Direksi dan/atau pegawai Perseroan untuk memintai keterangan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Kinerja Komisaris

Kinerja Komisaris dan anggota Komisaris akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kinerja Komisaris ditentukan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang terdapat dalam peraturan perundangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Komisaris sejak pengangkatannya.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Komisaris secara individual akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham

2. The decision is made through deliberation for consensus, should no agreement be reached, it will be made by voting;
3. A member may take another vote in place of another member that he/she represented, if a decision is to be made by voting;
4. The Commissioner meeting may also involve the Board of Directors and/or employees for inquiries with respect to the issues to be discussed.

The Commissioner Performance

The performance of the Board of Commissioners and its members will be evaluated on an annual basis by the Shareholders through General Meeting of Shareholders (GMOS). The commissioner performance is measured by tasks, authority and responsibility as specified in the Articles of Association and laws applicable and regulations. The formal evaluation criteria must be openly addressed to the commissioners since their assignment.

The performance evaluation result either in overall or by individual member becomes an inseparable part of the compensation and incentive scheme for the commissioner. The performance evaluation result by individual member also underlies the Shareholders consideration to reassign the concerned member. The performance evaluation result either for the overall Board or individual



untuk menunjuk kembali anggota Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Komisaris baik selaku Dewan maupun individu merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektifitas Komisaris.

Kriteria Kinerja Komisaris dinilai oleh Rapat umum Pemegang Saham, Kriteria evaluasi kinerja individu Komisaris antara lain meliputi :

1. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan, misal mengenai benturan kepentingan;
2. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan;
3. Kehadiran dalam rapat-rapat Komisaris maupun Komite;
4. Kontribusi dalam pelaksanaan tugas-tugas khusus;

Hubungan kerja Komisaris dengan Direksi

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris menyelenggarakan pertemuan secara teratur dengan Direksi (rapat koordinasi) untuk membicarakan masalah Perseroan. Diluar pertemuan rutin tersebut, Komisaris berhak mengadakan pertemuan dengan Direksi apabila dibutuhkan. Dalam setiap pertemuan, informasi bagi Komisaris disiapkan dan diberikan secara tertulis oleh Direksi sebelum pertemuan sehingga memungkinkan Komisaris untuk mendalami permasalahan yang akan dibahas. Bila perlu Direksi dapat membantu membuat ringkasan permasalahan yang akan dibahas sepanjang tidak mempengaruhi esensi informasi.

member adds to an assessment tool for improved commissioner effectiveness.

The commissioner performance criteria are assessed by GMOS, which include:

1. Adherence to applicable laws and regulations and company policy, i.e. with respect to conflict of interests.
2. Commitment to promoting the corporate interests;
3. Presence in either Commissioner or Committee meetings;
4. Contribution in the implementation of special tasks;

The working relationship with the Board of Commissioners

As for the professional relationship of the Commissioners with the Directors in their implementation of controlling tasks, the Commissioners held coordination meetings with the Directors on a regular basis to discuss the corporate issues. Regardless, the Commissioners reserve the rights to hold the meeting with the Directors if considered necessary. In each meeting, the information for the Commissioners is prepared and provided in writing by the BoD before the meeting to enable the Commissioners to grasp the issues to be discussed. If necessary, the BoD may provide assistance by making summary of the issues to be discussed to the extent that it will not affect any essential information.

Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan. Komisaris berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa dokumen untuk keperluan verifikasi. Pelaksanaan hak Komisaris ini dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak boleh mengganggu pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan.

Komite-komite di bawah Komisaris

Komisaris berhak mendapatkan saran profesional yang independen atas beban perseroan untuk hal-hal yang menjadi tanggung jawab profesional Komisaris agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Apabila diperlukan Komisaris berhak membentuk komite-komite sebagai alat bantu dalam menjalankan tugasnya. Komite-komite tersebut bertanggung jawab membantu Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta membantu merumuskan kebijakan Komisaris sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan.

Penetapan kebijakan tetap menjadi kewenangan Komisaris kecuali untuk hal-hal yang didelegasikan dalam Surat Keputusan Komisaris. Komite-komite tersebut diketuai oleh salah seorang anggota Komisaris. Komite-komite yang dapat dibentuk oleh Komisaris antara lain Komite Audit, Komite Risiko Usaha, Komite Nomisani serta Komite Remunerasi.

The Commissioners reserve the right to require explanation with respect to any issue as required from the BoD and the BoD must provide such explanation. The Commissioners reserve the right to enter any indoor or outdoor space or other premises used or controlled by the Company and reserve the right to inspect any documentation for a verification purpose. The exercise of these rights will be carried out in such a manner that they may not interfere with the company operational activities.

Committees under the Commissioner

The Commissioners reserve the right to obtain an independent professional advice at the company expenses with respect to issues for which they are professionally responsible to enable an effective task implementation. If necessary the Commissioners reserve the right to form committees to facilitate their task implementation. These committees are responsible for assisting the Commissioners in their tasks and responsibility implementation, and helps in the formulation of policies in accordance with the scope of work of the concerned committee.

The policy making must remain the Commissioners' authority except for the matters as delegated in the Resolution of Commissioners. These committees will be chaired by one member of the Board of Commissioners. The committees that can be established by the Commissioners are among others Audit Committee, Business Risk Committee, Nomination Committee, and Remuneration Committee.

Komite Audit bertugas membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan audit internal.

Komite Risiko Usaha/Asuransi bertugas melakukan penilai secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi yang ditutup oleh Perseroan dalam hubungannya dengan risiko usaha.

Komite Nominasi bertugas menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Komisaris, Direksi serta eksekutif puncak lainnya, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi Perseroan. Komite Remunerasi bertugas menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi Komisaris, Direksi dan pegawai serta rekomendasi tentang :

1. Penilaian terhadap sistem remunerasi bagi Komisaris, Direksi dan pegawai tersebut;
2. Sistem pensiun; dan
3. Sistem kompensasi serta manfaat-manfaat lain yang didapatkan pegawai apabila Perseroan melakukan perampingan pegawai.

Komite-komite tersebut atau komite-komite lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta disahkan dengan Surat Keputusan Komisaris. Komite ini dapat bersifat permanen atau sementara tergantung kebutuhan.

The Audit Committee assists the Board of Commissioners in ensuring an effective internal control system and effective task implementation of either external or Internal Auditor.

The Business Risk/Insurance must carry out assessment on a periodic basis and give recommendations with respect to the business risk and type and number of assurance paid by the Company with respect to the business risk.

The nomination committee prepares a selection criteria and nomination procedure for the member of the Commissioners, BoD, and other top executives, defines assessment system and gives recommendations with respect to the number of members of the Commissioners and BoD. The remuneration committee defines the remuneration and allowance system for the Commissioners, BoD, and employees and gives recommendations with respect to:

1. Evaluation to such remuneration system for the Commissioners, BoD, and employees;
2. Pension system; and
3. Compensation system and other benefits for the employees if the Company should consider a layoff.

These committees or that of others can be established as required by the Company and will be validated through a Resolution of Commissioners. This committee may be of either permanent or temporary nature according to the needs.

D. DIREKSI

Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan pengurusan Perseroan demi sebesar-besarnya kepentingan Perseroan. Direksi akan mengelola bisnis dan urusan perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan. Direksi akan bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi akan menggunakan wewenang yang dimiliki semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Direksi memiliki tugas dan wewenang antara lain memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya, menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi antara lain akan selalu :

1. Mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

D. THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors in good faith and full responsibility performs the company management for the best interests of the Company. The Board of Directors manages the company business and dealings by keeping in mind balanced interests of the parties concerned with the company activities. The Board of Directors takes careful and cautious actions while taking into account various keys and relevant aspects in their task implementation. The Board of Directors makes use of authority given to them solely for the best interests of the Company.

The Board of Directors' job description includes leading and managing the Company in line with the company purposes and objectives and continuing to improve efficiency and effectiveness of the Company. The Board of Directors is fully responsible in their task implementation for the best interests of the Company to achieve its purpose and objectives, to control, nurture and look after the company wealth.

In implementing their tasks, the Board of Directors must always, among others:

1. Adhere at all time to the Articles of Association as well as applicable laws and regulations.
2. Take effort and make sure the operation of business and activities according to the company purpose and objectives;

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

- | | |
|---|--|
| <p>3. Menyiapkan secara tepat waktu rencana jangka panjang Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan dan menyampaikannya kepada Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapatkan pengesahan;</p> <p>4. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan;</p> <p>5. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;</p> <p>6. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>7. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham;</p> <p>8. Menyiapkan struktur organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;</p> <p>9. Menjaga dan meningkatkan citra Perseroan.</p> | <p>3. Prepare in a punctual manner the company long-term plan, work plan and annual budget, including other plans in relation to the company business and activities and submit them to the Board of Commissioners to be subsequently presented to the General Meeting of Shareholders for approval;</p> <p>4. Hold and maintain the company bookkeeping and administration according to prevalence for a Company;</p> <p>5. Prepare accounting system according to Financial Accounting standard and based on internal control principles, especially such function as management, recording, storage and supervision;</p> <p>6. Provide accountability and any information on the company condition and operation comprising the annual report including annual calculation to the General Meeting of Shareholders;</p> <p>7. Provide a periodic report according to method and schedule as stated in applicable provisions as well as other reports upon request by the Shareholders;</p> <p>8. Prepare the company structure of organization completed with relevant job descriptions;</p> <p>9. Retain and improve the company image.</p> |
|---|--|

Kriteria Anggota Direksi

Brantas menyadari sepenuhnya bahwa Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Direksi. Namun demikian, untuk menjamin Dewan maupun anggota Direksi yang memiliki kinerja sesuai yang diharapkan, maka Perseroan perlu menetapkan kebijakan tentang kriteria anggota Direksi sesuai kebutuhan.

Brantas menerapkan kriteria Direksi Perseroan di antaranya meliputi:

10. Seseorang yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
11. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi lainnya dan anggota Komisaris;
12. Memiliki integritas yang baik yang ditunjukkan dengan track record;
13. Memahami dan memiliki pengalaman dalam bisnis yang digeluti Perseroan dan atau pengalaman yang relevan dengan Kebutuhan Perseroan;

Criteria for the Board of Directors Membership

Brantas fully recognizes that the Shareholders through the General Meeting of Shareholders hold full authority to assign the membership of the Board of Directors. Nevertheless, to ensure an effective task implementation of both the Board of Directors and its members, the Company requires determining a policy regarding suitable criteria of membership of the Board of Directors.

At Brantas, such criteria are determined as follows:

1. Any person able to conduct legal action and never pronounced of bankruptcy or being fault to have caused bankruptcy of any company, or any person never penalized due to any crime causing loss of state finance within a period of 5 (five) years prior to their assignments.
2. No blood relatives is allowed up to the third degree, either straight or to the side line as well as related by marriage (son/ daughter in law or brother/sister in law) with any member of either the Board of Directors or the Board of Commissioners;
3. Dedicated personality with integrity as evidenced in their track records;
4. Have good knowledge and experience of the company business field and/or experience relevant with the Company's requirement;

14. Memiliki kualitas kepemimpinan yang baik;
15. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk Peraturan Perseroan dan arahan Pemegang Saham;
16. Mampu mewakili Perseroan dihadapan publik, Pemegang saham dan Stakeholders lainnya;
17. Memiliki dedikasi tinggi untuk memajukan Perseroan;
18. Memiliki watak baik dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jabatan yang didudukinya.

5. Have good leadership quality;
6. Have commitment to compliance with applicable laws and regulations including the company policy as well as the Shareholders' directives.
7. Able to represent the Company before the public, Shareholders and other related Stakeholders;
8. Have elevated dedication to advance the Company;
9. Have good personality and ability to carry out tasks at their best efforts according to their positions.

Program pengenalan yang diberikan kepada anggota Direksi, antara lain meliputi :

An introductory program given to the members of the Board of Directors includes:

1. Direksi yang baru wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan yang bersangkutan.
2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan Direksi yang baru berada pada Direktur Utama.
3. Tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi;
4. Program pengenalan meliputi:
 - Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan.
 - Gambaran mengenai Perseroan.
 - Keterangan berkaitan dengan

1. Newly assigned Board of Directors must be provided with the related company introduction program.
2. The President Director is responsible for carrying out an introductory program to the newly assigned Board of Directors.
3. Tasks and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
4. The Company Introduction Program includes:
 - Adaptation of the GCG principles by the Company.
 - Description about the Company.
 - Description about the delegated

kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.

- Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi.

authority, internal and external audit, internal control system and policy, including Audit Committee.

- Description about the tasks and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Rapat Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan minimal 1 (satu) bulan sekali atau apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham minimal 10% dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Dalam rapat Direksi dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perseroan sesuai dengan tugas, kewenangan serta kewajibannya, pembuatan keputusan yang dianggap perlu dan juga membuat evaluasi bisnis Perseroan.

Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang kurangnya tiga hari sebelum rapat diadakan. Dalam panggilan tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.

Rapat Direksi adalah sah apabila dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya. Seorang anggota Direksi dapat

The Board of Directors Meeting

The BoD meeting is held at least once in every month or as deemed necessary by one or more members of the Board of Directors or upon request in writing by the one or more members of the Board of Commissioners or Shareholders having at least 10% shares by specifying the issues to be discussed. The BoD meeting discusses issues with respect to the Company according to their tasks, authorities and responsibilities, decision making as deemed necessary, and preparation of the company business evaluation.

The meeting invitation is submitted in writing by one of the members entitled to represent the Company by no later than three days prior to the meeting. The meeting invitation specifies agenda, date, time and venue of the meeting. No meeting invitation is required should all the members of the Board of Directors be present in the meeting.

This meeting is considered valid if organized within any Indonesian jurisdiction and entitled to make a binding resolution if attended or represented by more than ½ (a half) of the total members of the Board of Directors or their representatives. A member can only be

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.

Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul tersebut dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan ditentukan dengan pemungutan suara secara tertutup. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang dapat menggambarkan jalannya rapat secara utuh, argumentasi yang dikemukakan kesimpulan yang diambil serta pernyataan keberatan pendapat jika ada. Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut. Keberatan dan usul revisi terhadap risalah rapat disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan, maka risalah rapat tersebut sudah disetujui seluruh anggota Direksi.

represented by another fellow member based on a written authority specifically issued for the purpose. A member can only represent another fellow member.

Any decision is made through deliberation for consensus. Should no agreement be reached, it is thus to be made by voting. Each member is entitled to have 1 (one) vote and another additional 1 (one) vote for any member whom he/she represented. In the event that the voting came to an even result, the proposed decision must, thus, be voided, voting that relates to any person must be done in private. Any blank or invalid vote must be considered nonexistence and not counted in determining the final votes resulted in the meeting.

To every BoD meeting, the minutes can be made to describe the whole process, arguments proposed, conclusions made, and statements of objection, if any. Each member is entitled to a copy of the minutes of the meeting, although the concerned member may have not attended the meeting. Objections and proposed revision on the minutes can be submitted within a period of 14 (fourteen days) since the date of submission. In the event that within such period no response has been given, it can thus be agreed by the whole members.



Kebijakan Menggunakan Saran Profesional

Brantas memiliki kebijakan yang memungkinkan Direksi memperoleh saran profesional yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar direksi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk kepentingan Perseroan, Brantas memperbolehkan Direksi untuk mendapatkan saran profesional atas beban Perseroan.

E. SEKRETARIS KORPORAT

Perseroan menyadari sepenuhnya pentingnya hubungan yang baik antara organ perseroan (RUPS, Komisaris dan Direksi) dan hubungan antara Perseroan dan stakeholders. Untuk melaksanakan tugas tersebut Perseroan menunjuk seorang Sekretaris Korporat. Secara struktural Sekretaris Korporat bertanggung jawab kepada Direksi dan memiliki kewenangan yang memadai.

Policy of Using Professional Advice

Brantas entails policy enabling the Board of Directors to obtain any independent professional advice in their implementation of tasks and responsibilities in accordance with applicable laws and regulations. In order to perform well in their tasks implementation for the company interests, Brantas allows the Board of Directors to obtain independent professional advice at the company expenses.

E. CORPORATE SECRETARY

Good relationship between the company organs (GMOS, Commissioners, and BoD) is well-recognized by the Company, and so is that between the Company and the Stakeholders. To exercise this, the Company will assign a Corporate Secretary. Structurally, the Corporate Secretary is responsible to the Board of Directors and have sufficient authority.

Tugas Sekretaris Korporat antara lain adalah :

1. Memastikan bahwa perseroan taat terhadap berbagai peraturan yang berlaku dan melaksanakan GCG.
2. Menangani kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan investor, saham, bursa, pasar modal dan Anak Perseroan.
3. Menangani fungsi hubungan investor dan publikasi Perseroan.
4. Menjalankan fungsi corporate legal affair atau legal counsel

Sekretaris Korporate harus selalu mengikuti perkembangan peraturan peraturan yang berlaku dan memastikan Perseroan untuk memenuhi dan mematuhi peraturan tersebut. Sekretaris Korporat akan memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Komisaris apabila diminta.

STANDAR AKUNTANSI, PENGENDALIAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

A. STANDAR AKUNTANSI

Brantas memastikan bahwa semua kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan akuntansi selalu merujuk dan memenuhi ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK tersebut mewajibkan Perseroan menyajikan Laporan Keuangan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas dan pengungkapan lainnya dalam catatan

Tasks of the Corporate Secretary include:

1. To ensure company compliance with applicable laws and regulations and implementation of the GCG.
2. To deal with activities with respect to investors, shares, exchange, stock market and Subsidiaries.
3. To deal with the investor relation function and company publication.
4. To operate the company legal affairs or legal counsel functions.

The Corporate Secretary must always keep updated with new developments with respect to applicable laws and ensure the corporate compliance. The Corporate Secretary provides information with respect to his/her tasks implementation to the Board of Directors on a periodic basis and to the Board of Commissioners upon request.

ACCOUNTING STANDARD, INTERNAL AND EXTERNAL CONTROL

A. ACCOUNTING STANDARD

Brantas ensures that all policies and regulations with regards to accountancy at all time refer and are in compliance with the provisions set forth in the Statement of Financial Accounting Standard (PSAK). PSAK requires any Company to present their Financial Statements as objective as possible in terms of financial status and performance, changes in equity, and cash flow as well as other disclosures to record in the

atas laporan keuangan. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam PSAK, pengungkapan yang dilakukan Perseroan senantiasa mempertimbangkan aspek relevansinya terhadap kebutuhan pengguna laporan keuangan dan dapat diandalkan.

Penyajian laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas) pada setiap tahun buku, dilakukan Brantas untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Perseroan Brantas memiliki komitmen untuk mengungkapkan laporan tersebut secara adil dan transparan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Untuk memenuhi semua prinsip di atas, Perseroan memiliki kebijakan yang menjamin keberadaan suatu sistem akuntansi dan kebenaran pencatatannya. Transaksi yang tercatat dalam sistem akuntansi sekurang-kurangnya telah mendapatkan persetujuan manajemen yang memiliki kewenangan untuk keperluan tersebut dan telah dibukukan dengan benar. Laporan Keuangan Perseroan secara wajar dan akurat menggambarkan transaksi yang sebenarnya tanpa sedikitpun bermaksud mengelabui pembaca laporan.

Semua pihak, baik Direksi dan Pegawai yang bertanggungjawab atas fungsi fungsi tersebut wajib memahami dan menjalankan kebijakan sistem pengendalian internal keuangan dan prosedur pencatatan akuntansi Perseroan.

financial statement. For the issues not provided for in the PSAK, the company disclosure must always take into account its reliability and relevance with the need of the report users.

The financial report presentation (balance sheet, profit-loss statement, cash flow, and change in equity) in each fiscal year is given by Brantas to satisfy the needs of all related parties. Brantas commits to the disclosure of such reports in a fair and transparent manner according to applicable provisions.

To meet all of the above principles, the Company has defined a policy that ensures the availability of accounting system with reliable accuracy. Any transaction recorded in the accounting system has obtained at least approval from the management with respective authority and has been expensed properly. The company financial statement will reasonably and accurately depict the actual transactions without any intention to mislead the readers.

All related personnel, either the BoD or employees responsible for these functions must understand and exercise the company policy of internal financial control and accounting procedures.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

B. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal Keuangan diberlakukan untuk memberikan jaminan kebenaran informasi keuangan, efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan Perseroan serta kepatuhan kepada perundang-undangan yang terkait.

Perseroan senantiasa memelihara sistem pengendalian internal yang dimaksud mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perseroan yang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari :
 - Integritas, nilai etika dan kompetensi pegawai
 - Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha relevan;
3. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perseroan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap asset Perseroan;

B. INTERNAL CONTROL SYSTEM

This financial control is made applicable to ensure accuracy of financial information, effective and efficient process of company management and compliance with applicable laws.

The Company must at all time retain such internal control system which include such issues as the following:

1. A well-organized and structured internal control environment within the Company, which consists of:
 - Staff integrity, ethical values and competence
 - Manner in which the management conducts their authority and responsibility;
 - Human resources organization and development;
 - Attention and directives done by the Board of Directors
2. Business risk analysis and management, i.e. a process to identify, analyze, assess, and manage relevant business risks;
3. Control activity reflects actions done during the control process against the company activities at each level and unit within the company structure of organization, which includes, among others, authorization, verification, reconciliation, achievement analysis, task distribution and company asset protection;

4. Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Perseroan;
5. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perseroan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit.

Sedangkan menyangkut hubungan kerja antara SPI (Satuan Pengawas Intern) dengan Komite Audit antara lain meliputi :

1. Komite Audit mengevaluasi independensi, objektivitas dan efektivitas SPI
2. Komite Audit memonitor ketaatan terhadap Kode Etik Profesi Auditor
3. Komite Audit memberi pertimbangan kepada Komisaris tentang perubahan / pengangkatan dan pemberhentian Kepala SPI

C. AUDIT EKSTERNAL

Dalam hubungannya dengan Auditor Eksternal, Perseroan menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Merupakan kewenangan RUPS untuk menunjuk Auditor Eksternal dari calon yang diajukan oleh Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit;

4. Information and communication system is a process through which the operational and financial activities, and compliance with laws and regulations applicable to the Company are presented;
5. Monitoring is a process in which the internal control system that includes the internal audit function at each company level and structure of organization is analyzed in order to achieve an optimized implementation, provided, however, that any irregularity must be reported to the Board of Directors with a carbon copy to the Audit Committee.

In the meantime, the professional relationship between the SPI (Internal Control Unit) and the Audit Committee includes as follows:

1. The Audit Committee evaluated the SPI's independency, objectivity and effectiveness
2. The Audit Committee monitors compliance with the Auditor's Professional Code of Conduct
3. The Audit Committee provides considerations to the Board of Commissioners as to the modification / assignment and discharge of SPI Chairman

C. EXTERNAL AUDITOR

In connection with the External Auditor, the Company determined such policies as the following:

1. It is GMOS authority to take any External Auditor out of candidates proposed by the Board of Commissioners as recommended by the Audit Committee;

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

- | | |
|---|---|
| <p>2. Komite Audit melalui Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan Auditor Eksternal tersebut;</p> <p>3. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perseroan;</p> <p>4. Perseroan wajib menyediakan bagi Auditor Eksternal semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan Auditor Eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaataazasan, dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan standar akuntansi keuangan Indonesia;</p> <p>5. Penunjukan Auditor Eksternal dibatasi untuk maksimum 3 tahun buku berturut-turut oleh KAP & Partner yang sama</p> | <p>2. The Audit Committee through the Board of Commissioners presents to the GMOS the rationales of such External Auditor nomination;</p> <p>3. The said External Auditor must be free of the Commissioners, Directors, and other concerned company personnel's influences;</p> <p>4. The Company is responsible for providing the External Auditor with every accounting record as well as supporting data as required to enable them to express their opinions as to fairness, compliance, and agreement of the corporate financial report with Indonesian Accounting Standard;</p> <p>5. The assignment of the External Auditor must be limited to 3 consecutive fiscal years by the same Public Accounting and Partner.</p> |
|---|---|

PENUTUP

- Code of Corporate Governance ini disusun dengan memperhatikan antara lain UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 18 Tahun 1999, UU Nomor 19 Tahun 2003, PP 12 Tahun 1998, Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/MBU/2002, KEP-101/MBU/2002, dan KEP-103/MBU/2002, serta Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-peraturan lainnya. Code of Corporate Governance ini hanya memuat hal-hal penting yang akan menjadi acuan dalam tata kelola Perseroan. Hal-hal lain yang tidak dimuat dalam Code ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

CONCLUSION

- This Code of Corporate Governance is prepared by taking into account among others the Law Number 40 of 2007, Law Number 18 of 1999, Law Number 19 of 2003, Government Regulation Number 12 of 1998, Ministerial Decrees of SOE Numbers: KEP-117/MBU/2002, KEP-101/MBU/2002, and KEP-103/MBU/2002, as well as the Articles of Association and other related regulations. This Code of Corporate Governance contains only primary issues to serve as references throughout the corporate governance. Other issues not provided for in this Code shall remain to refer to relevant and applicable laws and regulations

- | | |
|---|--|
| <p>2. Code of Corporate Governance ini ditelaah dan dimutakhirkan secara berkala untuk disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan wewenang organ-organ Perseroan serta perubahan lingkungan Perseroan.</p> <p>3. Setiap perubahan terhadap Code of Corporate Governance harus disetujui oleh Direksi dan Komisaris.</p> <p>4. Setiap pegawai dapat menyampaikan laporan tertulis mengenai dugaan pelanggaran terhadap penerapan Good Corporate Governance melalui Tim CG atau media lain yang ditetapkan / disediakan Perseroan untuk kepentingan tersebut.</p> <p>5. Code of Corporate Governance ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Komisaris dan Direksi.</p> <p>6. Code of Corporate Governance ini didistribusikan kepada seluruh pejabat Perseroan dengan mengacu kepada mekanisme distribusi dokumen Perseroan</p> | <p>2. This Code of Corporate Governance is reviewed and updated on a periodic basis to match the function, responsibility, and authority of the company organs as well as change in the company environment.</p> <p>3. Any modification to this Code of Corporate Governance must be approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners.</p> <p>4. Each employee may submit report in writing with respect to alleged violation to the implementation of Good Corporate Governance through GCG team or other media as required / made available by the Company for such purpose.</p> <p>5. This Code of Corporate Governance is effective since its determination by the Board of Commissioners and Board of Directors.</p> <p>6. This Code of Corporate Governance is distributed to all of the company officials with reference to the company document distribution mechanism.</p> |
|---|--|

ETIKA PERUSAHAAN

Dengan adanya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Kep-117/ MMBU/ 2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar PT. Brantas Abipraya, Visi dan Misi Perseroan serta praktik-praktik terbaik GCG, diperlukan pula Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct). Ini merupakan penjabaran dari kaidah-kaidah GCG dan sebagai dasar serta acuan dalam pengelolaan Perseroan.

COMPANY CODE OF CONDUCT

Given the Ministerial Decree of State-Owned Enterprise (SOE) Number Kep-117/MMBU/ 2002 on the Implementation of GCG Practice in SOE, the Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company, Articles of Association of PT. Brantas Abipraya, company vision and mission as well as GCG best practices, a Code of Conduct is also required thereto. This comprises a description of GCG principles and becomes the basis and reference for the company management.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

Pedoman Etika dan Perilaku ini merupakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi seluruh aktivitas Perseroan, karena itu secara konsisten akan menginformasikan Code of Conduct ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami standar kerja Perseroan yang sesuai dengan Pedoman Etika dan Perilaku. Code of Conduct ini merupakan acuan bagi peraturan Perseroan yang lebih detail sesuai kebutuhan unit-unit organisasi dalam jajaran PT Brantas Abipraya (Perseroan).

Brantas akan selalu mengkaji Pedoman Etika dan Perilaku ini secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar kerja yang terbaik, dan setiap ada perubahan perbaikan akan selalu diberitahukan kepada semua pihak yang memerlukan.

Sebagai pedoman berperilaku bagi seluruh jajaran Perseroan dalam bekerja dan berinteraksi di dalam lingkungan Perseroan maka Brantas telah merumuskan, mengembangkan dan mensosialisasikan Budaya Perseroan, yang terdiri dari Falsafah Kerja dan Tujuh Nilai.

A. INTEGRITAS DALAM AKTIVITAS BISNIS dan PEKERJAAN

Perseroan menerapkan standar etika dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance. Brantas menjalankan operasional bisnis dengan lingkup kegiatan usaha utama di bidang konstruksi dan rancang bangun antara lain meliputi : (1) pekerjaan sipil umum; (2) pekerjaan bangunan gedung; (3) pekerjaan mekanikal dan elektrik dan lain-lain.

This Code of Conduct comprises the principles applicable throughout the company activities and, therefore, the Company consistently socializes this Code of Conduct to all related parties in order for them to recognize and understand the company working standard in accordance with this Code of Conduct. This GCG Guidelines must be referred to for more detailed company regulations matching the needs of the organizational units under the Company.

Given the dynamic business environment, Brantas at all time reviews its GCG Guidelines on a continual basis in order to achieve the best work standard for the Company.

Being the code of conduct for the company personnel at all levels in their works and interaction within the company premises, Brantas has, thus, formulated, developed and socialized its Company Culture, which consists of Work Philosophy and Seven Values.

A. INTEGRITY IN BUSINESS ACTIVITY AND WORK

The Company applies an ethical standard in carrying out the entire business activities based on the principles of good corporate governance. Brantas' business operations are delivered with construction and design as its main business field, which includes among other things: (1) general civil works; (2) building construction works; (3) mechanical and electrical works, and etc.

Brantas juga melakukan diversifikasi usaha meliputi bidang lain yang terkait erat dengan core bisnis perusahaan. Seluruh unit kerja di Kantor Pusat, kantor Wilayah, Kantor Cabang, Proyek, Depo Alat dan unit kerja lain diwajibkan untuk melakukan sosialisasi Panduan GCG ini untuk mempertahankan kejujuran, integritas dan keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis di lingkungan kerja masing-masing.

Brantas melarang seluruh jajaran Perseroan yang terdiri atas Komisaris, Direksi, seluruh unit kerja dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Proyek, Depo Alat dan unit kerja lain dan pihak yang terkait melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip GCG.

Brantas menerapkan fungsi pengawasan menggunakan audit berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar pelanggaran atas norma-norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan, baik administrasi maupun hukum. Setiap unit kerja berkewajiban untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan.

Kebijakan Perseroan dalam menjaga integritas dalam aktivitas bisnis dan pekerjaan antara lain :

1. Seluruh individu dan atau organ Perseroan di lingkungan Brantas senantiasa wajib patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di manapun operasional Perseroan dijalankan;

Brantas also diversifies its business to include other areas closely related to the corporate core of business. Across the working units in its Headquarter, Regional and Branch Offices, Projects, Equipment Storehouse, and other working units, a socialization of this GCG becomes imperative in order to retain honesty, integrity, and fairness throughout business activities in respective working units.

Brantas prohibits all company organs, which include the Board of Commissioners, the Board of Directors, all working units in our Headquarter, Regional and Branch Offices, Projects, Equipment Storehouse, and other working units as well as any related party to deal with any transaction that are against the law and the principles of GCG.

Brantas applies the control function through audit based on fit and proper and generally accepted principles while making all efforts that any violation to such applicable rules and regulation shall be subject to sanction as appropriate both administrative and legal nature. Each working unit is obliged to always take follow-up action to any finding resulted from audit conducted by the control function.

The Corporate Policy in maintaining integrity in business activity and work includes:

1. All individuals and or the company organs within Brantas must be in compliance at all time with the applicable laws and regulations at anywhere in which the company operation is carried out;



Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

2. Brantas senantiasa mengupayakan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah dan menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku;
3. Brantas berketetapan tidak mentolerer tindakan ilegal, penggunaan praktik yang tidak adil dan perilaku yang tidak jujur dalam meraih laba.
4. Segenap jajaran Brantas harus menghindari benturan kepentingan dan mengutamakan kepentingan Perseroan.

B. MANAJEMEN RISIKO

Brantas menyadari bahwa jalannya operasional Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah kendali maupun risiko yang berada di luar kendali Perseroan. Oleh karena itu Brantas menyadari akan pentingnya pengelolaan risiko Perseroan secara terintegrasi, optimal dan berkesinambungan.

Brantas senantiasa menyelenggarakan pengendalian risiko dan pengelolaan kebijakan Perseroan secara terintegrasi dan kontinyu untuk mewujudkan operasional Perseroan yang sehat dan mampu menghasilkan laba yang optimal pada batas toleransi risiko yang ditetapkan.

2. Brantas at all time makes every effort to obtain information in appropriate manner and retains and makes use of it in accordance with applicable ethical business principles;
3. Brantas determines not to tolerate any unlawful action, unfair practice, and dishonesty in generating profits.
4. All Brantas personnel at all levels should avoid any conflict of interests while prioritizing the company best interests.

B. RISK MANAGEMENT

Brantas realizes that no company operation is free from risks, both within and beyond the control of the Company. Therefore, Brantas realizes the significance of company risk management in an integrated, optimized and sustainable manner.

Brantas continues exercising the company risk management and policy management in an integrated and continual manner to realize a sound corporate operation able to make optimized profits against the determined limit of risk tolerance.

Brantas berkewajiban untuk melakukan identifikasi terhadap kemungkinan munculnya risiko-risiko baik eksternal maupun internal. Atas dasar identifikasi itu, Perseroan akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko, misalnya dengan menutup asuransi yang relevan, ataupun merancang kontrak sedemikian rupa sehingga secara hukum Perseroan terlindungi dari risiko yang tidak perlu.

Brantas selalu memantau dan mengkaji risiko secara berkala sehingga diharapkan risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi nilai Perseroan secara signifikan. Namun demikian, Perseroan juga menyadari adanya risiko yang berada di luar kendali yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya oleh upaya-upaya internal Brantas membentuk forum atau tim manajemen risiko yang memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dalam rangka menangani pekerjaan baru yang belum pernah dikerjakan oleh Perseroan sebelumnya.

Brantas mempunyai komitmen untuk mengungkapkan secara transparan risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai Perseroan. Dengan demikian pihak-pihak yang berkepentingan dengan Brantas dapat menghitung risiko-risiko yang relevan apabila melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan.

Brantas has obligations to identify possibilities of either external or internal risks. Based on such identification, the Company will make necessary efforts to minimize risks, for example by closing any relevant insurance or designing contract in such a way that it is legally protected from any unnecessary risks.

Brantas at all time monitors and reviews any possible risks on a periodic basis that they can be controlled in such a way that no company values are significantly decreased. However, the Company also recognizes risks beyond control that is hard to eliminate by internal efforts. Brantas established risk management forum or team providing consideration for decision making, in order to deal with new projects that have never before done by the Company.

Brantas commits to a transparent disclosure of risks that significantly affect the company values. Hence, any related party will be able to analyze relevant risks when entering into a business dealing with the Company.



Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

Manajemen Risiko di Brantas antar lain meliputi :

1. Perseroan melakukan identifikasi risiko dengan seksama, baik risiko yang berada di bawah kendali Perseroan maupun risiko yang berada di luar kendali Perseroan;
2. Perseroan melakukan penanganan terhadap berbagai risiko berdasarkan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki;
3. Perseroan mengungkapkan risiko dan penanganannya dalam Laporan Tahunan.

C. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Brantas akan memperlakukan Pemegang Saham secara adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama akan mendapatkan perlakuan yang setara dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Pemegang Saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimilikinya. Setiap pemegang saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan, kecuali untuk informasi di mana Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya.

Perseroan melarang Pemegang Saham campur tangan dalam kegiatan operasional

At Brantas, the Risk Management includes:

1. The Company carefully identifies risks, both within and beyond its control;
2. The Company deals with various risks based on priorities and resources at hand;
3. The Company discloses such risks along with methods through which they are managed in the Annual Report.

C. RELATIONSHIP WITH THE SHAREHOLDERS

The Shareholders are treated by Brantas in a fair manner in accordance with applicable laws and regulations. The Shareholders having share of similar classification are also treated equally and are able to exercise their rights in accordance with the Articles of Association as well as applicable laws and regulations.

Each Shareholder reserves the right to vote in agreement with their classification and volumes of shares. Each Shareholder reserves the right to obtain complete and accurate material information with respect to the Company, except for information where the Board of Directors are responsibly justified not to disclose them.

The Company prohibits the Shareholders to interfere with the company operational

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk pengertian dalam campur tangan adalah tindakan atau arahan secara langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan Perseroan atau terhadap pengambilan keputusan yang menjadi wewenang Direksi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat mempertegas kemandirian Perseroan sebagai badan hukum yang profesional sehingga dapat berkembang baik sesuai dengan tujuan usahanya.

Brantas akan berusaha keras agar Perseroan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan sehingga memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemegang Saham. Penetapan deviden dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pembagian deviden didasarkan pada kepentingan Perseroan, dengan melihat berbagai hal seperti kelangsungan usaha, strategi yang akan dan sedang dijalankan serta rencana investasi.

D. HUBUNGAN DENGAN PEMBERI PEKERJAAN (KLIEN)

Perseroan menempatkan Pemberi Pekerjaan (klien) sebagai mitra bisnis yang akan membantu pencapaian kinerja Perseroan. Kebijakan yang dijalankan Perseroan menjamin hubungan kerja sama secara umum dengan Pemilik Pekerjaan dilakukan secara profesional dan memenuhi prinsip kesetaraan. Perseroan menyediakan informasi material yang diperlukan tentang Perseroan secara benar, akurat dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan bagi calon Pemberi Pekerjaan (klien) dalam berhubungan dengan Perseroan.

activities for which the Board of Directors is responsible as stated in the Articles of Association and applicable laws and regulation. Included in this definition is any direct act or referral to influence the company management dealings or toward any decision making under the authority of the Board of Directors. This provision is intended to reinforce the independence of the Company as a legal and professional entity in order for the company to grow successfully in accordance with its business objectives.

Brantas strives in order that the Company retains a sustainable growth so as to provide optimized contribution to the Shareholders. The dividend allocation is determined by the Shareholders during the General Meeting of Shareholders. The dividend payment is done to the best interest of the Company while viewing various developments such as business continuity, future and ongoing strategy as well as investment plan.

D. RELATIONSHIP WITH THE CLIENT

The Company considers the client as a business partner that helps in the company performance achievements. The company policies ensure that the cooperative relationship with the Client is in overall done in a professional manner while following the principle of equality. The Company provides any necessary material information with respect to the Company in a proper, accurate and punctual manner to base the decision making by the Client in dealing with the Company.



Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya selalu mengutamakan kualitas pekerjaan dan kepuasan Pemberi Pekerjaan (Klien) sejak dari perencanaan pekerjaan sampai pekerjaan selesai. Perseroan melakukan survei kepuasan yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali pada Pemberi Pekerjaan (Klien) pada proyek-proyek, yang telah selesai untuk mengetahui kepuasan Pemberi Pekerjaan (Klien) dari tahun ke tahun.

E. SISTEM PEMASARAN

Brantas melakukan pemasaran secara konsisten dengan program peningkatan kepuasan Pemberi Pekerjaan (klien) dari tahun ke tahun. Brantas selalu berupaya memberikan alternatif solusi kepada Pelanggan berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Brantas memiliki sistem informasi yang tangguh yang memungkinkan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat, sehingga kesempatan dalam memperoleh berbagai jenis pekerjaan atau proyek yang menguntungkan dapat dilakukan secara terintegrasi pada tingkat Perseroan.

Berbagai informasi pasar dari berbagai sumber daya (departemen/instansi, konsultan, hubungan individual dan lain-lain) dikelola secara optimal oleh Perseroan dalam memperoleh berbagai jenis pekerjaan atau proyek yang saling menguntungkan dapat dilakukan secara terintegrasi pada tingkat Perseroan.

Brantas menyadari bahwa persaingan dalam Jasa Konstruksi cukup tajam dengan banyaknya perusahaan sejenis dan masuknya kontraktor asing akibat globalisasi, maka Brantas selalu melihat kemampuan perusahaan pesaing dan melihat pertumbuhan usaha

The Company in carrying out its business activities at all time gives priority to quality work and the Client's satisfaction from the planning to the completion of any work. The Company has a satisfaction survey conducted at least once in every year to the Client against the completed projects to find out the client satisfaction year after year.

E. MARKETING SYSTEM

Brantas conducts a consistent marketing under the Client satisfaction improvement program year after year. Brantas at all time strives to provide alternative solutions to the client based on the principle of mutual benefits. Brantas has a strong information system that allows accurate and quick decision-making that the opportunity to acquire different types of favorable jobs or projects can be found integrated at the company level.

A variety of market information from various resources (departments/agencies, consultants, individual relationship, etc.) are optimally managed by the Company in order to obtain various types of work and projects of mutual benefit that they can be performed at the company level.

Brantas realizes a sufficiently tight competition in the Construction Services with many companies of similar nature and the influx of foreign contractors due to globalization, Brantas at all time observes the competitors' ability and the business growth by comparing

dengan membandingkan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Brantas menghargai prinsip-prinsip persaingan yang sehat dalam aktivitas bisnis.

F. HUBUNGAN DENGAN PENGGUNA AKHIR

Brantas selalu berusaha untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik kepada pengguna akhir produk Brantas. Brantas akan selalu berusaha meningkatkan kualitas produknya, dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 (yang merupakan peningkatan dari Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:1994 dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9002:1994), ISO 18001:2007 (OHSAS), SMK3, ISO 14001:2004 (Sistem Manajemen Lingkungan) . Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna, Perseroan melakukan berbagai pendekatan seperti :

1. Perseroan melakukan sertifikasi ISO 9001 : 2000 untuk sistem manajemen mutu; ISO 18001:2007 (OHSAS); SMK3; ISO 14001:2004 (Sistem Manajemen Lingkungan)
2. Perseroan memberikan layanan purna jual yang sesuai.

G. HUBUNGAN DENGAN REKANAN

Brantas menjalin kerjasama dengan mitra kerja dilandasi etika baik dan saling menguntungkan yang dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis, serta mematuhi setiap kesepakatan yang telah di tuangkan dalam kontrak kerjasama.

the performance of previous years. Brantas respects the principles of fair competition in business activity.

F. RELATIONSHIP WITH END USERS

Brantas always strives to deliver best quality service to the end user of its products. Brantas at all time makes efforts to improve the quality of its products by applying the Quality Management System of ISO 9001:1994 and that of ISO 9002:1994), ISO 18001:2007 (OHSAS), SMK3, ISO 14001:2004 (Environmental Management System). In order to provide the best services to the users, the Company carried out a series of approaches as follows:

1. Certification for ISO 9001: 2000 for quality management system; ISO 18001:2007 (OHSAS); SMK3; ISO 14001:2004 (Environmental Management System)
2. Provision of appropriate after sales services.

G. RELATIONSHIP WITH PARTNERS;

Brantas enters into cooperation with partners based on a mutual benefit and good faith as specified in a written agreement while abiding by any agreement established in the form of contract.

Brantas bertindak adil dengan memberikan kesempatan yang sama pada seluruh rekanan yang memiliki kualifikasi yang sama tanpa diskriminasi. Pertimbangan pemberian pekerjaan didasarkan atas kriteria yang antara lain meliputi :

1. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usaha yang dapat dibuktikan dengan kualifikasi yang dikeluarkan asosiasi yang bersangkutan;
2. Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
3. Memiliki track record yang baik;
4. Tidak pernah membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi yang dimilikinya;
5. Kerjasama yang saling menguntungkan. Namun Brantas dalam melaksanakan fungsinya sebagai good corporate citizen mempunyai komitmen untuk membina rekanan ekonomi lemah untuk berkembang secara bertahap melalui proses kualifikasi yang ditentukan oleh Perseroan.

H. SISTEM PENGADAAN DAN KONTRAK PEKERJAAN

Brantas menerapkan proses pengadaan sesuai good corporate governance dengan menjunjung prinsip-prinsip keterbukaan, efisiensi biaya, kompetitif, fairness sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Brantas mematuhi etika proses

Brantas exercises fairness by giving an equal opportunity to all partners with similar qualifications rather than discrimination. Any award of contract is carried out in consideration of the following criteria hereof:

1. Have the technical and managerial expertise, experience in similar field of business as evidenced with qualifications issued by relevant association;
2. Have resources required for the job implementation;
3. Have excellent track record;
4. Never made untrue statement of qualification;
5. Cooperation for mutual benefits. However, Brantas in performing its functions as a good corporate citizen committed to fostering small enterprise partners in order to enable them to eventually grow through a qualification process determined by the Company.

H. PROCUREMENT AND CONTRACTING SYSTEM

Brantas applies appropriate procurement process in compliance with the good corporate governance while upholding the principles of transparency, cost efficiency, competitiveness, and fairness in accordance with applicable laws and regulations. Brantas also complies

pengadaan dalam proses pengadaan barang dan jasa antara lain :

1. Melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa dengan tertib dan disertai tanggung jawab
2. Bekerja secara profesional, mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.
3. Tidak mencampuri tugas dan kewenangan yang diberikan kepada tim pengadaan baik langsung maupun tidak langsung. Kontrak Pekerjaan antara Perseroan dengan rekaman memuat kesanggupan rekanan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan hak rekanan mendapatkan seluruh haknya berdasar kewajiban yang telah dilaksanakan sesuai yang disepakati dalam kontrak serta sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban masing-masing.

I. SISTEM PENGADAAN DAN KONTRAK PEKERJAAN

Pegawai Brantas terdiri atas Pegawai tetap (KKWT) yang dikelompokkan Tenaga Organik (TO), Tenaga Bulanan (TB) dan Pegawai Tidak Tetap (KKWTT) yang terdiri dari Tenaga Harian (TH) dan Tenaga Honorer (TR). Terhadap klasifikasi pegawai tersebut, Perseroan mempunyai komitmen untuk memperlakukan seluruh pegawai sesuai dengan hak dan kewajibannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

with ethical process during the procurement of goods and services including among others:

1. Carry out the procurement tasks in an orderly and responsible manner
2. Exercise honest professionalism and independency, and keep confidential the procurement documents as it should prevent irregularities during the procurement of goods and services.
3. In no case interfere with the tasks and responsibilities given to the procurement team, both directly and indirectly. Contract between the Company and the partner includes the partner's ability to perform their obligations in accordance with the terms agreed upon, and the partner's exercise of its rights with reference to the obligations that have been made as agreed in the contract as well as sanctions for non-fulfillment of respective obligations.

I. PROCUREMENT AND CONTRACTING SYSTEM

Brantas personnel consists of Full-time employees (KKWT) grouped into: Organic Staff (TO), Monthly Staff (TB) and Part-time employees (KKWTT) consisting of Daily Staff (TH) and Honorary Workers (TR). To such classification of the employee, the Company is committed to treating all employees in accordance with the rights and obligations set out in applicable laws and regulations.

Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban Karyawan ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Kontrak atau perjanjian antara perusahaan dengan karyawan dibuat secara tertulis dengan memuat hak dan kewajiban setiap pihak secara jelas.

Perusahaan mempunyai wewenang dalam menerima, mengangkat, menempatkan dan memberhentikan karyawan serta memberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Brantas menerapkan sistem manajemen human assets berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, adil, motivatif dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal usul, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja. Perseroan juga mengakui hak pegawai untuk berserikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Brantas selalu mengembangkan dan meningkatkan kualitas pegawai yang merupakan aset utama pada Perseroan dengan cara merealisasikan " Human Asset Development" . Oleh karena itu pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam Perseroan merupakan hal yang penting.

Brantas selalu melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai yang berpedoman pada Budaya Perseroan. Kebijakan Perseroan di bidang kepegawaian, Peraturan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pokok Organisasi. Perseroan juga menjamin bahwa peraturan-peraturan tersebut di atas sesuai dengan standar good corporate governance.

The appointment, dismissal, status, rights and obligations of employees are defined through employment agreements in accordance with the labor laws and regulations. Contract agreement between the Company and employee is made in writing clearly indicating the rights and obligations of each party.

The Company has the authority to recruit, assign, post and dismiss any employee and give disciplinary action in accordance with applicable regulations.

Brantas applies human assets management system based on the principles of transparency, fairness, motivational and free of bias with respect to race, origin, gender, religion and origin of birth and others having no relevance with performance. The Company also recognizes the employees' right of association in accordance with applicable laws and regulations.

Brantas constantly develops and improves the quality of staff, which is a major asset to the Company, by realizing the "Human Asset Development". Therefore, the quality development and improvement of the human resources in the company becomes highly important.

Brantas at all time trains and develops its employee as guided by the Company Culture, company personnel policy, Principles of Employment and Principles of Organization. The Company also ensures that rules and regulations mentioned above are in accordance with the standards of good corporate governance.

Brantas mempunyai Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang beroperasi diberbagai daerah dengan agama, budaya, tradisi, adat istiadat kondisi pegawai serta peraturan setempat yang berbeda-beda. Meskipun peka terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, Brantas tetap menerapkan praktik-praktik yang didasarkan pada prinsip-prinsip good corporate governance.

Perseroan menetapkan beberapa kebijakan mengenai pegawai dan hubungan industrial antara lain :

1. Melakukan penataan pekerjaan dengan baik sehingga memotivasi dan memberdayakan pegawai;
2. Mengusahakan agar remunerasi yang diterima pegawai, secara umum mengikuti peraturan serta sebanding dan kompetitif dengan industri sejenis;
3. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan perseroan;
4. Meningkatkan disiplin pegawai agar mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
5. Menerapkan reward dan punishment secara adil sesuai prestasi atau tingkat kesalahan pegawai;
6. Memberikan hak kepada pegawai untuk berserikat sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
7. Menempatkan PKB sebagai komitmen Perseroan

Brantas has Headquarter, Regional Office and Branch Offices operating in various regions with different beliefs, cultures, traditions, customs, employee conditions and local rules. Although these are sensitive differences, Brantas continues implementing the practices inspired by the principles of the good corporate governance.

The Company defines a series of policies regarding employee and industrial relations, which include as follows:

1. To carry out work reorganization in order to motivate and empower the employees;
2. To seek that the employee's remuneration will generally follow any applicable rules while comparable and competitive with similar industries;
3. To provide opportunities for employees to participate in education and training according to their competencies as well as company needs;
4. To improve the employee's discipline in order to realize compliance with the established rules and policies;
5. To apply fair reward and punishment according to employee's achievements or fault;
6. To provide the employees with their right of association subject to applicable laws and regulations;
7. To respect the PKB as the company commitment;

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

8. Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi pegawai
9. Memberikan hak-hak purna bakti sesuai ketentuan yang berlaku.

Brantas menyadari sepenuhnya adanya perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Untuk itu segenap jajaran Brantas baik Komisaris, Direksi, dan pegawai akan selalu berusaha untuk menjalin kemitraan agar saling mendukung dalam mencapai tujuan dan kemajuan bersama. Brantas akan selalu berusaha meningkatkan mutu manajemen dan kualitas pegawai sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif.

Pegawai juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Perseroan. Kewajiban Pegawai terhadap Perseroan antara lain :

1. Setiap pegawai wajib mentaati PKB, nilai-nilai Perusahaan dan semua peraturan yang dikeluarkan Brantas;
2. Setiap pegawai wajib mendahulukan kepentingan Perseroan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tanggungjawabnya;
3. Setiap pegawai wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diserahkan kepadanya;
4. Setiap pegawai wajib menjaga harta milik dan nama baik Perseroan;
5. Setiap pegawai yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan pada pegawai di lingkungannya.

8. To provide favorable and safe working conditions for the employees;
9. To provide severance rights in accordance with applicable regulations.

Brantas is fully aware of dynamic changes in business environment. Therefore, all company organs at Brantas, whether the Board of Commissioners, the Board of Directors, or employees at all time seeks to establish partnerships for mutual support in achieving the company goals and progress. Brantas also strives at all time to improve the quality of management as well as employees for efficient and effective task implementation.

The employees also have obligations to be fulfilled for the favor of Company. The employees' obligations to the Company include:

1. Each employee must comply with the Employment Contract, company values and all regulations issued by Brantas;
2. Each employee is required to advance the company interests related directly or indirectly to their responsibilities;
3. Each employee must give their best in carrying out their tasks and responsibilities.
4. Each employee must protect the company assets and reputation;
5. Each of the supervising employees must develop and give good examples to their subordinates.

J. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PEGAWAI

Brantas senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Perseroan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja secara optimal sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang.

Brantas menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Oleh karena itu Perseroan akan memastikan bahwa lokasi usaha serta fasilitas, sarana dan prasarana Perseroan lainnya, memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pegawai diusahakan Perseroan dengan cara antara lain :

1. Melaksanakan berbagai implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK-3) sesuai dengan peraturan yang berlaku secara konsisten dalam upaya memberikan perlindungan optimal pada pegawai Perseroan dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pegawai;
2. Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan K3;
3. Memperoleh beberapa sertifikasi yang berhubungan dengan K3 (SMK-3 untuk beberapa proyek, Zero Accident Award);
4. Menyertakan partisipasi Pegawai sebagai bagian dari upaya peningkatan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.

J. OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Brantas has at all time prioritized occupational health and safety. The Company realizes that an optimized occupational health and safety is a key to long-term success.

Brantas provides its employees with safe and healthy working environment. Therefore, the Company ensures that its business location and facilities, as well as other facilities and infrastructure comply with the relevant rules and regulations.

Such occupational health and safety is sought by the Company by way of among others:

1. Conducting a series of Occupational Health and Safety Management System (SMK-3) in accordance with applicable laws and regulations in a consistent manner in order to provide optimal protection for the employees from various threats;
2. Making efforts to refurbish numerous K3-related infrastructures on a sustainable basis;
3. Obtaining a series of K3-related certifications (SMK-3 for a number of projects, Zero Accident Award);
4. Involving the employees in the efforts to improve the implementation of occupational health and safety.



Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

K. PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Brantas menjalankan operasi Perseroan dengan mematuhi hukum maupun praktik standar industri konstruksi yang berlaku serta kebijakan dan standar sistem manajemen lingkungan dalam rangka perhatiannya terhadap perlindungan kelestarian lingkungan Brantas selalu mengevaluasi kebijakan tentang lingkungan Dalam menjalankan pekerjaan setiap pegawai melakukan identifikasi, kontrol dan menghindari atau meminimalkan penggunaan bahan-bahan yang memberikan dampak negatif pada lingkungan serta mengurangi limbah Sistem manajemen lingkungan akan dilakukan peningkatan secara berkelanjutan.

L. HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT

Brantas sangat menyadari bahwa di manapun Perseroan beroperasi selalu berhubungan dengan masyarakat sekitar yang memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu Brantas mempunyai komitmen bahwa hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perseroan.

Dalam hubungan dan kemitraan dengan masyarakat sekitar, Brantas akan senantiasa menerapkan berbagai prinsip antara lain :

1. Beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai budaya luhur masyarakat sekitar.
2. Berpartisipasi aktif dalam membantu pengembangan masyarakat sebagai rasa tanggung jawab sosial Perseroan.

K. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Brantas performs the corporate operations according to the applicable law and acceptable practice of construction industry standards as well as the environmental management policies and standards that reflect its concerns to the conservation. Brantas at all time evaluates its policy with respect to environment. In carrying out their tasks, each employee must identify, control and avoid or minimize the use of hazardous materials while reducing wastes. The environment management system must be given improvement in a sustainable manner.

L. RELATIONSHIP WITH COMMUNITY;

Brantas is exceptionally aware that the company operation constantly deals with the communities with diverse characteristics. Therefore, Brantas commits that good relationship and development of surrounding community is a basic foundation for long-term company success.

As for the relationship and partnership with the communities, Brantas continues applying various principles such as:

1. Adapting to the development of cultural core values in the society.
2. Active participation in facilitating the community development as the corporate social responsibility.

M. HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT

Brantas memiliki kebijakan yang mengharuskan Komisaris, Direksi, dan Pegawai yang mewakili Perseroan dalam setiap urusan Pemerintah dan politik, untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan Perseroan dalam urusan publik.

Brantas mengakui hak setiap orang untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai dengan keyakinannya Oleh karena itu Perseroan tidak memperbolehkan seorngpun melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

Brantas memiliki kebijakan untuk meminta agar pegawai yang aktif dalam politik sebagai pengurus politik dan/atau menjadi calon legeslatif salah satu partai politik dalam pemilu untuk mengundurkan diri dari Perseroan sebagai mana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sesuai Surat Edaran Kementerian BUMN nomor : SE 15/MBU/2008 tanggal 31 Juli 2008.

Brantas melarang pemberian sumbangan untuk partai politik manapun sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Praktik yang diterapkan Brantas dalam kaitannya dengan keterlibatan dengan politik diantaranya menyatakan Perseroan tidak akan memberikan dana, aset atau fasilitas Perseroan untuk kepentingan partai politik, seorang atau lebih calon anggota legeslatif, eksekutif dan yudikatif kecuali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

M. RELATIONSHIP WITH COMMUNITY

Brantas' policy requires its Boards of Commissioners and BoD and employees representing the Company in any government and political affairs to abide by the laws and regulations governing company involvement in public affairs.

Brantas recognizes everyone's right of political aspirations according to their beliefs. Therefore, it allows no one to force each other by limiting the individual rights to channel their political aspirations.

Brantas' policy also requires any employee involved in politics, being whether political organizer and/or legislative candidate for any political party to resign from the Company as provided for in applicable laws and regulations and in accordance with Circular of Minister of SOE number: SE 15/MBU/2008 dated 31 July 2008.

Brantas prohibits donations to any political party as provided by law. Brantas' practices in relation to the political engagement demonstrate that no fund, asset or facility shall be provided by the Company for the benefit of any political party, one or more incumbents for legislative, executive and judicative unless conducted in accordance with applicable laws and regulations.



N. PERNYATAAN PALSU, KLAIM PALSU DAN KONSPIRASI

Setiap pihak di dalam Perseroan, yang berkaitan dengan proyek mulai persiapan proposal, negosiasi dan administrasi termasuk akuntansi untuk biaya dan kewajiban, kajian serta penulisan laporan, harus menyadari pentingnya membuat pernyataan (lisan maupun tertulis) yang akurat dan klaim yang benar kepada Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, Pemerintah maupun pihak lain.

Adanya kesengajaan dalam menyampaikan pernyataan atau klaim yang tidak benar atau yang menyesatkan atau yang melibatkan adanya konspirasi dengan orang lain untuk merugikan Perseroan dapat mengakibatkan dikenakannya hukuman administratif atau bahkan tuntutan pidana bagi yang terlibat, baik Komisaris, Direksi dan Pegawai maupun pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Praktik yang dikategorikan dalam Pernyataan Palsu adalah :

1. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk melakukan rekayasa kejadian, perbuatan yang direncanakan dengan sadar untuk mengelabui pihak-pihak tertentu dengan maksud-maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok serta merugikan perusahaan;
2. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk membuat pernyataan yang menyesatkan dan tidak benar dalam proses evaluasi, atau audit sehingga menyesatkan/merugikan perusahaan;

N. FAKE STATEMENT, FAKE CLAIM AND CONSPIRACY

Any corporate entity involved in any project from the proposal, negotiation to administration that includes accounting for costs and liabilities, report study and writing must be aware of the importance of accurate and honest statement (oral or written) to the Board of Directors and Commissioners, Shareholders, Government and other related parties.

Any conscious provision of fake or misleading statement or claim or in which a conspiracy to the detriment of the Company is involved may be subject to administrative penalties or even criminal prosecution for those involved, whether a Commissioner, Director or Employees as well as other parties as provided for in applicable laws and regulations.

Practices that fall under Fake Statement category include:

1. Any deliberate act to engineer events, any act consciously planned to mislead certain parties in the intention to gain any personal or collective benefit while causing harm to the Company;
2. Any deliberate act to make misleading and untruthful statement during evaluation or audit process which causes harm to the Company;

3. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk membuat laporan palsu dengan maksud untuk melakukan penggelapan, misalnya menyembunyikan masalah teknis yang serius atau tidak melaporkan adanya penundaan pada jadwal kerja yang telah ditetapkan;
4. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk memalsukan dokumen dan sertifikat untuk mengambil manfaat pribadi merugikan perusahaan. Praktik yang dikategorikan dalam Klaim Palsu adalah tindakan yang secara sadar dilakukan dalam upaya memasukkan tagihan atau permintaan pembayaran berdasarkan data yang diketahui palsu. Penerapan atas kriteria ini termasuk data yang berkaitan dengan dokumen pengiriman, tagihan rekanan atau sub kontraktor, dan lain-lain yang merupakan dasar untuk melakukan klaim kepada perusahaan.

Praktik yang dikategorikan dalam Konspirasi adalah tindakan yang secara sadar dilakukan dalam upaya merencanakan dan melakukan kerjasama atau persekongkolan dengan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak kecurangan, penyelewengan dan pelanggaran hukum dan atau peraturan Perseroan dengan maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok dari perusahaan.

O. ETIKA BERUSAHA DAN ANTI KORUPSI

Dalam rangka mewujudkan komitmen perusahaan menjadi good corporate citizen, Brantas mendukung upaya-upaya

3. Any deliberate act to make fake report with the intent to commit fraud, such as keeping serious technical problem secret or having not reported any delays of any agreed work schedule;
4. Any deliberate act to falsify any document or certificate with the intent to gain personal gain while causing harm to the Company; Practice categorized under Fake Claims includes any deliberate act attempting to submit invoices or payment requests based on knowingly fake data. These criteria are applied to include data with respect to shipping documents, bills of partners or sub-contractors, and others serving as the basis for any claim addressed to the company.

Practices categorized as conspiracy include any deliberate act made in an attempt to craft and enter into cooperation or collusion to commit fraud, manipulation and violations to either applicable laws and regulations or company rules with the intent to take personal or collective gain from the Company.

O. BUSINESS ETHICS AND ANTI CORRUPTION

In order to realize the company commitment to being a good corporate citizen, Brantas supported any effort made by all entities to

yang dilakukan oleh semua pihak dalam menciptakan iklim bisnis yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu Brantas akan senantiasa berupaya untuk menerapkan etika berusaha yang dilandasi nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip bisnis yang berlaku secara umum.

Dalam melaksanakan prinsip tersebut di atas, Brantas melarang anggota Komisaris, Direksi dan Pegawai untuk menerima sesuatu yang berharga baik langsung maupun tidak langsung, yang patut diduga merupakan penyuapan atas tugas / jabatan yang menjadi kewenangannya. Brantas membuat suatu pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai-nilai etika berusaha.

P. HUBUNGAN DENGAN PEJABAT NEGARA

Adalah kebijakan Perseroan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap pejabat negara yang memiliki wewenang pada bidang operasi Perseroan dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum.

Setiap kontak dengan pejabat Pemerintah harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat objektif dan wajar (armslength) dan harus dihindari terjadinya penyimpangan.

Perlakuan terhadap pejabat negara harus dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku, dengan cara yang etis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

create a business that is free from corruption, collusion and nepotism (KKN). Therefore, Brantas has made any effort at all time to adapt business ethics based on the company values as well as commonly accepted business principles.

In favor of the above principles, Brantas prohibits commissioners, directors and employees from receiving anything of value, directly or indirectly, suspected to be of bribery in relation to their authorities. Brantas shall prepare guidance for the code of conduct containing ethical principles of business.

P. RELATIONSHIP WITH STATE OFFICIAL;

It is the company policy to develop and maintain good relationships and effective communications with any state officials having authority in the corporate area of specialty within a tolerated limit the law shall approve.

Any contact with Government officials must be preserved as arm's length relationship and any irregularities that may arise from which must be avoided.

The dealing with any state official should be done according to applicable law, in such an ethical manner while not conflicting with applicable laws and regulations.

Q. DATA PERUSAHAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Setiap pejabat yang mempunyai kewenangan harus menyampaikan informasi yang relevan kepada auditor dan bekerjasama sepenuhnya dengan auditor internal dan auditor eksternal dalam proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya.

Brantas memiliki kebijakan untuk melarang setiap anggota Komisaris, anggota Direksi, Auditor Internal, Auditor Eksternal, Komite Audit dan Pegawai mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia mengenai Perseroan atau pelanggan ke luar Perseroan baik selama masa kerja atau sesudahnya. Mengingat bahwa pengungkapan informasi rahasia tersebut akan merugikan Perseroan atau pelanggan dan memberikan keuntungan kepada pihak lain, maka pengungkapan pemberian informasi rahasia menurut keperluannya harus melalui persetujuan dari Direksi.

Perseroan juga bekerja dengan data khusus milik pemberi pekerjaan, rekanan dan mitra usaha patungan. Hal ini merupakan kepercayaan yang sangat penting dan harus dijaga oleh Perseroan. Oleh karena itu tidak seorangpun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak luar tanpa persetujuan Direksi, atau tidak seorangpun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada yang lain kecuali diwajibkan oleh hukum.

R. KETERBUKAAN INFORMASI

Perseroan akan mengungkapkan informasi penting yang relevan dalam Laporan kepada pihak-pihak yang berwenang (Laporan Tahunan, Laporan Semesteran dan lain-lain)

Q. CORPORATE DATA AND CONFIDENTIAL INFORMATION

Any authorized staff must provide relevant information to and fully cooperate with either internal or external auditor during a compliance audit or any other investigation.

At Brantas, it is prohibited for any member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Internal Auditors, External Auditors, Audit Committee and Employee to disclose the company confidential information or customers to any outside party either during or after their employment. Given that such disclosure may be detrimental to the Company or its customers while at the same time providing benefits to other party, thus, a prior approval of the Board of Directors shall be required.

The Company also copes with specific data owned by the client, associates and joint venture partners. This reflects a fundamental sense of trust to be maintained by the Company. Therefore, in no case should a person disclose confidential information to outside parties without any prior approval of the BoD, or in no case should person disclose confidential information to others unless otherwise required by law.

R. INFORMATION TRANSPARENCY

The Company discloses relevant material information in the report to any concerned authorities (Annual and Mid-Term Reports, and others) in accordance with applicable laws and

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.

Perseroan akan selalu berusaha untuk memelopori dan mengambil inisiatif dalam mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan penting bagi pengambilan keputusan pemilik modal, kreditur dan pihak berkepentingan lainnya baik pengungkapan yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela. Pengungkapan informasi tersebut, oleh Brantas dilakukan melalui Laporan Tahunan maupun media lain yang dianggap perlu.

Disamping informasi sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku (neraca, laba rugi, arus kas, perubahan modal dll.), Perseroan juga mengungkapkan berbagai informasi penting dalam Laporan Tahunan meliputi :

1. Tujuan, sasaran usaha dan strategi Perseroan selama tidak merugikan kepentingan Perseroan;
2. Penilaian Perseroan oleh Komite Audit, Auditor Eksternal, Pencapaian Kesehatan, KPI;
3. Riwayat hidup anggota Komisaris, Direksi, serta gaji dan tunjangan mereka;
4. Jumlah rapat Komisaris dan Direksi beserta tingkat kehadirannya;
5. Sistem pemberian honorarium Auditor Eksternal;

regulation in a punctual, accurate, clear and objective manner.

The Company makes reasonable efforts to pioneer and takes initiative to disclose both financial and non-financial information for decision-making purpose of the Shareholders, creditors and other concerned parties through either mandatory or voluntary nature of disclosure. As for such disclosure, Brantas seeks to provide information through Annual Report and any other media as deemed necessary.

In addition to the information required by applicable laws and regulations (balance sheet, income statement, cash flows, changes in capital, etc.), the Company also discloses a series of material information in the Annual Report which includes:

1. Company Objective and Strategy to the extent that no damage to the corporate interest is caused;
2. Company Assessment by the Audit Committee, External Auditor, Occupational Health Achievement, KPI;
3. Curriculum vitae of the Board of Commissioners, the Board of Directors, including their remunerations and benefits;
4. Number of meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors and their attendance rates;
5. Remuneration scheme for External Auditor;

6. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi anggota Komisaris, Direksi;
7. Faktor risiko yang material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko;
8. Informasi material mengenai pegawai dan pihak yang berkepentingan
9. Klaim menyangkut nilai yang material yang diajukan oleh Perseroan atau terhadap Perseroan, serta perkara yang substansial yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan Perseroan.
10. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan atau yang sedang berlangsung; dan
11. Pelaksanaan good corporate governance.

S. PENYELEWENGAN

Perseroan menetapkan kebijakan untuk melarang setiap bentuk penyelewengan dan senantiasa menerapkan prosedur yang wajib diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan.

Menurut Perseroan yang termasuk dengan penyelewengan adalah :

1. Ketidakjujuran;
2. Penggelapan;
3. Pemalsuan atau perubahan surat berharga seperti cek Perseroan;

6. Payroll and benefit system for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
7. Material risk factors that can be anticipated, including management assessment of business climate and risk factors;
8. Material information with respect to the employees and concerned parties.
9. Claims regarding the material value proposed by the Company or to the Company, as well as any substantial case in certain judicial or arbitration body involving the Company.
10. Conflict of interest likely to occur and/or ongoing, and Implementation of Good corporate Governance.

S. MANIPULATION

The Company defines a policy prohibiting any form of manipulation and at all time applies the procedures to be followed in relation to the discovery, recognition, reporting, inquiry and investigation on any suspicion of the manipulation.

According to the Company, any act categorized as the manipulation includes as follows:

1. Dishonesty;
2. Embezzlement;
3. Forgery or alteration of securities such as company checks;



4. Penyalahgunaan asset yang dimiliki oleh Perseroan, Pegawai, Mitra Usaha atau Rekanan;
5. Pengalihan kas, surat berharga atau asset Perseroan lain untuk penggunaan pribadi;
6. Penanganan dan pelaporan transaksi Perseroan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
7. Pemalsuan atas catatan akuntansi Perseroan atau laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan Perseroan.

T. SOSIALISASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

Perseroan melakukan sosialisasi, implementasi dan evaluasi terhadap Panduan ini. Perseroan membentuk Tim yang diketuai oleh Sekretaris Korporat yang bertanggungjawab terhadap program sosialisasi, implementasi dan evaluasi Panduan Good Corporate Governance.

U. PELAPORAN PELANGGARAN PANDUAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Setiap anggota Komisaris, Direksi, Komite-Komite yang ada serta Pegawai dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Panduan Good Corporate Governance ini kepada Perseroan secara pribadi, melalui surat. Tim sebagai mana disebut butir T di atas akan menindaklanjuti informasi pelanggaran kode ini. Tim tersebut akan menyediakan Kotak Pengaduan untuk keperluan tersebut.

4. Misuse of assets owned by the Company, Employee, Business Partner or Partner;
5. Transfer of cash, securities or other company assets for personal use;
6. Handling and reporting of the company transactions conducted not according to procedures and applicable rules;
7. Forgery of company accounting records or financial statements for personal gain or other interests causing the company loss.

T. SOCIALIZATION, IMPLEMENTATION AND EVALUATION

The Company conducts socialization, implementation and evaluation of this Code. The Company forms a team chaired by Corporate Secretary responsible for the socialization, implementation and evaluation of the Good Corporate Governance guidelines.

U. REPORTING VIOLATION TO THE GOOD CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

Any member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees and Employees may submit a report on any alleged violation of the Good Corporate Governance guidelines to the Company either in person or by mail. The team as referred to in point T must follow up the information as to violation of this Code. The team must make available a Complaint Desk for this purpose.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan :

1. Secara Umum, pada prinsipnya semua Pelapor harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas.
2. Penggunaan surat yang tidak beridentitas (surat kaleng) akan diperlakukan sebatas sebagai informasi awal dimana tindak-lanjutnya tergantung kepada tingkat keyakinan Tim atas kebenaran substansi masalah yang dilaporkan
3. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor manakala pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran Panduan Good Corporate Governance ini.
4. Dalam hal ini pengungkapan hal tersebut dapat merupakan faktor yang meringankan. Apabila pelanggaran tersebut benar terjadi dan pihak pelapor tidak terlibat di dalamnya, maka kepada pihak pelapor akan diberikan penghargaan yang sesuai.
5. Tim tersebut akan berpegang teguh pada azas praduga tak bersalah.
6. Kerahasiaan tetap dijaga kecuali apabila pengungkapan tersebut :
 - a. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh Pemerintah,
 - b. Sejalan dengan kepentingan Perseroan dan sejalan dengan tujuan Panduan Good Corporate Governance ini,

Points of attention:

1. As a rule, the Complainants must clearly disclose their identities.
2. The use of anonymous letter is treated merely as initial information whereby the follow-up depends on the level of confidence of the team in substantial correctness of the reported issues
3. No punishment should be sentenced to the complainant when a breach actually occurs, unless the concerned complainant is also involved in such violation to this Good Corporate Governance Guidelines. In this case, such disclosure may become an easing factor. If violation really occurred and the complainant was found not guilty, he/she must, thus, be given appropriate award.
4. The team must steadfastly hold the principle of presumption of innocence.
5. Confidentiality must be kept except where any disclosure is:
 - a. Required in connection with a report or investigation by the Government,
 - b. In line with the company interests and in accordance with the purpose of this Good Corporate Governance Guidelines,

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

- c. Diperlukan oleh Bagian Hukum untuk mempertahankan posisi Perseroan di depan Hukum.

Kotak Panduan tersebut tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan keluhan pribadi.

- c. Required by Legal Division to defend the company position before the law.

The Complaint Desk is not intended as a mechanism for personal grievances.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

PT. Brantas Abipraya (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor konstruksi umum. Bidang usaha Perusahaan ini tidak hanya menangani proyek-proyek irigasi, tetapi juga telah melaksanakan proyek bergengsi yang terletak di dalam dan di luar negeri. Proyek tersebut, antara lain bendungan, terowongan, jalan dan jembatan, bandara, bangunan, pembangkit listrik, dan banyak lagi.

Sebagai entitas bisnis yang dikelola profesional, Perusahaan dituntut untuk mampu menjalankan seluruh kegiatan bisnis dan operasionalnya secara berkelanjutan. Karenanya menjadi penting bagi Perusahaan untuk tidak semata-mata mendapatkan keuntungan (profit), tetapi juga memberikan perhatian kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat (people) dan kelestarian lingkungan (planet).

Untuk itulah, konsep CSR yang diterapkan oleh Brantas didasari oleh tiga prinsip yang dikenal dengan istilah Triple Bottom Lines, atau dikenal dengan 3P (People, Profit, Planet) yaitu kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet). Ini dilakukan agar keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan. Hal ini merupakan suatu konsep bahwa organisasi Brantas memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap pemegang saham, karyawan, konsumen, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Selain itu, juga memberikan

PT. Brantas Abipraya (Persero) is a State-Owned Enterprise (SOE) specialized in the general construction sector. The corporate business field deals with not only irrigation, but also other prestigious projects located inside and outside the country. The project covers among others dams, tunnels, roads and bridges, airports, buildings, power plants, and many more.

As a professionally managed business entity, the Company is required running the entire business activities and operations in a sustainable manner. Therefore, it becomes important for the company to achieve not only profit, but also improvement of social welfare (people) and natural conservation (planet).

For this reason, the CSR is applied by Brantas based on three principles known as Triple Bottom Lines, or also known as 3P (People, Profit, Planet), i.e. the corporate responsibility to set aside part of its profits for the benefit of human development (people) and environment (planet). This is done in order for the corporate existence to develop and progress. It constitutes a concept that Brantas organization has social responsibility to the shareholders, employees, customers, communities and the environment in all aspects of the company operations. In addition thereto, it also contributes to the economic development of the local community or society at large, along with the improvement

kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya.

Aspek Ekonomi

Keberadaan proyek Brantas yang tersebar di berbagai wilayah di Tanah Air, secara langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat terhadap perekonomian daerah dan masyarakat setempat. Manfaat secara langsung, antara lain diwujudkan melalui:

- Rekrutmen masyarakat setempat sebagai pekerja, sehingga mengurangi tingkat pengangguran di daerah masing-masing.
- Pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat.
- Pemberian berbagai bantuan kepada masyarakat sekitar yang ditujukan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat setempat.

1. Prioritaskan Pemasok Lokal

Kontribusi terhadap perekonomian di masing-masing daerah yang menjadi lokasi keberadaan proyek Brantas Abipraya juga diwujudkan Perusahaan melalui penyertaan perusahaan-perusahaan lokal sebagai pemasok. Baik untuk pengadaan barang maupun pelayanan jasa. Kebijakan Perusahaan ini membuka peluang tumbuhnya lapangan kerja guna menyuplai kebutuhan proyek yang sedang dikerjakan.

2. Utamakan Pekerja Lokal

Kebijakan dalam proses penerimaan tenaga kerja, Brantas tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar

of living standards of its employees as well as their families.

The Economics

The existence of Brantas projects in various regions in the country whether directly or not, provides benefits to the local economy and communities. The direct benefit, among others, was realized through:

- Recruitment of indigenous people as workers, that unemployment rate can be reduced in respective area.
- Infrastructure development is aimed at improving the quality of public livelihood.
- Provision of a variety of assistance to the local communities is aimed at improving their welfare.

1. Prioritizing Local Suppliers

Contribution to economy in each region in which Brantas Abipraya projects are located, it is also realized through a participation of local companies as suppliers for the procurement of both goods and services. The company policy opens opportunities of the employment growth to supply the needs of the ongoing projects.

2. Prioritizing Local Workers

As for the company policy on recruitment process, Brantas continues giving opportunity to local members of the community to work for the ongoing



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

lokasi proyek yang sedang dikerjakan untuk dapat bekerja membantu pembangunan proyek tersebut. Hal ini secara langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan tentu saja juga menambah pengalaman masyarakat untuk bekerja dalam satu tim besar mengerjakan proyek yang berskala besar juga. Namun demikian, berkaitan tuntutan yang tinggi atas semua pekerja yang terlibat dalam proyek yang sedang dikerjakan, Perusahaan tetap melakukan seleksi ketat terhadap calon pekerja.

projects in their respective areas in supporting the project development. This is created an open labor market for the local community and of course added to their experiences to be part of a large team dealing with some large-scale projects. However, as for a high demand of the workers to be involved in the ongoing projects, the Company conducts a high profile of selection process for prospective employees. Indirectly, the people involved in the project will be trained to work in such a professional and disciplined manner, which is of the basic company requirements. To the future, they will become internalized on how to deal with high standard of discipline at work, which can be an added value for their further lives.

Secara tidak langsung masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan ini akan dilatih untuk bekerja secara profesional dan disiplin, yang menjadi tuntutan dasar dari Brantas. Dampak ke depan, masyarakat akan terinternalisasi bagaimana harus bekerja dengan standar disiplin yang tinggi dan dapat menjadi bekal dalam hidup mereka selanjutnya.

Secara terbatas Perusahaan memberikan kewenangan kepada pimpinan proyek, untuk melakukan rekrutmen tenaga kerja terutama yang bersifat untuk dukungan operasional lapangan. Di antaranya

To a limited scope, the Company gives authority to the project leaders to recruit the workers particularly in support of the field operations. They are posted as security personnel, construction workers and helper. Obviously, during the selection process, the company policies for general recruitment should be considered while the monitoring is conducted by Head Office.

On the other hand, the recruitment of qualified staff with educational backgrounds of Bachelor (S1) and

adalah tenaga pengamanan (security), tenaga tukang dan pembantu tukang. Tentu saja dalam pelaksanaan rekrutmen, tetap harus memperhatikan kebijakan penerimaan pegawai secara umum, proses seleksi dan monitoring tetap dijalankan oleh Kantor Pusat.

Adapun untuk proses rekrutmen terhadap tenaga kerja berkeahlian, dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1) dan Diploma (D III), dilakukan sepenuhnya oleh Kantor Pusat di Jakarta. Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, proses penerimaan pegawai dilaksanakan secara terbuka dan sejak pendaftaran penerimaan telah dipublikasikan secara nasional.

Kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek-proyek yang sedang dikerjakan, juga dilaksanakan melalui kebijakan Perusahaan yang mengharuskan mitra kerja maupun perusahaan pemasok lokal untuk menggunakan tenaga kerja lokal. Melalui kebijakan ini maka jumlah masyarakat lokal di sekitar proyek yang bisa merasakan manfaat langsung dengan menjadi tenaga kerja di masing-masing proyek juga bertambah banyak.

Dengan menjadi tenaga kerja, baik di proyek Brantas maupun pada perusahaan mitra kerja dan pemasok, maka warga setempat memperoleh imbal jasa pekerjaan atau upah. Selanjutnya upah

Diploma (D III) is entirely conducted by the Head Office in Jakarta. With reference to the principles of the good corporate governance, the hiring process is carried out in a transparent manner and was published throughout the nation since the registration phase.

The job opportunities for indigenous people in the surroundings of the ongoing projects are also given by taking into account the corporate policy that requires its partners and local suppliers to use local workforce. Given this policy, number of the local communities around projects which directly benefit from the projects also highly increase.

Given their involvement, both at Brantas project and under local partners' payroll, the local people gain their compensation or wage. Furthermore, such earned wages are utilized to satisfy their daily needs, so that their welfare becomes increasingly better.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

yang didapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga kesejahteraan mereka menjadi lebih baik. Khusus untuk tenaga kerja di Brantas, pemberian imbal jasa pekerjaan didasarkan pada sistem remunerasi yang berlaku sesuai dengan Keputusan Direksi. Kebijakan itu dengan mempertimbangkan besaran upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan Dewan Pengupahan setempat.

Adapun besaran upah yang diterima karyawan Perusahaan pada golongan terendah, baik di kantor pusat maupun yang bertugas di proyek, masih lebih besar dibanding dengan UMP 2011 yang ditetapkan Dewan Pengupahan setempat. Brantas Abipraya juga mewajibkan perusahaan penyedia tenaga kerja alihdaya (outsourcing) di lingkungan Perusahaan, untuk memberlakukan hal yang sama kepada para karyawannya. Dengan demikian dapat dipastikan, besaran upah yang diterima oleh mereka selama tahun 2011, minimal telah sama dengan UMP yang ditetapkan Dewan Pengupahan setempat.

3. Penyaluran Dana Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

Landasan hukum dalam menjalankan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan :

1. Peraturan Menteri BUMN nomor : Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan

For those under the company payroll of Brantas, the compensation is based on the applicable remuneration system in accordance with the Decision of the Board of Directors. This policy takes into account the provincial minimum wage (UMP) established by the local remuneration council.

The amount of wages received by the employees of the lowest rank, both at head office and those assigned to a project, remains greater than 2011 UMP established by the local remuneration council. Brantas Abipraya also requires the outsourcing providers within the Company to apply the same to their employees. Thus, it can be ascertained that the amount of wage they earned during the year 2011 was at least equal to the minimum wage set forth by the local remuneration council.

3. Distribution of Partnership Fund and Environmental Development Program

The legal basis for the Partnership by SOE with Small Business and Community Development Program:

1. Ministerial Decree of SOE Number: Per-05/MBU/2007 dated April 27, 2007 on the Partnership by SOE with Small Business

Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

2. Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
3. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2011 dan 2010.

Mitra Binaan yang dibina oleh Brantas adalah usaha kecil yang berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi dan mempunyai legalitas/surat ijin sebagai salah satu persyaratan administrasi. Tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Brantas, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN No : PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 antara lain sebagai berikut :

1. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan
2. Menyusun Standar Operating Procedure (SOP) untuk pelaksanaan PKBL
3. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL
4. Melakukan evaluasi, seleksi dan penetapan calon Mitra Binaan
5. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program

and Community Development Program.

2. Ministerial Decree of SOE No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 on Assessment of Soundness of State-Owned Enterprise.
3. Work Plan and Budget (RKA) for Partnership and Environmental Development Program of 2011 and 2010.

The partners developed by Brantas cover small business of individual persons, informal or formal business entities, including cooperation having adequate legality/permits that meets one of the administrative requirements. The main tasks and functions of the Partnership and Environmental Development Program Unit at Brantas, according to the Ministerial Decree of SOE Number: PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007 are as follows:

1. To establish Partnership and Environmental Development Program Unit
2. To prepare Standard Operating Procedure (SOP) for PKBL implementation
3. To prepare Work Plan and Budget (RKA) for PKBL
4. To conduct evaluation, selection, and award of development partner
5. To prepare and distribute the Partnership fund to the



- Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program Bina Lingkungan kepada masyarakat
- 6. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan
- 7. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan
- 8. Melakukan pembukuan atas program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan
- 9. Menyampaikan laporan pelaksanaan PKBL yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri BUMN.

- development partners and Environmental Development Program fund to the community
- 6. To provide monitoring and assistance to the development partner
- 7. To administer the development activities
- 8. To conduct bookkeeping of the Partnership and Environment Development Program
- 9. To submit the PKBL implementation report which includes periodic reports, either quarterly or annually to the Minister of SOE.

Tugas pokok Bagian Bina Lingkungan adalah memberdayakan kondisi sosial masyarakat melalui bantuan :

1. Korban bencana alam
2. Pendidikan dan /pelatihan
3. Peningkatan kesehatan
4. Pengembangan sarana dan prasarana umum
5. Bantuan sarana peribadatan
6. Bantuan Pelestarian alam

Keberadaan Brantas Abipraya juga membawa manfaat tidak langsung bagi masyarakat sekitar. Manfaat tersebut diwujudkan Perusahaan melalui pelaksanaan Program Kemitraan. Program Kemitraan adalah program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi

The main tasks of the Environmental Development Division include strengthening the social condition through donations:

1. Natural disaster victims
2. Education and/or training
3. Health Improvement
4. Development of public facility and infrastructure
5. Religious facility donation
6. Natural conservation donation

The existence of Brantas Abipraya also brings indirect benefit to the surrounding community. Such benefit is actualized by the Company through the implementation of Partnership Program. The Partnership Program aims at empowering and improving the public

masyarakat, melalui pemberian pinjaman kemitraan untuk modal kerja dan investasi. Selain itu melalui Program Kemitraan, Perusahaan juga memberikan bantuan pembinaan berupa bantuan pelatihan manajemen usaha, bantuan pemasaran (promosi/pameran) dan lain-lain.

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi usaha kecil yang dijalankan masyarakat, sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Melalui program ini maka setiap usaha kecil yang telah berkembang diharapkan juga bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal, sehingga mereka mendapatkan penghasilan. Dengan demikian masyarakat sekitar yang tidak bisa bekerja di proyek Brantas Abipraya, tetap bisa merasakan manfaat dari kehadiran Perusahaan.

Pinjaman kemitraan kepada usaha kecil yang diberikan Perusahaan sifatnya non-komersial. Mekanisme penyalurannya dilakukan berdasarkan evaluasi atas persyaratan serta angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan usaha. Efektivitas penyaluran dana kemitraan pada tahun 2011 sebesar Rp 210 juta

economy through partnership loans for working capital and investment. In addition thereto, through this program, the Company also gives assistance of business management coaching, marketing (promotion/exhibition) and others.

It also aims at improving the competence of small businesses, making them stronger and more independent. Through this program, each of them which have grown is also expected to absorb labor force from the local community for their own earnings. Thus, any member of the surrounding community not able to work in Brantas project remains to acquire benefit from the presence of the Company.

Partnership loans to small businesses given the Company a non-commercial nature. Distribution mechanism is based on an evaluation of the requirements as well as the installments are adjusted to the ability of business. Effectiveness of the partnership funds in 2011 amounted to USD 210 million or by 217% of RKA

atau sebesar 217% dari RKA 2012. Jumlah penyaluran dana kemitraan berdasarkan unit usaha dalam tahun 2012 sebanyak 6 unit, sesuai dengan RKA 2012.

Perkembangan mitra binaan dalam tahun 2012 mengalami kenaikan dalam pengembalian angsuran pinjaman. Total angsuran yang diterima sebesar Rp 484.500.000, sedangkan dalam tahun 2011 adalah sebesar Rp 210.000.000. Penerimaan angsuran di tahun 2012 sebesar 92,80 % dari total penerimaan RKA tahun 2012.

Besaran Dana Program Kemitraan yang disalurkan untuk kegiatan Program Kemitraan beserta jumlah PUKK selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

2012. Number of partnership funds by business units in the year 2012 as many as 6 units, in accordance with the RKA 2012.

Partner in the development of construction in 2012 experienced an increase in loan installment refund. Total installment received Rp 484.5 million, whereas in 2011 is Rp 210 million. Installment receipt in the year 2012 as big as 92.80% of the total receipts RKA 2012.

Scale Partnerships Program funds channeled to activities with total PUKK Partnership Program for the last three years are as follows:

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

NO.	TAHUN	Jumlah Dana disalurkan (Rupiah)	Jumlah PUKK
1	2010	Rp 160 Juta	6 Perusahaan
2	2011	Rp 210 Juta	5 Perusahaan
3	2012	Rp 484,50 Juta	6 Perusahaan
4	2013		

Aspek Sosial

Komitmen Perusahaan dalam pemenuhan aspek sosial terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah keterlibatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar lokasi proyek konstruksi. Hal tersebut diwujudkan Perusahaan dalam bentuk pelaksanaan Program Bina Lingkungan, yakni program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dan peningkatan kualitas hidup, yakni bantuan pendidikan berupa beasiswa, sunatan massal, bantuan kepada korban bencana.



Pelaksanaan Program Bina Lingkungan sudah dijalankan cukup lama. Kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut mencakup kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan dalam program strategis dan program responsif dalam bentuk pemberian bantuan yang sifatnya insidental, memenuhi kebutuhan sesaat, ataupun tanggap darurat.

Khusus untuk tahun 2012, dari semua objek bantuan Program Bina Lingkungan, Perusahaan memprioritaskan pemberian bantuan di bidang pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat menjadi perhatian utama Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan Program Bina Lingkungan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pendidikan merupakan salah satu pondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sepanjang tahun 2012, Perusahaan telah menyalurkan dana untuk bidang pendidikan dan pelatihan sebesar Rp 491 juta.

Social Aspects

The company commitment in fulfilling the social aspects in relation to the social responsibility comprises its involvement in improving the community welfare, especially those in construction project surroundings. It is realized through an implementation of Environmental Development Program, i.e. a community empowerment, and improving life quality, i.e. educational aid of scholarships, mass circumcision and donations to disaster victims.

The Environmental Development Program has run quite for long. Activities conducted during this time include those categorized as strategic and responsive programs in the form of incidental aid to meet immediate needs, or emergency response.

Especially for the year 2012, of all the Environmental Development Program objects, the Company prioritized the provision of education aid. Improving the public education quality becomes a major concern during the Environmental Development Program implementation. This is based on the consideration that education is one of foundations to improve public welfare. During the year 2012, the Company distributed funds for education and training worth Rp 491 million.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

NO.	Uraian	RKAP Tahun 2013	RKAP Tahun 2012	Realisasi 2012	Realisasi 2011	Persentase terhadap		Description
						RKAP 2012	REALISASI 2011	
						%	%	
1	Pendidikan (Anak Asuh)		520,00	491,00	490,39	94,42	99,80	Education (Children Foster)
2	Kesehatan (Sunatan Massal)		75,00	108,33	-	144		Health
3	Bantuan Social: (Bencana Alam, Kesehatan, dan Lingkungan)		5,00	70,50	4,99	1.410	1.412	Social Aids

